PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG :
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

# RPJMD
# KABUPATEN KOLAKA
# 2019 - 2024

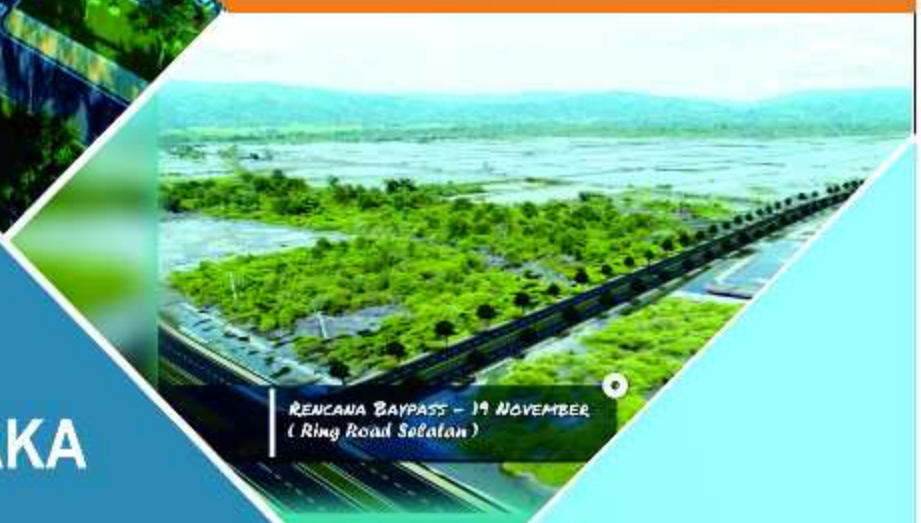


PEMERINTAH
KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2019

BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2019 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019 – 2024

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2005 - 2025;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA
dan
BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2019 – 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kolaka.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah perangkat daerah berfungsi sebagai penunjang perencanaan yang mempunyai tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disingkat RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023, yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2005–2025, yang selanjutnya disebut RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Tahun 2012-2032.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
16. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Prioritas pembangunan daerah adalah pembangunan yang diutamakan dan didahulukan dari yang lain dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang berkolerasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan provinsi dan nasional.
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
22. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bappeda.
23. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
24. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.
25. Kinerja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

## BAB II
## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud penyusunan RPJMD adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Kolaka sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih periode 2019-2024, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024

### Pasal 3

Tujuan penyusunan RPJMD antara lain sebagai berikut :

a. merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan, sehingga dokumen ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kolaka dalam menyusun Renstra perangkat daerah periode 2019-2024;

b. merumuskan pedoman pengelolaan terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan pembangunan daerah tahun 2019-2024;

c. merumuskan dan menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2019-2024; dan

d. merumuskan indikator kinerja sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja tahunan dilingkungan pemerintah Kabupaten Kolaka.

### Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I Pendahuluan;

b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;

c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah;

d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;

e. BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;

f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;

g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;

h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

i. BAB IX Penutup.

## BAB III

## PELAKSANAAN RPJMD

### Pasal 5

RPJMD sebagai dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

a. seluruh perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Kolaka, Pemerintah Desa, dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD tahun 2019-2024;
b. seluruh perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Kolaka, Pemerintah Desa, dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD tahun 2019-2024 dengan sebaik-baiknya;
c. seluruh perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Kolaka agar menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2019-2024; dan
d. seluruh Pemerintah Desa dalam menyusun RPJMDesa harus mempedomani RPJMD Tahun 2019-2024.

## BAB IV

## PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 6

(1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dilakukan dalam rangka menjamin dan memastikan tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam RPJMD.
(2) Bupati melalui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, indikasi program prioritas dan kebutuhan pendanaan.
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikasi rencana program prioritas, kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
(5) Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RPJMD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.

(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RKPD dan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

RKPD Tahun 2019 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai desember Tahun 2019.

Pasal 9

(1) Dalam hal pelaksanaan RPJMD tahun 2019-2024 target sasaran kinerja yang ditetapkan telah tercapai, maka dirumuskan kembali besaran target sasaran kinerja baru.

(2) Dalam hal pelaksanaan RPJMD tahun 2019-2024 target sasaran kinerja yang ditetapkan sulit tercapai, maka dirumuskan kembali penyesuaian kembali besaran target sasaran kinerja baru.

(3) Target sasaran kinerja baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 15 - 07 - 2019

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 15 - 07 - 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA,

POITU MURTOPO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2019 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2019 – 2024

I. Umum

Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan peran serta masyarakat. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, maka perencanaan pembangunan di daerah disusun dalam tahapan-tahapan baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

RPJMD sebagai penjabaran visi, misi Bupati dan Wakil Bupati merupakan komitmen kinerja *(performance agreement)* Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2019-2024 sesuai periode. Tujuan, sasaran, dan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 serta RPJMD Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023. Penetapan sasaran dan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD disesuaikan dengan

prediksi kemampuan sumber daya dan dana serta hasil-hasil (keluaran dan dampak) yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut yang ditetapkan secara indikatif. Keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku, dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dimuat dalam dokumen perencanaan tahunan atau RKPD.

RPJMD Tahun 2019-2024 merupakan perspektif masa depan daerah tentang apa yang ingin dicapai dalam masa 5 (lima) tahun ke depan melalui Visi : **"Kabupaten Kolaka yang Semakin Maju Berkeadilan dan Sejahtera".**

Dalam upaya mencapai perspektif masa depan tersebut secara terencana, terarah dan terukur serta dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, maka disusunlah RPJMD Tahun 2019-2024.

Adapun maksud dari penyusunan dokumen Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2019-2024 adalah untuk memberikan pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Daerah, dan perumusan prioritas pembangunan daerah,

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2019 NOMOR

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah selesai disusun.

RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024 ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode kedua dengan akronim “SMS BERJAYA” (Strategi Mekongga Sejahtera Bekerja dan Berkarya), sekaligus juga menjadi instrumen pengukuran kinerja pemerintahan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam pencapaian target pembangunan RPJMD melibatkan seluruh perangkat daerah di lingkup pemerintahan Kabupaten Kolaka, mengedepankan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, serta mendorong peran aktif masyarakat termasuk dunia usaha.

Kepada semua pihak yang telah membantu memberikan masukan saran, pendapat, dan perbaikan yang konstruktif dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024 ini, kami ucapkan terima kasih.

Akhirnya kami mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan untuk kita satukan kekuatan dan sumberdaya yang ada, dengan semangat kerja cerdas dan ikhlas, serta berinovasi dan berkolaborasi dalam menyukseskan dan mengawal terwujudnya Kabupaten Kolaka yang Semakin Maju, Berkeadilan dan Sejahtera dengan dilandasi semangat SANGGA-SANGGAE OLUTUMU PEKIKI INESAMBA. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi niat baik kita, Amiin.

Kolaka, 15 Juli 2019

**BUPATI KOLAKA,**

**H. AHMAD SAFEI, SH., MH**

# DAFTAR ISI


| | Hal. |
|---|---|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | I.1 |
| 1.1. Latar Belakang | I.1 |
| 1.2. Dasar Hukum penyusunan | I.5 |
| 1.3. Hubungan antar dokumen | I.8 |
| 1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Kolaka dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara | I.8 |
| 1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Kolaka dengan RPJPD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah | I.8 |
| 1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Kolaka dengan RTRW Kabupaten Kolaka | I.9 |
| 1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Kolaka dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kab. Kolaka | I.10 |
| 1.4. Maksud dan Tujuan | I.11 |
| 1.4.1. Maksud | I.11 |
| 1.4.2. Tujuan | I.11 |
| 1.5. Sistematika penulisan | I.12 |
| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II.1 |
| 2.1. Aspek Geografi dan Demografi | II.1 |
| 2.1.1. Karateristik lokasi dan wilayah kab. Kolaka | II.1 |
| 2.1.2. Potensi Pengembangan daerah | II.9 |
| 2.1.3. Wilayah rawan bencana | II.16 |
| 2.1.4. Daya dukung dan daya tampung LH | II.18 |
| 2.1.5. Demografi | II.55 |
| 2.2. Aspek kesejahteraan masyarakat | II.58 |
| 2.2.1. Fokus kesejahteraan dan pemetaan ekonomi | II.58 |
| 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial | II.67 |
| 2.2.3. Seni, Budaya, Pemuda dan Olahraga | II.84 |
| 2.3. Aspek Pelayanan Umum | II.88 |
| 2.3.1. Layanan umum | II.90 |
| 2.3.2. Fokus layanan urusan pemerintahan pilihan | II.123 |
| 2.3.4. Fokus Urusan Penunjang Pemerintah | II.129 |
| 2.4. Aspek daya saing | II.132 |
| 2.4.1. Fokus kemampuan ekonomi daerah | II.132 |
| 2.4.2. Fokus Kewilayahan/Infrastruktur | II.138 |
| 2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi | II.141 |

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia ..... II.145

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH ..... III.1

3.1. Kondisi Perekonomian Daerah ..... III.1
3.2. Kinerja keuangn masa lalu ..... III.4
3.2.1. Kinerja pelaksanaan APBD ..... III.4
3.2.2. Neraca daerah ..... III.15
3.3. Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu ..... III.19
3.3.1. Proporsi penggunaan angaran ..... III.20
3.3.2. Analisis pembiayaan daerah ..... III.21
3.4. Kerangka pendanaan ..... III.23
3.4.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja..... III.23
3.4.2. APBD Tahun Anggaran 2019..... III.24
3.4.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan ..... III.27

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ..... IV.1

4.1. Permasalahan pembangunan ..... IV.1
4.1.1. Urusan wajib pelayanan dasar ..... IV.1
4.1.2. Urusan Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar ..... IV.4
4.1.3. Urusan Pilihan ..... IV.9
4.1.4. Urusan penunjang urusan pemerintahan daerah ..... IV.11
4.2. Isu strategis ..... IV.12
4.2.1. Isu strategis internasional ..... IV.13
4.2.2. Isu strategis nasional ..... IV.16
4.2.3. Isu Strategis Regional (Prov. Sultra) ..... IV.19
4.2.4. Isu Strategis Kabupaten Kolaka ..... IV.19

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ..... V.1

5.1. Visi ..... V.1
5.2. Misi ..... V.3
5.3. Tujuan dan sasaran pembangunan ..... V.7
5.3.1. Tujuan pembangunan ..... V.7
5.3.2. Sasaran pembangunan ..... V.8

BAB VI STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ..... VI.1

6.1. Strategi ..... VI.1
6.2. Arah kebijakan ..... VI.5
6.3. Program Pembangunan Daerah ..... VI.18

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH ..... VII.1

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH .. VIII.1

8.1. Indikator kinerja utama ..... VIII.1
8.2. Indikator kinerja utama perangkat daerah ..... VIII.7

BAB IX PENUTUP ..... IX.1
9.1. Kaidah Pelaksanaan ..... IX.1
9.2. Pedoman Transisi ..... IX.2

# DAFTAR TABEL


| | | Hal. |
|---|---|---|
| Tabel 2.1 | Luas Kecamatan Kab. Kolaka ..... | II.2 |
| Tabel 2.2 | Klasifikasi kemiringan lereng ..... | II.3 |
| Tabel 2.3 | Luas areal menurut jenis tanah di Kab. Kolaka ..... | II.5 |
| Tabel 2.4 | Luas Wilayah Kabupaten Kolaka Menurut Jenis Penggunaan Lahan ..... | II.09 |
| Tabel 2.5 | Perkembangan Populasi Ternak di Kab. Kolaka Tahun 2014-2018 ..... | II.11 |
| Tabel 2.6 | Potensi Sumberdaya Perikanan dan tingkat Pemanfaatannya ..... | II.12 |
| Tabel 2.7 | Data Potensi Pariwisata ..... | II.13 |
| Tabel 2.8 | Data Potensi Bahan Galian di Kabupaten Kolaka Tahun 2017 ..... | II.15 |
| Tabel 2.9 | Rekapitulasi Kejadian Bencana Kab. Kolaka tahun 2014 – 2018 ..... | II.16 |
| Tabel 2.10 | Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kab. Kolaka berdasarkan kec. ..... | II.18 |
| Tabel 2.11 | Jumlah Penduduk Penggunaan Air Tanah ..... | II.22 |
| Tabel 2.12 | Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan air ..... | II.22 |
| Tabel 2.13 | Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Serat ..... | II.26 |
| Tabel 2.14 | Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim menurut kecamatan..... | II.29 |
| Tabel 2.15 | Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Menurut Kec. ..... | II.31 |
| Tabel 2.16 | Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Tata Aliran Air menurut Kec.. ..... | II.34 |
| Tabel 2.17 | Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air Menurut Kecamatan ..... | II.37 |
| Tabel 2.18 | Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Penyerbukan Alami Menurut Kec. ..... | II.39 |

Tabel 2.19 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit Menurut Kec ..... II.41
Tabel 2.20 Distribusi Luas & Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan & Perlindungan terhadap Banjir Menurut Kec ..... II.44
Tabel 2.21 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan & Perlindungan terhadap Longsor Menurut Kec ..... II.46
Tabel 2.22 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan & Perlindungan terhadap Kebakaran ..... II.48
Tabel 2.23 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pendukung Keanekaragaman Hayati Menurut Kec ..... II.50
Tabel 2.24 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka ..... II.52
Tabel 2.25 Status Daya Dukung dan daya Tampung Air Menurut Kec. di Kab. Kolaka (Ketersediaan vs Kebutuhan) ..... II.54
Tabel 2.26 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Menurut Kecamatan (Belum terlampaui vs Terlampaui) ..... II.55
Tabel 2.27 Kondisi Kependudukan di Kab. Kolaka Tahun 2017 .... II.56
Tabel 2.28 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2017 ..... II.57
Tabel 2.29 Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2018 ..... II.58
Tabel 2.30 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kolaka Tahun 2014 – 2018 ..... II.60
Tabel 2.31 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan menurut lapangan usaha Kabupaten Kolaka Tahun 2014 – 2018 ..... II.61
Tabel 2.32 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas dasar harga berlaku dan Harga Konstan kabupaten Kolaka Tahun 2014 – 2018 ..... II.62
Tabel 2.33 Nilai Inflasi Rata-Rata Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2017 ..... II.63

Tabel 2.34 Perkembangan IPM KabupatenKolaka
Tahun 2014-2018 ..... II.63
Tabel 2.35 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kolaka
Tahun 2014-2018 ..... II.66
Tabel 2.36 Penanganan PMKS Kabupaten Kolaka
Tahun 2014-2018 ..... II.66
Tabel 2.37 Perkembangan Angka Partisipasi Siswa Kab. Kolaka
Tahun 2014–2018 ..... II.68
Tabel 2.38 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Kolaka
Tahun 2014 – 2018 ..... II.70
Tabel 2.39 Perkembangan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Kolaka
Tahun 2014– 2018..... II.71
Tabel 2.40 Persentase Balita Gizi Kurang, Stunting dan Wasting
Menurut Puskesmas (E-PPBGM) TAHUN 2019 ..... II.76
Tabel 2.41 Capaian Indikator Kinerja Pelayanan RSBG di Kabupaten Kolaka
Tahun 2014–2018 ..... II.83
Tabel 2.42 Capaian pembangunan Seni dan Budaya di Kab. Kolaka
Tahun 2014–2018 ..... II.85
Tabel 2.43 Program capaian kinerja kegiatan Kepemudaan di Kab.
Kolaka Tahun 2014-2018 ..... II.86
Tabel 2.44 Program capaian Indikator kegiatan Kepemudaan
di Kab. Kolaka Tahun 2014-2018..... II.86
Tabel 2.45 Perkembangan Jenis Cabang Olahraga Kab. Kolaka ..... II.87
Tabel 2.46 APS, APK, APM SD/MI dan SMP/MTS di Kab. Kolaka
Tahun 2014 – 2018 ..... II.90
Tabel 2.47 Ketersediaan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Kolaka
Tahun 2014–2018 ..... II.91
Tabel 2.48 Rasio Guru / Murid di Kabupaten Kolaka
Tahun 2014 – 2018 ..... II.92
Tabel 2.49 Perkembangan Jumlah Lulusan Sekolah Kab. Kolaka
Tahun 2014 – 2018 ..... II.93
Tabel 2.50 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di
Kab. Kolaka Tahun 2014–2018 ..... II.94

Tabel 2.51 Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Kolaka Tahun 2014 – 2018 ..... II.95
Tabel 2.52 Akses Penduduk Kabupaten Kolaka terhadap Air Minum Tahun 2014-2018 ..... II.97
Tabel 2.53 Kondisi Jalan Kabupaten Kolaka Tahun 2014 – 2018 . II.97
Tabel 2.54 Jumlah Jembatan di Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2018 II.99
Tabel 2.55 Panjang Jaringan Irigasi di Kabupaten Kolaka ..... II.100
Tabel 2.56 Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang Kab. Kolaka Tahun 2014-2018 ..... II.101
Tabel 2.57 Capain sektor Perumahan, Kawasan Perkotaan, Sanitasi dan Air Bersih Kab. Kolaka Tahun 2014 – 2018..... II.102
Tabel 2.58 Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat tahun 2014 – 2018..... II.103
Tabel 2.59 Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Sosial Kabupaten Kolaka..... II.104
Tabel 2.60 Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) ..... II.104
Tabel 2.61 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab. Kolaka Tahun 2014 – 2018 ..... II.105
Tabel 2.62 Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan PA Kab. Kolaka..... II.106
Tabel 2.63 Realisasi Kinerja Ketahanan Pangan Kabupaten Kolaka Tahun 2014 – 2018..... II.108
Tabel 2.64 Data Pertanahan Milik Pemda di Kab. Kolaka Ta. 2018 II.109
Tabel 2.65 Volume Sampah dan Jumlah Sampah yang Tertangani Tahun 2018 ..... II.110
Tabel 2.66 Kondisi Indikator Lingkungan Hidup Kab. Kolaka 2014 – 2018..... II.110
Tabel 2.67 Capaian Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kab. Kolaka Tahun 2014 – 2018 ..... II.111
Tabel 2.68 Jumlah Lembaga BUMDES di Kabupaten Kolaka Tahun 2014 - 2018..... II.112
Tabel 2.69 Cakupan Peserta KB Kab. Kolaka Tahun 2014 – 2018 II.113

Tabel 2.70 Perkembangan Transportasi Darat Kab. Kolaka Tahun 2014 – 2018 ..... II.114
Tabel 2.71 Perkembangan Transportasi Udara Kab. Kolaka Tahun 2014 – 2018 ..... II.115
Tabel 2.72 Perkembangan Transportasi Laut Kab. Kolaka Tahun 2014 – 2018..... II.115
Tabel 2.73 Urusan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kolaka Tahun 2014 – 2018..... II.117
Tabel 2.74 Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Kolaka 2014-2018 II.117
Tabel 2.75 Jumlah Pertumbuhan UKM Tahun 2014 – 2018 ..... II.118
Tabel 2.76 Jumlah Organisasi Olahraga di Kab. Kolaka Tahun 2014 – 2018 ..... II.119
Tabel 2.77 Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Kolaka Tahun 2014 – 2017 ..... II.120
Tabel 2.78 Jumlah Penyelengaraan Seni Budaya dan Situs Budaya yang Dilestarikan di Kab. Kolaka Ta. 2014-2017 ..... II.121
Tabel 2.79 Produksi perikanan kab. Kolaka tahun 2014-2018 ..... III.123
Tabel 2.80 Produksi Perikanan Budidaya Ikan Tahun 2014-2018 II.124
Tabel 2.81 Rincian Produksi Perikanan Budidaya berdasarkan Jenis Usaha dari Tahun 2014-2018 ..... II.124
Tabel 2.82 Perkembangan Jumlah Objek Wisata dan Jumlah Wisatawan di Kab. Kolaka Tahun 2014-2018 ..... II.125
Tabel 2.83 Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Ternak dan Perikanan di Kab. Kolaka Tahun 2014–2018 ..... II.125
Tabel 2.84 Kondisi Sarana dan Prasarana Pertanian di Kab. Kolaka Tahun 2014–2018 ..... II.126
Tabel 2.85 Nilai Perdagangan Antar Pulau Kab.Kolaka 2014-2018 II.128
Tabel 2.86 Jumlah Pasar yang terbangun di Kab.Kolaka Tahun 2014-2018 ..... II.128
Tabel 2.87 Realisasi Capaian Urusan Perindustrian Kab. Kolaka 2014 – 2018..... II.129
Tabel 2.88 Capaian kinerja bidang perencanaan Tahun 2014 – 2018..... II.130

Tabel 2.89 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Kepegawaian Kab. Kolaka ..... II.131
Tabel 2.90 Capaian Kinerja penyelengaraan Urusan penunjang Pemerintahan Bidang pengawasan Kab. Kolaka ..... II.131
Tabel 2.91 Capaian Kinerja penyelengaraan Urusan penunjang Pemerintahan Bidang Penelitian dan pengembangan Kabupaten Kolaka ..... II.132
Tabel 2.92 Perkembangan komponen Konsumsi Rumah Tangga Kab. Kolaka Tahun 2014-2017 ..... II.133
Tabel 2.93 Pengeluaran Rata-rata per Kapita sebulan kelompok Makanan (rupiah) Kab, Kolaka Tahun 2017 ..... II.134
Tabel 2.94 Pengeluaran Rata-rata per Kapita sebulan kelompok bukan Makanan (rupiah) Kab, Kolaka Tahun 2017 ..... II.135
Tabel 2.95 Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita seminggu (kkal) Kabupaten Kolaka tahun 2017 ..... II.136
Tabel 2.96 Produktifitas Total Daerah ..... II.137
Tabel 2.97 Luasan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Kab. Kolaka ..... II.139
Tabel 2.98 Kondisi Infrastruktur jalan Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2018 ..... II.140
Tabel 2.99 Kondisi Infrastruktur Irigasi di Kab. Kolaka ..... II.140
Tabel 2.100 Angka Stabilitas Keamanan Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2018 ..... II.142
Tabel 2.101 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka ..... II.144
Tabel 2.102 Persentase Penduduk 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pend. yang Ditamatkan, Tahun 2017 II.145
Tabel 3.1 Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kab. Kolaka Tahun 2014-2018 ..... III.6
Tabel 3.2 Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah kab. Kolaka tahun 2014-2018 ..... III.9
Tabel 3.3 Kemampuan keuangan daerah kab. Kolaka tahun 2014-2018 ..... III.12

Tabel 3.4 Rata-rata pertumbuhan realisasi pembiayaan daerah Kab. Kolaka tahun 2014-2018 ..... III.14
Tabel 3.5 Rata-rata pertumbuhan neraca daerah kab. Kolaka Tahun 2014-2018 ..... III.16
Tabel 3.6 Rasio keuangan daerah kab. Kolaka tahun 2014-2018 III.18
Tabel 3.7 Analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur kab. Kolaka tahun 2014-2018 ..... III.20
Tabel 3.8 Defisit riil anggaran kab. Kolaka tahun 2014-2018 ..... III.22
Tabel 3.9 Proyeksi APBD Kab. Kolaka tahun 2020.2024 ..... III.25
Tabel 3.10 Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah kab. Kolaka Tahun 2020-2024 ..... III.29
Tabel 3.11 Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah kab. Kolaka tahun 2020-2024 ..... III.31
Tabel 5.1 Keterkaitan Misi RPJMN (Nawacita), RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara dan RPJMD Kabupaten Kolaka ..... V.5
Tabel 5.2 Rumusan Misi,Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Kab. Kolaka Tahun 2019-2024 ..... V.12
Tabel 6.1 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 1 ..... VI.1
Tabel 6.2 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 2 ..... VI.2
Tabel 6.3 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 3 ..... VI.3
Tabel 6.4 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 4 ..... VI.4
Tabel 6.5 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 5 ..... VI.4
Tabel 6.6 Arah Kebijakan Pembangunan lima Tahun kedepan .... VI.12
Tabel 6.7 Keselarasan Nawacita, Program Sultra Emas dengan 9 Prioritas Pembangunan SMS Berjaya ..... VI.17
Tabel 6.8 Implementasi 9 Prioritas Pembangunan SMS Berjaya dan program unggulan terhadap Misi ..... VI.19
Tabel 6.9 Program pembangunan daerah yang disertai pagu indikatif kab. kolaka tahun 2019-2024 ..... VI.23
Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020-2024 Kabupaten Kolaka ..... VII.3
Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan ..... VII.5

Tabel 8.1 Indikator Kinerja Utama ..... VIII.2
Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ..... VIII.8

# DAFTAR GAMBAR


| | | Hal. |
|---|---|---|
| Gambar 1.1 | Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD Kab. Kolaka 2019 – 2024 ..... | I.3 |
| Gambar 1.2 | Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya ..... | I.10 |
| Gambar 2.1 | Peta Administrasi Kab. Kolaka ..... | II.1 |
| Gambar 2.2 | Peta kemiringan lereng Kab. Kolaka ..... | II.4 |
| Gambar 2.3 | Peta Jenis Tanah Kab. Kolaka ..... | II.5 |
| Gambar 2.4 | Peta Hidrologi Kab. Kolaka ..... | II.7 |
| Gambar 2.5 | Jumlah hari Hujan dan Curah Hujan Kabupaten Kolaka Tahun 2018 ..... | II.8 |
| Gambar 2.6 | Peta Potensi Pertambangan Kab. Kolaka ..... | II.15 |
| Gambar 2.6a | Peta Rawan Bencana Kab. Kolaka ..... | II.17 |
| Gambar 2.7 | Profil Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan menurut Kecamatan di Kab.Kolaka ..... | II.19 |
| Gambar 2.8 | Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan menurut Kec. di Kab.Kolaka .... | II.21 |
| Gambar 2.9 | Profil Jasa Ekosistem Penyedian Air menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka ..... | II.23 |
| Gambar 2.10 | Peta Cekungan Air Tanah (CAT) di Kab. Kolaka ..... | II.24 |
| Gambar 2.11 | Profil Jasa Ekosistem Penyedian Air menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka ..... | II.25 |
| Gambar 2.12 | Profil Jasa Ekosistem Penyedian Serat menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka ..... | II.27 |
| Gambar 2.13 | Peta daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Serat di Kabupaten Kolaka ..... | II.27 |
| Gambar 2.14 | Profil Jasa Ekosistem Penyedian Serat menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka ..... | II.29 |
| Gambar 2.15 | Peta daya Dukung Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim di Kabupaten Kolaka ..... | II.30 |
| Gambar 2.16 | Profil Jasa Ekosistem Pengaturan Kualitas Udara menurut Kecamatan di Kab. Kolaka ..... | II.31 |
| Gambar 2.17 | Profil Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan | |

Kualitas Udara menurut Kec. di Kab. Kolaka ..... II.32
Gambar 2.18 Profil Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Tata Aliran Air menurut Kecamatan ..... II.35
Gambar 2.19 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Tata Aliran Air ..... II.35
Gambar 2.20 Profil Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air menurut Kecamatan di Kab. Kolaka ..... II.37
Gambar 2.21 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air Kab. Kolaka ..... II.38
Gambar 2.22 Profil Jasa Ekosistem Pengaturan Penyerbukan Alami menurut Kecamatan di Kab. Kolaka ..... II.39
Gambar 2.23 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Penyerbukan Alami menurut Kecamatan di Kab. Kolaka ..... II.40
Gambar 2.24 Profil Jasa Ekosistem Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit menurut Kec. di Kab. Kolaka .... II.42
Gambar 2.25 Profil Jasa Ekosistem Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit menurut Kec. di Kab. Kolaka .... II.42
Gambar 2.26 Profil Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan & Perlindungan terhadap banjir ..... II.44
Gambar 2.27 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan & Perlindungan terhadap banjir ..... II.45
Gambar 2.28 Profil Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan & Perlindungan terhadap longsor di Kab. Kolaka ..... II.46
Gambar 2.29 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan & Perlindungan terhadap kebakaran menurut Kecamatan di Kab. Kolaka ..... II.47
Gambar 2.30 Profil Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan & Perlindungan terhadap kebakaran menurut Kecamatan di Kab. Kolaka ..... II.48
Gambar 2.31 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan & Perlindungan terhadap kebakaran menurut Kecamatan di Kab. Kolaka ..... II.49
Gambar 2.32 Peta Jasa Ekosistem Pendukung Keanekaragaman Hayati di Kab. Kolaka ..... II.51

Gambar 2.33 Status Daya Dukung Pangan menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka ..... II.53
Gambar 2.34 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka ..... II.54
Gambar 2.35 Kontribusi masing-masing sektor PDRB ..... II.59
Gambar 2.36 Capaian Perkembangan IPM Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2018..... II.65
Gamabr 2.37 APS Kab. Kolaka 2014 – 2018 ..... II.68
Gambar 2.38 Rata - Rata Lama Sekolah Kab. Kolaka 2014 – 2018 II.69
Gambar 2.39 Perkembangan APK Kab. Kolaka 2014 – 2018 ..... II.70
Gambar 2.40 Perkembangan APM Kab. Kolaka 2014 – 2018..... II.71
Gambar 2.41 Angka Kematian Bayi (AKB) Kab. Kolaka 2014 – 2018..... II.72
Gambar 2.42 Angka Harapan Hidup Kab. Kolaka 2014 – 2018 .... II.73
Gambar 2.43 Angka Kematian Ibu Kab. Kolaka 2014 – 2018 ..... II.74
Gambar 2.44 Gizi Buruk Kab. Kolaka 2014 – 2018..... II.76
Gambar 2.45 Angka Kematian Anak Balita Kab. Kolaka 2014 – 2018..... II.77
Gambar 2.46 Angka Ibu Hamil Mendapatkan Pelayaan Kesehatan Kab. Kolaka 2014 – 2018..... II.78
Gambar 2.47 Angka Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Kab. Kolaka 2014 – 2018 ..... II.79
Gambar 2.48 Angka Persalinan bayi baru lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kab. Kolaka 2014 – 2018 ..... II.80
Gambar 2.49 Angka Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar Kab. Kolaka Tahun 2014 – 2018 ..... II.81
Gambar 2.50 Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kab. Kolaka 2014 – 2018..... II.82
Gambar 2.51 Warga negara usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Kab. Kolaka 2014 – 2018 ..... II.83
Gambar 2.52 Peta Jaringan Jalan Kab. Kolaka ..... II.98
Gambar 2.53 Jumlah Sambungan Listrik ..... II.93

Gambar 2.54 Grafik Perkembangan Jumlah Investor PMA &PMDN di Kabupaten Kolaka Tahun 2014–2017 ..... II.119
Gambar 2.55 Kunjungan Perpustakaan 2014 – 2017 ..... II.122
Gambar 2.56 Pengeluaran per kapita 2014 - 2017..... II.134
Gambar 3.1 Perkembangan PDRB Kabupaten Kolaka Tahun 2014 – 2018 ..... III.2
Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kolaka Tahun 2014 – 2018 ..... III.3
Gambar 3.3 Rata-rata realisasi kontribusi komponen pendapatan daerah ..... III.7
Gambar 3.4 Rata-rata realisasi kontribusi Komponen belanja daerah ..... III.11
Gambar 6.1 Arah kebijakan Umum Tahunan ..... VI.6

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 258 ayat (2) mengamanatkan bahwa, pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bupati dan Wakil Bupati Kolaka telah dilantik pada tanggal 15 Januari 2019 sehingga sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku perlu disusun dokumen RPJMD untuk Periode 2019-2024. Sesuai amanat dalam pasal 264 ayat (4) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, Bupati dan Wakil Bupati terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkannya dalam bentuk Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah

kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi dan RPJMN. Selain itu, RPJMD juga memperhatikan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJMD yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi perencanaan pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan kompensasi program dan kegiatan.

Dalam penyusunan RPJMD, Pemerintah Kabupaten Kolaka menerapkan beberapa pendekatan sebagaimana di atur dalam Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud, meliputi :

1. Pendekatan Teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang di bahas bersama DPRD;
4. Pendekatan atas bawah (*Top Down*) dan bawah atas (*Button Up*) merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, hingga Nasional.

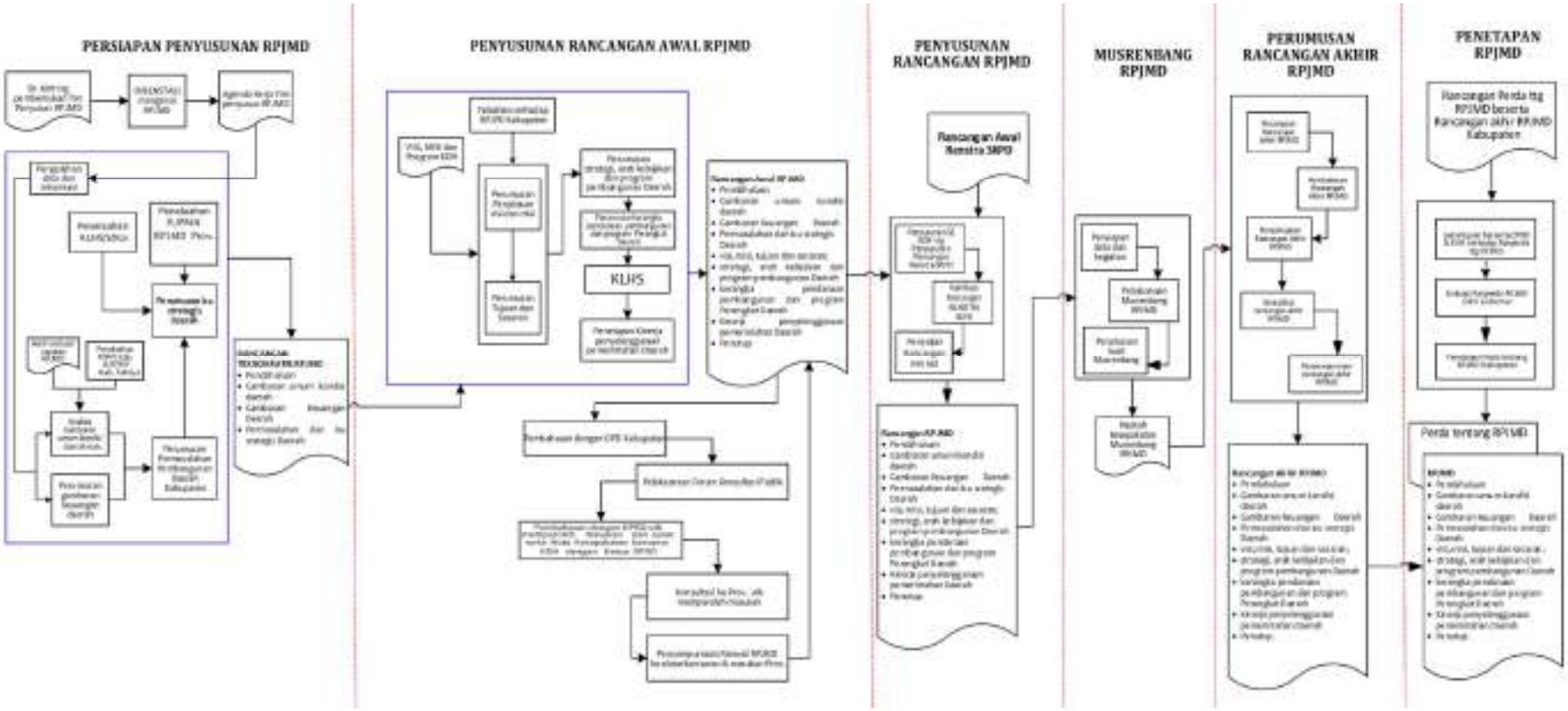


Gambar 1.1
Tahapan dan Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka Tahun 2019 - 2024

Berdasarkan gambar 1.1 Penyusunan RPJMD Kabupaten Kolaka merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan sampai dengan penetapan Perda tentang RPJMD. Pada tahap persiapan telah dilakukan penyusunan Rancangan teknokratik RPJMD, sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Hasil dari Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi salah satu input bagi penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Selanjutnya, Rancangan Awal disusun dan disempurnakan dengan hasil konsultasi publik, pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD Kabupaten Kolaka serta hasil konsultasi ke Gubernur Sulawesi Tenggara.

Rancangan Awal yang telah disempurnakan selanjutnya menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Hasil dari penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan Renstra menjadi masukan untuk perumusan Rancangan RPJMD dan siap untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD.

Hasil musrenbang RPJMD menjadi masukan untuk penyempurnaan menjadi rancangan Akhir RPJMD. Rancangan Akhir RPJMD selanjutnya diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD. Setelah disetujui, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dievaluasi oleh Gubernur. Hasil evaluasi Gubernur menjadi dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, yang selanjutnya ditetapkan dengan Perda tentang RPJMD Kabupaten Kolaka 2019-2024.

RPJMD Kabupaten Kolaka merupakan dokumen yang sangat strategis yang digunakan untuk :

1. Mengimplementasikan janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye pada seluruh masyarakat.

2. Penjabaran pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kolaka Tahun 2005 – 2025 untuk periode/ tahap keempat.
3. Pedoman pembangunan selama lima tahun.
4. Pedoman penyusunan RKPD Kabupaten Kolaka.
5. Instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal pemerintah (SPIP) dan Bappeda.
6. Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala perangkat daerah selama lima tahun.
7. Pedoman penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan daerah yang dimiliki.
8. Pedoman penyusunan RPJMDes.

Selanjutnya RPJMD yang disusun akan menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2024, sehingga tercipta keselarasan antara perencanaan strategis di RPJMD dengan perencanaan operasional di Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kolaka.

## 1.2. Dasar hukum penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019 - 2024 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008-2028 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5889);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tenggara 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2)

17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2009 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kolaka Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2012 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 5).

## 1.3. Hubungan Antar Dokumen

### 1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Kolaka dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kolaka memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana diamanatkan dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. RPJMN 2015 – 2019 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023 dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional/ provinsi dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.

### 1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Kolaka dengan RPJPD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

RPJPD Kabupaten Kolaka Tahun 2005 – 2025 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD. Penyusunan rancangan RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019 – 2024 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap keempat RPJPD Kabupaten Kolaka Tahun 2005 – 2025.

RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Renstra perangkat daerah merupakan rencana kerja lima tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Selanjutnya, RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja. Dalam pelaksanaan setiap tahunnya, RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

### 1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Kolaka dengan RTRW Kabupaten Kolaka

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kolaka berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2012 – 2032 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kolaka Tahun 2012-2032 dan Rancangan Perda Revisi RTRW Kabupaten Kolaka Tahun 2019 – 2039. RTRW dipedomani dengan maksud untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kolaka dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang.

### 1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Kolaka dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kolaka

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana dan program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah.

Gambar 1.2
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

## 1.4. Maksud dan Tujuan

### 1.4.1. Maksud

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Kolaka 2019 – 2024 adalah menjabarkan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Kolaka pada tanggal 21 Januari 2019, yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bagi seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya. Selain itu, RPJMD Kabupaten Kolaka 2019 – 2024 disusun dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang untuk mencapai sasaran pembangunan daerah.

### 1.4.2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RPJMD Kabupaten Kolaka 2019 – 2024, yaitu :

1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah serta kebijakan dan strategi pembangunan daerah tahun 2019-2024;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;
3. Sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap perangkat daerah lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;
4. Sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, termasuk dalam menentukan program-program prioritas;
5. Sebagai instrument untuk menggunakan seluruh perangkat daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

6. Menjadi instrument pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan;
7. Sebagai instrument untuk memahami secara utuh dan menggunakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan; dan,
8. Sebagai instrument untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian.

## 1.5. Sistematika Penulisan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kolaka 2019-2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN**

   Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

2. **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

   Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Kolaka beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam empat aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

3. **BAB III GAMBARAN KEUANGANDAERAH**

   Bab ini memuat kondisi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah beberapa tahun terakhir sebagai dasar untuk merancang kerangka pendanaan untuk membiayai pembangunan 5 (lima) tahun ke depan.

4. **BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**

   Bab ini memuat rangkaian proses yang menghasilkan isu-isu strategis pembangunan daerah. Tahapan dimulai dengan perumusan permasalahan pembangunan, menelaah dokumen perencanaan lainnya maupun kebijakan isu tingkat regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah.

5. **BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

   Bab ini memuat rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih. Selanjutnya, misi dijabarkan ke tujuan dan sasaran serta indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

6. **BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

   Bab ini menyajikan rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Selanjutnya, ditetapkan program pembangunan daerah yang akan menunjang pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

7. **BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

   Bab ini memuat program perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun pembangunan Kabupaten Kolaka yang disertai dengan pendanaan bersifat indikatif.

**8. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Bab ini memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disajikan beserta target setiap tahun sampai tahun 2024.

**9. PENUTUP**

Bab ini memuat hal – hal yang perlu untuk dilaksanakan dan diperhatikan dalam pelaksanaan RPJMD secara terpadu dan berkesinambungan.

# BAB II

# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

## 2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

### 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Kolaka

#### 2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kolaka secara administratif memiliki luas wilayah yaitu 3.283,64 Km² dan secara administratif memiliki batas wilayah yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Kolaka Utara dan Kolaka Timur
- Sebelah Timur : Kabupaten Kolaka Timur
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bombana
- Sebelah Barat : Teluk Bone

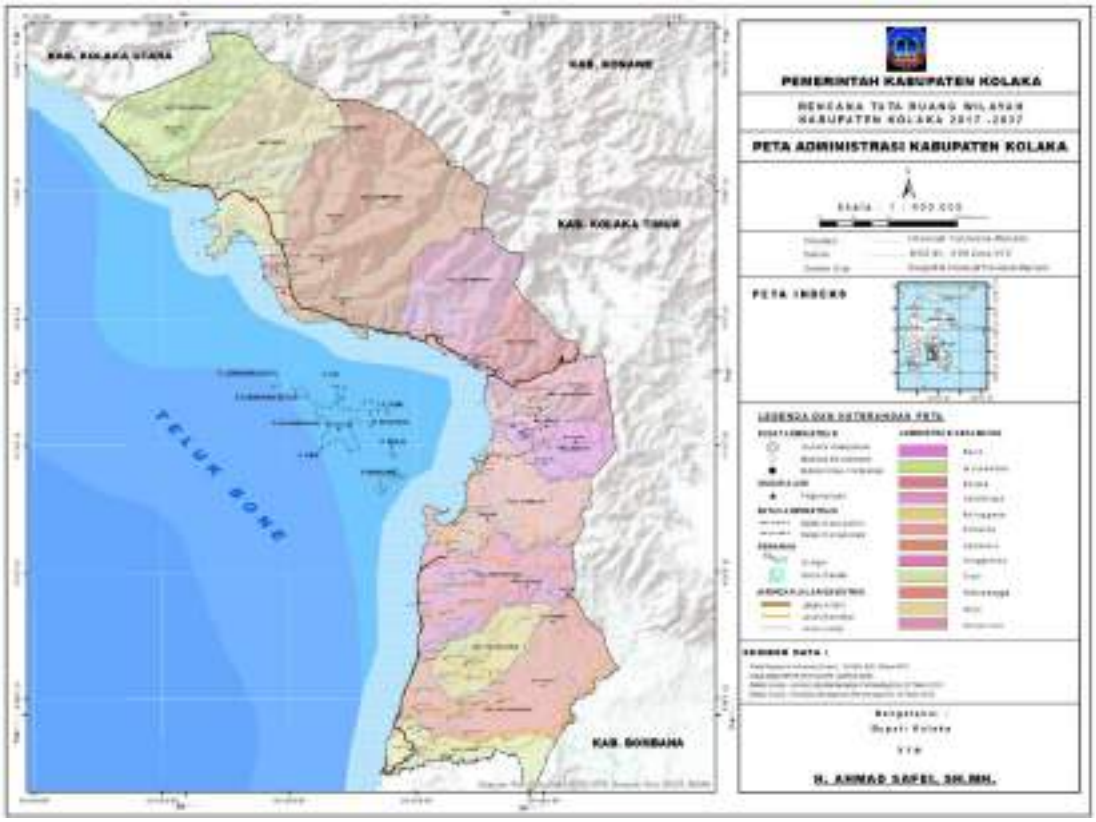


*Gambar 2.1*
*Peta Administrasi Kab. Kolaka (Bappeda, 2018)*

Kabupaten Kolaka saat ini terbagi menjadi 12 Kecamatan, 100 desa dan 35 kelurahan. Luas Wilayah daratan Kabupaten Kolaka adalah 3.283,64 km2 dan perairan laut seluas ± 15.000 $Km^2$ dengan panjang garis pantai 293,45 km. Kecamatan Samaturu adalah kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 743,65 $Km^2$ atau 22,65% dari total luas Kabupaten Kolaka sedangkan Kecamatan Toari merupakan kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu 119,37 $Km^2$ atau 3,64% dari total luas Kabupaten Kolaka. Luas wilayah Kabupaten Kolaka menurut kecamatan selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Luas Kecamatan Kab. Kolaka

| No | **Luas Wilayah** | | |
|---|---|---|---|
| | **Kecamatan** | **$Km^2$** | **%** |
| 1 | Iwoimendaa | 288,03 | 8,77 |
| 2 | Wolo | 393,12 | 11,97 |
| 3 | Samaturu | 743,65 | 22,65 |
| 4 | Latambaga | 252,36 | 7,69 |
| 5 | Kolaka | 142,54 | 4,34 |
| 6 | Wundulako | 185,24 | 5,64 |
| 7 | Baula | 120,73 | 3,68 |
| 8 | Pomalaa | 264,51 | 8,06 |
| 9 | Tanggetada | 275,71 | 8,40 |
| 10 | Polinggona | 140,02 | 4,26 |
| 11 | Watubangga | 358,36 | 10,91 |
| 12 | Toari | 119,37 | 3,64 |
| **Total** | | **3.283,64** | **100,00** |

*Sumber: BPS, 2018*

### 2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Kolaka terletak di bagian barat Provinsi Sulawesi Tenggara dengan posisi memanjang dari Utara ke Selatan, tepatnya berada pada 3°37'- 4°38' Lintang Selatan dan 121°05'-121°46' Bujur Timur. Kabupaten Kolaka yang terletak ± 165 Km dari Kota Kendari, ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara yang dapat diakses dengan mudah melalui transportasi darat (Trans Sulawesi), laut (Penyebrangan Feri Bajoe-Kolaka dan Feri Tobaku-Siwa) serta transportasi udara ( Bandara Sangia Nibandera ).

### 2.1.1.3 Topografi

Topografi wilayah Kabupaten Kolaka pada umumnya memiliki permukaan tanah yang bervariasi mulai dari datar, landai, agak miring, agak curam, curam dan sangat curam. Ketinggian tempat dari permukaan laut di Kabupaten Kolaka di bedakan dalam empat segmen yaitu:

1. Kemiringan lereng 0 – 8%, berada disepanjang wilayah pesisir Kabupaten Kolaka yang menempati 80,197 % dari total luas wilayah Kabupaten Kolaka atau sekitar 2.633,393 Ha.
2. Kemiringan lereng 8 – 25 % menempati sekitar 18,88 % atau sekitar 620 Ha yang berada di wilayah bagian utara kabupaten Kolaka.
3. Kemiringan lereng 25 – 40 % menempati 0,60 % atau sekitar 19,56 Ha dari total luas wilayah Kabupaten Kolaka yang berada di Kecamatan Iwoimendaa dan kecamatan Wolo.
4. Kemiringan lereng > 40 % menempati 0,33 % atau sekitar 10,70 Ha yang berada di wilayah kawasan hutan lindung di kecamatan Iwoimendaa dan Kecamatan Wolo.

Tabel 2.2
Klasifikasi Kemiringan Lereng

| Klasifikasi Kelerengan | Luas (Ha) | % |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| 0 - 8 % | 2.633,39 | 80,20 |
| 8 - 25 % | 620,00 | 18,88 |
| 25 - 40 % | 19,56 | 0,60 |
| > 40 % | 10,70 | 0,33 |
| **Total** | **3.283,64** | **100,00** |

*Sumber: Analisa Revisi RTRW Kab. Kolaka*

*Gambar 2.2*
*Peta Kemiringan Lereng Kab. Kolaka (Bappeda, 2018)*

### 2.1.1.4 Geologi

Berdasarkan peta geologi lembar Lasusua - Kendari Sulawesi dan peta geologi lembar Kolaka Sulawesi dengan skala 1:250.000 yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi (P3G), Dirjen Geologi dan Sumberdaya Mineral, serta kompilasi peta oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara wilayah Kabupaten Kolaka tersusun oleh beberapa jenis batuan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kompleks Mekongga (Pzm) formasi batuan ini termasuk di dalamnya marmer Paleozoikum (Pzmm) Kompleks batuan ini terdiri atas batuan metamorf berupa sekis, geneis dan kuarsit. Sedangkan Pzmm sendiri merupakan batuan metamorf hasil ubahan dari batu gamping (marmer).
2. Formasi Tolala (TRJt) formasi ini tersusun oleh batu gamping dengan sisipan batu pasir, serpih dan napal.
3. Formasi Meluhu (TRJm) formasi ini terdiri atas perselingan batu pasir, serpih, batu gamping dan lanau.

4. Batuan Beku Ultrabasa (Ku) batuan ini terdiri atas peridotit, hazburgit, gabro, dunit dan serpentinit.
5. Kompleks Pompangeo (MTpm) merupakan kompleks batuan metamorf yang terdiri dari sekis, rijang dan marmer serta meta gamping.

Tabel 2.3
Luas areal menurut jenis tanah di Kab. Kolaka

| Jenis Tanah | Luas (Ha) | Persen (%) |
|---|---|---|
| **Alluvial** | 1,681 | 0,50 |
| **Regosol** | 6,929 | 1,50 |
| **Latosol** | 50,871 | 2,11 |
| **Kambisol** | 293,151 | 89,24 |
| **Gleisol** | 20,924 | 6,37 |
| **Rendzina** | 9,06 | 0,28 |
| **Total** | **328,520** | **100** |

*Sumber: BPS, 2018*

*Gambar 2.3*
*Peta Jenis Tanah Kab. Kolaka (Revisi RTRW Kab. Kolaka)*

#### 2.1.1.5 Hidrologi

Kabupaten Kolaka memiliki beberapa sungai yang tersebar pada 12 kecamatan. Sungai tersebut memiliki potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber tenaga, kebutuhan industri, kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan irigasi serta pariwisata. Adapun sungai yang dimaksud adalah antara lain:

- Sungai Wolulu di Kecamatan Watubangga.
- Sungai Oko-Oko di Kecamatan Tanggetada.
- Sungai Huko-Huko di Kecamatan Pomalaa.
- Sungai Baula di Kecamatan Baula.
- Sungai Lamekongga di Kecamatan Wundulako.
- Sungai Sabilambo, Balandete dan Kolaka di Kecamatan Kolaka.
- Sungai Mangolo di Kecamatan Latambaga.
- Sungai Iwoimendaa di Kecamatan Iwoimendaa.
- Sungai Wolo di Kecamatan Wolo.
- Sungai Tamboli dan Konaweha di Kecamatan Samaturu.

*Gambar 2.4*
*Peta Hidrologi Kab. Kolaka (Revisi RTRW Kab. Kolaka)*

Dalam konteks hidrologi regional, di Kabupaten Kolaka terdapat 2 Wilayah Sungai (WS) yaitu:

a. WS Pompengan – Larona dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam daerah yaitu DAS Larona; dan
b. WS Toari - Lasusua dengan DAS dalam daerah meliputi DAS Tamborasi, DAS Iwoimendaa, DAS Langgomali, DAS Tamboli, DAS Konaweeha, DAS Mangolo, DAS Balandete, DAS Sabilambo, DAS Wundulako, DAS Mekongga, DAS Huko-huko, DAS Oko-oko, DAS Popalia, DAS Wolulu, DAS Poturua, DAS Peoho, DAS Toari dan DAS Padamarang.

### 2.1.1.6 Klimatologi

Berdasarkan pada klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson, wilayah Kabupaten Kolaka dibedakan dalam dua klasifikasi yaitu Tipe Iklim B yakni tipe Iklim dengan kelembaban 14,3-33,3 % pada daerah Iwoimendaa

hingga Wundulako, dan Tipe Iklim C yaitu dengan kelembapan 33,3-60 % pada wilayah Pomalaa hingga Watubangga. Untuk curah hujan, pada wilayah utara yakni pada wilayah Wundulako hingga Iwoimendaa termasuk daerah dengan rata-rata curah hujan diatas 2.000 mm per tahun, sedangkan wilayah selatan yaitu wilayah Pomalaa hingga Toari merupakan daerah dengan rata-rata curah hujan kurang dari 2.000 mm per tahun. Keadaan curah hujan di Kabupaten Kolaka ditunjukkan pada gambar berikut

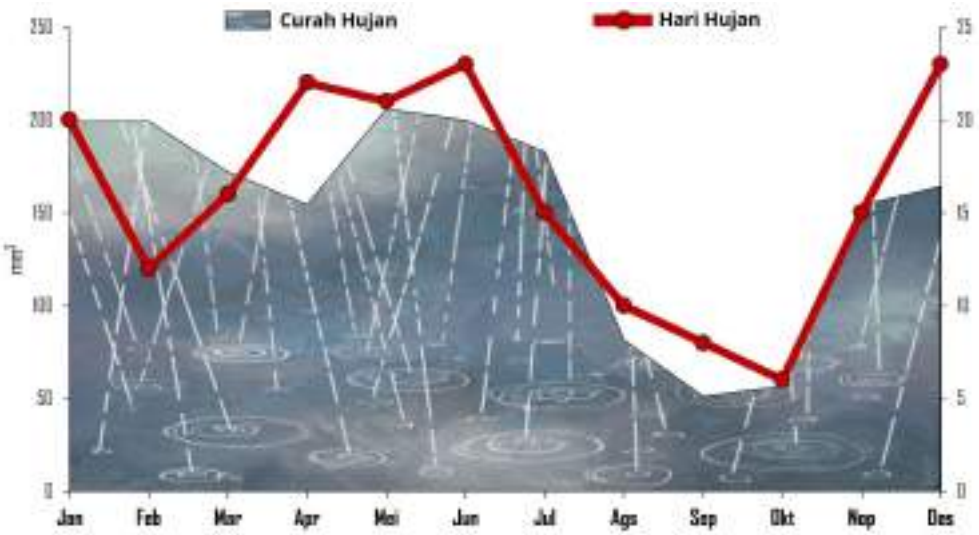


Gambar 2.5
Jumlah hari Hujan dan Curah Hujan
Kabupaten Kolaka Tahun 2018 (BPS, 2019)

### 2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas manusia pada bidang lahan tertentu, misalnya permukiman, persawahan, dan perkebunan. Penggunaan lahan juga dapat dikatakan sebagai pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya.Pengertian penggunaan lahan biasanya digunakan untuk mengacu pemanfaatan lahan masa kini *(present or current land use).*

Penggunaan lahan di Kabupaten Kolaka dibedakan menjadi lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Lahan pertanian terdiri atas lahan

pertanian sawah dan lahan pertanian bukan sawah. Berdasarkan penggunaan lahannya, sebagian besar wilayah Kabupaten Kolaka berupa hutan lindung dan hutan produksi serta sebagian kecil berupa permukiman. Luas wilayah menurut jenis penggunaan lahan di Kabupaten Kolaka selengkapnya disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Luas Wilayah Kabupaten Kolaka Menurut Jenis Penggunaan Lahan

| JENIS PENGGUNAAN LAHAN | LUAS ($km^2$) |
|---|---|
| **A. Kawasan Lindung** | |
| - Hutan lindung | 109.174,8 |
| - Sempadan sungai | 2.391,2 |
| - Hutan Suaka | 8.070,0 |
| **B. Kawasan Budidaya** | |
| - Hutan produksi | 74.538,6 |
| - Perkebunan | 23.755,2 |
| - Sawah | 8.520,5 |
| - Lahan kering/hortikultura | 665,5 |
| - Permukiman | 13.075,8 |
| - Pertambangan | 8.399,7 |
| - Perikanan | 9.700 |

Sumber : RTRW Kab. Kolaka, 2018

### 2.1.2 Potensi Pengembangan Daerah

Berdasarkan karakter geografi, sebaran penggunaan lahan dan potensi sumberdaya alam yang ada di Kabupaten Kolaka dapat diidentifikasi potensi - potensi yang dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Kolaka seperti potensi pertanian, perikanan dan pertambangan. Potensi pengembangan wilayah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kolaka Tahun 2012 - 2032 yang diatur dalam Perda Nomor 16 Tahun 2012 menyebutkan bahwa rencana penggunaan lahan pada tahun 2032 diarahkan untuk menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan Lindung adalah wilayah yang harus dilindungi dan

memiliki fungsi perlindungan yang harus dipertahankan guna menghindari berbagai efek negatif yang mungkin muncul. Sedangkan Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya manusia, dan sumber daya buatan.

a. Potensi Pertanian

Pertanian merupakan sektor utama mata pencarian masyarakat Kabupaten Kolaka. Sektor pertanian telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kolaka yaitu urutan kedua setelah sektor pertambangan. Adapun komoditas andalan Kabupaten Kolaka pada sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan adalah padi, jagung, dan kedelai.

Kabupaten Kolaka merupakan salah satu daerah penghasil padi terbesar di Sulawesi Tenggara dimana sebagian produksinya telah di pasarkan keluar wilayah Sulawesi Tenggara. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam budidaya padi adalah masih rendahnya produktivitas padi per Ha. Olehnya itu Kabupaten Kolaka terus berupaya dan berinovasi untuk menjadi produsen padi terbesar di Sulawesi Tenggara.

Kabupaten Kolaka memiliki luas lahan tanaman pangan tahun 2017 sebagai berikut: sawah seluas 8.520,5 $Km^2$ dengan produksi sebesar 58.877 ton, jagung seluas 3.116 Ha, dengan produksi sebesar 15.829,28 ton, luas lahan kedelai 1.111 Ha dengan produksi 1.644,28 ton. Kondisi wilayah Kabupaten Kolaka khususnya iklim, lahan dan sumber daya alam merupakan pendukung utama pengembangan usaha jenis komoditas pertanian terutama pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Sama halnya komoditas tanaman pangan, maka untuk pengembangan komoditas hortikultura, dan perkebunan masih diperlukan peningkatan produktivitas dan konversi produk. Hal ini dalam rangka mendukung ketahanan pangan masyarakat yang tidak hanya mengandalkan dari sektor beras, namun juga harus didukung

dengan komoditas pangan yang lain. Tahun 2017 luas lahan komoditas sayuran 2.620 Ha, komoditas buah-buahan 2.437 Ha dan komoditas biofarmaka seluas 8.070 m2. Adapun produksi komoditas sayur-sayuran sebesar 8.805 kwintal, buah-buahan sebesar 57.757 kwintal, biofarmaka sebesar 55 kwintal.

Permasalahan di bidang pertanian tidak hanya dalam produksi dan budidaya, namun dalam pemenuhan sarana pertanian seperti Jalan Usaha Tani (JUT) dan JITUT/JIDES juga masih perlu ada peningkatan. Saat ini panjang JUT yang sudah terbangun/direhab sejak tahun 2014 - 2017 sejumlah 56,1 Km, sedangkan panjang JITUT/JIDES yang terbangun tahun 2014 - 2017 sepanjang 32,9 km.

Selain pemenuhan sarpras pertanian, untuk pola tanam dan konversi lahan juga masih ada kendala, karena dengan semakin banyaknya lahan pertanian yang beralih fungsi ke permukiman ditambah dengan perlakuan olah lahan yang salah (terlalu bergantung pada pupuk kimia) sangat mempengaruhi produksi dan keamanan pangan daerah. Saat ini jumlah produksi sektor peternakan khususnya sapi sudah bisa mencukupi kebutuhan lokal daerah, namun untuk komoditas peternakan lain seperti unggas dan telur di Kabupaten Kolaka masih kekurangan dan harus mendatangkan dari luar kabupaten, namun secara umum populasi ternak di Kabupaten Kolaka selama 4 tahun mengalami peningkatan baik untuk ternak besar, ternak sedang maupun ternak kecil.

Tabel 2.5
Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2018

| Uraian | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| **Ternak** | | | | | | |
| **Sapi** | Ekor | 19.7 | 22.03 | 26.075 | 28.088 | 29.055 |
| **Kerbau** | Ekor | 314 | 420 | 375 | 377 | 379 |
| **Kuda** | Ekor | 42 | 50 | 58 | 65 | 66 |
| **Kambing** | Ekor | 15.1 | 16.23 | 22.737 | 24.003 | 25.150 |
| **Babi** | Ekor | n/a | 5.335 | 6.001 | 6.202 | 6.401 |
| **Ayam** | Ekor | 90.1 | 150.6 | 160.13 | 168.13 | 181.934 |

| Uraian | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| **Ayam** | Ekor | 415. | 1.302. | 1.441.3 | 1.490.3 | 1.543.346 |
| **Ayam** | Ekor | 6.00 | 15.55 | 17.300 | 18.512 | 19.314 |
| **Itik** | Ekor | 18.4 | 20.57 | 22.517 | 23.525 | 30.368 |

Sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2018

b. Potensi Perikanan

Luas perairan laut Kabupaten Kolaka yang mencapai 15.000 Km2 dengan panjang garis pantai membentang sepanjang 295.855 Km dengan luas keseluruhan pulau seluas 4.384 Ha, menjadikan Kabupaten Kolaka sebagai salah satu daerah yang sangat baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari sektor perikanan. Berikut gambaran potensi sumber daya perikanan Kabupaten Kolaka disajikan dalam table berikut.

Tabel 2.6
Potensi Sumberdaya Perikanan dan tingkat pemanfaatannya

| No. | Sumber Daya Perikanan | Potensi | Tingkat Pemanfaatan | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Perikanan laut | 37.500 Ton/ tahun | 16.739,42 Ton/tahun | 44,64% |
| 2. | Budi Daya air payau | 8.500 Ha | 4.890,5 Ha | 57,54% |
| 3. | Budidaya air tawar | 500 Ha | 131 Ha | 26,20% |
| 4. | Budidaya laut | 7.000 Ha | 975 Ha | 13,92 |

Sumber : Dinas Perikanan, Tahun 2018

c. Potensi Pariwisata

Potensi pengembangan wilayah untuk pengembangan kawasan pariwisata meliputi :

1. Kawasan peruntukan pariwisata alam laut/bahari terdapat di Kecamatan Watubangga, Samaturu, Wundulako, Latambaga, Pomalaa, Kolaka dan Iwoimendaa;
2. Kawasan peruntukan pariwisata sejarah dan budaya terdapat di Kecamatan Wundulako, Kolaka dan Pomalaa;

3. Kawasan peruntukan pariwisata buatan terdapat di Kecamatan Latambaga dan Kolaka.

Tabel 2.7
Data Potensi Pariwisata

| No. | Jenis Wisata | Jarak dari Pusat Kota menuju daya Tarik wisata (km) |
|---|---|---|
| **I** | **Wisata Alam** | |
| | 1. Pantai dan sungai terpendek Tamborasi | 80 |
| | 2. Pantai Tanjung Malaha | 30 |
| | 3. Pantai Tanjung Kayu Angin | 20 |
| | 4. Air panas dan air terjun ulunggolaka | 12 |
| | 5. Pulau padamarang dan pulau-pulau sekitarnya | 10 |
| | 6. Gua Watu Wulaa dan air terjun toro'ue | 12 |
| | 7. Pantai Poturua Watubangga | 80 |
| | 8. Pantai harapan Pomalaa | 20 |
| | 9. Pantai Kalomang Watubangga | 80 |
| **II** | **Wisata Budaya** | |
| | 1. Cagar Budaya Makam Sangia Nibandera | 10 |
| | 2. Situs benteng tanah bende wuta | 20 |
| | 3. Cerobong tua pabrik nikel Antam Pomalaa | 25 |
| **III** | **Wisata Buatan** | |
| | 1. Replika Rumah Adat Mekongga | Dalam Kota |
| | 2. Tugu Coklat | Dalam Kota |
| | 3. Kampung Coklat | 3 |

Sumber : Dinas Pariwisata, Tahun 2018

d. Potensi Industri

Potensi pengembangan wilayah untuk pengembangan kawasan industri meliputi :

1. Kawasan Industri Perikanan di Kelurahan Mangolo Kecamatan Latambaga;
2. Kawasan industri peternakan dengan sentra pengembangan di Kecamatan Watubangga;

3. kawasan agro industri kelapa sawit dengan sentra pengembangan di Kecamatan Polinggona, Watubangga, Tanggetada dan Baula;
4. kawasan industri pertambangan di Kecamatan Wolo, Samaturu, Latambaga, Wundulako dan Tanggetada.

e. Potensi Pertambangan

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dikeluarkan Badan Standarisasi Nasional Indonesia (BSNI) nomor SNI 13-4726-1998 tentang klsifikasi sumber daya mineral dan cadangan, yang mengacu pada *United Nations International Framework Classification forReserves/Resources* tahun 1996, dinyatakan bahwa ada empat tahapan eksplorasi yaitu Survai Tinjau (Reconnaissance), Prospeksi (Prospecting), Eksplorasi Umum (General Exploration), dan Eksplorasi Rinci (Detailed Exploration).

Mengingat wilayah Kabupaten Kolaka cukup luas dan terbatasnya dana, maka inventarisasi sumberdaya mineral yang pernah dilakukan masih pada tahap survey tinjau sehingga kategori sumberdaya dan cadangan adalah sumberdaya dan cadangan hipotetik. Gambaran potensi bahan galian yang ada di Kabupaten Kolaka dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 2.8
Data Potensi Bahan Galian di Kabupaten Kolaka Tahun 2017

| No. | WILAYAH | | SEBARAN BAHAN GALIAN (HEKTAR) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Kecamatan** | **Hektar** | **Nikel** | **Marmer** | **Metamorf** | **Oniks** | **Magnesit** | **Kawarsa** | **Gamping** | **G. Dolomit** |
| 1 | IWOIMENDAA | 25.680 | | 19.450 | 19.450 | | | | | |
| 2 | WOLO | 35.033 | 4.108 | 10.560 | 16.740 | | | | | |
| 3 | SAMATURU | 66.260 | | | 61.510 | 428 | | | | |
| 4 | LATAMBAGA | 22.480 | | | 20.820 | 207 | | 239 | | |
| 5 | KOLAKA | 12.700 | | | 10.900 | | | | | |
| 6 | WUNDULAKO | 16.483 | 4.498 | | 9.002 | | 40,3 | | | |
| 7 | BAULA | 10.750 | 4.481 | | 5.506 | | | | | |
| 8 | POMALAA | 23.420 | 16.136 | | 650 | | | 2.095 | | |
| 9 | TANGGETADA | 24.540 | 4.911 | | | | | 14.600 | | |
| 10 | POLINGGONA | 12.460 | | | | | | 10.830 | | |
| 11 | WATUBANGGA | 31.880 | 737,5 | | | | | 22.080 | 331 | 1.902 |
| 12 | TOARI | 10.620 | | | | | | 5.298 | 1.610 | 3.359 |
| | **JUMLAH** | **292.307** | **34.874** | **30.010** | **129.966** | **635,7** | **40,3** | **55.144** | **1.971** | **5.261** |
| | **Berat Jenis** | | **1,5** | **2,55** | **2,7** | **3,65** | **5,3** | **2,7** | **2,5** | **2,85** |
| | Estimasi Ketebalan | | **5** | 20 | 25 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| | Estimasi Sebaran | | **50%** | 15% | 80% | 50% | 50% | 50% | 70% | 70% |

Sumber: Bagian SDA Setda Kolaka, 2018

Gambar 2.6
Peta Potensi Pertambangan Kab. Kolaka (Bappeda, 2017)

### 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Kolaka pada umumnya disebabkan oleh faktor alam dan kelalaian manusia seperti banjir, angin puting beliung dan kebakaran. Selama tahun 2018 tercatat frekuensi kejadian bencana banjir sebanyak 11 kali kejadian, angin puting beliung sebanyak 5 kali kejadian dan kebakaran sebanyak 16 kali kejadian.

Rekapitulasi kejadian bencana yang terjadi selama tahun 2018 selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.9
Rekapitulasi Kejadian Bencana Kab. Kolaka tahun 2014 – 2018

| JENIS BENCANA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Angin Puting Beliung** | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| **Kebakaran** | | | | | |
| *Rumah* | 9 | 15 | 21 | 10 | 16 |
| *Hutan* | - | 7 | - | - | - |
| *Lahan* | - | 1 | - | - | - |
| **Banjir** | 5 | 2 | 32 | 2 | 11 |
| **Tanah Longsor** | - | 2 | 1 | - | - |

*Sumber: BPBD Kab. Kolaka, 2019*

Terkait penanganan bencana yang dilaksanakan oleh instansi terkait seperti BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kodim 1412 Kolaka, Polres Kolaka, Basarnas dan PMI Kolaka pada saat terjadinya bencana dan kegiatan pasca bencana. Kegiatan pada saat terjadinya bencana antara lain pemberian bantuan darurat berupa bahan pangan dan obat-obatan. Sedangkan kegiatan pasca bencana yaitu rehabilitasi fisik sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana.

a. Status Bencana

   Bencana yang terjadi di Kabupaten Kolaka selama tahun 2018 berstatus bencana lokal yaitu bencana yang dapat ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka sendiri.

b. Berdasarkan kondisi geografis Kabupaten Kolaka, potensi kejadian bencana yang mungkin terjadi antara lain sebagai berikut:

1. Bencana banjir

   Wilayah berpotensi banjir terdapat di Kecamatan Samaturu, Kecamatan Pomalaa, Kecamatan Baula, Kecamatan Tanggetada dan Kecamatan Kolaka.

2. Bencana tanah longsor

   Wilayah berpotensi tanah longsor terdapat di Kecamatan Samaturu, Kecamatan Latambaga, Kecamatan Kolaka, Kecamatan Baula, dan Kecamatan Watubangga.

3. Bencana gelombang pasang

   Wilayah berpotensi gelombang pasang terdapat di Kecamatan Iwoimendaa, Kecamatan Wolo, Kecamatan Samaturu, Kecamatan Latambaga, Kecamatan Tanggetada, Kecamatan Watubangga, dan Kecamatan Toari.

4. Bencana angin puting beliung

   Wilayah berpotensi angin puting beliung terdapat di seluruh kecamatan utamanya kecamatan yang berada di pesisir pantai.

5. Bencana kebakaran rumah

   Seluruh wilayah di Kabupaten Kolaka berpotensi terjadi kebakaran, khususnya pada musim kemarau.

c. Dalam mengantisipasi kejadian bencana yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, rusaknya aset dan lingkungan, Pemerintah Kabupaten Kolaka dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka melakukan pendekatan sistematis untuk mengantisipasi, mengkaji dan mengurangi resiko bencana dengan sosialisasi ke masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya bencana dan membentuk forum-forum tanggap darurat bencana di tingkat desa/kelurahan serta bekerjasama dengan instansi terkait demi mengurangi resiko/dampak bencana.

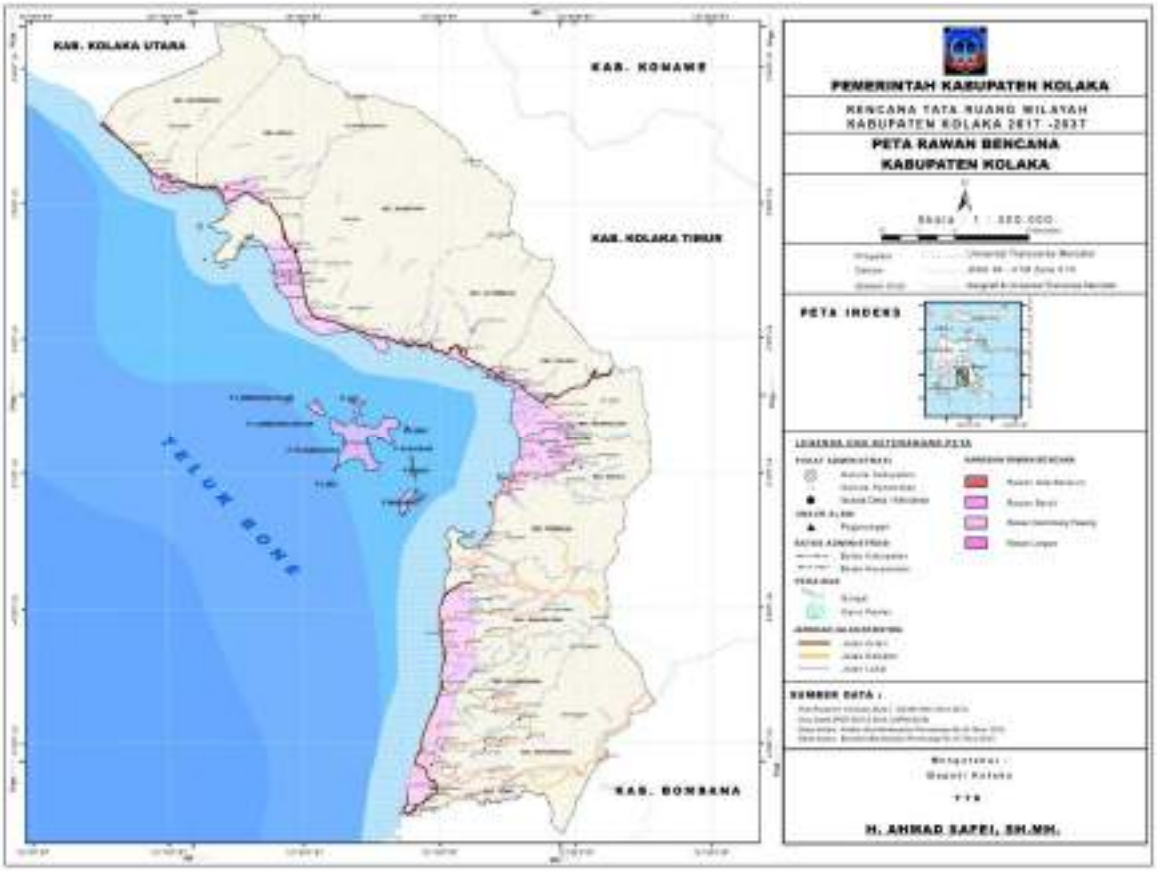


Gambar 2.6a
Peta Rawan Bencana
Kabupaten Kolaka

### 2.1.4 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

**a. Profil Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan**

Jasa ekosistem penyediaan adalah barang yang dihasilkan oleh ekosistem dan dimanfaatkan secara langsung oleh manusia.

- **Profil dan Distribusi Indeks Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan**

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap mahluk hidup untuk dapat bertahan hidup. Hal ini membuat ketersediaan pangan di suatu wilayah merupakan hal yang penting dan harus selalu terjamin ketersediaannya. Alam diciptakan terdiri dari berbagai ekosistem yang juga memberikan bermacam-macam manfaat bagi mahluk hidup. Salah satu manfaat ini adalah penyediaan bahan pangan, yakni segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati baik tumbuhan maupun hewan yang dapat diperuntukan bagi konsumsi manusia dan cukup bervariasi antara lain beras, sagu, ubi, jagung, segala macam buah dan sayuran, ikan, daging dan telur. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan.

Tabel 2.10
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem
Penyediaan Pangan Kab. Kolaka berdasarkan kecamatan

| NO | KECAMATAN | SANGAT RENDAH – RENDAH | | SEDANG | | TINGGI - SANGAT TINGGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ha | % | Ha | % | Ha | % |
| 1 | BAULA | 268,98 | 0,09 | 9.390,08 | 3,24 | 1.044,14 | 0,36 |
| 2 | IWOIMENDAA | 85,62 | 0,03 | 24.206,72 | 8,34 | 222,36 | 0,08 |
| 3 | KOLAKA | 539,86 | 0,19 | 11.371,45 | 3,92 | 724,47 | 0,25 |
| 4 | LATAMBAGA | 454,15 | 0,16 | 21.073,03 | 7,26 | 890,11 | 0,31 |
| 5 | POLINGGONA | 175,08 | 0,06 | 11.127,79 | 3,84 | 1.098,65 | 0,38 |
| 6 | POMALAA | 2.024,97 | 0,70 | 20.030,15 | 6,90 | 1.318,05 | 0,45 |
| 7 | SAMATURU | 434,55 | 0,15 | 62.989,02 | 21,71 | 2.541,88 | 0,88 |
| 8 | TANGGETADA | 1.104,96 | 0,38 | 19.711,80 | 6,79 | 3.624,57 | 1,25 |
| 9 | TOARI | 3.658,69 | 1,26 | 6.367,52 | 2,19 | 510,30 | 0,18 |
| 10 | WATUBANGGA | 1.254,90 | 0,43 | 28.776,76 | 9,92 | 1.758,72 | 0,61 |
| 11 | WOLO | 275,39 | 0,09 | 32.531,35 | 11,21 | 2.060,41 | 0,71 |
| 12 | WUNDULAKO | 352,34 | 0,12 | 14.235,03 | 4,91 | 1.921,78 | 0,66 |
| **TOTAL** | | **10.629,49** | **3,66** | **261.810,73** | **90,23** | **17.715,45** | **6,11** |

Sumber: DDDTLH Kab. Kolaka, 2018

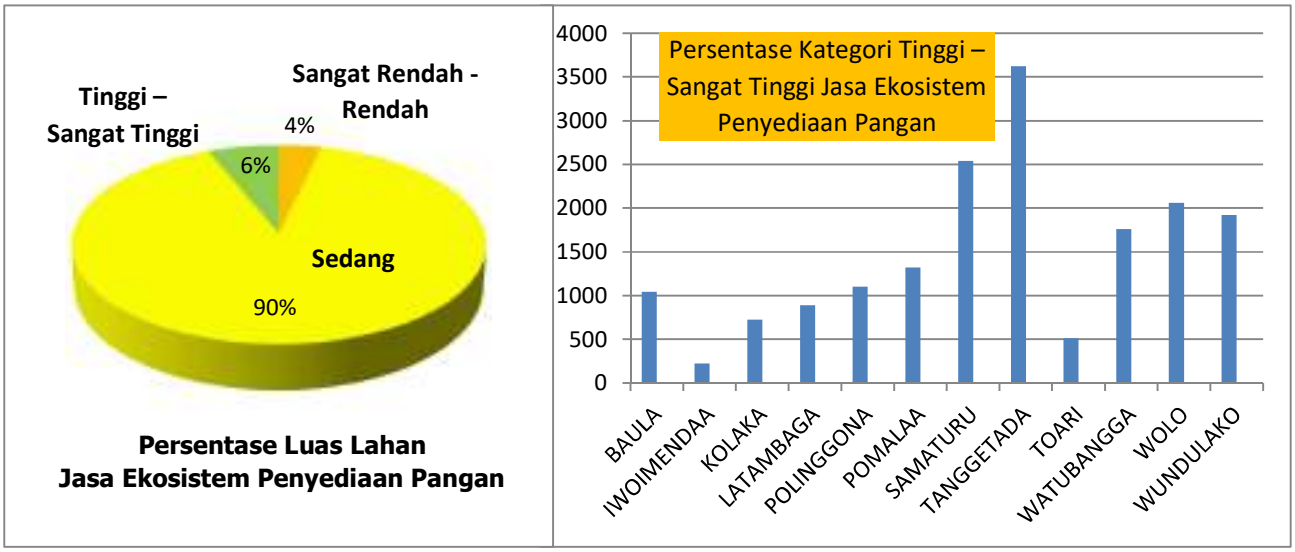


Gambar 2.7 Profil Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka (Sumber: DDDTLH Kab. Kolaka, 2018)

Berdasarkan ciri dan kenampakan alamiah, lahan di Kabupaten Kolaka dapat dibagi menjadi tiga jenis ekoregion, yaitu Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Lore Lindu - Bogani Nani Wartabone, Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Rawa Aopa Watumohai - Kep Padamarang dan Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Mangolo - Morowali - Pati Pati. Ketiga jenis ekoregion ini, Kompleks Pegunungan Struktural Lore Lindu - Bogani Nani Wartabone merupakan ekoregion ini yang dominan dan menempati 98,6% dari total luas wilayah Kabupaten Kolaka. Masing-masing ekoregion umumnya memiliki ciri khas yang berbeda termasuk dalam penyediaan bahan pangan bagi manusia. Secara umum lahan yang mampu menyediakan bahan pangan di Kabupaten Kolaka dapat dibagi menjadi lahan berpotensi tinggi, sedang, dan rendah. Lahan yang memiliki potensi tinggi sampai dengan sangat tinggi tersebar di Kecamatan Samaturu dengan luas ± 63.423,57 Ha atau 21,86%, Kecamatan Wolo dengan luas ± 32.806,74 Ha (11,31%) dan Kecamatan Watubangga dengan luas ± 30.031,66 Ha (10,35%). ketiga kecamatan tersebut di sebabkan karena daerah – daerahnya masih didominasi oleh hutan dengan vegetasi cukup lebat yang dapat menjadi plasma nutfah sehingga dapat menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup

sekitarnya. Selain itu luas wilayah ketiga kecamatan ini merupakan tiga kecamatan dengan luas terbesar seluas 252.523,9 Ha atau 46,34% dari total luas wilayah Kabupaten Kolaka, sehingga daya dukung (luas lahan) ketiga kecamatan ini cukup besar untuk penyediaan bahan pangan.

Lahan yang memiliki potensi sangat rendah sampai rendah sebagian besar terletak di wilayah bagian selatan kabupaten kolaka yaitu di Kecamatan Toari dengan luas 3.658,69 Ha (1,26%) dan Kecamatan Pomalaa 2.024,97 Ha (0,70%). Sebagian besar lahan di kedua kecamatan ini terletak pada ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Lore Lindu - Bogani Nani Wartabone dengan fungsi kawasan dominan Hutan Produksi dengan topografi relatif landai dengan batuan penyusun didominasi oleh batupasir dengan tingkat porositas yang cukup tinggi.

Secara umum ekoregion untuk mendukung pangan di Kabupaten Kolaka didominasi oleh kondisi sedang dengan luas ± 261.810,701 Ha (90,23 %). Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekoregion di Kabupaten Kolaka masih mampu untuk mendukung penyediaan pangan.

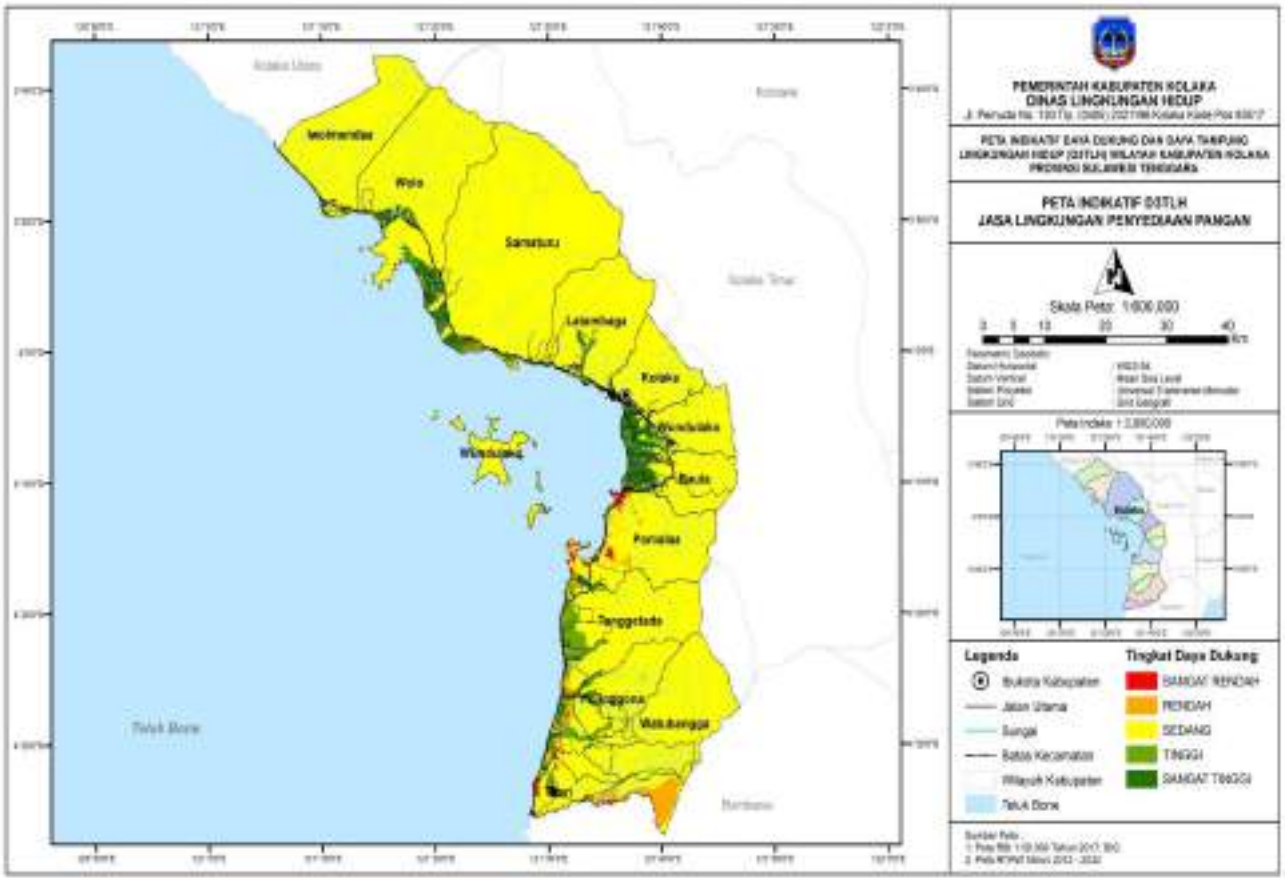


Gambar 2.8 Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan menurut Kecamatan di Kab.Kolaka (DDDTLH Kab. Kolaka, 2018)

- **Profil dan Distribusi Jasa Ekosistem Penyediaan Air**

Air bersih adalah salah satu jenis sumberdaya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari dan memenuhi persyaratan untuk pengairan sawah, untuk treatment air minum dan untuk treatmen air sanitasi.

Secara umum penyediaan air bersih dapat berasal dari penyediaan air tanah (termasuk penyimpanannya) dan penyediaan air permukaan.

Tabel 2.11
Jumlah Penduduk Penggunaan Air Tanah

| No. | Uraian | Jumlah Pengguna | Ket |
|---|---|---|---|
| 1. | Sumur Gali Terlindung | 22.659 | |
| 2. | Sumur Gali dengan Pompa | 9528 | |
| 3. | Sumur Bor Po mpa | 38.311 | |
| 4. | Mata air terlindung | 3.639 | |

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Kolaka,2018

Tabel 2.12
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan air

| NO | KECAMATAN | SANGAT RENDAH – RENDAH | | SEDANG | | TINGGI - SANGAT TINGGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ha | % | Ha | % | Ha | % |
| 1 | BAULA | 2941,63 | 1,01 | 7760,95 | 2,67 | 0,6182 | 0,0002 |
| 2 | IWOIMENDAA | 897,39 | 0,31 | 23596,50 | 8,13 | 20,8193 | 0,0072 |
| 3 | KOLAKA | 1435,59 | 0,25 | 11190,03 | 3,86 | 10,1715 | 0,0035 |
| 4 | LATAMBAGA | 1616,56 | 0,40 | 20779,91 | 7,16 | 20,8270 | 0,0072 |
| 5 | POLINGGONA | 5767,61 | 1,99 | 6622,50 | 2,28 | 11,4081 | 0,0039 |
| 6 | POMALAA | 7768,17 | 2,68 | 15559,37 | 5,36 | 45,6417 | 0,0157 |
| 7 | SAMATURU | 4364,72 | 1,50 | 61533,74 | 21,21 | 66,9925 | 0,0231 |
| 8 | TANGGETADA | 7575,54 | 2,59 | 16082,64 | 5,54 | 783,1643 | 0,2699 |
| 9 | TOARI | 7141,06 | 2,46 | 3349,00 | 1,15 | 46,4494 | 0,0160 |
| 10 | WATUBANGGA | 11574,01 | 3,99 | 20168,29 | 6,95 | 48,0823 | 0,0166 |
| 11 | WOLO | 3798,13 | 1,31 | 30989,09 | 10,68 | 79,9251 | 0,0275 |
| 12 | WUNDULAKO | 3463,80 | 1,19 | 12974,32 | 4,47 | 71,0323 | 0,0245 |
| | | 58344,20 | 20,11 | 230606,33 | 79,48 | 1205,1317 | 0,4153 |

Sumber: DDDTLH Kab. Kolaka, 2018

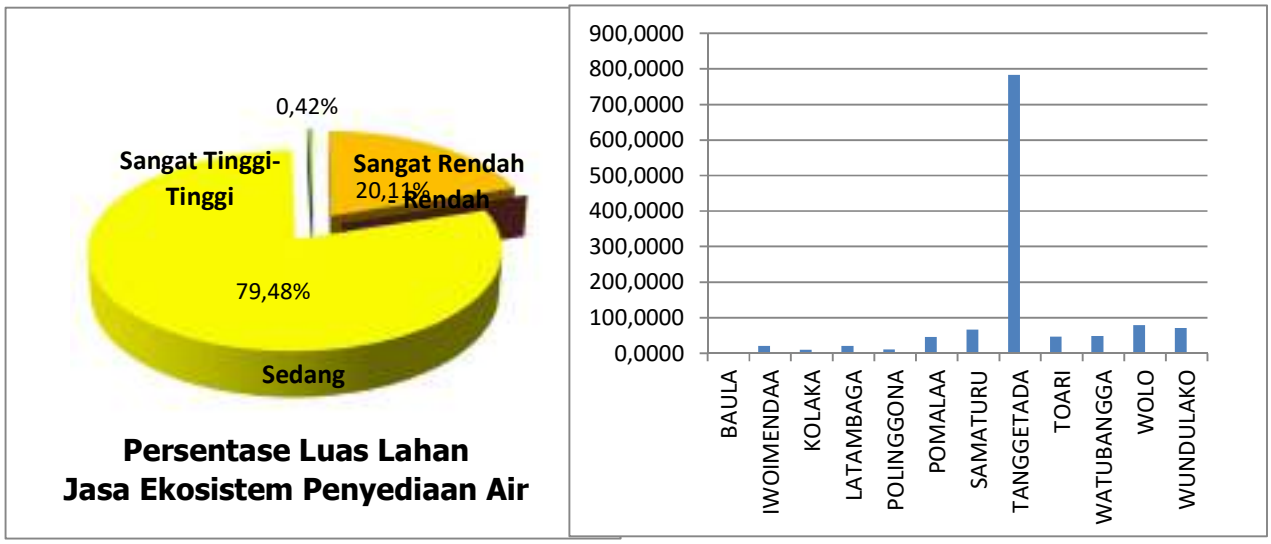


Gambar 2.9 Profil Jasa Ekosistem Penyedian Air menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka
(Sumber: DDDTLH Kab. Kolaka, 2018)

Ekosistem dengan penyediaan air yang ada di Kabupaten Kolaka utamanya dipenuhi oleh Cekungan Air Tanah (CAT) yakni :

a. CAT Kolaka meliputi Kecamatan Latambaga, Kolaka, Wundulako, Baula serta Pomalaa; dan
b. CAT Tanggetada meliputi Kecamatan Pomalaa, Tenggetada, Polinggona, Watubangga dan Toari.

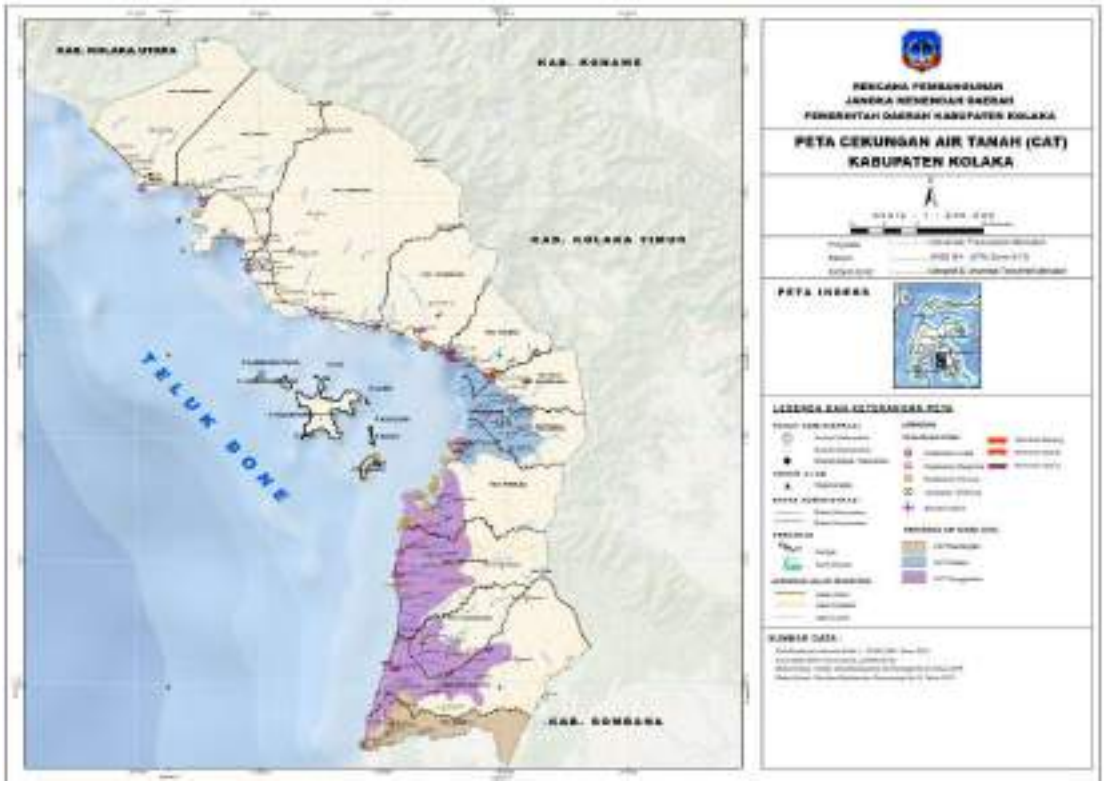


Gambar 2.10

Peta Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Kolaka

Wilayah yang menyediakan jasa air dengan tingkat yang tinggi sampai dengan sangat tinggi berada di Kecamatan Tanggetada seluas 783,1643 Ha (0,2699%). Kondisi ekoregion Kecamatan Tanggetada berada pada dataran bermaterial alluvium dengan jenis tanah kambisol dengan litologi penyusun didominasi oleh material pasir kuarsa yang memiliki porositas yang tinggi.

Lahan yang memiliki potensi sangat rendah sampai rendah berada di Kecamatan Watubangga seluas 11574,01 Ha (3,99%) Dataran solusional karst berombak bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat.

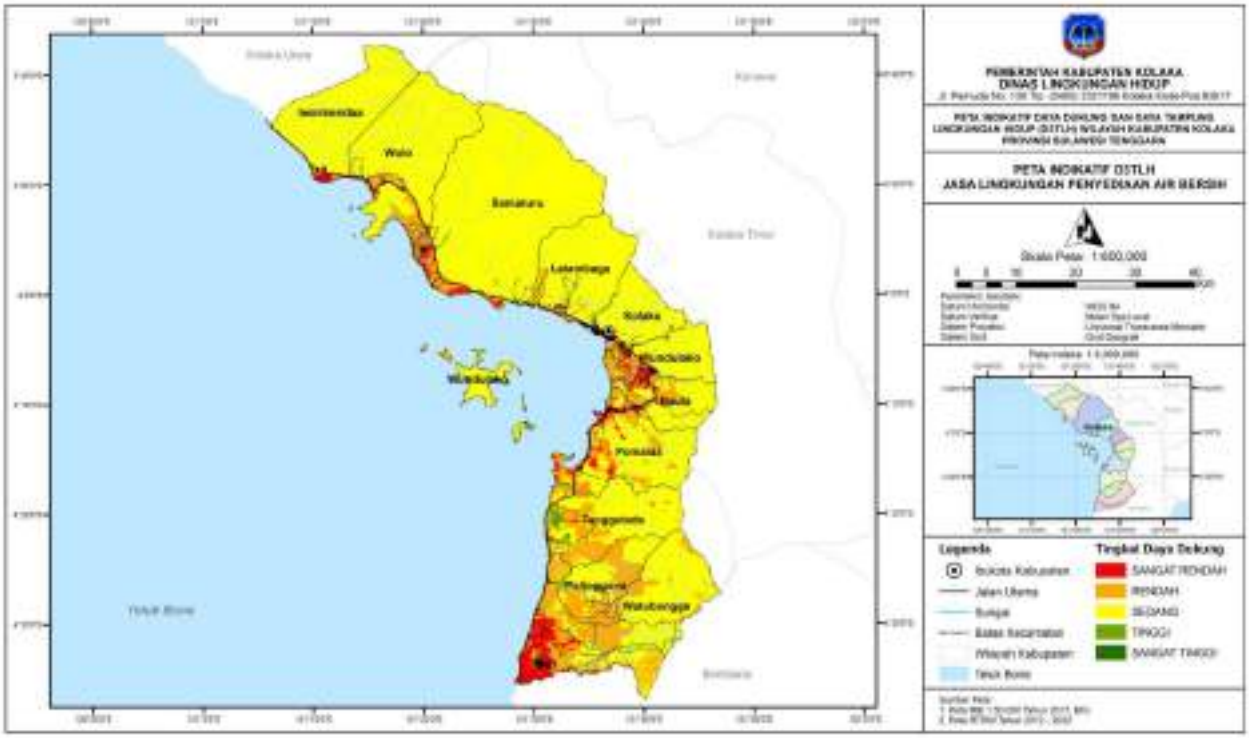


Gambar 2.11
Profil Jasa Ekosistem Penyedian Air menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka
(DDDTLH Kab. Kolaka, 2018)

- **Profil dan Distribusi Indeks Jasa Ekosistem Penyediaan Serat (Fiber) menurut kecamatan**

Serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh dan molekul penyusunannya terorientasi. Ekosistem penyedia serat alami meliputi serat yang diproduksi oleh tumbuh-tumbuhan (serat dari biji, batang dan daun), hewan (staple dan flamen), proses-proses geologis (asbes). Kabupaten Kolaka ada yang dapat memberikan manfaat berupa penyediaan serat (fiber) dengan baik dan ada pula yang tidak. Potensi penyediaan bahan serat di Kabupaten Kolaka hanya berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Sementara dari aspek kondisi geologi, penyediaan bahan serat dari proses geologi tidak/kecil potensinya. Namun secara umum wilayah Kabupaten Kolaka.

Tabel 2.13
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Serat

| NO | KECAMATAN | SANGAT RENDAH – RENDAH | | SEDANG | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ha | % | Ha | % |
| 1 | BAULA | 5043,14 | 1,74 | 5660,06 | 1,95 |
| 2 | IWOIMENDAA | 3444,81 | 1,19 | 21069,89 | 7,26 |
| 3 | KOLAKA | 3021,59 | 0,63 | 9614,21 | 3,31 |
| 4 | LATAMBAGA | 4310,89 | 1,33 | 18106,41 | 6,24 |
| 5 | POLINGGONA | 2451,98 | 0,85 | 9949,54 | 3,43 |
| 6 | POMALAA | 9526,47 | 3,28 | 13846,71 | 4,77 |
| 7 | SAMATURU | 16080,61 | 5,54 | 49884,84 | 17,19 |
| 8 | TANGGETADA | 6181,65 | 2,04 | 18259,68 | 6,29 |
| 9 | TOARI | 6578,77 | 2,27 | 3957,74 | 1,36 |
| 10 | WATUBANGGA | 8134,92 | 2,80 | 23655,46 | 8,15 |
| 11 | WOLO | 9792,74 | 3,37 | 25074,41 | 8,64 |
| 12 | WUNDULAKO | 4513,16 | 1,56 | 11996,00 | 4,13 |
| | | **79.080,73** | **27,25** | **21.1074,9** | **72,74541** |

Sumber: DDDTLH Kab. Kolaka, 2018

Secara umum di wilayah Kabupaten Kolaka lahan yang mampu menyediakan serat (fiber) hanya dapat dibagi menjadi lahan sedang dan sangat rendah sampai rendah. Lahan yang berpotensi sedang terdapat hampir di semua kecamatan di Kabupaten Kolaka dan menempati 72% dari total luas wilayah Kabupaten Kolaka. Penggunaan lahan yang dominan pada lahan yang berpotensi sedang ini adalah hutan rimba dengan luas 224086,5 Ha dan berada pada perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik dan perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar. Sementara lahan yang memliki potensi sangat rendah terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Kolaka yang merupakan kawasan terbangun dengan luas 11.232,02 Ha (3.87%) dan yang memiliki potensi rendah dan menempati lahan dengan luas 67.848,71 Ha (23,38%).

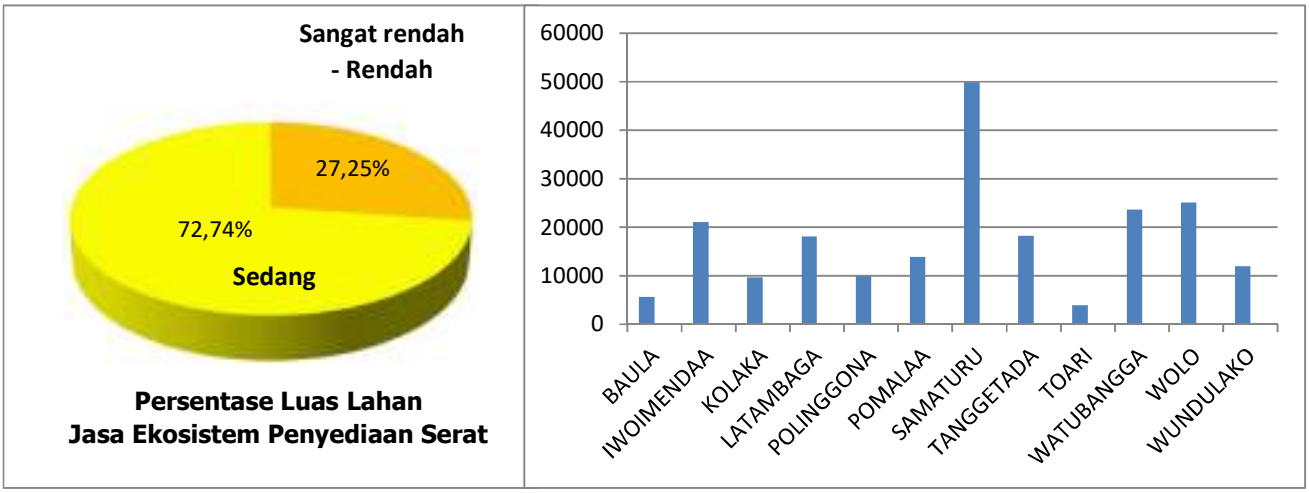


Gambar 2.12
Profil Jasa Ekosistem Penyedian Serat menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka
(DDDTLH Kab. Kolaka, 2018)

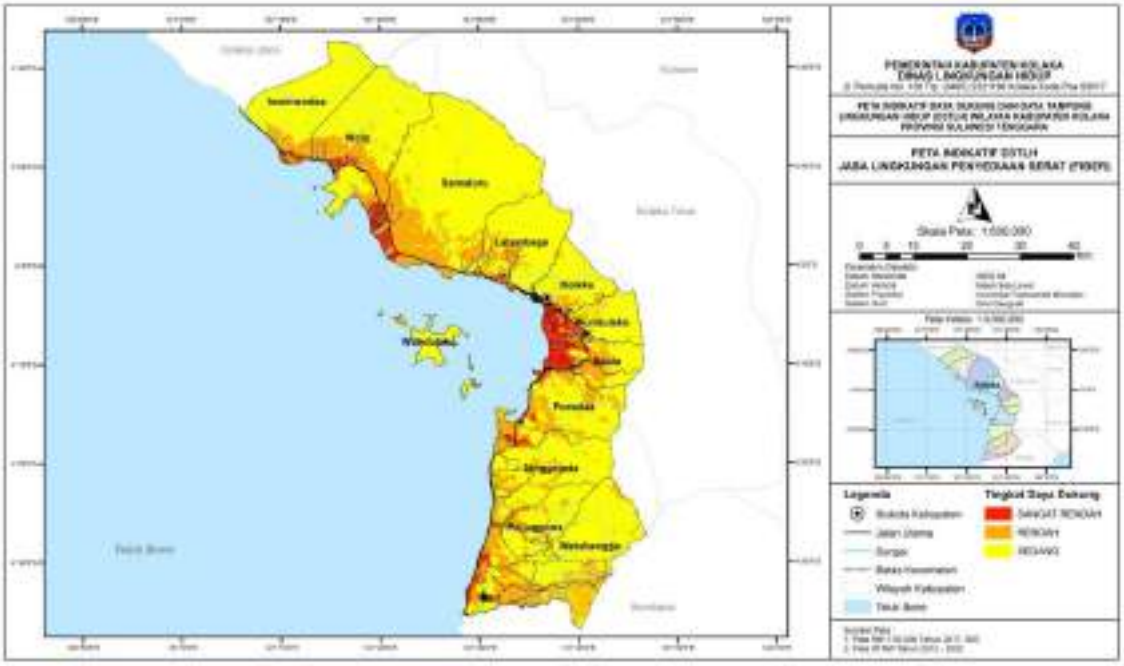

Gambar 2.13
Peta daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Serat di Kabupaten Kolaka (DDDTLH Kab. Kolaka, 2018)

### b. Profil Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan

Jasa ekosistem pengaturan adalah manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem melalui jasa pengaturan yang dilakukan oleh ekosistem.

Siklus kehidupan dalam ekosistem menghasilkan barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan manusia.

- **Profil dan Distribusi Indeks Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim menurut kecamatan**

Secara alamiah ekosistem mampu memberikan jasa ekosistem berupa jasa pengaturan iklim mikro, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca serta penyerapan karbon. Kondisi vegetasi, ketinggian tempat serta bentuk akan berpengaruh terhadap fungsi pengaturan iklim. Semakin rapat suatu vegetasi dengan posisi fisiografis berada di daerah ketinggian maka pengaturan iklim akan lebih baik dibandingkan dengan kondisi vegetasi yang jarang dan berada di daerah dataran rendah. Kondisi vegetasi yang rapat dengan posisi fisiografis di daerah ketinggian akan bermanfaat secara langsung untuk pengurangan emisi karbon dioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti naiknya permukaan nair laut, banyaknya daratan yang tenggelam serta perubahan iklim ekstrim. Jasa pengaturan iklim berperan sangat penting untuk pengaturan iklim mikro suatu wilayah. Kabupaten Kolaka sebagai daerah dengan kegiatan pertambangan yang cukup tinggi berpotensi untuk terganggunya fungsi pengaturan iklim.

Sebagaimana terlihat pada tabel di bawah wilayah dengan fungsi pengaturan iklim yang tinggi sampai dengan sangat tinggi berada di Kecamatan Samaturu dan menempati lahan dengan luas 49.792,52 Ha ( 17,16%) dan Kecamatan Iwoimendaa 21.030, 53 Ha ( 7.25%) . Kecamatan Samaturu dan Kecamatan Iwoimendaa ini merupakan merupakan wilayah yang masih didominasi oleh tutupan lahan berupa hutan rimba. Kondisi vegetasi serta fisiografi kedua kecamatan ini masih berfungsi dengan baik dalam haln fungsi pengaturan iklim.

Sementara wilayah dengan fungsi pengaturan iklim yang sangat rendah sampai dengan rendah berada di Kecamatan Pomalaa dengan luas

3234,70 Ha (1.11%). Kecamatan Pomalaa secara eksisting merupakan wilayah dengan kegiatan pertambangan yang cukup tinggi.

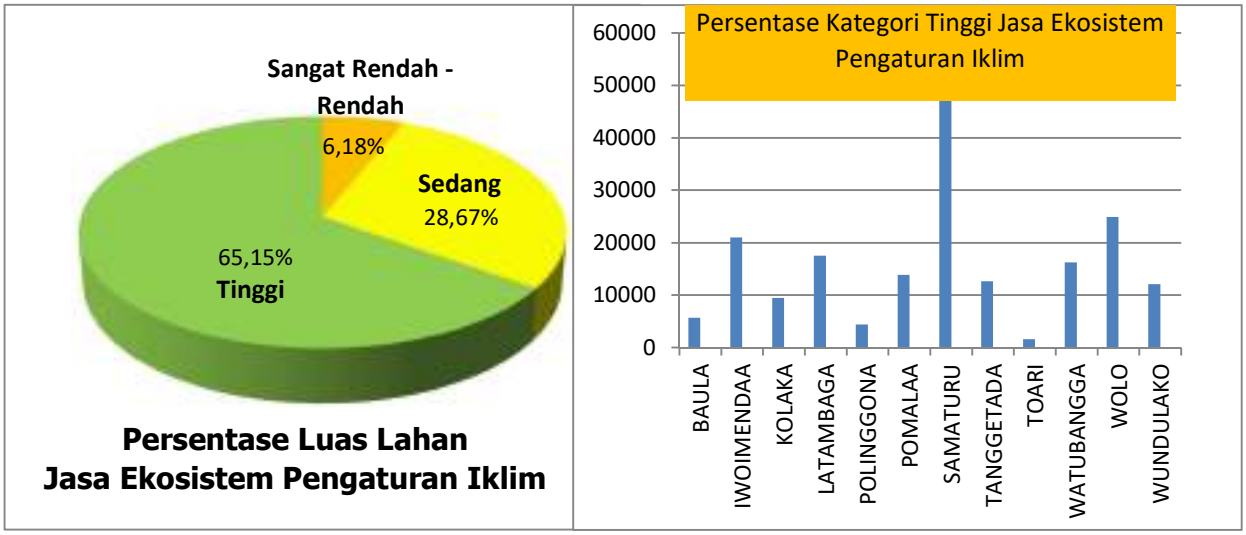


Gambar 2.14
Profil Jasa Ekosistem Penyedian Serat menurut Kecamatan di Kab. Kolaka (DDDTLH Kab. Kolaka, 2018)

Tabel 2.14
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim menurut kecamatan

| NO | KECAMATAN | SANGAT RENDAH - RENDAH | | SEDANG | | TINGGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ha | % | Ha | % | Ha | % |
| 1 | BAULA | 1289,73 | 0,44 | 3748,52 | 1,29 | 5664,95 | 1,95 |
| 2 | IWOIMENDAA | 283,36 | 0,10 | 3200,90 | 1,10 | 21030,45 | 7,25 |
| 3 | KOLAKA | 1239,72 | 0,43 | 1899,31 | 0,65 | 9496,77 | 3,27 |
| 4 | LATAMBAGA | 600,87 | 0,21 | 4318,51 | 1,49 | 17497,92 | 6,03 |
| 5 | POLINGGONA | 181,91 | 0,06 | 7844,36 | 2,70 | 4375,25 | 1,51 |
| 6 | POMALAA | 3234,70 | 1,11 | 6323,67 | 2,18 | 13814,80 | 4,76 |
| 7 | SAMATURU | 2625,60 | 0,90 | 13581,81 | 4,68 | 49758,04 | 17,15 |
| 8 | TANGGETADA | 1557,06 | 0,54 | 10256,03 | 3,53 | 12628,24 | 4,35 |
| 9 | TOARI | 885,50 | 0,31 | 8038,86 | 2,77 | 1612,14 | 0,56 |
| 10 | WATUBANGGA | 2246,53 | 0,77 | 13298,25 | 4,58 | 16245,60 | 5,60 |
| 11 | WOLO | 1629,50 | 0,56 | 8351,36 | 2,88 | 24886,28 | 8,58 |
| 12 | WUNDULAKO | 2152,31 | 0,74 | 2322,36 | 0,80 | 12034,49 | 4,15 |
| | | 17926,80 | 6,18 | 83183,94 | 28,67 | 189044,93 | 65,15 |

Sumber: DDDTLH Kab. Kolaka, 2018

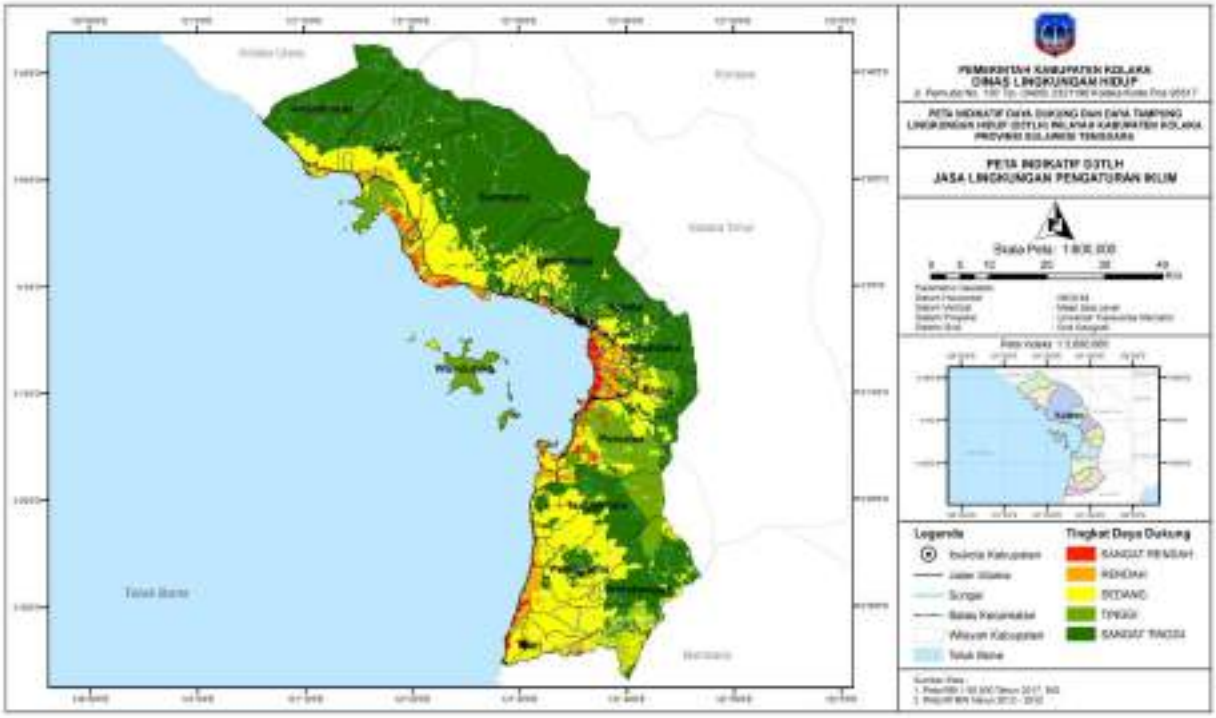


Gambar 2.15
Peta daya Dukung Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kabupaten Kolaka
(DDDTLH Kab. Kolaka, 2018)

- **Profil dan Distribusi Indeks Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara menurut kecamatan**

Kualitas udara adalah keadaan udara yang memiliki kandungan tertentu berkaitan dengan kesehatan manusia. Kualitas udara yang baik merupakan salah satu manfaat yang diberikan oleh ekosistem kepada manusia. Kualitas udara sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya lokasi, sumber pencemar dari berbagai kegiatan, polutan, serta meteorologi dan topografi yang mempengaruhi penyebaran polutan di udara serta pemanfaatan ruang permukaan bumi. Semakin tinggi intensitas pemanfaatan ruang suatu wilayah maka semakin dinamis kualitas udara di wilayah tersebut. Jasa ekosistem pemeliharaan kualitas udara tergantung dari kondisi vegetasi dan topografi. Pada daerah dengan vegetasi yang rapat dan topografi berada di ketinggian maka kualitas udara

yang dihasilkan akan jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan daerah yang tidak bervegetasi.

Tabel 2.15
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Menurut Kecamatan

| NO | KECAMATAN | SANGAT RENDAH - RENDAH | | SEDANG | | TINGGI - SANGAT TINGGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ha | % | Ha | % | Ha | % |
| 1 | BAULA | 2180,42 | 0,75 | 2857,21 | 0,98 | 5665,56 | 1,95 |
| 2 | IWOIMENDAA | 3423,99 | 1,18 | 60,18 | 0,02 | 21030,53 | 7,25 |
| 3 | KOLAKA | 1555,12 | 0,54 | 1582,26 | 0,55 | 9498,42 | 3,27 |
| 4 | LATAMBAGA | 997,97 | 0,34 | 3928,33 | 1,35 | 17491,00 | 6,03 |
| 5 | POLINGGONA | 1478,82 | 0,51 | 6547,45 | 2,26 | 4375,25 | 1,51 |
| 6 | POMALAA | 6751,35 | 2,33 | 2804,02 | 0,97 | 13817,81 | 4,76 |
| 7 | SAMATURU | 4549,72 | 1,57 | 11623,21 | 4,01 | 49792,52 | 17,16 |
| 8 | TANGGETADA | 4356,56 | 1,50 | 7456,53 | 2,57 | 12628,24 | 4,35 |
| 9 | TOARI | 2894,51 | 1,00 | 6027,51 | 2,08 | 1614,49 | 0,56 |
| 10 | WATUBANGGA | 4384,94 | 1,51 | 11190,56 | 3,86 | 16214,89 | 5,59 |
| 11 | WOLO | 5176,53 | 1,78 | 4771,75 | 1,64 | 24918,87 | 8,59 |
| 12 | WUNDULAKO | 3445,85 | 1,19 | 1014,48 | 0,35 | 12048,83 | 4,15 |
| | | 41195,78 | 14,20 | 59863,48 | 20,63 | 189096,41 | 65,17 |

Sumber: DDDTLH Kab. Kolaka, 2018

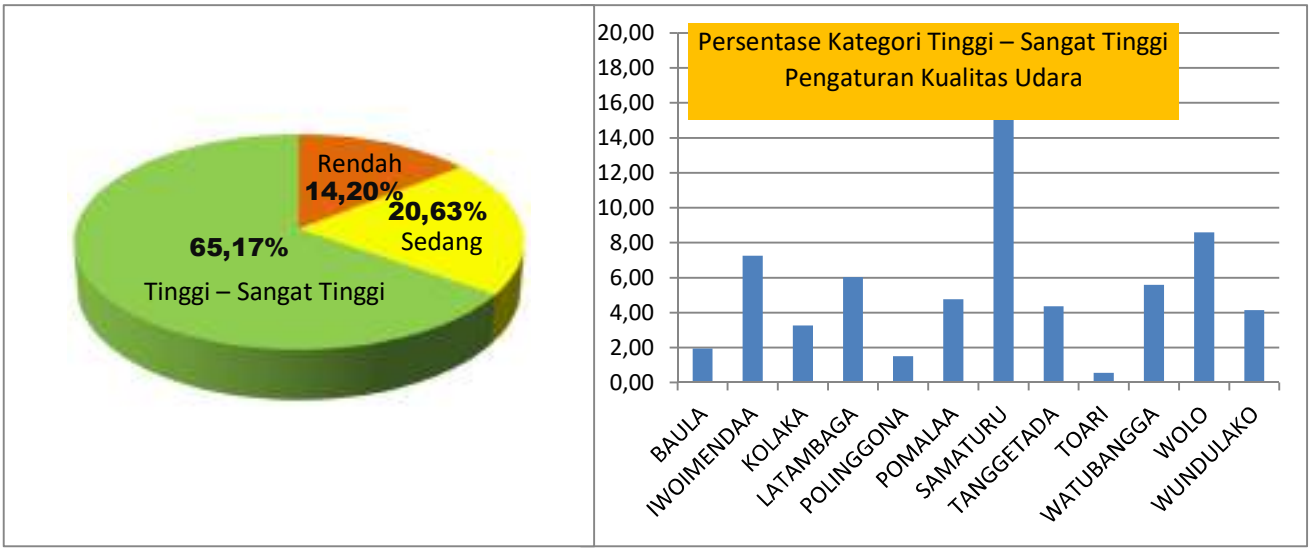


Gambar 2.16 Profil Jasa Ekosistem Pengaturan Kualitas Udara menurut Kec. di Kab. Kolaka (DDDTLH Kab. Kolaka, 2018)

Daya tampung Kabupaten Kolaka dalam jasa pemeliharaan kualitas udara sebagian besar tinggi sampai dengan sangat tinggi. Sebagaimana

terlihat pada tabel di atas Wilayah bagian utara Kabupaten Kolaka merupakan wilayah yang masih cukup bagus dalam hal pemeliharaan terhadap kualitas udara dengan luas lahan keseluruhan sebesar 189.096,41 Ha (65,17%) yang tersebar hampir di semua kecamatan. Namun daya dukung yang paling besar terdapat di Kecamatan Samaturu dengan luas lahan 49.792,52 Ha (17,16 %), Kecamatan Wolo dengan luas lahan 24.918,87 Ha (8,59%) dan Kecamatan Iwoimendaa 21.030,53 Ha ( 7,25%). Daya tampung yang cukup besar ini berasal dari tutupan lahan di ketiga wilayah ini yang didominasi oleh hutan primer dan hutan sekunder dengan topografi berada pada ketinggian.

Secara umum daya tampung dalam hal jasa pemeliharaan kualitas udara yang sangat rendah sampai rendah terdapat di semua kecamatan di Kabupaten Kolaka, namun Kecamatan Pomalaa yang paling rendah dalam memebrikan dukungan terhadap pemeliharaan jasa kualitas udara dengan luas lahan sebesar 6.751,35 Ha (2,33%).

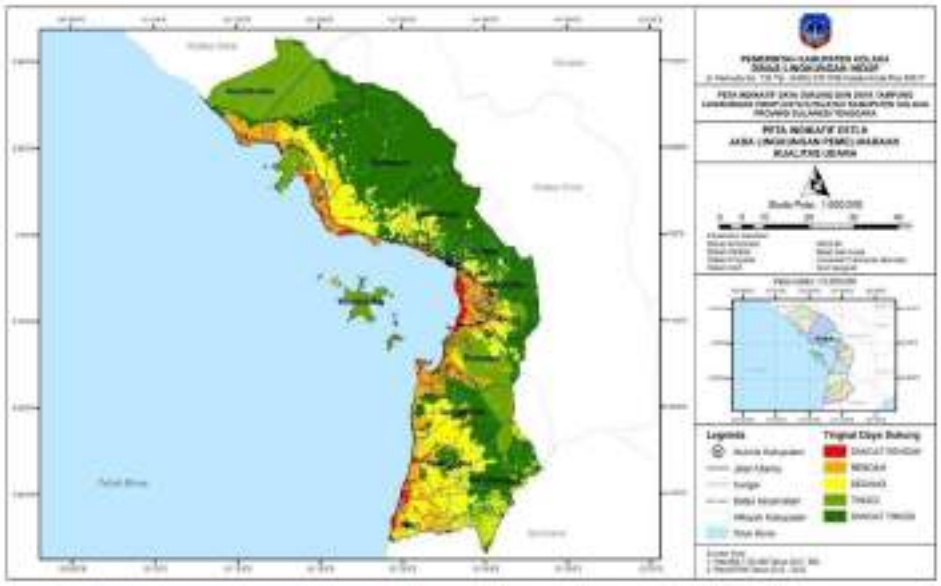

Gambar 2.17
Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara di Kab. Kolaka
(DDDTLH Kab. Kolaka, 2018)

- **Profil dan Distribusi Indeks Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air**

Siklus hidrologi adalah salah satu dari 6 siklus biogeokimia yang berlangsung di bumi. Siklus hidrologi adalah suatu siklus atau sirkulasi air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus menerus. Siklus hidrologi memegang peran penting bagi kelangsungan hidup organisme bumi. Melalui siklus ini, ketersediaan air di daratan bumi dapat tetap terjaga, mengingat teraturnya suhu lingkungan, cuaca, hujan, dan keseimbangan ekosistem bumi dapat tercipta karena proses siklus hidrologi ini.

Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan. Siklus hidrologi yang terjadi di biosfer dan litosfer, yaitu ekosistem air yang meliputi aliran permukaan, ekosistem air tawar, dan ekosistem air laut. Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air.

Secara umum lahan yang mampu memberikan dukungan terhadap pengaturan tata pengaturan tata aliran air di Kabupaten Kolaka terbagi menjadi lahan yang berpotensi sangat rendah sampai dengan tinggi. Lahan yang memiliki potensi yang tinggi terhadap pengaturan tata aliran air menempati lahan dengan luas sebesar 188.510,75 Ha (64,97%) tersebar di semua wilayah kecamatan di Kabupaten Kolaka. Namun wilayah kecamatan yang paling besar dukungannya te)rhadap pengaturan tata aliran air terdapat di Kecamatan Samaturu seluas 49.810,18 Ha (17.17%) dan Kecamatan Wolo seluas 24.936,01 Ha (8.59%). Sementara lahan yang sangat rendah dukungannya dalam pengaturan tata aliran air menempati lahan seluas 94.139, 60 Ha (32.44%) yang tersebar di semua wilayah kecamatan, namun wilayah yang sangat rendah dukungannya terhadap pengaturan tata aliran air terdapat di Kecamatan Watubangga 14.121,68 Ha (4.87%) dan Kecamatan Samaturu 16.155,28 Ha (5.57%. Kecamatan

Samaturu merupakan wilayah yang memiliki lahan yang berpotensi tinggi dalam mendukung tata aliran air tapi sekaligus memiliki lahan yang rendah dalam mendukung pengaturan tata aliran air, hal ini disebabkan karena Kecamatan Samaturu merupakan kecamatan dengan luas wilayah terbesar. Lahan yang rendah dukungannya dalam pengaturan tata aliran air terdapat di sepanjang pesisir pantai.

Tabel 2.16
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Tata Aliran Air menurut Kecamatan

| NO | KECAMATAN | SANGAT RENDAH - RENDAH | | SEDANG | | TINGGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ha | % | Ha | % | Ha | % |
| 1 | BAULA | 5037,6318 | 1,7361824 | - | - | 5665,563 | 1,952594 |
| 2 | IWOIMENDAA | 3473,88 | 1,197247 | - | - | 21040,82 | 7,251564 |
| 3 | KOLAKA | 3129,8738 | 1,0786878 | - | - | 9505,921 | 3,276145 |
| 4 | LATAMBAGA | 4343,2141 | 1,4968565 | 576,5366 | 0,198699 | 17497,55 | 6,030399 |
| 5 | POLINGGONA | 7213,5031 | 2,4860803 | 812,7703 | 0,280115 | 4375,248 | 1,507897 |
| 6 | POMALAA | 9519,2195 | 3,2807284 | 708,6579 | 0,244234 | 13145,3 | 4,53043 |
| 7 | SAMATURU | 16155,276 | 5,5677962 | - | - | 49810,18 | 17,16671 |
| 8 | TANGGETADA | 9467,1129 | 3,2627703 | 2339,343 | 0,806237 | 12634,88 | 4,354518 |
| 9 | TOARI | 7559,1793 | 2,6052151 | 1356,745 | 0,467592 | 1620,582 | 0,558521 |
| 10 | WATUBANGGA | 14121,679 | 4,8669321 | 1448,485 | 0,49921 | 16220,22 | 5,590179 |
| 11 | WOLO | 9668,3515 | 3,3321256 | 262,7898 | 0,090569 | 24936,01 | 8,59401 |
| 12 | WUNDULAKO | 4450,6751 | 1,5338922 | - | - | 12058,48 | 4,155865 |
| | | **94139,597** | **32,444514** | **7505,327** | **2,586655** | **188510,7** | **64,96883** |

Sumber: DDDTLH Kab. Kolaka, 2018

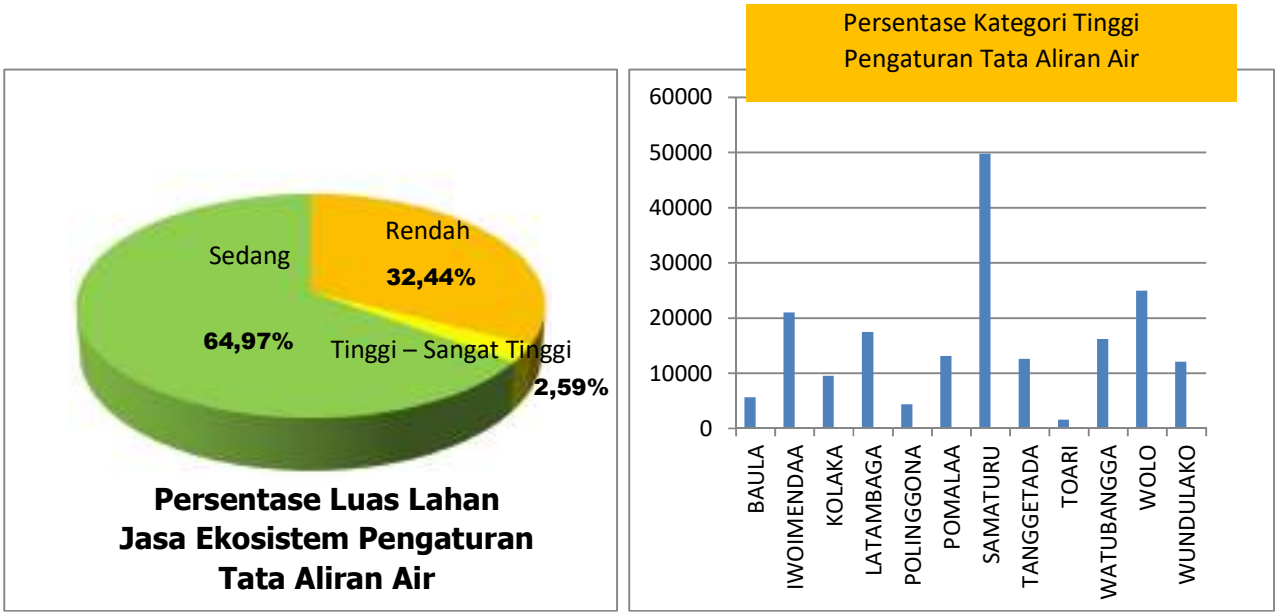


Gambar 2.18 Profil Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Tata Aliran Air menurut Kecamatan (DDDTLH Kab. Kolaka, 2018)

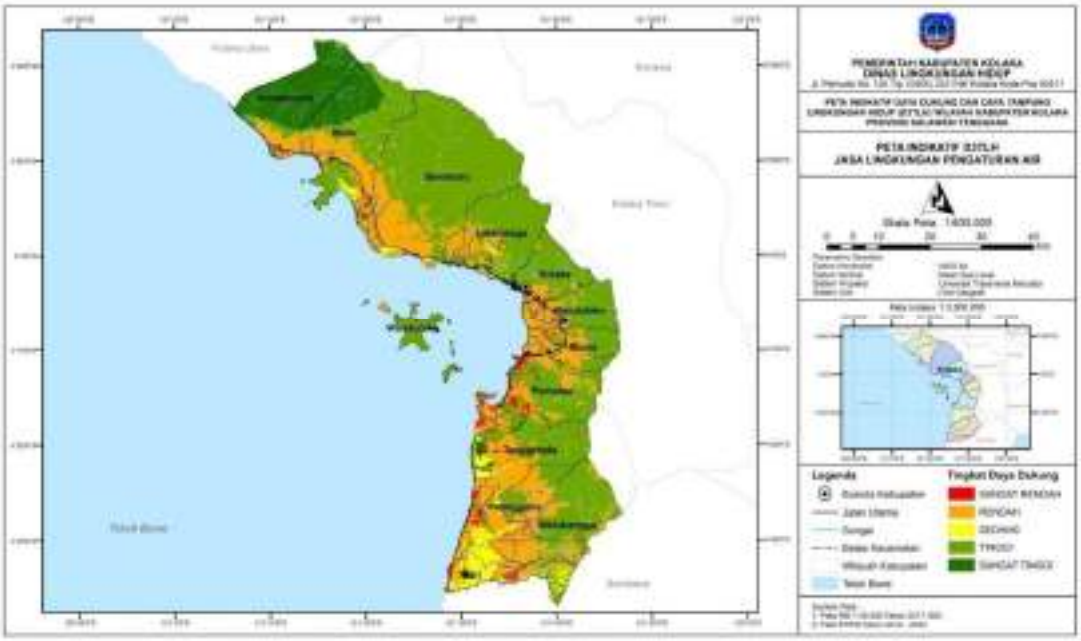

Gambar 2.19 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Tata Aliran Air (DDDTLH Kab. Kolaka, 2018)

**Profil dan Distribusi Indeks Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air**

Manusia memerlukan air bersih untuk menopang kehidupannya. Lingkungan hidup memiliki kemampuan untuk menyediakan jasa untuk memurnikan air sehingga air yang tercemar dapat dimurnikan untuk kemudian bisa dimanfaatkan kembali oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Ekosistem memiliki kemampuan untuk "membersihkan" pencemar melalui proses-proses kimia-fisik-biologi yang berlangsung secara alami dalam badan air. Hal ini dapat terjadi karena pengaruh organisme dan tanaman air yang hidup dan berkembang di ekosistem tersebut. Kemampuan pemurniah air secara alami (*self purification*) memerlukan waktu dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya beban pencemar dan teknik pemulihan alam khususnya aktivitas bakteri alam dalam merombak bahan organik, sehingga kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar meningkat.

Secara umum ekoregion Kabupaten Kolaka memiliki lahan yang dapat memberikan manfaat pemurniaan air maupun tidak. Luas lahan yang mampu memberikan manfaat yang tinggi untuk pemurniaan air seluas 132.436,1 Ha (45,64%) tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Kolaka. Namun wilayah yang memiliki kemampuan dengan luas wilayah paling besar terdapat di Kecamatan Samaturu seluas 49.730,96 Ha (17.14%). Sementara wilayah dengan dukungan lahan yang sangat rendah sampai rendah terdapat di Kecamatan Toari dengan luas lahan 6.625,47 Ha (2.28 %).

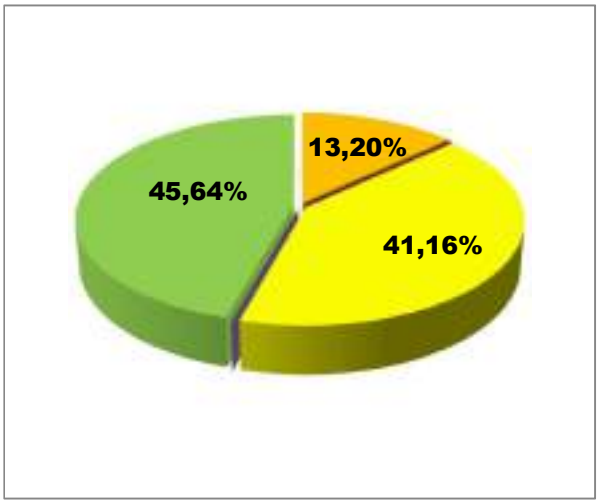


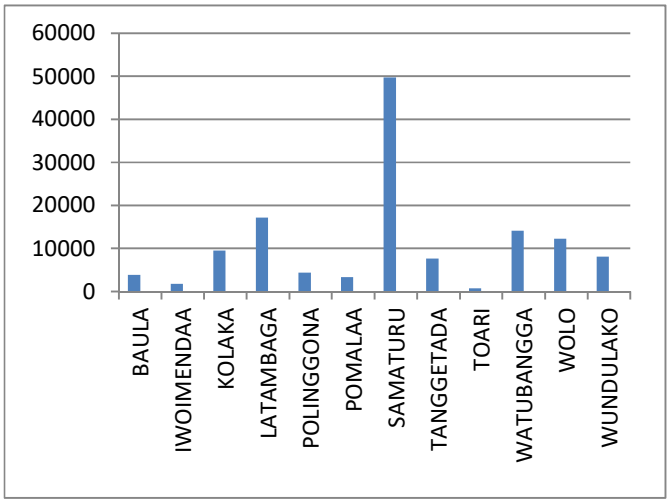


Gambar 2.20 Profil Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air menurut Kecamatan di Kab. Kolaka (DDDTLH Kab. Kolaka, 2018)

Tabel 2.17
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air Menurut Kecamatan

| KECAMATAN | SANGAT RENDAH - RENDAH | | SEDANG | | TINGGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ha | % | Ha | % | Ha | % |
| BAULA | 2972,429 | 1,024426 | 3845,179 | 1,325212 | 3885,588 | 1,339139 |
| IWOIMENDAA | 828,2303 | 0,285443 | 21949,27 | 7,564653 | 1737,204 | 0,598714 |
| KOLAKA | 1444,144 | 0,497713 | 1707,794 | 0,588579 | 9483,856 | 3,268541 |
| LATAMBAGA | 1246,125 | 0,429468 | 4052,981 | 1,39683 | 17118,19 | 5,899657 |
| POLINGGONA | 830,6231 | 0,286268 | 7261,71 | 2,502695 | 4309,189 | 1,48513 |
| POMALAA | 6418,615 | 2,212128 | 13599,21 | 4,686867 | 3355,35 | 1,156396 |
| SAMATURU | 4057,956 | 1,398545 | 12176,53 | 4,196552 | 49730,96 | 17,13941 |
| TANGGETADA | 2537,101 | 0,874393 | 14264,64 | 4,916203 | 7639,594 | 2,632929 |
| TOARI | 6625,475 | 2,283421 | 3213,298 | 1,107439 | 697,7324 | 0,240468 |
| WATUBANGGA | 4521,708 | 1,558373 | 13172,85 | 4,539925 | 14095,83 | 4,858022 |
| WOLO | 3447,412 | 1,188125 | 19183,75 | 6,611537 | 12235,99 | 4,217043 |
| WUNDULAKO | 3370,414 | 1,161588 | 4992,153 | 1,720509 | 8146,587 | 2,807661 |
| TOTAL | 38300,23 | 13,19989 | 119419,4 | 41,157 | 132436,1 | 45,64311 |

Sumber: DDDTLH Kab. Kolaka, 2018

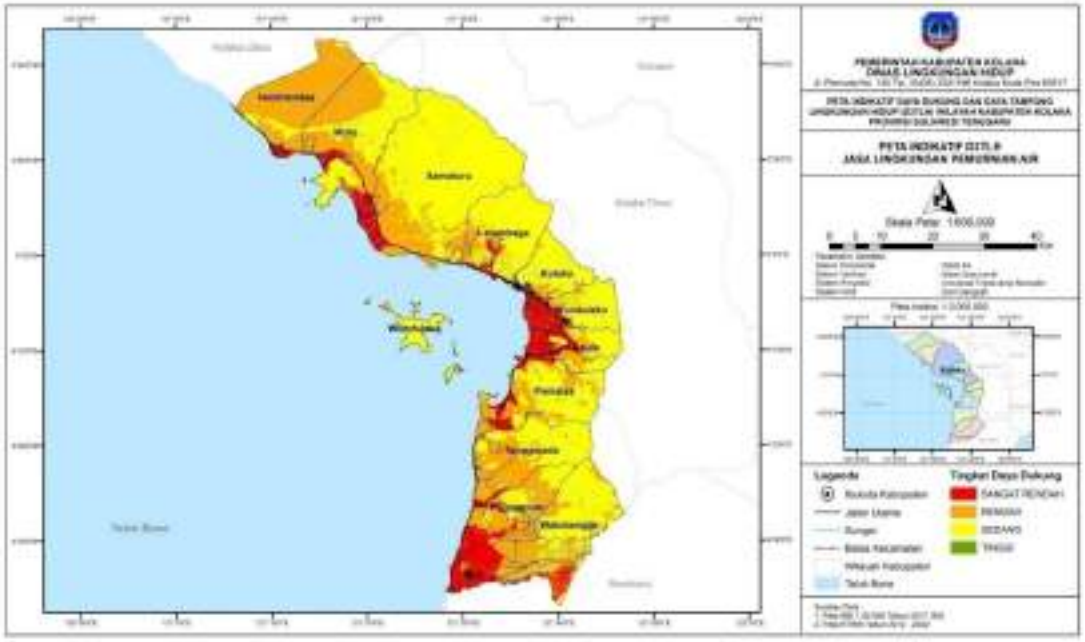


Gambar 2.21 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air Kab. Kolaka (DDDTLH, 2018)

- **Profil dan Distribusi Indeks Jasa Ekosistem Pengaturan Penyerbukan Alami**

Penyerbukan alami (*pollination*) adalah proses penyerbukan (berpindahnya serbuksari dari kepala sari ke kepala putik) yang secara khusus terjadi pada bunga yang sama atau antar bunga yang berbeda tetapi dalam satu tanaman atau di antara bunga pada klon tanaman yang sama. Ekosistem menyediakan jasa pengaturan penyerbukan alami khususnya lewat tersedianya habitat spesies yang dapat pembantu proses penyerbukan alami. Habitat alami seperti hutan dan areal bervegetasi umumnya menyediakan media spesies pengatur penyerbukan yang lebih melimpah. Penyerbukan alami dilakukan melalui bantuan spesies tertentu. Keberadaan spesies tersebut tergantung dari kondisi lingkungan.

Secara umum wilayah yang tergolong memiliki presentase besar lahan potensial atau paling tinggi terdapat di Kecamatan Samaturu dengan lahan seluas 49743,18 Ha (17.14%) dari total luas wilayah Kabupaten

Kolaka. Dari total luas wilayah Kabupaten Kolaka 65.11 % atau seluas 188.908,13 Ha lahan yang memiliki potensi tinggi dalam mendukung terjadinya penyerbukan secara alami. Hal ini diakibatkan karena lebih dari 50% wilayah Kabupaten Kolaka masih merupakan hutan primer dan hutan sekunder, terutama di wilayah bagian utara. Sementara luas lahan yang rendah dalam mendukung terjadinya penyerbukan alami sebesar 11.96 % atau menempati lahan seluas 908.13 Ha dan wilayah dengan dukungan terkecil terdapat di Kecamatan Pomalaa.

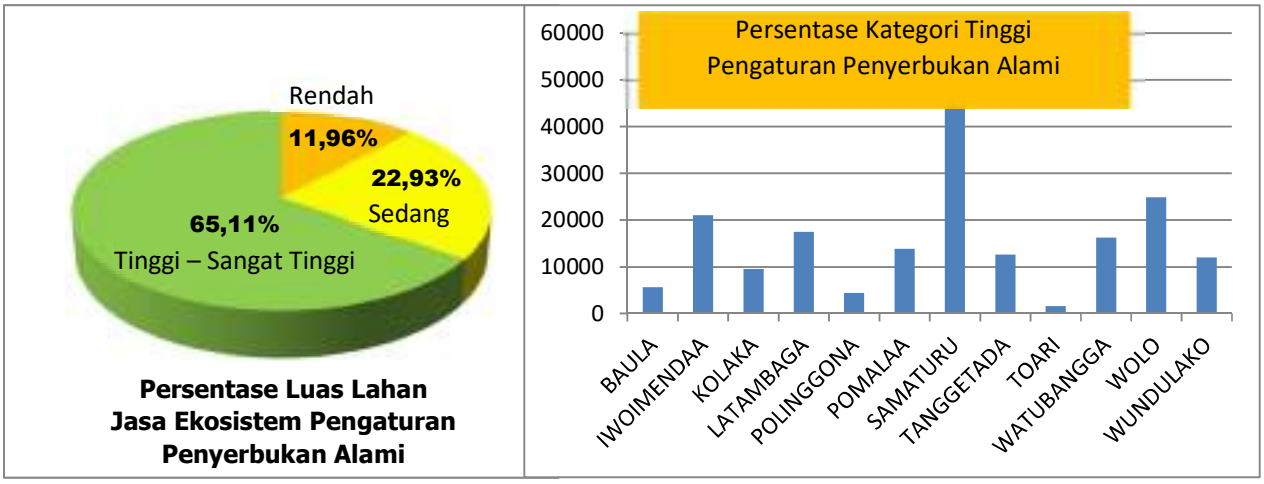


Gambar 2.22 Profil Jasa Ekosistem Pengaturan Penyerbukan Alami menurut Kecamatan di Kab. Kolaka (DDDTLH, 2018)

Tabel 2.18
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Penyerbukan Alami Menurut Kecamatan

| NO | KECAMATAN | RENDAH | | SEDANG | | TINGGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ha | % | Ha | % | Ha | % |
| 1 | BAULA | 2974,529 | 1,03 | 2063,721 | 0,71 | 5664,945 | 1,952 |
| 2 | IWOIMENDAA | 866,5596 | 0,30 | 2628,059 | 0,91 | 21020,08 | 7,24 |
| 3 | KOLAKA | 1453,299 | 0,50 | 1686,335 | 0,58 | 9496,16 | 3,27 |
| 4 | LATAMBAGA | 1257,17 | 0,43 | 3676,488 | 1,27 | 17483,64 | 6,03 |
| 5 | POLINGGONA | 832,942 | 0,29 | 7204,739 | 2,48 | 4363,84 | 1,50 |
| 6 | POMALAA | 7894,837 | 2,72 | 1669,186 | 0,58 | 13809,15 | 4,76 |
| 7 | SAMATURU | 4197,915 | 1,45 | 12024,35 | 4,14 | 49743,18 | 17,14 |
| 8 | TANGGETADA | 1011,865 | 0,35 | 10820,5 | 3,73 | 12608,97 | 4,35 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | TOARI | 4041,808 | 1,39 | 4888,13 | 1,68 | 1606,568 | 0,55 |
| 10 | WATUBANGGA | 2995,03 | 1,03 | 12592,01 | 4,34 | 16203,34 | 5,58 |
| 11 | WOLO | 3620,215 | 1,25 | 6373,057 | 2,20 | 24873,88 | 8,57 |
| 12 | WUNDULAKO | 3569,15 | 1,23 | 905,6438 | 0,31 | 12034,36 | 4,15 |
| | | **34715,32** | **11,96** | **66532,23** | **22,93** | **188908,1** | **65,11** |

Sumber: DDDTLH Kab. Kolaka, 2018

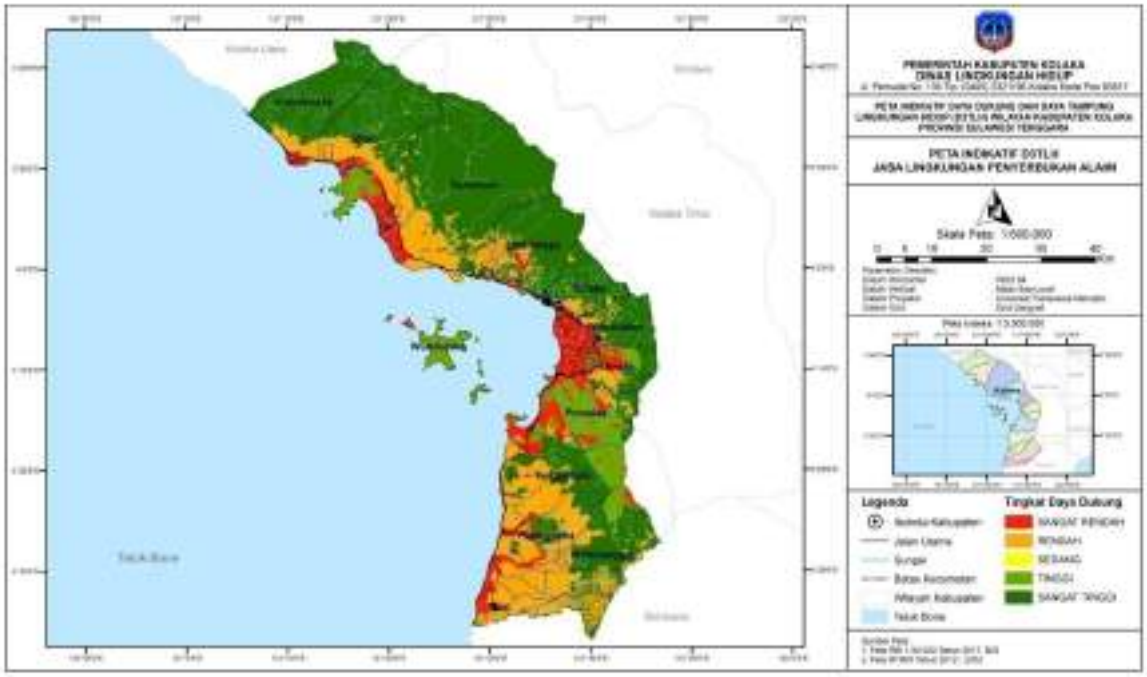


Gambar 2.23 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Penyerbukan Alami menurut Kecamatan di Kab. Kolaka (Sumber: DDDTLH Kab. Kolaka, 2018)

- **Profil dan Distribusi Indeks Jasa Ekosistem Pengaturan Pengedalian Hama dan Penyakit**

Pengendalian hama adalah pengaturan makhluk-makhluk atau organisme pengganggu yang disebut hama karena dianggap mengganggu kesehatan manusia,ekologi, atau ekonomi. Hama dan penyakit merupakan ancaman biotis yang dapat mengurangi hasil dan bahkan dapat menyebabkan gagal panen. Ekosistem secara alami menyediakan sistem pengendalian hama dan penyakit melalui keberadaan habitat spesies trigger dan pengendali hama dan penyakit.

Secara umum Kabupaten Kolaka memiliki lahan yang berpotensi rendah sampai dengan tinggi dalam pengaturan pengendalian hama dan penyakit. Lahan dengan potensi yang tinggi dalam pengaturan pengendalian hama dan penyakit terdapat di semua kecamatan di Kabupaten Kolaka dan menempati lahan seluas 188826,69 Ha (65.08%) dan wilayah yang paling luas dukungannya terhadap pengedalian hama dan penyakit terdapat di Kecamatan Samaturu seluas 49.743,18 Ha (17.14%). Namun disisi lain Kecamatan Samaturu juga memiliki wilayah yang rendah dukungannya dalam hal pengaturan pengendalaian hama dan penyakit seluas 15.103,78 Ha (5.17%) yang terdapat di wilayah pesisir dengan vegetasi berupa terna rawa gambut yang terletak pada dataran vulkanik kipas bermaterial piroklastik.

Tabel 2.19
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit Menurut Kecamatan

| NO | KECAMATAN | RENDAH | | SEDANG | | TINGGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ha | % | Ha | % | Ha | % |
| 1 | BAULA | 4854,536 | 1,67 | 183,7143 | 0,06 | 5664,945 | 1,952 |
| 2 | IWOIMENDAA | 748,7414 | 0,26 | 2745,958 | 0,95 | 21020 | 7,24 |
| 3 | KOLAKA | 3071,185 | 1,06 | 68,86037 | 0,02 | 9495,749 | 3,27 |
| 4 | LATAMBAGA | 4696,14 | 1,62 | 237,5183 | 0,08 | 17483,64 | 6,03 |
| 5 | POLINGGONA | 7076,995 | 2,44 | 960,686 | 0,33 | 4363,84 | 1,50 |
| 6 | POMALAA | 6908,999 | 2,38 | 2655,025 | 0,92 | 13809,15 | 4,76 |
| 7 | SAMATURU | 15013,78 | 5,17 | 1208,492 | 0,42 | 49743,18 | 17,14 |
| 8 | TANGGETADA | 9530,555 | 3,28 | 2301,808 | 0,79 | 12608,97 | 4,35 |
| 9 | TOARI | 7587,538 | 2,61 | 1374,836 | 0,47 | 1574,132 | 0,54 |
| 10 | WATUBANGGA | 13975,23 | 4,82 | 1611,811 | 0,56 | 16203,34 | 5,58 |
| 11 | WOLO | 6659,778 | 2,30 | 3335,083 | 1,15 | 24872,29 | 8,57 |
| 12 | WUNDULAKO | 4271,997 | 1,47 | 249,7105 | 0,09 | 11987,45 | 4,13 |
| | | **84395,47** | **29,09** | **16933,5** | **5,84** | **188826,7** | **65,08** |

Sumber: DDDTLH Kab. Kolaka, 2018

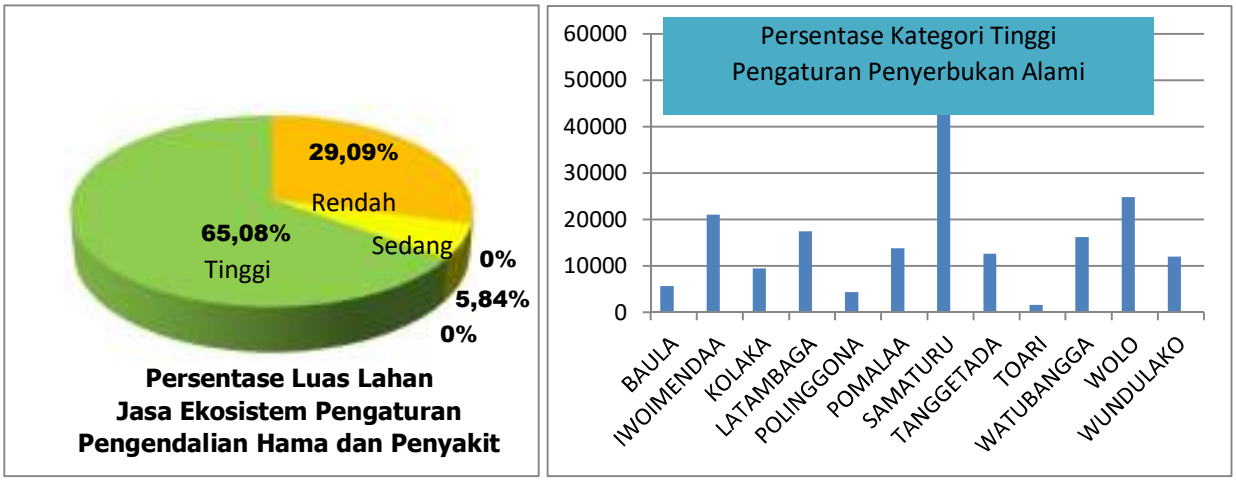


Gambar 2.24 Profil Jasa Ekosistem Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit menurut Kecamatan di Kab. Kolaka (DDDTLH Kab. Kolaka, 2018)

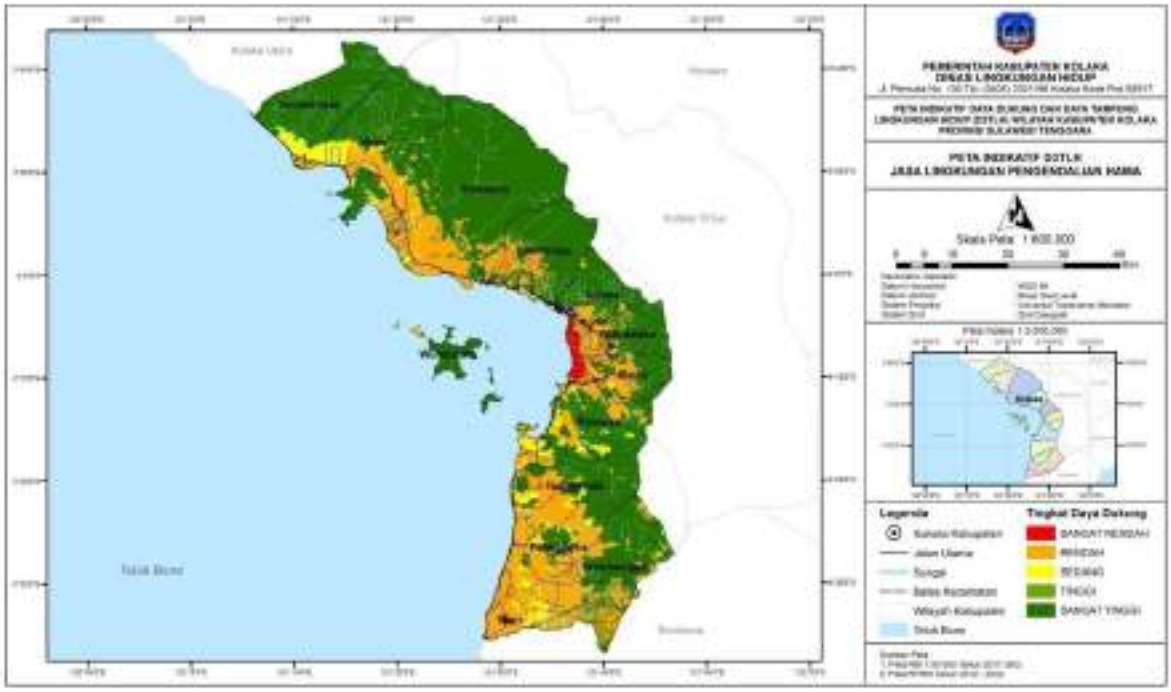

Gambar 2.25 Profil Jasa Ekosistem Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit menurut Kecamatan di Kab. Kolaka (DDDTLH Kab. Kolaka, 2018)

- **Profil dan Distribusi Indeks Jasa Ekosistem Pengaturan Perlindungan dan Pencegahan Terhadap Bencana**

Perlindungan dan pencegahan terhadap bencana adalah upaya yang dilakukan untuk menghalangi terjadinya bencana dan mencegah bahaya yang ditimbulkannya. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. Sementara defenisi dari bencana yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan orang-orang yang diakibatkan oleh faktor alam dan/atau faktor manusia sehingga menyebabkan munculnya korban jiwa, rusaknya lingkungan, kerugian harta benda serta efek psikologis. Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa alam. Bencana alam adalah konsekuensi untuk keterlibatan manusia pada pengrusakan alam yang ada.

Secara umum pengaturan dan perlindungan terhadap bencana di Kabupaten Kolaka terbagi 3 yaitu pencegahan terhadap bencana banjir, tanah longsor dan kebakaran.

**A. Bencana Banjir.**

Berdasarkan tabel di bawah lahan yang berpotensi sebagai pengatur untuk perlindungan terhadap bencana banjir terbagi atas kategori tinggi yang menempati lahan seluas 161.817 Ha (55,77%) yang tersebar di semua wilayah kecamatan, namun wilayah dengan dukungan lahan tertinggi terhadap perlindungan bencana banjir terdapat di Kecamatan Samaturu dengan luas lahan 49.792,52 Ha (17,16%). Tutupan lahan yang dominan di wilayah ini berupa hutan rimba dan berada pada perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik. Vegetasi yang rapat di wilayah ini menjadikan lahan di wilayah ini memiliki kemampuan yang tinggi dalam memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap bencana banjir. Namun disisi lain Kecamatan Samaturu juga memiliki lahan dengan dukungan terhadap pencehagan dan perlindungan terhadap banjir dengan luas 16.070 Ha (5.54%) yang berada pada dataran vulkanik kipas

bermaterial piroklastik dengan tutupan lahan berupa kebun dan sawah. Vegetasi yang terdapat pada lahan perkebunan dan persawahan dan berada pada daerah dataran rendah mengakibatkan lahan di wilayah ini memiliki kemampuan yang rendah dalam memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap bencana banjir.

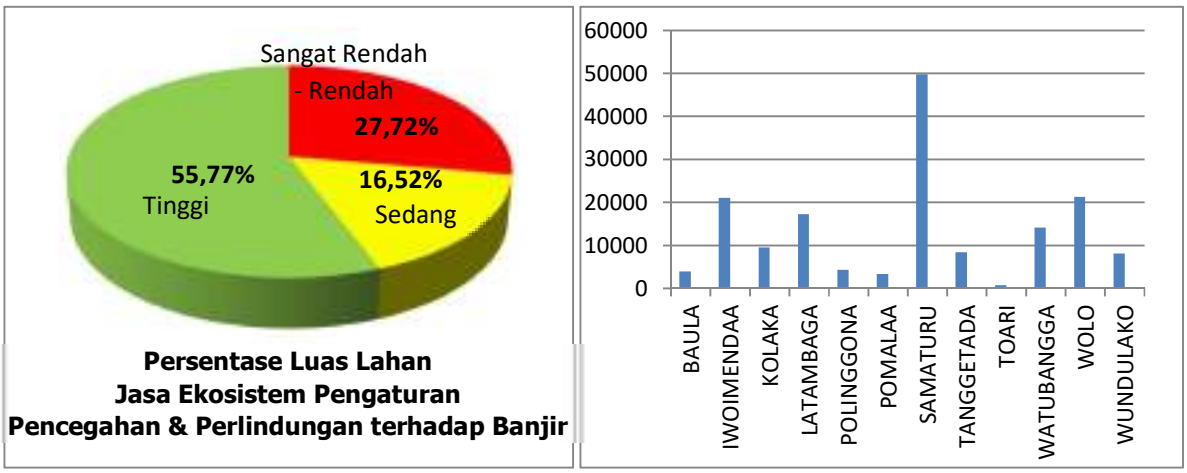


Gambar 2.26
Profil Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan & Perlindungan terhadap banjir Alami menurut Kecamatan di Kab. Kolaka

Tabel 2.20
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan & Perlindungan terhadap Banjir Menurut Kecamatan

| NO | KECAMATAN | SANGAT RENDAH - RENDAH | | SEDANG | | TINGGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ha | % | Ha | % | Ha | % |
| 1 | BAULA | 4913,63 | 1,69 | 3728,823 | 1,29 | 3885,384 | 1,339 |
| 2 | IWOIMENDAA | 3463,75 | 1,19 | 2620,271 | 0,90 | 21030,53 | 7,25 |
| 3 | KOLAKA | 2998,51 | 0,61 | 1698,47 | 0,59 | 9483,856 | 3,27 |
| 4 | LATAMBAGA | 4076,32 | 1,21 | 4503,185 | 1,55 | 17264,56 | 5,95 |
| 5 | POLINGGONA | 2777,97 | 0,96 | 7851,68 | 2,71 | 4367,927 | 1,51 |
| 6 | POMALAA | 9513,78 | 3,28 | 11523,82 | 3,97 | 3352,575 | 1,16 |
| 7 | SAMATURU | 16070,94 | 5,54 | 13093,01 | 4,51 | 49792,52 | 17,16 |
| 8 | TANGGETADA | 6066,49 | 1,94 | 14342,64 | 4,94 | 8406,392 | 2,90 |
| 9 | TOARI | 7535,81 | 2,60 | 5197,377 | 1,79 | 735,7376 | 0,25 |
| 10 | WATUBANGGA | 8799,03 | 3,03 | 14505,28 | 5,00 | 14097,83 | 4,86 |
| 11 | WOLO | 9787,81 | 3,37 | 10329,41 | 3,56 | 21255,89 | 7,33 |
| 12 | WUNDULAKO | 4414,54 | 1,52 | 4872,698 | 1,68 | 8143,778 | 2,81 |
| | | **80418,57** | **27,72** | **94266,66** | **32,49** | **161817** | **55,77** |

Sumber: DDDTLH Kab. Kolaka, 2018

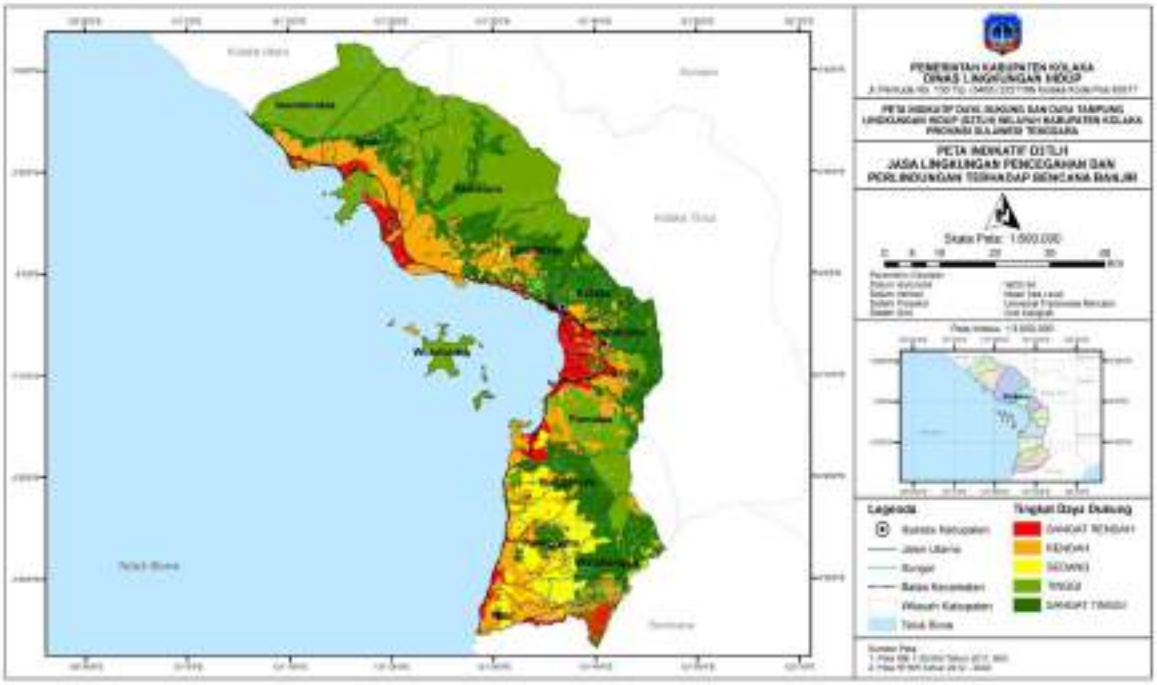


Gambar 2.27 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan & Perlindungan terhadap banjir Alami menurut Kecamatan di Kab. Kolaka (DDDTLH, 2018)

**B. Bencana Longsor**

Berdasarkan tabel di bawah menunjukkan bahwa luas lahan yang tinggi dukungannya terhadap perlindungan dan pencegahan terhadap bencana longsor seluas 165.007,2 Ha (56.87%) dan Kecamatan Samaturu merupakan wilayah dengan luas lahan terbesar yaitu 49.836,94 Ha (17,18%). Lahan ini terdapat pada wilayah dengan vegetasi hutan rimba yang terdapat pada ekoregion perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik. Ekoregion yang demikian memiliki kemampuan yang tinggi dalam perlindungan dan pencegahan terhadap bencana longsor. Selain itu vegetasi yang rapat (hutan rimba) menjadikan lahan ini memiliki kemampuan yang lebih baik dalam pencegahan dan perlindungan terhadap bencana longsor.

Sementara itu wilayah yang memiliki dukungan sangat rendah dalam perlindungan dan pencegahan terhadap bencana longsor menempati lahan seluas 30.881 Ha (10,64%) dari total luas wilayah Kabupaten Kolaka dan Kecamatan Pomalaa dengan luas 7.556,87 Ha (2.60%) merupakan

wilayah yang sangat rendah dalam mengatur pencegahan dan perlindungan terhadap bencana longsor. Sebagaimana terlihat pada gambar 2.28 Kecamatan Pomalaa dengan ekoregion berupa perbukitan vulkanik dengan material batuan beku dan kondisi vegetasi yang jarang mengakibatkan daya tampung jasa ekosistem pengaturan perlindungan dan pencegahan terhadap bencana longsor di wilayah ini sangat rendah.

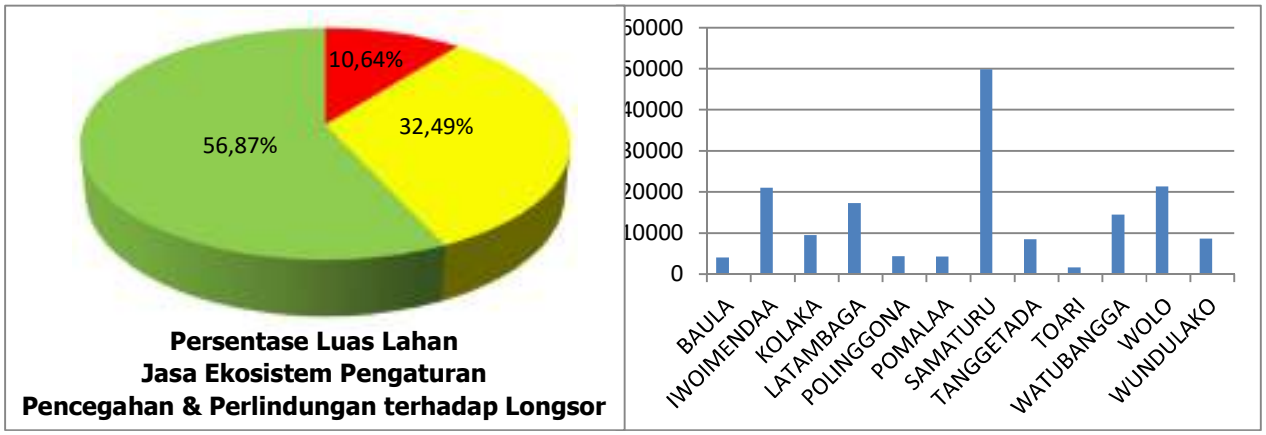


Gambar 2.28 Profil Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan & Perlindungan terhadap longsor di Kabupaten Kolaka

Tabel 2.21
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan & Perlindungan terhadap Longsor Menurut Kecamatan

| NO | KECAMATAN | SANGAT RENDAH – RENDAH | | SEDANG | | TINGGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ha | % | Ha | % | Ha | % |
| 1 | BAULA | 2893,41 | 1,00 | 3728,823 | 1,29 | 4080,962 | 1,406 |
| 2 | IWOIMENDAA | 853,61 | 0,29 | 2620,271 | 0,90 | 21040,82 | 7,25 |
| 3 | KOLAKA | 1444,31 | 0,33 | 1698,47 | 0,59 | 9493,012 | 3,27 |
| 4 | LATAMBAGA | 616,11 | 0,11 | 4503,185 | 1,55 | 17298 | 5,96 |
| 5 | POLINGGONA | 175,08 | 0,06 | 7851,68 | 2,71 | 4374,76 | 1,51 |
| 6 | POMALAA | 7556,87 | 2,60 | 11523,82 | 3,97 | 4292,485 | 1,48 |
| 7 | SAMATURU | 3035,50 | 1,05 | 13093,01 | 4,51 | 49836,94 | 17,18 |
| 8 | TANGGETADA | 1604,02 | 0,53 | 14342,64 | 4,94 | 8494,673 | 2,93 |
| 9 | TOARI | 3718,55 | 1,28 | 5197,377 | 1,79 | 1620,582 | 0,56 |
| 10 | WATUBANGGA | 2813,59 | 0,97 | 14505,28 | 5,00 | 14471,51 | 4,99 |
| 11 | WOLO | 3229,81 | 1,11 | 10329,41 | 3,56 | 21307,93 | 7,34 |
| 12 | WUNDULAKO | 2940,93 | 1,01 | 4872,698 | 1,68 | 8695,524 | 3,00 |
| | | **30881,81** | **10,64** | **94266,66** | **32,49** | **165007,2** | **56,87** |

Sumber: DDDTLH Kab. Kolaka, 2018

**C. Kebakaran**

Secara umum wilayah yang memiliki dukungan lingkungan yang tinggi terhadap perlindungan dan pencegahan terhadap bencana kebakaran di Kabupaten Kolaka menempati lahan seluas 141.735,66 Ha (48,85%). Kecamatan Samaturu merupakan wilayah yang memiliki potensi tinggi dalam pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap kebakaran seluas 50.096,66 Ha (17,27%) yang berada pada bentang lahan perbukitan struktural. Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) dengan tutupan vegetasi yang lebat dan berada pada topografi yang tinggi mengakibatkan lahan ini akan jauh dari aktifitas manusia sehingga potensi untuk terjadinya bencana kebakaran akan sangat kecil. Meskipun begitu upaya untuk menjaga kawasan ini agar tidak rusak harus terus dilakukan terutama dari bahaya penebangan hutan dan pembakaran hutan oleh masyarakat.

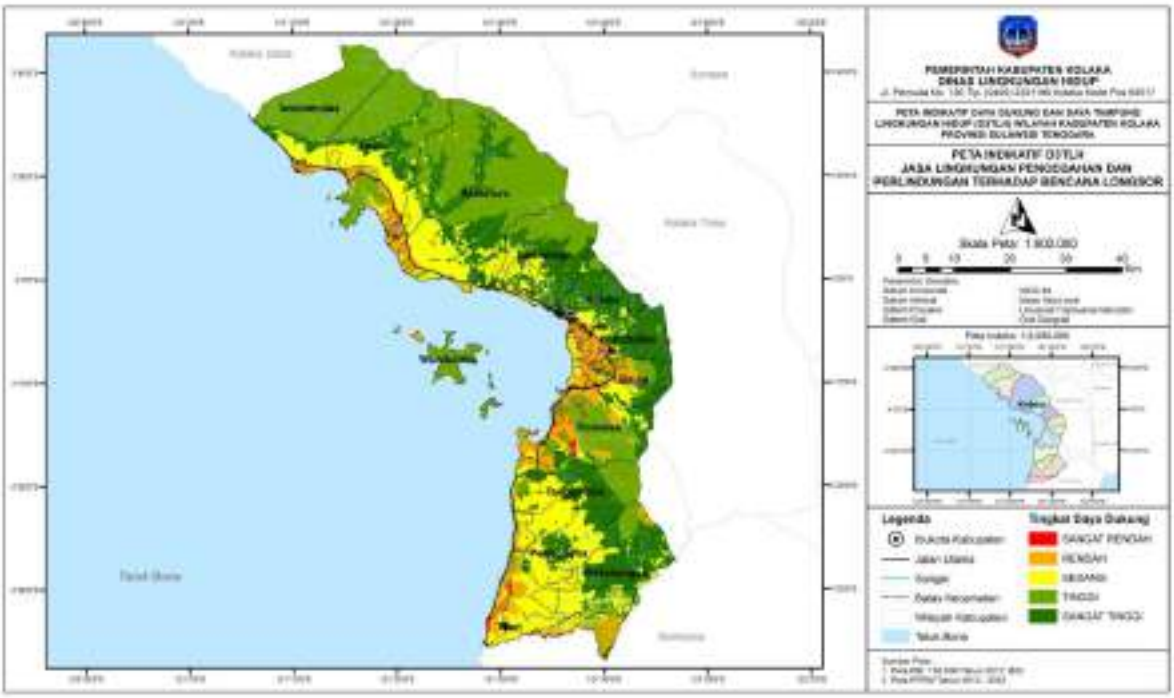


Gambar 2.29
Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan & Perlindungan terhadap kebakaran menurut Kecamatan di Kab. Kolaka (DDDTLH Kab. Kolaka, 2019)

Sementara itu pengaturan perlindungan dan pencegahan terhadap bencana kebakaran yang sangat rendah menempati lahan seluas 93.362,29 Ha (31,28%) dari total luas wilayah Kabupaten Kolaka dan tersebar disetiap kecamatan. Kecamatan Samaturu dan Kecamatan Watubangga yang terdapat pada daerah dataran rendah dengan pengunaan lahan yang didominasi oleh kegiatan perkebunan dan tegalan serta merupakan wilayah terbangun, menyebabkan kedua wilayah ini memiliki lahan yang sangat rendah dukungannya terhadap perlindungan dan pencagahan terhadap bahaya kebakaran.

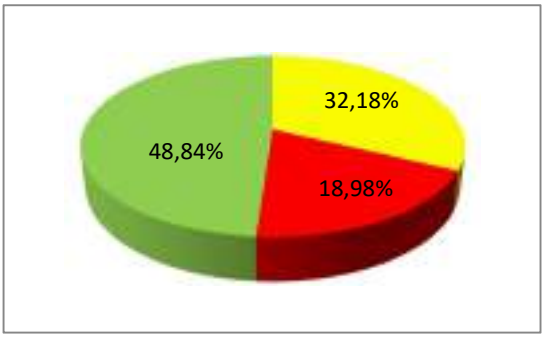


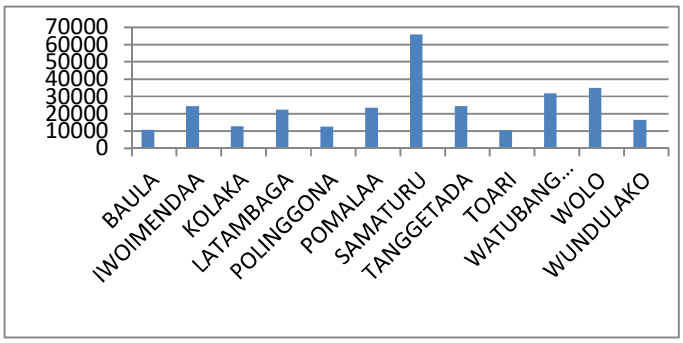


Gambar 2.30
Profil Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan & Perlindungan terhadap kebakaran menurut Kecamatan di Kab. Kolaka

Tabel 2.22
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan & Perlindungan terhadap Kebakaran

| NO | KECAMATAN | SANGAT RENDAH – RENDAH | | SEDANG | | TINGGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ha | % | Ha | % | Ha | % |
| 1 | BAULA | 4904,00 | 1,69 | 1913,19 | 0,66 | 3886,00 | 1,34 |
| 2 | IWOIMENDAA | 3436,42 | 1,18 | 14574,35 | 5,02 | 6503,93 | 2,24 |
| 3 | KOLAKA | 3051,85 | 0,83 | 90,93 | 0,03 | 9493,01 | 3,27 |
| 4 | LATAMBAGA | 4466,40 | 1,43 | 658,97 | 0,23 | 17291,93 | 5,96 |
| 5 | POLINGGONA | 7583,25 | 2,61 | 443,51 | 0,15 | 4374,76 | 1,51 |
| 6 | POMALAA | 8834,59 | 3,04 | 11124,19 | 3,83 | 3414,40 | 1,18 |
| 7 | SAMATURU | 15088,19 | 5,20 | 780,61 | 0,27 | 50096,66 | 17,27 |
| 8 | TANGGETADA | 10328,46 | 3,47 | 5493,82 | 1,89 | 8619,06 | 2,97 |
| 9 | TOARI | 8466,31 | 2,92 | 1319,69 | 0,45 | 750,51 | 0,26 |
| 10 | WATUBANGGA | 13883,25 | 4,78 | 3444,64 | 1,19 | 14462,49 | 4,98 |
| 11 | WOLO | 9473,90 | 3,27 | 10718,11 | 3,69 | 14675,15 | 5,06 |
| 12 | WUNDULAKO | 3845,67 | 1,33 | 4495,72 | 1,55 | 8167,77 | 2,81 |
| | | **93362,29** | **32,18** | **55057,72** | **18,98** | **141735,66** | **48,85** |

Sumber: DDDTLH Kab. Kolaka, 2018

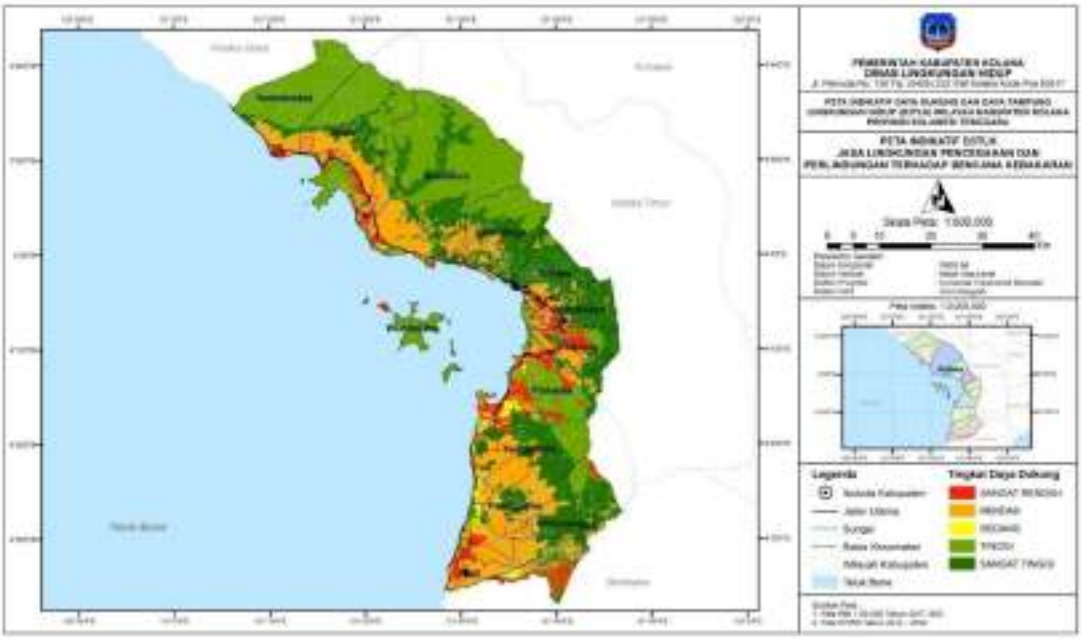

Gambar 2.31

Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan & Perlindungan terhadap kebakaran menurut Kecamatan di Kab. Kolaka (Sumber: DDDTLH Kab. Kolaka, 2018)

### c. Profil dan Distribusi Indeks Jasa Ekosistem Pendukung terhadap Keanekaragaman Hayati

Ekosistem menyediakan beragam sumber daya genetik yang melimpah dan bernilai ekonomis dan bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Sumberdaya genetik berhubungan erat dengan keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna, dimana keanekaragaman hayati yang tinggi akan diikuti dengan sumber daya genetik yang melimpah. Keanekaragaman hayati ditentukan oleh tipe ekosistem yaitu bentang lahan dan penutup lahan.

Lahan yang memiliki dukungan yang tinggi terhadap keanekaragaman hayati di Kabupaten Kolaka menempati lahan seluas 189.219,16 Ha (65,21%) dari total luas wilayah Kabupaten Kolaka. Lahan ini tersebar di setiap kecamatan, namun Kecamatan Samaturu memiliki lahan yang masuk dalam kategori tinggi seluas 49.810 Ha (17,17%). Kondisi wilayah ini yang didominasi oleh hutan rimba dengan bentang

lahan berada pada daerah perbukitan mengakibatkan wilayah ini berpotensi untuk berkembang biaknya berbagai macam flora dan fauna. Selain itu kondisi vegetasi diwilayah ini yang cukup lebat mengakibatkan tata aliran air masih berfungsi dengan baik, sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh baik terhadap keanekaragaman hayati yang ada di wilayah ini.

Sementara itu berdasarkan tabel di bawah Kecamatan Samuturu juga memiliki lahan yang dukungannnya terhadap keanekaragaman hayati masuk dalam kategori rendah yaitu lahan yang terdapat diwilayah terbangun. Lahan ini terdapat pada daerah dataran rendah dengan penggunaan lahan berupa tegalan/ ladang. Pengaturan jasa ekosistem tata aliran air di wilayah ini juga rendah sehingga secara tidak langsung keanekeragaman hayati juga akan rendah.

Tabel 2.23
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pendukung Keanekaragaman Hayati Menurut Kecamatan

| NO | KECAMATAN | RENDAH | | SEDANG | | TINGGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ha | % | Ha | % | Ha | % |
| 1 | BAULA | 4219,59 | 1,45 | 818,042 | 0,28 | 5665,563 | 1,953 |
| 2 | IWOIMENDAA | 223,9893 | 0,08 | 3249,891 | 1,12 | 21040,82 | 7,25 |
| 3 | KOLAKA | 2486,972 | 0,86 | 642,9019 | 0,22 | 9505,921 | 3,28 |
| 4 | LATAMBAGA | 3818,781 | 1,32 | 1100,97 | 0,38 | 17497,55 | 6,03 |
| 5 | POLINGGONA | 1479,888 | 0,51 | 6546,385 | 2,26 | 4375,248 | 1,51 |
| 6 | POMALAA | 5901,929 | 2,03 | 3617,29 | 1,25 | 13853,96 | 4,77 |
| 7 | SAMATURU | 13205,07 | 4,55 | 2950,211 | 1,02 | 49810,18 | 17,17 |
| 8 | TANGGETADA | 2877,523 | 0,99 | 8928,923 | 3,08 | 12634,89 | 4,35 |
| 9 | TOARI | 3724,88 | 1,28 | 5191,044 | 1,79 | 1620,582 | 0,56 |
| 10 | WATUBANGGA | 5656,048 | 1,95 | 9913,64 | 3,42 | 16220,7 | 5,59 |
| 11 | WOLO | 5641,898 | 1,94 | 4289,244 | 1,48 | 24936,01 | 8,59 |
| 12 | WUNDULAKO | 2474,019 | 0,85 | 1976,656 | 0,68 | 12058,48 | 4,16 |
| | | **51710,58** | **17,82** | **49225,2** | **16,97** | **189219,9** | **65,21** |

Sumber: DDDTLH Kab. Kolaka, 2018

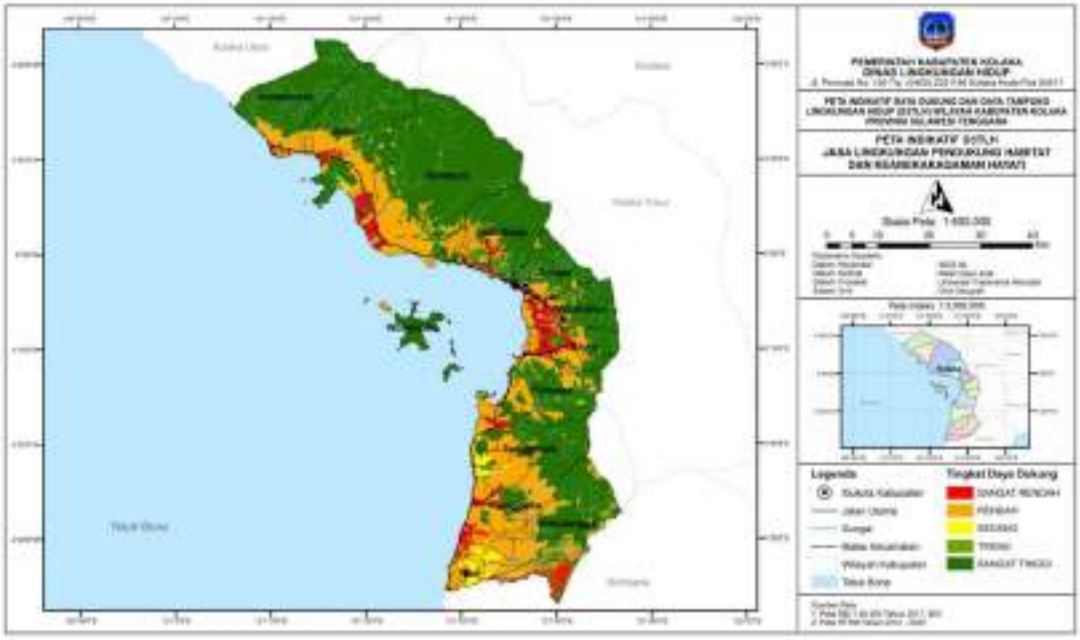

Gambar 2.32
Peta Jasa Ekosistem Pendukung Keanekaragaman Hayati di Kab. Kolaka (Sumber: DDDTLH Kab. Kolaka, 2018)

**d. Status dan daya Dukung Daya Tampung**

- **Status dan daya Dukung Daya Tampung Populasi Penduduk**

Pertambahan penduduk yang terus menerus akan menimbulkan beban bila tidak diimbangi dengan penduduk yang berkualitas. Pertambahan jumlah penduduk sering dihubungkan dengan berbagai masalah pemenuhan kebutuhan seperti khususnya kebutuhan primer.

Berdasarkan Peta populasi penduduk di Kabupaten Kolaka terlihat bahwa populasi penduduk yang terbesar berada di Kecamatan Kolaka dan Kecamatan Pomalaa.

- **Status dan daya Dukung Daya Tampung Status Pangan**

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Pangan sering disebut juga makanan yaitu bahan, biasanya dari berasal hewan atau

tumbuhan, dimakan oleh makhluk hidup untuk memberikan tenaga dan nutrisi.

Kondisi alam Kabupaten Kolaka yang merupakan wilayah dengan potensi lahan pertanian dan perkebunan yang cukup tinggi berpotensi menjadi penghasil bahan pangan.

Berdasarkan tabel di bawah terlihat bahwa secara umum daya dukung pangan Kabupaten Kolaka masih menunjukkan angka yang positif. Kebutuhan pangan Kabupaten Kolaka Tahun 2017 sebesar ± 177 milyar Kkal dan ketersedian energi pangan sebesar ± 392 milyar Kkal. Ini menunjukkan kondisi alam Kabupaten Kolaka masih mampu untuk mendukung kebutuhan pangan sebanyak 500.662 jiwa. Namun khusus untuk Kecamatan Kolaka daya tampung dan daya dukung pangannya telah terlampaui dan hanya mampu untuk mendukung pangan sebanyak 23.058 jiwa. Ini berarti penambahan populasi penduduk untuk Kecamatan Kolaka sudah tidak memungkinkan dan dengan demikian perkembangan permukiman wilayah perkotaan sebaiknya diarahkan keluar dari Kecamatan Kolaka.

Tabel 2.24
Status Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka

| Kecamatan | Ketersediaan Pangan (kkal) | Kebutuhan Pangan (kkal) | Selisih (kkal) | Ambang Batas Jiwa Jiwa | Status Ambang Batas Jiwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Baula | 16.265.557.664 | 9.575.519.500 | 6.690.038.164 | 20752 | 8550 |
| Iwoimendaa | 31.988.526.404 | 6.567.572.750 | 25.420.953.654 | 40760 | 32307 |
| Kolaka | 18.053.389.150 | 26.129.036.000 | - 8.075.646.850 | 23058 | -20478 |
| Latambaga | 29.021.632.391 | 23.886.220.500 | 5.135.411.891 | 37032 | 3838 |
| Polinggona | 18.086.011.285 | 5.808.719.500 | 12.277.291.785 | 23080 | 15252 |
| Pomalaa | 31.973.932.465 | 20.869.641.500 | 11.104.290.965 | 40758 | 6796 |
| Samaturu | 80.641.416.975 | 19.890.273.500 | 60.751.143.475 | 102820 | 77474 |
| Tanggetada | 32.723.431.061 | 12.458.691.000 | 20.264.740.061 | 41737 | 25733 |
| Toari | 15.274.220.088 | 8.439.201.500 | 6.835.018.588 | 19463 | 8709 |
| Watubangga | 42.764.508.692 | 13.131.221.750 | 29.633.286.942 | 54599 | 37529 |
| Wolo | 46.515.375.736 | 15.434.463.000 | 31.080.912.736 | 59294 | 38548 |
| Wundulako | 29.252.608.044 | 15.654.977.750 | 13.597.630.294 | 37309 | 14922 |
| **Grand Total** | **392.560.609.954** | **177.845.538.250** | **214.715.071.704** | **500.662** | **249180** |

Sumber: DDDTLH Kab. Kolaka, 2018

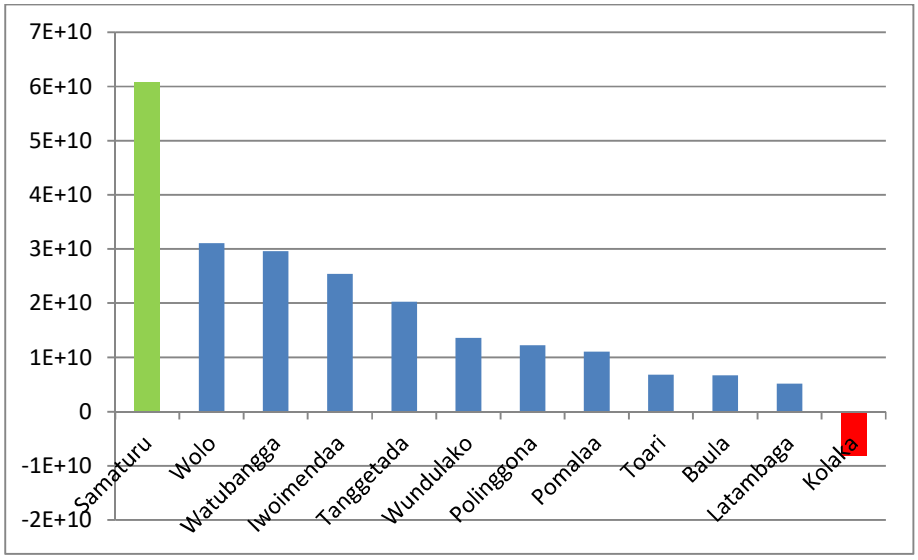


Gambar 2.33
Status Daya Dukung Pangan menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka (DDDTLH Kab. Kolaka, 2018)

- **Status dan daya Dukung Daya Tampung Air**

Berdasarkan tabel dan grafik di bawah terlihat bahwa daya dukung dan daya tampung Kabupaten Kolaka untuk pemenuhan kebutuhan air masih sangat mencukupi. Status Daya Dukung Air Kabupaten Kolaka belum melampaui, dengan ketersediaan air sebesar ± 5 milyar m3 secara alami mampu mendukung kebutuhan air sebesar ± 700 juta $m^3$ dan ini berarti ketersedian air di Kabupaten Kolaka masih surplus ± 4 milyar $m^3$ atau sebesar 96,84%.

Namun dari 12 kecamatan di Kabupaten Kolaka, Kecamatan Samaturu merupakan wilayah dengan ketersediaan air paling tinggi. Hal ini disebabkan karena kondisi alam Kecamatan Samaturu yang sebagaian besar masih merupakan hutan rimba dengan luas wilayah yang Kabupaten Kolaka khususnya Kecamatan Samaturu dperlu dijaga agar ketersediaan air di Kabupaten Kolaka bisa terjaga.

Tabel 2.25
Status Daya Dukung dan daya Tampung Air Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka
(Ketersediaan vs Kebutuhan)

| NO | KEC. | Penduduk (BPS) | STATUS DD AIR KABUPATEN KOLAKA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ketersediaan Air | Kebutuhan Air untuk Lahan | Kebutuan Air Untuk Domestik | Kebutuan Air Total | Selisih |
| | | (Jiwa) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) |
| 1 | Baula | 12.197 | 197.783.164 | 51.136.333 | 1.054.253 | 52.190.586 | 145.592.578 |
| 2 | Iwoimendaa | 8.452 | 436.313.708 | 6.964.427 | 723.082 | 7.687.508 | 428.626.200 |
| 3 | Kolaka | 43.536 | 243.594.282 | 29.625.275 | 2.876.774 | 32.502.050 | 211.092.233 |
| 4 | Latambaga | 33.192 | 409.350.652 | 27.531.474 | 2.629.843 | 30.161.317 | 379.189.335 |
| 5 | Polinggona | 7.828 | 211.364.587 | 69.605.561 | 639.533 | 70.245.094 | 141.119.494 |
| 6 | Pomalaa | 33.966 | 393.228.001 | 48.417.432 | 2.297.722 | 50.715.153 | 342.512.848 |
| 7 | Samaturu | 25.348 | 1.126.187.131 | 99.063.289 | 2.189.894 | 101.253.183 | 1.024.933.948 |
| 8 | Tanggetada | 16.033 | 399.385.401 | 74.674.982 | 1.371.686 | 76.046.669 | 323.338.732 |
| 9 | Toari | 10.751 | 178.826.275 | 50.236.073 | 929.146 | 51.165.218 | 127.661.057 |
| 10 | Watubangga | 17.068 | 523.461.029 | 107.670.193 | 1.445.731 | 109.115.924 | 414.345.105 |
| 11 | Wolo | 20.756 | 616.605.115 | 53.927.872 | 1.699.315 | 55.627.187 | 560.977.927 |
| 12 | Wundulako | 22.390 | 366.808.964 | 49.228.500 | 1.723.594 | 50.952.093 | 315.856.871 |
| **TOTAL** | | **251.517** | **5.102.908.310** | **668.081.410** | **19.580.573** | **687.661.982** | **4.415.246.328** |

Sumber: DDDTLH Kab. Kolaka, 2018

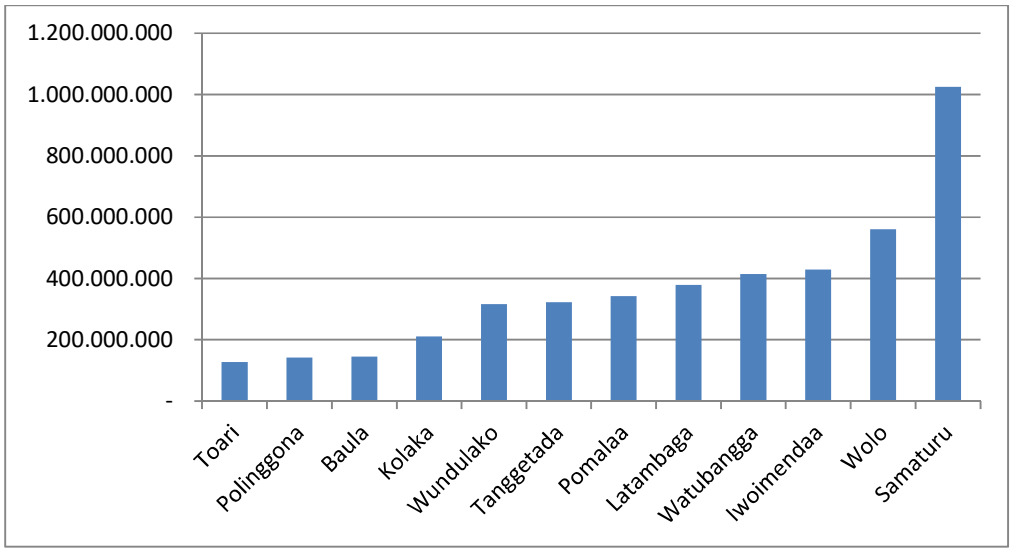


Gambar 2.34
Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka
(DDDTLH, 2018)

Tabel 2.26
Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Menurut Kecamatan (Belum terlampaui vs Terlampaui)

| NO | KECAMATAN | STATUS DD AIR KABUPATEN KOLAKA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ambang Batas | Status Ambang Batas | Belum Melampaui | | Melampaui | |
| | | (Jiwa) | (Jiwa) | (Ha) | % | (Ha) | % |
| 1 | Baula | 3.394.582 | 3.382.380 | 11.533,06 | 3,60% | 1.536,39 | 0,48% |
| 2 | Iwoimendaa | 9.938.744 | 9.930.291 | 25.625,23 | 7,99% | 248,35 | 0,08% |
| 3 | Kolaka | 4.952.945 | 4.909.409 | 13.894,53 | 4,33% | 850,77 | 0,27% |
| 4 | Latambaga | 8.838.319 | 8.805.125 | 24.663,42 | 7,69% | - | |
| 5 | Polinggona | 3.281.447 | 3.273.619 | 15.852,73 | 4,95% | - | |
| 6 | Pomalaa | 7.981.740 | 7.947.778 | 24.883,00 | 7,76% | 1.192,99 | 0,37% |
| 7 | Samaturu | 23.775.770 | 23.750.424 | 67.150,49 | 20,95% | 1.530,27 | 0,48% |
| 8 | Tanggetada | 7.516.448 | 7.500.444 | 26.815,66 | 8,37% | 426,84 | 0,13% |
| 9 | Toari | 2.976.625 | 2.965.871 | 12.032,39 | 3,75% | 170,08 | 0,05% |
| 10 | Watubangga | 9.624.753 | 9.607.683 | 34.848,70 | 10,87% | 595,05 | 0,19% |
| 11 | Wolo | 13.024.948 | 13.004.202 | 36.971,18 | 11,53% | 1.186,45 | 0,37% |
| 12 | Wundulako | 7.351.403 | 7.329.016 | 16.133,15 | 5,03% | 2.388,20 | 0,75% |
| **TOTAL** | | **102.657.724** | **102.406.242** | **310.403,55** | **96,84%** | **10.125,38** | **3,16%** |

Sumber: DDDTLH Kab. Kolaka, 2018

### 2.1.5 Demografi

Kependudukan merupakan salah satu aspek penting yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam perencanaan daerah. Penduduk sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan wilayah merupakan salah satu potensi internal yang cukup penting dalam pengembangan wilayah itu sendiri.

Jumlah penduduk Kabupaten Kolaka pada Tahun 2017 mencapai 251.520 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 129.212 jiwa dan perempuan mencapai 122.308 jiwa, dengan sex ratio mencapai 106 dimana. Lebih jelas kondisi kependudukan di Kabupaten Kolaka tahun 2017 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.27
Kondisi Kependudukan di Kabupaten Kolaka Tahun 2017

| Kecamatan | Luas Wilayah (km²) | Jumlah Penduduk | Sex Ratio | Kepadatan Penduduk (jiwa/km²) |
|---|---|---|---|---|
| **Iwoimendaa** | 288.03 | 8.452 | 104 | **29** |
| **Wolo** | 393.12 | 20.759 | 104 | **53** |
| **Samaturu** | 743.60 | 25.348 | 104 | **34** |
| **Latambaga** | 252.36 | 33.192 | 104 | **132** |
| **Kolaka** | 142.54 | 43.536 | 104 | **305** |
| **Wundulako** | 185.24 | 22.390 | 107 | **121** |
| **Baula** | 120.73 | 12.197 | 108 | **101** |
| **Pomalaa** | 264.51 | 33.966 | 105 | **128** |
| **Tanggetada** | 275.71 | 16.033 | 109 | **58** |
| **Polinggona** | 140.02 | 7.828 | 115 | **56** |
| **Watubangga** | 358.36 | 17.068 | 110 | **48** |
| **Toari** | 119.37 | 10.751 | 104 | **90** |
| **JUMLAH** | **3.283.59** | **251.520** | **106** | **77** |

*Sumber : BPS Kab. Kolaka, 2018*

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Kolaka 305 jiwa/km2, kemudian disusul Kecamatan Latambaga 132 jiwa/km2, Kecamatan Pomalaa 128 jiwa/km2. Sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Iwoimendaa 29 jiwa/km2, Kecamatan Samaturu 34 jiwa/km2, dan Kecamatan Watubangga 48 jiwa/km2. Hal ini menunjukkan persebaran penduduk masih belum merata antara kecamatan yang dipengaruhi faktor masih tingginya keinginan untuk bekerja diperkotaan.

Data mengenai rasio jenis kelamin (*sex ratio*) berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.

Kemudian data jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat menjelaskan sebaran usia produktif (15-64 tahun) dan non produktif (0-14 tahun dan >65 tahun) di suatu wilayah, sehingga dapat diketahui

ratio ketergantungan. Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk non-produktif dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif, jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Kolaka Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2017

| Kelompok Umur | JenisKelamin | | Jumlah Total |
|---|---|---|---|
| | Laki-Laki | Perempuan | |
| 0-4 | 14.312 | 13.587 | 27.899 |
| 5-9 | 14.008 | 13.497 | 27.505 |
| 10-14 | 12.752 | 12.020 | 24.772 |
| 15-19 | 11.739 | 10.742 | 22.481 |
| 20-24 | 10.713 | 10.338 | 21.051 |
| 25-29 | 10.855 | 10.325 | 21.180 |
| 30-34 | 10.600 | 10.425 | 21.025 |
| 35-39 | 9.407 | 9.264 | 18.671 |
| 40-44 | 8.929 | 8.493 | 17.422 |
| 45-49 | 7.582 | 6.773 | 14.355 |
| 50-54 | 5.655 | 5.222 | 10.877 |
| 55-59 | 4.562 | 4.204 | 8.766 |
| 60-64 | 3.283 | 2.812 | 6.095 |
| 65-69 | 2.247 | 1.966 | 4.213 |
| 70-74 | 1.298 | 1.271 | 2.569 |
| 75+ | .1.270 | 1.369 | 2.639 |
| JumlahTotal | 129.212 | 122.308 | 251.250 |

*Sumber:BPS,2018*

Berdasarkan data tersebut rasio ketergantungan di Kabupaten Kolaka sebesar 61,41% artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 62 orang yang belum produktif dan atau dianggap tidak produktif lagi.

Sektor pertanian dalam arti luas (Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan) masih menjadi primadona dalam penyediaan

lapangan kerja, hal ini terlihat dari jumlah penduduk tahun 2017 berdasarkan mata pencaharian sektor pertanian sebesar 37.820 jiwa, kemudian perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi jasa sebesar 17.040 jiwa (BPS, 2018).

## 2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek Kesejahteraan Masyarakat terdiri atas Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Fokus Kesejahteraan Sosial serta Fokus Seni Budaya dan Olah Raga:

### 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Salah satu metoda yang digunakan untuk mengetahui kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Kolaka adalah melalui pengukuran pencapaian indikator makro ekonomi atau Indikator Kinerja Utama (IKU). Komponen-komponen Indikator makro tersebut antara lain adalah pertumbuhan ekonomi, PDRB, tingkat inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Kemiskinan.

Tabel 2.29
Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2018

| Uraian | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| **Pertumbuhan Ekonomi** | 0,48 | 6,55 | 5,13 | 10,4 | 6,68 |
| **Inflasi (%)** | 7,4 | 1,68 | 2,45 | 2,96 | 2,55 |
| **IPM** | 70,20 | 70,47 | 71,12 | 71,46 | 72,07 |
| **TPT** | 4,20 | 6,53 | n/a | 2,97 | 2,18 |
| **Tingkat Kemiskinan (%)** | 15,03 | 14,68 | 15,05 | 13,78 | 12,51 |
| **Gini Rasio** | n/a | n/a | n/a | n/a | 0,34 |

Sumber: BPS, 2018, Bappeda diolah

#### A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kolaka selama kurun waktu 2014 s/d 2017 menurut harga berlaku mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp.15.291,37 Milyar, sedangkan di tahun 2017 meningkat

menjadi Rp.21.343,93 milyar. Sektor pertambangan masih merupakan sektor yang paling banyak memberikan dukungan PDRB Kabupaten Kolaka yaitu sebesar 48,85 %. Diikuti oleh sektor pertanian 13,15%. Kontribusi masing-masing sektor PDRB dapat dilihat dalam diagram berikut:

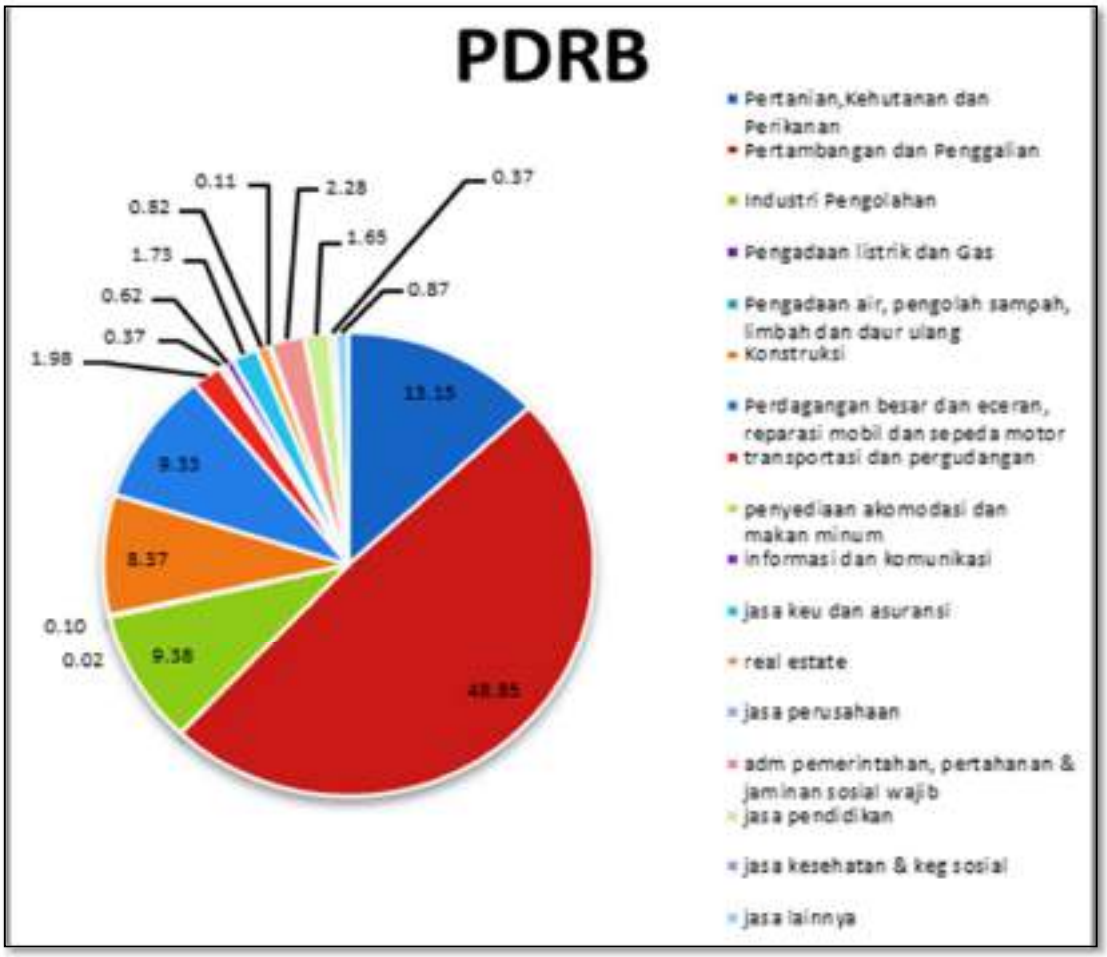


Gambar 2.35
Kontribusi masing-masing sektorPDRB (BPS, 2018)

Agar tidak terlalu tergantung dengan sektor pertambangan yang terbatas jangka waktunya, sektor pertanian harus ditingkatkan khususnya yang mengarah pada industrialisasi pertanian (agroindustri), karena jika mencermati dari serapan tenaga kerja, sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan yang menyerap tenaga kerja 41,99 % dari seluruh angkatan kerja, sedangkan sektor pertambangan kontribusi tenaga

kerjanya hanya sekitar 3,44 %. Secara keseluruhan perkembangan PDRB Kabupaten Kolaka mengalami peningkatan, baik secara total PDRB maupun di masing-masing sektor.

Tabel 2.30
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kolaka Tahun 2014 – 2018

| Uraian | Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| **Lapangan Usaha** | | | | | |
| **Pertanian, Kehutanan dan Perikanan** | 2.135,61 | 2.264,76 | 2.628,76 | 2.807,44 | 2.997,67 |
| **Pertambangan dan Penggalian** | 7.242,49 | 8.250,37 | 8.196,56 | 10.425,00 | 11.829,23 |
| **Industri Pengolahan** | 1.505,71 | 1.554,72 | 1.848,60 | 2.001,70 | 2.248,94 |
| **Pengadaan Listrik dan Gas** | 2,15 | 2,21 | 2,68 | 3,21 | 3,30 |
| **Pengadaan Air, Pengelolaan, Sampah, Limbah dan Daur Ulang** | 17,32 | 18,15 | 20,10 | 20,51 | 21,75 |
| **Konstruksi** | 1.139,30 | 1.373,61 | 1.699,63 | 1.785,75 | 1.727,13 |
| **Perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor** | 1.421,98 | 1.555,00 | 1.818,87 | 1.990,41 | 2.194,41 |
| **Transportasi dan Pergudangan** | 342,88 | 359,23 | 399,27 | 422,82 | 467,46 |
| **Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum** | 61,03 | 62,09 | 72,61 | 78,44 | 81,29 |
| **Informasi dan Komunikasi** | 100,62 | 105,08 | 119,76 | 132,57 | 143,66 |
| **Jasa Keuangan dan Asuransi** | 261,73 | 285,74 | 340,21 | 369,75 | 390,02 |
| **Real Estate** | 134,16 | 151,91 | 165,74 | 176,03 | 181,29 |
| **Jasa Perusahaan** | 16,67 | 19,00 | 21,79 | 23,67 | 25,69 |
| **Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial** | 427,87 | 437,96 | 461,45 | 487,11 | 537,39 |
| **Jasa Pendidikan** | 271,03 | 298,67 | 328,75 | 351,58 | 380,46 |
| **Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial** | 63,27 | 70,26 | 75,46 | 79,57 | 86,12 |
| **Jasa Lainnya** | 147,55 | 162,95 | 177,60 | 186,39 | 198,34 |
| **Total PDRB ADHB** | **15.291,37** | **16.971,72** | **18.377,83** | **21.343,93** | **23.759,23** |

Sumber Data: BPS Kabupaten Kolaka,2019

Tabel 2.31
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan menurut lapangan usaha Kabupaten Kolaka Tahun 2014 – 2018

| Uraian | Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| **Lapangan Usaha** | | | | | |
| **Pertanian, Kehutanan dan Perikanan** | 1.775,29 | 1.796,10 | 2.031,51 | 2.090,75 | 2.228,99 |
| **Pertambangan dan Penggalian** | 6.639,38 | 7.207,72 | 7.068,69 | 8.364,40 | 8.931,68 |
| **Industri Pengolahan** | 1.334,74 | 1.370,93 | 1.551,86 | 1.613,22 | 1.747,75 |
| **Pengadaan Listrik dan Gas** | 2,67 | 2,75 | 3,01 | 3,19 | 3,23 |
| **Pengadaan Air, Pengelolaan, Sampah, Limbah dan Daur Ulang** | 14,59 | 14,83 | 15,66 | 15,68 | 16,57 |
| **Konstruksi** | 980,49 | 1.113,20 | 1.286,13 | 1.321,25 | 1.401,75 |
| **Perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor** | 1.241,16 | 1.301,55 | 1.470,48 | 1.532,21 | 1.628,12 |
| **Transportasi dan Pergudangan** | 320,32 | 330,70 | 358,40 | 371,38 | 401,75 |
| **Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum** | 52,51 | 50,81 | 55,35 | 57,89 | 61,71 |
| **Informasi dan Komunikasi** | 104,17 | 109,80 | 121,52 | 131,77 | 142,57 |
| **Jasa Keuangan dan Asuransi** | 209,64 | 219,85 | 255,79 | 267,08 | 272,41 |
| **Real Estate** | 119,98 | 131,16 | 132,76 | 137,58 | 140,62 |
| **Jasa Perusahaan** | 14,72 | 15,79 | 17,45 | 18,44 | 19,39 |
| **Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial** | 345,17 | 353,38 | 362,44 | 374,97 | 394,95 |
| **Jasa Pendidikan** | 242,42 | 257,16 | 272,89 | 281,09 | 299,60 |
| **Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial** | 56,56 | 60,21 | 63,98 | 66,10 | 69,97 |
| **Jasa Lainnya** | 133,40 | 140,95 | 151,48 | 155,50 | 163,92 |
| **Total PDRB ADHK** | **13.587,20** | **14.476,90** | **15.219,39** | **16.802,49** | **17.925,11** |

Sumber Data: BPS Kabupaten Kolaka, 2019

Tabel 2.32
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas dasar harga berlaku dan Harga Konstan kabupaten Kolaka Tahun 2014 – 2018

| URAIAN | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HB (%) | HK (%) | HB (%) | HK (%) | HB (%) | HK (%) | HB (%) | HK (%) | HB (%) | HK (%) |
| Pertanian,Kehutanan, dan Perikanan | 13,97 | 13,07 | 13,34 | 12,41 | 14,3 | 13,35 | 13,15 | 12,44 | 12,62 | 12,44 |
| Pertambangan dan Penggalian | 47,36 | 48,86 | 48,61 | 49,79 | 44,6 | 46,45 | 48,85 | 49,78 | 49,79 | 49,78 |
| Industri Pengolahan | 9,85 | 9,82 | 9,16 | 9,47 | 10,06 | 10,22 | 9,38 | 9,60 | 9,47 | 9,60 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Konstruksi | 7,45 | 7,22 | 8,09 | 7,69 | 9,25 | 8,45 | 8,37 | 7,86 | 8,30 | 7,86 |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 9,30 | 9,13 | 9,16 | 8,99 | 9,90 | 9,66 | 9,33 | 9,12 | 9,24 | 9,12 |
| Transportasi dan Pergudangan | 2,24 | 2,36 | 2,12 | 2,28 | 2,17 | 2,35 | 1,98 | 2,21 | 1,97 | 2,21 |
| Penyediaan Akomodasi dan makan minum | 0,40 | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,40 | 0,36 | 0,37 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Informasi dan Komunikasi | 0,66 | 0,77 | 0,62 | 0,76 | 0,65 | 0,80 | 0,62 | 0,78 | 0,60 | 0,78 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,71 | 1,54 | 1,68 | 1,52 | 1,85 | 1,68 | 1,73 | 1,59 | 1,64 | 1,59 |
| Real Estate | 0,88 | 0,88 | 0,90 | 0,91 | 0,90 | 0,87 | 0,82 | 0,82 | 0,76 | 0,82 |
| Jasa Perusahaan | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Administrasi Pemerintahan | 2,80 | 2,54 | 2,58 | 2,44 | 2,58 | 2,38 | 2,28 | 2,23 | 2,26 | 2,23 |
| Pertahanan dan Jaminan jasa pendidikan | 1,77 | 1,78 | 1,76 | 1,78 | 1,76 | 1,79 | 1,65 | 1,67 | 1,60 | 1,67 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan social | 0,41 | 0,42 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | 0,42 | 0,37 | 0,39 | 0,36 | 0,39 |
| Jasa lainnya | 0,96 | 0,98 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 1,00 | 0,87 | 0,93 | 0,83 | 0,93 |
| **PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: BPS Kabupaten Kolaka, 2019

## B. INFLASI

Inflasi adalah proses meningkatnya harga dari sekelompok barang dan jasa secara terus menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi dapat disebabkan antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran suplai dan distribusi barang. Jika besarannya tidak terkendali, inflasi akan mempengaruhi kondisi perekenomian masyarakat.

Laju inflasi Kabupaten Kolaka menggunakan pendekatan laju inflasi Kota Kendari, selengkapnya ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 2.33
Nilai Inflasi Rata-Rata Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2017

| Uraian | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Inflasi (%) | 7,40 | 1,69 | 3,07 | 2,96 |

*Sumber: BPS, 2018*

Perkembangan inflasi di Kabupaten Kolaka dipengaruhi oleh harga-harga komoditas yang terjadi ditingkat lokal Sulawesi Tenggara. Pada kurun waktu tahun 2014 - 2015, laju inflasi menunjukkan tren penurunan, sedangkan pada tahun 2016 - 2017 kembali naik. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh naiknya sejumlah harga-harga komoditas seperti cabai, bawang merah, bawang putih dan kebutuhan sandang lainnya.

## C. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kolaka mengalami peningkatan dari 70,20 pada tahun 2014 menjadi 71,46 pada tahun 2018. Kenaikan IPM inimenunjukan tingkat status pembangunan manusia di Kolaka telah berhasil dan terus meningkat yang mencerminkan meningkatnya kualitas sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Kolaka. Capaian IPM di Kabupaten Kolaka tahun 2018 secara umum masih diatas IPM Sulawesi Tenggara tahun Tahun 2018 sebesar 69,86.

Tabel 2.34
Perkembangan IPM KabupatenKolaka Tahun 2014-2018

| Indikator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Angka Harapan Hidup | 69,80 | 69,90 | 69,97 | 70,05 | 71,46 |
| Harapan Lama Sekolah | 11,89 | 11,91 | 12,37 | 12,38 | 12.98 |
| Rata-rata Lama Sekolah | 8,17 | 8,18 | 8,18 | 8,31 | 8.31 |
| IPM | 70,20 | 70,47 | 71,12 | 71,46 | 72,07 |
| Angka Garis Kemiskinan | 277.220 | 292.370 | 320.897 | 327.329 | 349.388 |
| Tingkat Kemiskinan | 15,03 | 14,68 | 15,05 | 13,78 | 12,51 |
| Indeks Daya Beli (Rp)/Org | 11.699 | 11.942 | 12.072 | 12.243 | 12.243 |
| Peringkat Provinsi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

*Sumber: BPS, 2018, Bappeda diolah*

Dari 7 (tujuh) indikator IPM di 5 (lima) tahun terakhir kabupaten Kolaka (2014 – 2018) menunjukan adanya peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ketahun, dimana indikator angka harapan hidup di Kabupaten Kolaka tahun 2014 sebesaar 69,80 % dan ditahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 71,46 %, kemudian untuk indikator harapan lama sekolah tahun 2014 sebesar 11,89 % dan ditahun 2018 terjadi peningktan sebesar 12,98 %, kemudian indicator rata-rata lama sekolah ditahun 2014 sebesr 8,17 % dan di tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 8,31 %, untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditahun 2014 sebesar70,20 daan ditahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 72,07 %, untuk angka garis kemiskinan ditahun 2014 sebesar Rp. 2.77.220; dan ditahun 2018 terjadi peningkatan garis kemiskinan ditahun 2018 sebesar Rp. 3.49.388; untuk tingkat kemiskinan terjadi penurunan yang cukup baik dimana tahun 2014 sebesar 15,03 % dan ditahun 2018 sebesar 12,51 %, Untuk indeks daya beli juga terjadi peningkatan yang lebih baik dimana pada tahun 2014 sebesar Rp. 11.699 perorang dan ditahun 2018 sebesar Rp. 12.243 perorang.

Dengan Sembilan Prioritas Pembangunan yang dilaksanakan melalui pendekatan Strategi Mekongga Sejahtera Bekerja dan Berkarya (SMS Berjaya) Jilid II diharapkan ditahun mendatang IPM Kabupaten Kolaka akan terus mengalami peningkatan secara signifikan sehingga SDM Kolaka dapat dan mampu berperan dalam pembangunan daerah di berbagai bidang baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Dari tabel di atas dapat ketahui bahwa masih banyak indikator IPM yang perlu terus ditingkatkan, Pemerintah Daerah bertekad untuk tetap mendorong peningkatan IPM sebagai prioritas utama dalam RPJMD tahun 2019 - 2024.

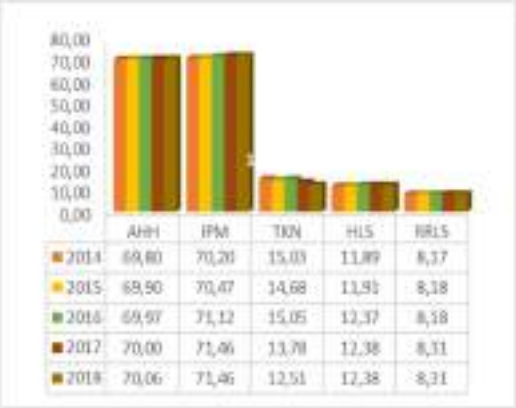

*sumber BPS, 2018, Bappeda diolah*

Gambar 2.36
Capaian Perkembangan IPM Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2018

## D. Tingkat Kemiskinan

Membaiknya kinerja perekonomian daerah yang didukung dengan pelaksanaan program-program pembangunan daerah yang terintegrasi dengan upaya penanggulangan kemiskinan mampu mendorong menurunnya tingkat kemiskinan Kabupaten Kolaka dari 15.03 % pada tahun 2014 menjadi 12.51 % pada tahun 2018. Capaian ini telah melampaui target RPJMD yang ditetapkan yaitu 13.02%. Hasil capaian ini sejalan dengan target jangka menengah Pemerintah Kabupaten Kolaka yang bertekad untuk menurunkan tingkat kemiskinan Kabupaten Kolaka menjadi kurang dari 10%.

Salah satu bagian dalam upaya penurunan kemiskinan dalam lima tahun terakhir adalah adalah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pada tahun 2018, realisasi penanganan PMKS di Kabupaten Kolaka telah mencapai 46.44%. Walaupun capaian ini masih di bawah target RPJMD, namun angka ini menunjukkan adanya peningkatan dari capaian tahun sebelumnya yang hanya mencapai 31%. Peningkatan ini adalah hasil dari intervensi berbagai program kegiatan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terdapat di daerah. Dari pencapaian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap

tumbuhnya kemandirian para penyandang untuk keluar dari kategori PMKS.

Tabel 2.35
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2018

| Indikator | Volume Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Prosentase Tingkat Kemiskinan | 15,03 | 14,68 | 15,05 | 13,78 | 12,51 |
| Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan | 25,33 | 26,26 | 12,41 | 23,39 | 16,21 |
| Prosentase PMKS Lansia yang memperoleh Manfaat Program | 9,61 | 36,66 | 26,47 | 23,39 | 30,23 |

Sumber : Dinas Sosial, 2018

Tabel 2.36
Penanganan PMKS Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2018

| No. | Realisasi Bantuan (Kemiskinan) | Penduduk Miskin (Jiwa) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) | 35.419 | 27.210 | 28.560 | 26.640 | 24.734 |
| 2 | Lanjut Usia (Lansia) | 500 | 500 | 440 | 137 | 1.421 |
| 3 | Komunitas Adat Terpencil (KAT) | - | - | 59 | 59 | 59 |
| 4 | Anak Terlantar / Anak Jalanan (ANJAL) | 80 | 85 | 37 | 29 | 29 |
| 5 | Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) | 78 | 90 | 41 | 30 | 20 |
| 6 | Distabilitas (cacat fisik) | 34 | 34 | 17 | 51 | 49 |
| 7 | Korban Tindak Kekerasan (KTK) | - | - | - | 11 | - |
| 8 | Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) | - | - | - | 60 | - |

Sumber : Dinas Sosial Kab. Kolaka, 2018

Faktor lain yang berpengaruh langsung terhadap tingkat kemiskinan adalah sektor ketenagakerjaan. Tersedianya peluang kerja di suatu daerah dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat yang tentunya mampu memberikan dampak positif pada penurunan angka kemiskinan. Sejak tahun 2015 sampai 2018 jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan pada berbagai lapangan pekerjaan di Kabupaten Kolaka telah mencapai 6.661 orang. Hal ini menunjukkan adanya kinerja yang baik dimana telah terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5.016 orang.

Peningkatan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan tersebut diatas juga nampak pada adanya peningkatan capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada tahun 2017, angka TPAK Kabupaten Kolaka tercatat sebesar 74,9 % yang kemudian meningkat menjadi 75.6 % pada tahun 2018.

### 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Pelaksananaan pembangunan daerah untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat yang terintegrasi dalam 9 prioritas Pembangunan daerah meliputi pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Capaian indikator pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 2.2.2.1 Pendidikan

**A. Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pedidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan, khususnya bagi penduduk usia sekolah, semakin tinggi APS semakin besar penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Angka APS di Kabupaten Kolaka sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.37
Perkembangan Angka Partisipasi Siswa Kab. Kolaka Tahun 2014–2018

| Uraian | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| APS SD/MI | 98,45 | 99,72 | 99,72 | 99,83 | 99,79 |
| APS SLTP/MTs | 91, 73 | 90,56 | 96,72 | 94,49 | 96,81 |
| APS SMA/MA | 62,63 | 59,56 | 73,30 | 62,22 | n/a |

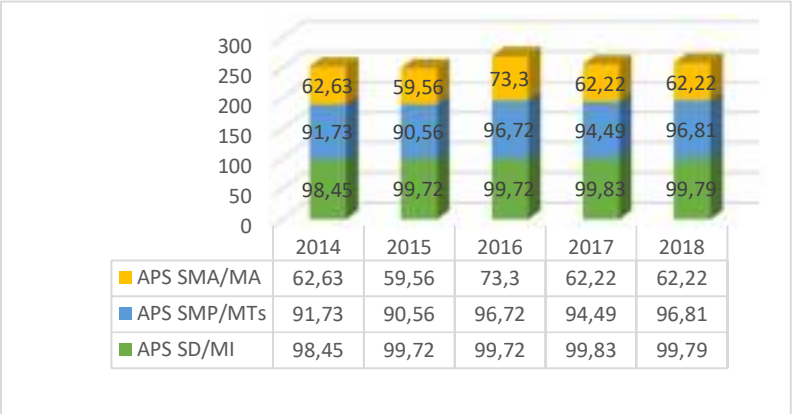


*Sumber: BPS, 2018, Bappeda diolah*

Gambar 2.37
APS Kab. Kolaka 2014 - 2018

Capaian APS kabupaten Kolaka tahun 2014-2018 pada jenjang pendidikan SD/MI cenderung bervariasi dan meningkat dari 98,45 pada tahun 2014 menjadi 99,79 di tahun 2018. Capaian APS jenjang SMP/MTs juga meningkat dari 91,73 pada tahun 2014 menjadi 96,81 di tahun 2018. Perkembangan APS jenjang SM/MA berfluktuatif dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, hal ini menunjukan masih terbatasnya ketersediaan akses dan dukungan fasilitas sarana prasarana dalam proses belajar mengajar sehingga dibutuhkan peningkatan sapras pendidikan khusnya dijenjang SMA/MA.

## B. Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator Rata-rata Lama sekolah memberi gambaran tentang berapa capaian masyarakat dalam mengakses pendidikan wajar sembilan tahun. Rata-rata lama sekolah yang dicapai tahun 2014-2018 sebagaimana pada gambar berikut :

Gambar 2.38
Rata - Rata Lama Sekolah Kab. Kolaka 2014 – 2018

Berdasarkan gambar tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat kecenderungan setiap tahun terjadi peningkatan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kolaka, meskipun rata-rata kenaikannya masih relatif kecil. Pada tahun 2014 rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Kolaka adalah 8.17 tahun, meningkat menjadi 8.31 tahun pada tahun 2018.

## C. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 15 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitanpada jenjang pendidikan tertentu. Indikator APK akan memberikan gambaran terhadap tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu jenjang tingkat pendidikan dan merupakan indikator yang

paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan:

Tabel 2.38
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Kolaka
Tahun 2014 – 2018

| Uraian | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| APK SD/MI | 110.92 | 99 | 99.88 | 99.17 | 104,07 |
| APK SLTP/MTs | 89.34 | 97.71 | 97.01 | 97.71 | 109,07 |
| APK SMA/MA | 82.27 | 95.72 | 95.97 | 78.37 | 96,65 |

*Sumber: BPS, 2018, Bappeda diolah*

Gambar 2.39
Perkembangan APK Kab. Kolaka 2014 – 2018

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa APK SD/MI di tahun 2014 s/d tahun 2018 berfluktuatif, sedangkan APK SLTP/MTs, SLA/MA terus mengalami peningkatan. Capaian APK tersebut mencerminkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat kolaka pada usia sekolah sesuai jenjang pendidikan.

**D. Angka Partisipasi Murni (APM)**

Indikator APM adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 15 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP dibagi

dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 15 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) juga memberi gambaran persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama, juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut :

Tabel 2.39
Perkembangan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Kolaka
Tahun 2014– 2018

| Uraian | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| APM SD/ MI | 91.51 | 85.79 | 85.79 | 86.54 | 88,60 |
| APM SLTP/MTs | 69.43 | 76.81 | 80.02 | 87.09 | 78,60 |
| APM SMA/MA | 55.28 | 73.97 | 54.43 | 58.00 | 66,1 |

Sumber: BPS, 2018, Bappeda diolah

Gambar 2.40
Perkembangan APM Kab. Kolaka 2014 – 2018

Dari tabel di atas, diketahui bahwa APM jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs terus mengalami peningkatan, peningkatan ini mencerminkan bahwa semakin meningkatnya partisipasi penduduk dalam kelompok usia tertentu untuk mengakses pendidikan pada jenjang tertentu. Sementara penurunan angka APM, SMA/MA pada tahun 2018 lebih dipengaruhi oleh faktor dukungan infrastruktur pendidikan jenjang

SMA/MA yang masih sangat terbatas, terutama akses ke sekolah. Kendatipun demikian capaian APM SMA/MA sebesar 58% sedikit berada dibawah capaian APM Provinsi Sulawesi Tenggara 58,53%. Namun jika dibandingkan dengan capaian APM Nasional 55,14% capaian APM Kabupaten Kolaka tahun 2018 masih diatas capaian nasional.

**2.2.2.2. Kesehatan**

Capaian kinerja indikator kesehatan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**A. Angka Kematian Bayi (AKB)**

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. AKB merupakan indikator derajat kesehatan yang sangat penting karena kelompok bayi merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kesakitan maupun kematian. AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup (KLH) pada tahun yang sama. Pada tahun 2018 Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 14,0 Per 1000 kelahiran hidup.

Perbandingan capaian tersebut bila dibandingkan dengan target nasional sebesar 24 per1000 KLH dapat dilihat pada grafik berikut :

*Sumber: BPS, 2018, Bappeda diolah*

Gambar 2.41
Angka Kematian Bayi (AKB) Kab. Kolaka 2014 – 2018

Pada gambar diatas menunjukkan bahwa sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 angka kematian bayi 11,20 menjadi 14,0 (58 kasus) per 1000 kelahiran hidup. Capaian tersebut masih menunjukkan adanya peningkatan kasus namun kondisi ini masih berada dibawah target nasional. Oleh karena itu pada tahun yang akan datang intervensi secara komprehensif dan terintegrasi yang lebih fokus sangat dibutuhkan untuk mengatasi penyebab utama kematian bayi di daerah.

**B. Angka Harapan Hidup**

Kondisi Angka Harapan Hidup (AHH) Kab. Kolaka Tahun 2018 mencapai 70,06 tahun meningkat 0,25 Tahun disbanding Tahun 2014 yaitu 69,80 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

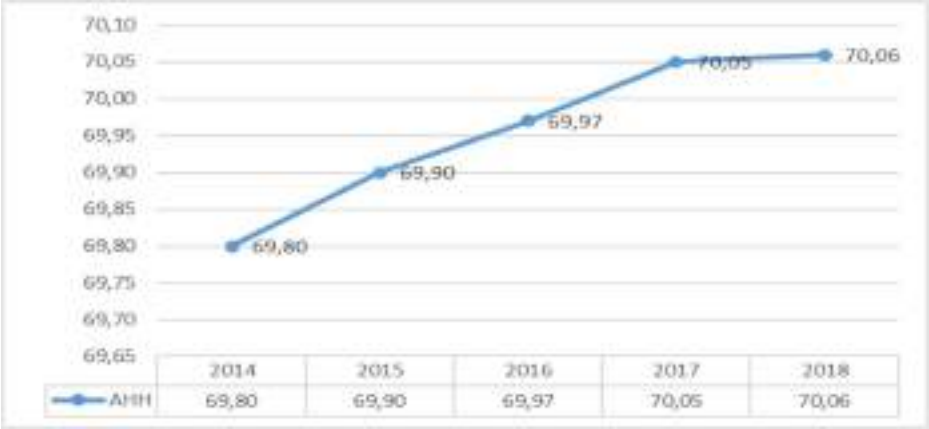


*Sumber: BPS, 2018, Bappeda diolah*

Gambar 2.42
Angka Harapan Hidup Kab. Kolaka 2014 – 2018

Dari grafik tersebut di atas diketahui bahwa capaian Indikator AHH Kab. Kolaka Tahun 2018 lebih tinggi dari capaian Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 69,86 tahun namun masih berada di bawah target nasional sebesar 70,81 tahun.

**C. Angka Kematian Ibu (AKI)**

Indikator AKI adalah jumlah ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian yang terkait dengan gangguan atau penanganannya (tidak

termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per100.000 Kelahiran Hidup dalam waktu satu tahun. Di Kabupaten Kolaka Angka Kematian Ibu sejak tahun 2014 sampai 2018, sebagai berikut :

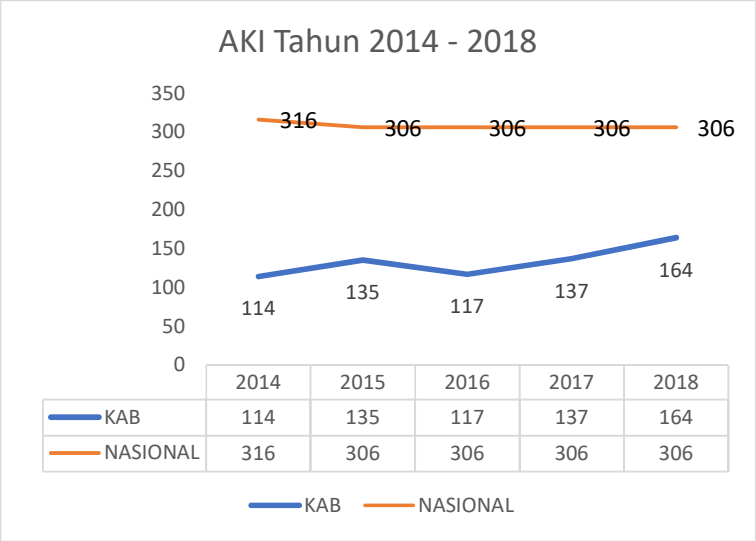


*Sumber: BPS, 2018, Bappeda diolah*

*Gambar 2.43*
*Angka Kematian Ibu Kab. Kolaka 2014 – 2018*

Dari grafik diatas dapat di ketahui bahwa AKI melahirkan tahun 2014 sebanyak 114/100.000 KLH meningkat tahun 135/100.000 KLH di tahun 2015, kemudian dapat diturunkan menjadi 117/ 100.000 KLH pada tahun 2016, kemudian terjadi peningkatan lagi di 2 tahun terakhir yakni tahun 2017 sebesar 137/100.000 KLH dan ditahun 2018 menjadi 164/100.000 KLH. Namun capaian selama 5 tahun terakhir masih berada di bawah target yang ditetapkan secara nasional. Angka kematian Ibu lebih disebabkan adanya penyakit insidentil yang muncul pada masa nifas dan bukan termasuk penyakit penyebab kematian akibat kelahiran seperti gagal ginjal, anemia, gagal fungsi sirkulasi, oedema paru dan penyakit jantung, serta ditetapkannya RSBG Kolaka menjadi RSBG rujukan regional.

Oleh karena itu pada tahun yang akan datang akan dilakukan interfensi yang lebih khusus, teritegrasi dan konperensif untuk menekan angka kematian ibu di kabupaten kolaka sehingga dapat ditingkatkan kinerja pada indikator AKI.

**D. Prevalensi Balita Kurang Gizi**

Persentase balita Kurang Gizi adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk ditambah dengan persentase balita gizi kurang terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO (1999) mengelompokkan wilayah berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu:

a. rendah = di bawah 10 %
b. sedang = 10-19 %
c. tinggi = 20-29 %
d. sangat tinggi = 30 %

Upaya Pemerintah Daerah untuk menekan Prevalensi Gizi buruk di daerah melalui pendekatan dan sinergitas program telah menunjukkan tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi bagi balita. Capaian menekan prevalensi gizi buruk bagi balita sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 sebagai berikut.

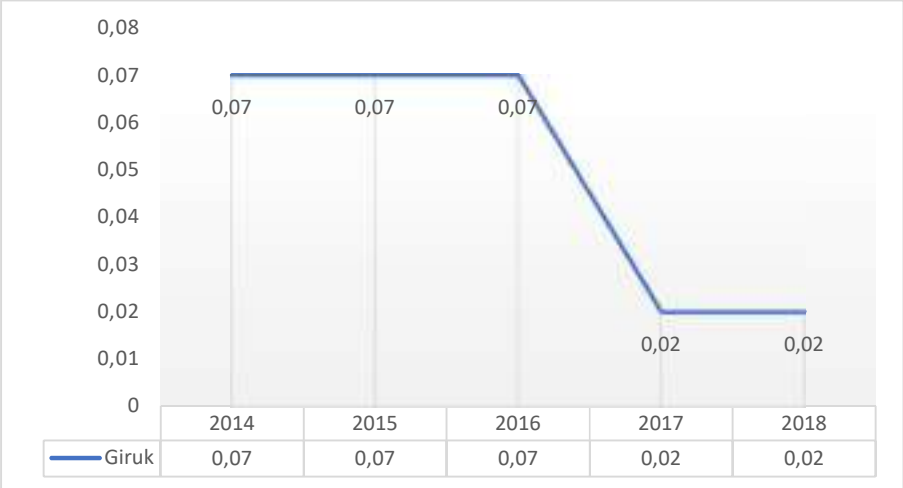


*Sumber: BPS, 2018, Bappeda diolah*

Gambar 2.44
Gizi Buruk Kab. Kolaka 2014 – 2018

Dari gambar diatas sejak tahun 2014 sampai tahun 2017 prevalensi pada balita berhasil ditekan dari 0,07 menjadi 0.02 pada tahun 2018. Keberhasilan ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk memberikan asupan gizi pada balita melalui diversifikasi pemanfaatan bahan lokal sebagai upaya untuk pemenuhan pangan yang berkualitas berbasis karakteristik dan kearifan lokal daerah.

Tabel 2.40
Persentase Balita Gizi Kurang, Stunting dan Wasting Menurut Puskesmas (E-PPBGM) TAHUN 2019

| NO | PUSKESMAS | BALITA | GIZI KURANG | % | STUNTING (pendek) | % | WASTING (Kurus) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolaka | 296 | 21 | 7,1 | 109 | 36,8 | 10 | 3,4 |
| 2 | Kolakaasi | 517 | 30 | 5,8 | 167 | 32,3 | 6 | 1,2 |
| 3 | Latambaga | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 4 | Wundulako | 262 | 29 | 11,1 | 107 | 40,8 | 17 | 6,5 |
| 5 | Baula | 724 | 51 | 7,0 | 143 | 19,8 | 98 | 13,5 |
| 6 | Pomalaa | 311 | 58 | 18,6 | 115 | 37,0 | 42 | 13,5 |
| 7 | Tanggetada | 341 | 30 | 8,8 | 45 | 13,2 | 63 | 18,5 |
| 8 | Polinggoma | 400 | 62 | 15,5 | 224 | 56,0 | 26 | 6,5 |
| 9 | Watubangga | 821 | 143 | 17,4 | 211 | 25,7 | 61 | 7,4 |
| 10 | Kukutio | 401 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 11 | Toari | 654 | 4 | 0,6 | 55 | 8,4 | 5 | 0,8 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tosiba | 469 | 42 | 9,0 | 120 | 25,6 | 13 | 2,8 |
| 13 | Wolo | 1225 | 123 | 10,0 | 353 | 28,8 | 111 | 9,1 |
| 14 | Iwoimendaa | 603 | 94 | 15,6 | 242 | 40,1 | 63 | 10,4 |
| Jumlah | | 7024 | 687 | 9,8 | 1.891 | 26,9 | 515 | 7,3 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Kolaka, Tahun 2018

Penanganan intervensi stunting di Kabupaten Kolaka telah terlaksana dari tahun – ketahun tetapi dalam pelaksanaannya masih belum terintegrasi, jumlah balita di Kabupaten Kolaka sebanyak 7.024 orang dan yang Prevalensi gizi kurang berjumlah 687 orang atau 9,8%, untuk stunting (pendek) berjumlah 1.891 orang atau 26,9%, sedangkan Wasting (kurus) berjumlah 515 orang atau 7,3%.

**E. Angka Kematian Anak Balita (AKABA)**

Indikator AKABA pada tahun 2014 sampai tahun 2018 pada anak usia 1 sampai 5 tahun berhasil diturunkan Capaian angka Akaba sebagai berikut :

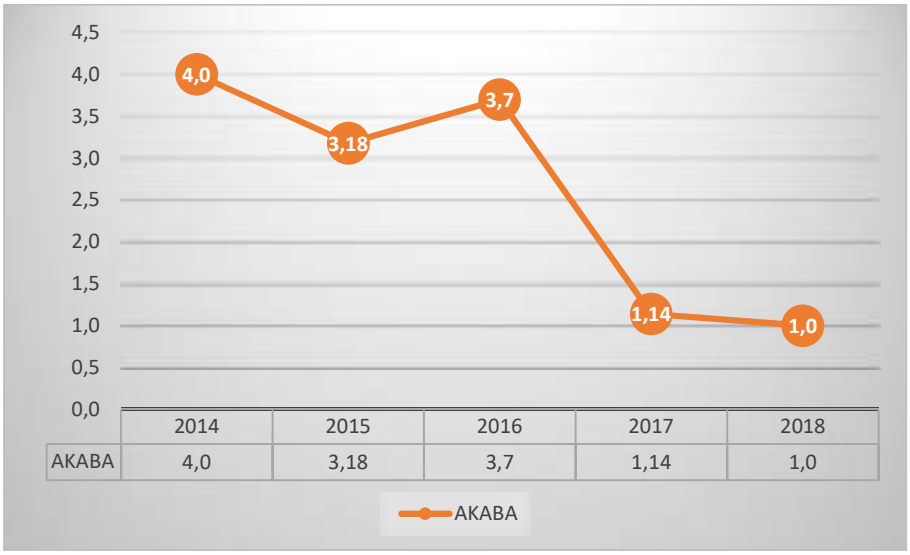


Sumber: BPS dan Bappeda,2018 (diolah)

Gambar 2.45
Angka Kematian Anak Balita Kab. Kolaka 2014 – 2018

Dari Grafik tersebut di atas dapat diketahui angka kematian balita dari tahun 2014 sebanyak 4,0 per 1000 KLH (13 kasus). Kemudian pada tahun 2018 jumlah kelahiran hidup bisa ditekan sebanyak 1 per 1000 KLH

(3 kasus). Kondisi ini menunjukan adanya penurunan jumlah kasus di tahun 2017 sebanyak 5 kasus dan dapat ditekan menjadi 3 kasus ditahun 2018. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan anak di Kabupaten Kolaka.

**F. Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan**

Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga profesional untuk ibu hamil selama masa kehamilannya yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang di tetapkan. Pemeriksaan Antenatal Care (ANC) adalah pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil, hingga mampu menghadapi persalinan, kala nifas, persiapan pemberian ASI dan kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar. Capaian Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan tahun 2014 sampai tahun 2018 sebagai berikut :

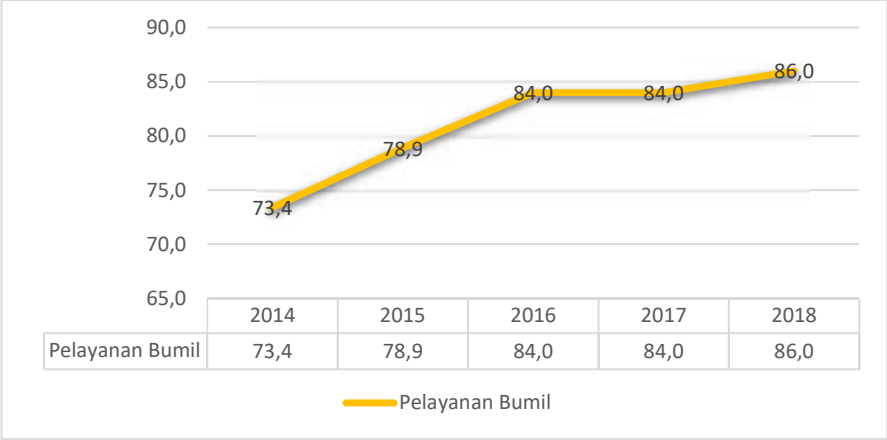


Sumber: Profil Dinkes, 2018, Bappeda diolah

Gambar 2.46
Angka Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kab. Kolaka 2014 – 2018

Bila dilihat gambar diatas capaian Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan diatas capaian pada tahun 2014 sebesar 73,4% dan pada tahun 2018 sebesar 86,0 %. Angka ini menunjukan kesan adanya peningkatan cakupan dari tahun ketahun dan dalam ketegori baik (tercapai). Kecenderungan peningkatan capaian ini dikarenakan sudah ada

kesepahaman dan kemudahan baik dari segi pencatatan dan pelaporan untuk Ibu hamil maupun persalinan di fasilitas kesehatan.

**G. Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih.**

Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum dan bidan, serta diupayakan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Capaian terhadap proporsi yang ditolong oleh tenaga kesehatan tahun 2014 sampai tahun 2018 sebagai berikut :

*Sumber: BPS, 2018, Bappeda diolah*

Gambar 2.47
Angka Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Kab. Kolaka 2014 – 2018

Berdasarkan Gambar diatas capaian persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih tahun 2018 sebesar 90 % atau telah mencapai target nasional (81%) dan capaian ini telah berada diatas capaian provinsi sebesar 61,72% serta capaian nasional sebesar 83,67% pada tahun 2018.

Upaya pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan pelayanan bidang kesehatan khususnya dalam persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dengan menempatkan 1 desa 1 tenaga bidan dan tenaga kesehatan lainnya melalui Program Gerakan Masyarakat Mandiri (Gemari) Kesehatan, mengoptimalkan peran dan fungsi posyandu serta secara bertahap meningkatkan kompetensi tenaga kebidanan.

**H. Bayi baru lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan**

Persalinan bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan adalah Pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh petugas kesehatan yang kompeten kepada neonates/bayi baru lahir sedikit 3 kali, selama periode 0 sampai dengan 28 hari setelah lahir, baik di fasilitas kesehatan maupun melalui kunjungan rumah. Capaian Persalinan bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan tahun 2014 sampai tahun 2018 sebagai berikut:

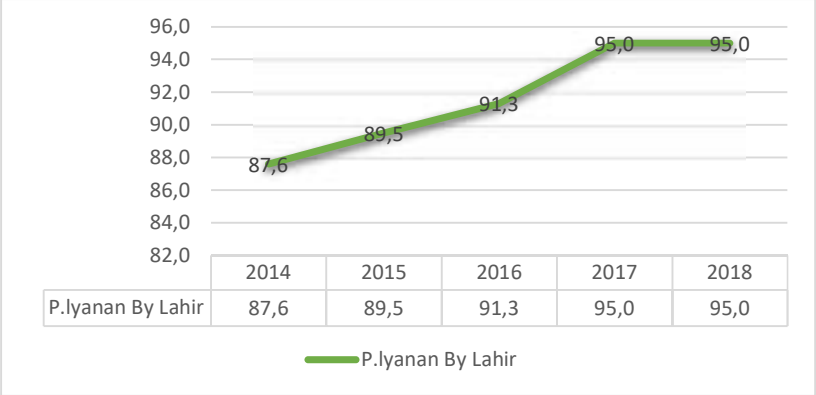


*Sumber: Profil Dinkes, 2018, Bappeda diolah*

*Gambar 2.48*
*Angka Persalinan bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Kab. Kolaka Tahun 2014 – 2018*

Berdasarkan Gambar diatas capaian persalinan bayi baru lahir, tren yang menggambarkan terjadinya peningkatan capaian dipriode lima tahun terakhir yakni capaian ditahun 2014 sebesar 87,6% dan kemudian capaian ini meningkat ditahun 2018 mencapai 95,0%. Kondisi ini menggambarkan bahwa semakin baiknya pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Kolaka.

**I. Pelayanan Kesehatan Balita**

Pelayanan kesehatan Balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di

fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM. Capaian Persalinan bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan tahun 2014 sampai tahun 2018 sebagai berikut :

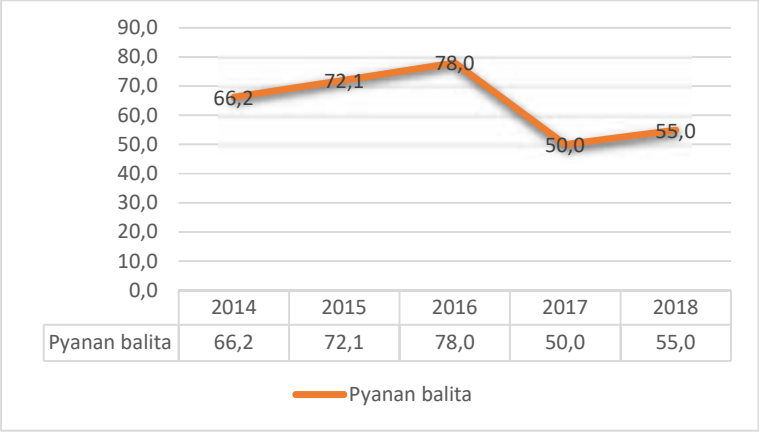


Sumber: Profil Dinkes, 2018, Bappeda diolah

Gambar 2.49

Angka Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar Kab. Kolaka Tahun 2014 – 2018

Berdasarkan Gambar diatas capaian angka pelayanan kesehatan balita sesuai standar menunjukan adanya tren penurunan capaian dipriode lima tahun terakhir, dimana capaian ditahun 2014 sebesar 66,2% dan ditahun 2018 menjadi 55,0%. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor perlaku yang tidak lagi mengontrol tumbuh kembang anak balitanya, dengan alasan anaknya telah mendapatkan pelayanan imunisasi lengkap sewaktu diusia dibawah satu tahun. Perilaku buruk ini yang perlu diperbaiki melaui penyuluhan kesehatan yang intens di masyarakat tentang pentingnya pememantauan tumbuh kembang anak balita dipelayanan kesehtan terutama diposyandu.

### J. Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan pelayanan Kesehatan

Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yaitu setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar melalui Penjaringan kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang

dilakukan oleh puskesmas. Capaian anak usia pendidikan daar mendapat pelayanan kesehatan tahun 2014 sampai tahun 2018 sebagai berikut :

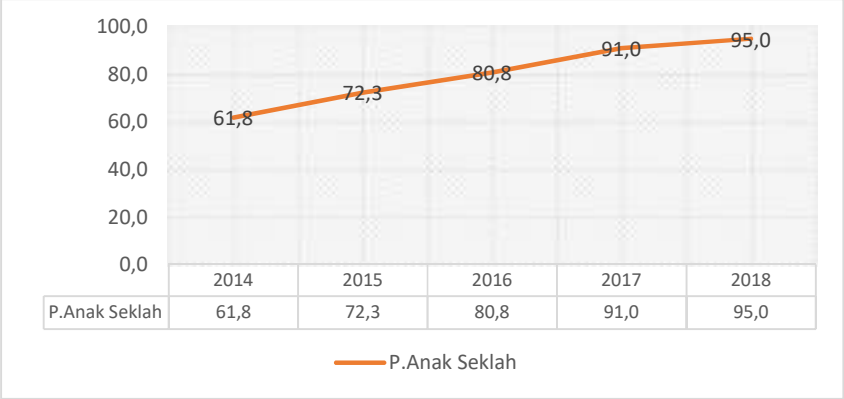


*Sumber: Profil Dinkes, 2018, Bappeda diolah*

*Gambar 2.50*
*Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*
*Kab. Kolaka 2014 – 2018*

Bila dilihat gambar diatas capaian Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan pada tahun 2014 sebesar 61,8 % dan pada tahun 2018 sebesar 95,0 %. Angka ini menunjukan kesan adanya peningkatan cakupan pelayanan dari tahun ketahun. Kecenderungan peningkatan capaian ini dikarenakan program ini menjadi salah satu program yang masuk dalam SPM yang wajib dilaksanakan dan menjadi prioritas program pemerintah daerah.

## K. Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan

Warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan adalah Pelayanan kesehatan lanjut usia adalah upaya kesehatan yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu wadah dan merupakan upaya preventif, promotif, kuratif, serta rehabilitatif bagi lanjut usia. Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Capaian Warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan tahun 2014 sampai tahun 2018 sebagai berikut :

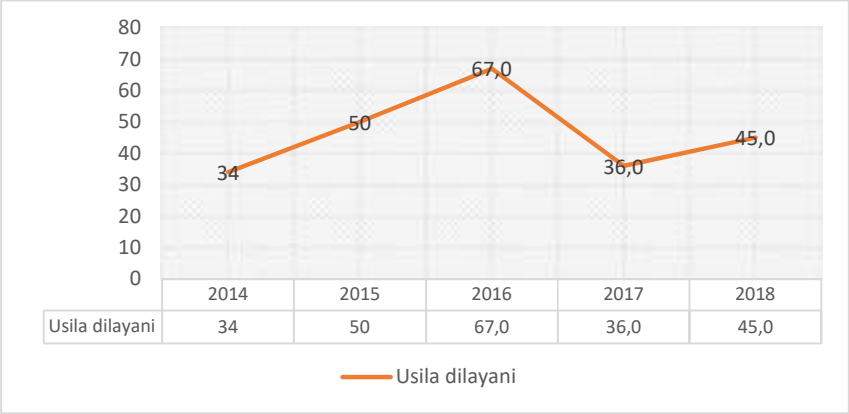


*Sumber: Profil Dinkes, 2018, Bappeda diolah*

*Gambar 2.51*
*Warga negara usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Kab. Kolaka 2014 – 2018*

skrining kesehatan pada tahun 2014 sebesar 34 % dan pada tahun 2018 sebesar 45 %. Angka ini menunjukan adanya penurunan capaian namun diakhir tahun 2018 terlihat adanya kecenderungan peningkatan cakupan pelayanan pada usila. Kecenderungan peningkatan capaian ini dikarenakan program ini menjadi salah satu program yang masuk dalam SPM yang wajib dilaksanakan dan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah.

Tabel 2.41
Capaian Indikator Kinerja Pelayanan RSBG di Kabupaten Kolaka
Tahun 2014–2018

| Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan | Capaian RPJMD Kabupaten Kolaka pada RKPD tahun ke- | | | | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| | | | K | K | K | K | K | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| Program Pelayanan Kesehatan Sekunder | Cakupan Pemanfaatan Tempat Tidur ( (BOR) | % | 71,11 | 83,47 | 72,32 | 63,23 | 65,09 | |
| | Cakupan Rata-rata Lama Perawatan (LOS) | Hari | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| | Cakupan Selang Waktu Penggunaan Tempat Tidur (TOI) | Hari | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | |

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kab. Kolaka, 2018

Penilaian indikator capaian kinerja rumah sakit benyamin guluh (RSBG) ditentukan dengan indikator Cakupan Pemanfaatan Tempat Tidur ( (BOR), Cakupan Rata-rata Lama Perawatan (LOS) dan Cakupan Selang Waktu Penggunaan Tempat Tidur (TOI). Adapun capaian cakupan pemanfaatan tempat tidur (BOR) pada tahun 2014 sebesar 71,11%, tahun 2015 sebesar 83,47%, tahun 2016 sebesar 72,32, tahun 2017 sebesar 63,23 dan tahun 2018 sebesar 65,09% ( Idealnya 60 s/d 85% Depkes RI 2005). Untuk Indikator Cakupan Rata-rata Lama Perawatan (LOS) pada tahun 2014 rata-rata 5 hari, tahun 2015 rata-rata 5 hari, tahun 2016 rata-rata 4 hari, tahun 2017 rata-rata 4 hari dan tahun 2018 rata-rata 4 hari ( Idealnya 6 s/d 9 Hari). Untuk indikator Cakupan Selang Waktu Penggunaan Tempat Tidur (TOI) pada tahun 2014 rata-rata 2 hari, tahun 2015 rata-rata 1 hari, tahun 2016 rata-rata 2 hari, tahun 2017 rata-rata 3 hari dan tahun 2018 rata-rata 3 hari ( idealnya 1 s/d 3 hari ).

### 2.2.3 Seni, Budaya, Pemuda dan Olahraga

Pembangunan Seni Budaya dan Olahraga difokuskan pada dua aspek yaitu: Seni dan Budaya, serta Pemuda dan Olahraga.

#### A. Seni dan Budaya

Kabupaten Kolaka sebagai daerah perjuangan, religi dan budaya, pembangunan budaya ditujukan dan diarahkan untuk melestarikan dan mengembangkan nilai dan norma budaya daerah serta menjadikannya sebagai norma dalam hubungan sosial kemasyarakatan ditengah derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global.

Pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Kolaka sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 telah memperlihatkan kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai budaya pada heterogenitas masyarakat Kolaka sehingga hidup damai, tentram dan kondusif. Namun demikian upaya peningkatan jati diri masyarakat Kabupaten Kolaka seperti halnya solidaritas sosial, rasa kekeluargaan, budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, penghargaan terhadap nilai budaya masih perlu terus ditingkatkan terutama di kalangan generasi muda agar nilai budaya yang diwariskan leluhur tidak tergerus.

Oleh karena itu diperlukan strategi dan upaya yang lebih kongkrit, agar generasi muda dan masyarakat dapat mengenal, mencintai budaya sesuai dengan kearifan lokal sehingga terbentuk generasi yang berkarakter dan berwawasan cinta budaya, cinta daerah dan cinta NKRI, yang diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Tabel 2.42
Capaian pembangunan Seni dan Budaya di Kabupaten Kolaka
Tahun 2014–2018

| Uraian | Satuan | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanggar Seni | Sanggar | 3 | 5 | 9 | 19 | 22 |
| Pembinaan Pemangku Adat | Orang | 12 | 24 | 24 | 30 | 32 |
| Pelestarian Aktualisasi Budaya | Unit | 15 | 25 | 25 | 25 | 5 |
| Pelestarian Cagar dan Benda Budaya | Unit | 20 | 30 | 50 | 83 | 160 |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kolaka, 2018

Dalam mendorong pengembangan dan pelestarian budaya di daerah sebagaimana tabel di atas, Pemerintah Daerah telah menjadikan program pembangunan budaya menjadi prioritas pertama yang disinergikan dengan pendidikan dan agama. Dengan demikian eksistensi Kolaka sebagai daerah perjuangan, daerah religius dan daerah berbudaya dapat terpelihara.

**B. Urusan Kepemudaan & Olahraga**

Pembinaan generasi pemuda dilaksanakan melalui beberapa kegiatan seperti Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), penyelenggaraan upacara bendera, penyelenggaraan pemuda produktif, kegiatan pemuda pelopor, peningkatan peran pemuda dalam pembangunan daerah. Kegiatan pembinaan kepemudaan yang dilakukan 2014 s/d 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.43
Program capaian kinerja kegiatan Kepemudaan di Kab. Kolaka Tahun 2014-2018

| NO | URAIAN KEGIATAN | VOLUME CAPAIAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN | 47 | 87 | 33 | 35 | 40 |
| 2 | MELAKSANAKAN KIRAB PEMUDA NAS (KALI) | - | - | - | 1 | 1 |
| 3 | SELEKSI PASKIBRAKA NASIONAL TK. KAB. | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 |
| 4 | PELAKSANAAN PASKIBRAKA TK. KABUPATEN | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 |
| 5 | SELEKSI CAPASKIBRAKA Tk. PROV. SULTRA | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 6 | SELEKSI CAPASKIBRAKA Tk. PUSAT | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 7 | JAMBORE PEMUDA INDONESIA/BPAP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | GELAR PARADE SUMPAH PEMUDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | PAMERAN PRESTASI HASIL KARYA PEMUDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | MUSYAWARAH PPI & LKBB | - | - | - | - | 1 |
| 11 | BANTUAN SARANA PENDUKUNG SEKERTARIAT PK KNPI Kec. | - | - | - | - | 1 |
| 12 | LOKAKARYA WIRA USAHA MUDA | - | - | - | 1 | 1 |
| 13 | PEMBINAAN KEPEMIMPINAN PRAMUKA PENEGAK | - | - | - | - | 1 |
| 14 | GELAR RELAWAN ANTI NARKOBA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | RAKORNIS PEMBERDAYAAN PEMUDA | - | - | - | 1 | 1 |

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kolaka, 2018

Dari tabel tersebut diatas hasil kegiatan pembinaan kepemudaan didaerah dalam kurun waktu 2014 s/d 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.44
Program capaian Indikator kegiatan Kepemudaan di Kab. Kolaka Tahun 2014-2018

| NO | URAIAN KEGIATAN | VOLUME CAPAIAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | JUMLAH ORGANISASI KEPEMUDAAN YANG TERDATA | 47 | 87 | 33 | 35 | 40 |
| 2 | JUMLAH ORGANISASI KEPEMUDAAN YANG AKTIF | 35 | 40 | 33 | 35 | 40 |
| 3 | JUMLAH ORGANISASI KEPEMUDAAN YANG MANDIRI | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 4 | JUMLAH PEMUDA PELOPOR TINGKAT NASIONAL | - | - | - | 3 | 4 |
| 5 | JUMLAH PEMUDA YANG BERRESTASI TKT KAB, TKT PROVINSI DAN NASIONAL | - | - | - | 10 | 14 |

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kolaka, 2018

Sementara pembinaan olahraga dilaksanakan melalui kegiatan olahraga pelajar dan olahraga masyarakat meliputi pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga, penyelenggaraan Pekan Olahraga SD, SMP, dan SMA, Pekan olahraga bagi penyandang cacat/disabilitas, Pekan Olahraga dan Seni PGRI, Lomba Gerak Jalan, bimbingan teknis personal, lomba senam dan kegiatan senam masal, Tes Kesegaran Jasmani bagi pelajar. Kegiatan event tersebut juga dimaksudkan untuk sebagai upaya mencari bibit atlet olahraga yang berpotensi untuk dibina lebih lanjut.

Dalam Pembinaan keolahragaan diarahkan pada klub sebagaimana pada tabel di atas dengan sasaran pengembangan klub agar dapat berprestasi, menggali potensi atlet dan membangun kemandirian klub.

Tabel 2.45
Perkembangan Jenis Cabang Olahraga Kabupaten Kolaka

| JENIS | SATUAN | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angkat Besi | Club | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Atletik | Club | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Balap sepeda | Club | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Balap Motor | Club | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Bilyard | Club | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Bola Basket | Club | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| Bridge | Club | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bulu Tangkis | Club | 10 | 15 | 17 | 20 | 20 |
| Catur | Club | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| Dayung | Club | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Futsal | Club | 7 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Golf | Club | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Karate | Club | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Panjat Tebing | Club | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Pencak Silat | Club | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| Renang | Club | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| Sepakbola | Club | 10 | 10 | 15 | 17 | 17 |
| Taekwondo | Club | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Takraw | Club | 5 | 5 | 10 | 12 | 15 |
| Tenis Meja | Club | 5 | 7 | 7 | 10 | 15 |
| Tenis Lapangan | Club | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tinju | Club | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volley Ball | Club | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2018

## 2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

Di era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang aparatur pemerintah hendaknya memberikan pelayanan optimal yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan yaitu masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintahan apabila merujuk pada Undang-undang 23 tahun 2014 dikategorikan dalam dua hal, urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintah yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk memastikan penyelenggaraan Pelayanan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara berjalan optimal, maka diatur melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk melihat sejauh mana capaian penyelengaraan pelayanan oleh pemerintah bisa dilihat pada indikator kinerja dari masing-masing sektor. Di bidang pelayanan pendidikan meskipun capaian Kabupaten Kolaka di atas rata-rata nasional, tetapi perlu upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah kecamatan. Dalam bidang kesehatan masih diperlukan akselerasi pemenuhan akses dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan pengendalian penyakit, meningkatkan gizi masyarakat dan mengedepankan upaya promotif dan preventif. Di samping itu kondisi lingkungan juga akan berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. Penyediaan air minum sebagai kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi di Kabupaten Kolaka belum mencapai 100%. Masih perlu percepatan dalam penyediaan air minum agar seluruh warga di Kabupaten Kolaka mendapatkan air minum. Pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 4.667 unit (tahun 2018) menunjukkan bahwa pelayanan peningkatan mutu RTLH masih menjadi agenda prioritas.

Pemenuhan hak kependudukan Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan Kartu Tanda Penduduk (KTP-elektronik), dan kepemilikan akta lainnya (akta kelahiran, akta kematian, dan akta perkawinan) masih perlu ditingkatkan, data tahun 2018 menunjukkan bahwa masih terdapat 7.929 Jiwa yang belum terekam KTP elektronik dari Jumlah wajib KTP 157.751 Jiwa. Perhatian terhadap pelayanan terhadap anak juga harus dioptimalkan mengingat masih terjadinya kekerasan terhadap anak, anak terlantar, perkawinan di bawah umur. Pemenuhan layanan Keluarga Berencana dalam perspektif pengendalian penduduk diperlukan agar penduduk tumbuh seimbang dengan target *Total Fertility Rate (TFR)* sebesar 2,5 sehingga dependecy ratio kecil sehingga banyak penduduk produktif yang bekerja yang kemudian mendorong pada peningkatan ekonomi. Di sisi lain perlu juga memperbaiki pelayanan terhadap lansia karena diproyeksikan semakin besar jumlahnya. Isu kesetaraan gender juga perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan program kegiatan, karena isu gender masih cukup mengemuka seperti seperti aktivitas perempuan dalam ekonomi masih tertinggal dengan laki-laki, demikian halnya dengan posisi perempuan dalam lembaga politik yang masih kecil dibanding laki-laki. Di sektor domestik perempuan masih memikul beban ganda, yaitu mengurus kebutuhan domestik dan masih harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di samping itu kekerasan dalam rumah tangga dimana lebih banyak perempuan sebagai korban.

Pelayanan publik atau pelayanan umum Kabupaten Kolaka merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada bagian ini dibahas mengenai capaian kinerja aspek pelayanan umum yang meliputi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

### 2.3.1 Layanan Umum

#### 2.3.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

**A. Urusan Pendidikan**

- Angka Partisipasi Sekolah

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur capaian kinerjabidangpendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS), APK dan APM. Indikator ini memberikan gambaran seberapa besar anak usia sekolah menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS,APK dan APM di hitung berdasarkan jumlah murid kelompok pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar per1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Capaian urusan wajib bidang pendidikan dasar wajar 9 tahun yang menjadi kewengan Pemerintah Daerah sesuai UU No.23 tahun 2014. Indikator Capaian urusan wajib pelayanan dasar sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.46

APS, APK, APM SD/MI dan SMP/MTS di Kabupaten Kolaka
Tahun 2014 – 2018

| Uraian | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Sekolah SD/MI | APS | 98,45 | 99,72 | 99,72 | 99,83 | 99,79 |
| | APK | 110,92 | 99,00 | 99,88 | 99,17 | 109,07 |
| | APM | 91,51 | 85,79 | 85,79 | 86,54 | 88,60 |
| Sekolah SLTP / MTs | APS | 91,73 | 90,56 | 96,72 | 94,49 | 96,81 |
| | APK | 89,34 | 97,71 | 97,01 | 97,71 | 104,07 |
| | APM | 69,43 | 76,81 | 80,02 | 87,09 | 78,60 |

*Sumber: BPS, 2018*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah kabupaten Kolaka sudah di atas 90% hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam jenjang pendidikan terntentu. Demikian juga APK maupun APM telah mencapai 85%. Meskipun demikian perlu upaya untuk peningkatan Angka Partisipasi tersebut khususnya APM SMP yang belum mencapai angka 100%.

- Ketersediaan Gedung Sekolah/ Penduduk

Selain indikator capaian kinerja bidang pendidikan peningkatan ketersediaan, infrastruktur sarana dan prasarana untuk mendukung capaian indikator pelayanan dasar di bidang pendidikan wajar 9 tahun telah menjadi komitmen pemerintah daerah yang telah dituangkan dalam 9 prioritas pembangunan daerah guna pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Kolaka terus mendorong untuk meningkatkan ketersediaan fasilitas pendidikan di Kabupaten Kolaka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47
Ketersediaan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Kolaka
Tahun 2014–2018

| No | URAIAN | SATUAN | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fasilitas Sekolah SD / MI | | | | | | |
| | - Jumlah Gedung. | Unit | 174 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| | - Jumlah RKB | Lokal | 1.132 | 1.216 | 1.216 | 1.216 | 1.464 |
| | - Jumlah Rombel | Lokal | 1.330 | 1.335 | 1.335 | 1.335 | 1.368 |
| | - Jumlah R. Kelas | Lokal | 1.212 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.342 |
| | - Rusak Ringan | Lokal | 161 | 161 | 621 | 662 | 425 |
| | - Rusak Berat | Lokal | 97 | 97 | 272 | 205 | 152 |
| 2 | Fasilitas Sekolah SLTP / MTs | | | | | | |
| | - Jumlah Gedung | Unit | 52 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| | - Jumlah RKB | Lokal | 372 | 363 | 363 | 363 | 582 |
| | - Jumlah Rombel | Lokal | 359 | 348 | 348 | 348 | 406 |
| | - Jumlah R. Kelas | Lokal | 326 | 395 | 395 | 395 | 458 |
| | - Rusak Ringan | Lokal | 47 | 47 | 167 | 114 | 94 |
| | - Rusak Berat | Lokal | 19 | 19 | 37 | 45 | 38 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Fasilitas Sekolah SMA/MA | | | | | | |
| | - Jumlah Gedung | Unit | 21 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| | - Jumlah RKB | Lokal | 273 | 287 | 304 | 315 | 321 |
| | - Jumlah Rombel | Lokal | 316 | 321 | 332 | 350 | 368 |
| | - Jumlah R. Kelas | Lokal | 378 | 293 | 337 | 356 | 385 |
| | - Rusak Ringan | Lokal | 56 | 56 | 45 | 45 | 37 |
| | - Rusak Berat | Lokal | 17 | 17 | 12 | 7 | 5 |

Sumber: BPS, 2018

- Rasio Guru/ Murid

Rasio Guru/Murid dalam hal ini adalah perbandingan jumlah guru dengan jumlah murid untuk masing-masing tingkat pendidikan di Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2018 sebagai berikut:

Tabel 2.48
Rasio Guru / Murid di Kabupaten Kolaka Tahun 2014 – 2018

| Uraian | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| SDSederajat | | | | | |
| -Guru/ Murid | 1/20 | 1/20 | 1/16 | 1/16 | 1/16 |
| -SMP sederajat | | | | | |
| Guru/ Murid | 1/16 | 1/16 | 1/14 | 1/14 | 1/14 |
| SMA sederajat | | | | | |
| Guru/ Murid | 1/12 | 1/12 | 1/16 | 1/16 | 1/16 |

Sumber: BPS, 2018

- Jumlah Lulusan dan Angka Kelulusan Siswa

Meningkatnya jumlah angka kelulusan siswa pada berbagai jenjang pendidikan setiap tahun ajaran, menjadi harapan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Namun jika terjadi penurunan, hal tersebut perlu dicermati secara bijak dengan melihat korelasi dan sinergitas di antara siswa, guru serta orang tua dan keberhasilan yang dibangun tersebut telah memperlihatkan persentase angka kelulusan dan jumlah kelulusan siswa di Kabupaten Kolaka per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2014 – 2018 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.49
Perkembangan Jumlah Lulusan Sekolah Kab. Kolaka Tahun 2014 – 2018

| Tahun | Angka Lulusan (%) | | |
|---|---|---|---|
| | SD / MI | SMP / MTs | SMU / MA |
| 2014 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2015 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2016 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2018 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kab.Kolaka, 2018

Berdasarkan data tersebut, persentase kelulusan siswa SD/MI, SMP/MTs dan SMU/MA di Kabupaten Kolaka tahun 2014 - 2018 sebesar 100% yang artinya siswa seluruhnya lulus pada jenjang pendidikan dasar.

## B. Urusan Kesehatan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kesehatan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

- Rasio Rumah Sakit dan Rasio Tempat Tidur Pasien per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak jumlah ketersediaan rumah sakit,akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Jumlah rumah sakit di Kabupaten Kolaka sampai awal tahun 2018 sebanyak 3 unit, terdiri dari rumah sakit milik pemerintah daerah sebanyak 1 unit dan rumah sakit BUMN sebanyak 1 unit. Angka rasio rumah sakit per 1.000 penduduk pada tahun 2018 adalah 0.0080 artinya satu rumah sakit melayani 80.000 jiwa, idealnya 1 rumah sakit melayani 100.000 penduduk, sehingga Kabupaten Kolaka dengan penduduk sebesar 251.520 jiwa maka idealnya saat ini masih membutuhkan 1 RS baru.

Sementara Rasio tempat tidur Rumah Sakit di Kabupaten Kolaka sampai tahun 2018 ketersediaan tempat tidurperawatanbagi penduduk,idealnya 1 tempat tidur untuk 1000 penduduk,dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.50
Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Kab. Kolaka Tahun 2014–2018

| Uraian | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| Jumlah Rumah Sakit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah Rumah Sakit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah Rumah Sakit | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Jumlah Tempat Tidur | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Jumlah Penduduk | 235.655 | 241.455 | 246.918 | 251.250 | 257.470 |
| Rasio RS Per 1.000 penduduk | 1:84869 | 1:82831 | 1:80998 | 1:80000 | 1:80000 |
| Rasio TT terhadap | 1:6110 | 1:5963 | 1:5832 | 1:5731 | 1:5731 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka, 2018

Dari gambaran tabel di atas, dalam jangka panjang kondisi rasio tersebut sudah tidak relevan lagi seiring dengan perkembangan dinamika masyarakat yang begitu cepat yang diikuti dengan pertambahan penduduk. Oleh sebab itu pemerintah daerah pada tahun 2016 telah membangun rumah sakit yang berstandar nasional untuk menjawab tuntutan dan peningkatan pelayanan kesehatan dimasa akan datang yang semakin kompleks.

- Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu terhadap Penduduk

Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) merupakan salah satu saranapelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) terhadap jumlah penduduk diKabupaten Kolaka pada tahun 2018 Angka rasio Puskesmas/Pustu per 1.000 penduduk pada tahun 2018 adalah 0,478 artinya satu Puskesmas melayani 47.761 jiwa, Adapun rasio Puskesmas

terhadap jumlah kecamatan pada tahun 2018 mencapai 1 : 1,17. Ini artinya bahwa terdapat beberapa kecamatan yang mempunyai Puskesmas lebih dari 1 unit. Jumlah kecamatan di Kabupaten Kolaka adalah 12, sedangkan puskesmas yang tersedia 14 unit puskesmas.

Berikut adalah data secara lengkap mengenai rasio Puskesmas dan Pustu terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Kolaka selama kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2018.

Tabel 2.51
Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Kolaka Tahun 2014 – 2018

| Uraian | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Puskesmas | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| Jumlah Puskesmas Pembantu | 20 | 22 | 37 | 37 | 37 |
| Puskel | - | - | - | - | - |
| Jumlah Puskesdes | 45 | 50 | 69 | 69 | 69 |
| Jumlah Poskel/Pustu/ Puskesmas | 77 | 84 | 120 | 120 | 120 |
| Jumlah Penduduk | 235655 | 241455 | 246918 | 251250 | 251520 |
| Rasio Puskesmas per 1000 penduduk | 1:32.7 | 1:34.8 | 1:48.6 | 1:47.8 | 1:47.8 |
| Rasio Pustu per 1000 penduduk | 1:08.5 | 1: 9.112. | 1:15.0 | 1:14.7 | 1:14.7 |
| Jumlah Kecamatan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Jumlah Desa/Kelurahan | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Rasio Puskesmas per Kecamatan | 1:1 | 1:1 | 1:1,7 | 1:1,17 | 1:1,17 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka, 2018

Dari gambaran tabel di atas, dalam jangka panjang kondisi rasio tersebut sudah tidak relevan lagi seiring dengan perkembangan dinamika masyarakat yang begitu cepat yang diikuti dengan pertambahan penduduk. Untuk menjawab tuntutan peningkatan pelayanan kesehatan dimasa akan datang yang semakin kompleks akan melanjutkan penguatan

dan peningkatan jejaring pelayanan kesehatan pada tahun 2019 - 2024 yang akan datang.

**C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara. Penyelenggaraan SPM dalam Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Selain pelaksanaan SPM tersebut, Pemerintah Daerah melalui urusan Pekerjaan Umum juga menyelenggarakan pelayanan pemenuhan akses jalan dan jembatan, pengelolaan air irigasi, dan pemenuhan pelayanan ruang terbuka hijau.

a. Kondisi pemenuhan kebutuhan pokok air minum;

Air minum adalah salah satu kebutuhan primer manusia. Air begitu penting bagi kehidupan karena air merupakan salah satu prasyarat untuk mengukur kualitas hidup manusia. Akses penduduk Kabupaten Kolaka terhadap air minum tahun 2014 sebanyak 119.505 Jiwa (50,7%), Tahun 2015 sebanyak 216.590 jiwa (89,6%) Tahun 2016 sebanyak 178.278 jiwa (72,1%), Tahun 2017 sebanyak 220.082 Jiwa (87,5%) dan pada tahun 2018 sebanyak 235.142 jiwa (91,3%). Kondisi akses penduduk Kabupaten Kolaka terhadap air minum terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.52
Akses Penduduk Kabupaten Kolaka terhadap Air Minum Tahun 2014-2018

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Jumlah Penduduk | 235.655 | 241.555 | 246.999 | 251.520 | 257.470 |
| Jumlah Penduduk Akses Air Minum (Jiwa) | 119.505 | 216.590 | 178.278 | 220.082 | 235.142 |
| Persentase Cakupan Akses Air Minum | 50,7% | 89,6% | 72,1% | 87,5% | 91,3% |

Sumber : Profil Kesehatan, 2018

b. Kondisi Jaringan Jalan

Pembangunan infrastruktur jalan memegang peranan penting dalam rangka mendukung konektivitas antar wilayah pedesaan, kecamatan, kawasan produktif dan kawasan setrategis yang berdampak pada pengembangan pertumbuhan ekonomi daerah. Panjang jalan yang telah terbangun di Kabupaten kolaka hingga tahun 2018 sepanjang 876,81 Km dengan 55,65 % dalam kondisi mantap (kondisi baik dan sedang). Rincian jalan Kabupaten hingga akhir tahun 2018 disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.53
Kondisi Jalan Kabupaten Kolaka Tahun 2014 – 2018

| Kondisi Jalan | Panjang Jalan | | Kondisi Jalan | Panjang Jalan | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Km | % | | Km | % |
| Mantap | 487,98 | 55,65 | Baik | 197,28 | 22,5 |
| | | | Sedang | 290,66 | 33,15 |
| Tidak Mantap | 388,83 | 44,35 | Rusak ringan | 254,14 | 28,98 |
| | | | Rusak Berat | 134,68 | 15,36 |
| Jumlah | 876,81 | 100 | | 876,81 | 100 |

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kolaka, 2019

Gambar 2.52
Peta Jaringan Jalan Kab. Kolaka (Bappeda Kolaka, 2018)

c. Kondisi Jembatan

Jembatan di Kabupaten Kolaka selama kurun waktu 5 tahun (2014 - 2018) mengalami kenaikan dari 182 jembatan yang dibangun pada tahun 2014 menjadi 338 jembatan atau terjadi kenaikan 156 jembatan. Tahun 2014 kondisi jembatan dalam keadaan baik sebanyak 109 buah (59,89%), tahun 2015 sebanyak 106 buah (46,69%), tahun 2016 sebanyak 116 (47,35%) tahun 2017 sebanyak 176 (52,07%) dan tahun 2018 sebanyak 180 (53,3%). Perincian kondisi jembatan mulai tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.54
Jumlah Jembatan di Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2018

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Jembatan Kondisi baik (unit) | 109 | 106 | 116 | 176 | 180 |
| Jembatan Kondisi sedang (unit) | 45 | 79 | 58 | 118 | 118 |
| Jembatan Kondisi rusak (unit) | 28 | 42 | 71 | 44 | 40 |
| Total Jumlah Jembatan (unit) | 182 | 227 | 245 | 338 | 338 |
| Persentase Jembatan Kondisi Baik (%) | 59.8 | 46.69 | 47.35 | 52.07 | 53.3 |
| Persentase Jembatan Kondisi Sedang (%) | 24.7 | 34.81 | 23.67 | 34.91 | 34.9 |
| Persentase Kondisi Rusak (%) | 15.3 | 18.5 | 28.98 | 13.02 | 11.8 |

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kolaka, 2018

d. Kondisi Jaringan Irigasi

Pembangunan irigasi yang dibangun di Kabupaten Kolaka bertujuan untuk mempertahankan produktivitas pertanian dan kelestarian kawasan lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B) seluas kurang lebih 7.400 Ha dan LP2B cadangan sebesar kurang lebih 8.100 Ha yang tersebar di wilayah Kabupaten Kolaka.

Berdasarkan data tabel di bawah panjang saluran irigasi pada tahun 2018 dibandingkan dengan panjang saluran irigasi (primer, sekunder dan tersier) pada tahun 2014 mengalami penambahan panjang saluran sebesar 22,85 km. Pada tahun 2014 hingga tahun 2018 jaringan irigasi (primer dan sekunder) dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 24,40%. Ini berarti bahwa penambahan panjang saluran irigasi diiringi dengan peningkatan kualitas jaringan irigasi

Tabel 2.55

Panjang Jaringan Irigasi di Kabupaten Kolaka

| Uraian | Satuan | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panjang Saluran Primer | Km | 14,29 | 17,88 | 17,88 | 18,00 | 18,00 |
| Panjang Saluran Sekunder | Km | 141,63 | 149,03 | 158,00 | 160,77 | 160,77 |
| Panjang Saluran Tersier | **Km** | **206,34** | **206,34** | **206,34** | **206,34** | **206,34** |
| Total | **Km** | | | | | |

Sumber: Dinas PUPR & Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kolaka, 2018

e. Penataan Ruang

Kinerja penataan ruang diukur melalui ketersediaan informasi mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten beserta rencana rincinya. Saat ini Kabupaten Kolaka telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kolaka Tahun 2012 – 2032, sedangkan untuk rencana rincinya berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan sedang dalam proses legalisasi peraturan daerah yaitu Rencana Detail Tata Ruang BWP 1 Kolaka yang meliputi 4 kecamatan yaitu Kecamatan Kolaka, Latambaga, Wundulako dan Baula. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih dibutuhkannya Dokumen Peraturan Daerah Rencana Rinci Bagian Wilayah Perkotaan 2 yang meliputi Kecamatan Pomalaa, Dokumen Peraturan Daerah Rencana Rinci Kawasan Industri Pertambangan, Dokuemn Peraturan Daerah Rencana Rinci Kawasan Bandara dan Rencana Rinci Pusat Kawasan Industri Pertambangan Pomalaa. Minimnya ketersediaan informasi tata ruang tersebut dapat menjadi penyebab penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan perencanaan fungsi ruang, selain itu juga berpengaruh terhadap kurangnya informasi detail ketersediaan lahan untuk investasi. Capaian kinerja yang berkaitan dengan peraturan daerah urusan penataan ruang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.56
Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang Kab. Kolaka
Tahun 2014-2018

| Uraian | Satuan | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revisi RTRW Kabupaten | Buah | - | - | - | - | 1 |
| RTRW Kab. Kolaka yang telah berkekuatan hukum (Perda) | Buah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Yang belum berkekuatan hukum (Draft Perda) | Buah | - | - | - | - | 1 |

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kolaka, 2018

**D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Pembangunan prasarana dasar permukiman pada hakekatnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata dan menyediakan pelayanan dasar. Pembangunan prasarana dasar permukiman meliputi penyediaan prasarana air bersih, sanitasi, drainase, rumah layak huni dan kawasan permukiman bebas kumuh.

Kebutuhan perumahan diperkirakan akan bertambah dari tahun ke tahun diakibatkan sebagai konsekuensi pertumbuhan penduduk dan seiring dengan perkembangan kemajuan Kabupaten Kolaka, Kondisi kebutuhan rumah bagi seluruh masyarakat Kolaka tercatat sebesar 16.715 pada tahun 2018, sedangkan rumah tidak layak huni Tahun 2018 sebanyak 4.667 unit.

Selain itu, kawasan kumuh perkotaan di Kecamatan Kolaka dan Kecamatan Latambaga sebesar 105,23 Ha dan yang sudah tertangani sebanyak 70,51 Ha.

Tabel 2.57
Capain sektor Perumahan, Kawasan Perkotaan, Sanitasi dan Air Bersih
Kabupaten Kolaka Tahun 2014 – 2018

| Uraian | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumah Tidak Layak Huni (unit) | n/a | 5.689 | 5.611 | 5,271 | 4.667 |
| Back Log Rumah (unit) | 22.925 | 21.355 | 19.785 | 18.215 | 16.715 |
| Kawasan Kumuh Perkotaan (Ha) | 105,23 | 102,59 | 101,27 | 90,17 | 34,72 |
| Layanan Sanitasi (%) | 52,45 | 52,45 | 83,39 | 81,58 | 80,64 |
| Layanan Air Bersih (%) | 73,22 | 91,02 | 76,22 | 77,51 | 79,47 |

Sumber: Dinas PKP Kabupaten Kolaka, 2019

Pertumbuhan kebutuhan energi listrik perkapita di Kabupaten Kolaka semakin naik setiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan permukiman, pertumbuhan industri, pertumbuhan infrastruktur publik dan pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan energy listrik Kolaka pada tahun 2017 sekitar 19 megawatt dengan pemakaian tertinggi 18 megawat yang berarti ada cadangan 1 megawat.

Sambungan rumah terhadap kebutuhan listrik setiap tahunnya meningkat, selama kurun waktu 4 tahun (2014-2017) sambungan listrik perumahan mengalami kenaikan dari 33.510 sambungan rumah pada tahun 2104 naik menjadi 47.007 sambungan rumah dengan rasio elektrifikasi 78,9% tahun 2014 naik menjadi 92,99% tahun 2019. Gambaran peningkatan sambungan listrik terhadap rumah dapat dilihat pada grafik berikut ini:

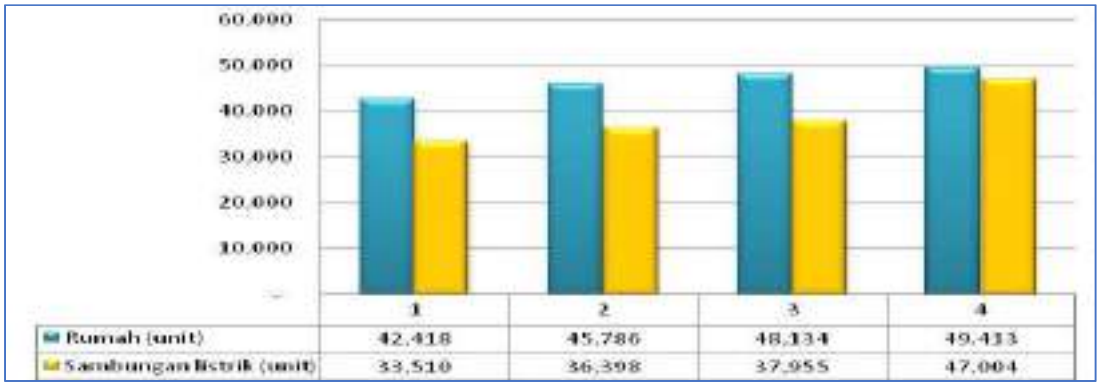


Gambar 2.53
Sumber: Dinas PKP Kab. Kolaka, 2018

## E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sangat berperan dalam kesinambungan pembangunan yang dilaksanakan di daerah. Fungsi peran menciptakan kondisi yang kondusif dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja dan kesbangpol. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memperkuat nilai nilai kebangsaan bagi seluruh masyarakat sehingga tidak terjadi konflik sosial, terbangunnya rasa kebangsaan, toleransi antara suku agama dan ras sehingga tercipta hubungan sosial kemasyarakatan yang saling menghormati, gotong royong, suasana yang kondusif di dalam masyarakat. :

Tabel 2.58
Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat tahun 2014 – 2018

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Penanganan Konflik Sosial (Kali) | 1 | 8 | 10 | 6 | 22 |
| Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan | 2 | 10 | 6 | 1 | - |
| Patroli Penyakit Masyarakat | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 |
| Operasi Penertiban dan Keamanan | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 |
| Pelaksanaan Kegiatan FKUB | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Pengendalian Kebakaran | - | - | 7 | 20 | 2 |

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesbangpol Kab. Kolaka, 2018

**F. Urusan Sosial**

Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten kolaka merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial yang bersifat lintas OPD terdiri atas :

Tabel 2.59
Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Sosial Kabupaten Kolaka

| NO | URAIAN INDIKATOR | VOLUME CAPAIAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Persentase Tingkat Kemiskinan (%) | 15,03 | 14,68 | 15,05 | 13,78 | 12,51 |
| 2 | Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan (Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Nakal, Anak Bermasalah, dll) (%) | 25,33 | 26,26 | 12,41 | 23,39 | 16,21 |
| 3 | Persentase PMKS Lansia Yang Memperoleh Manfaat Program (%) | 9,61 | 36,66 | 26,47 | 30,44 | 30,23 |

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa urusan sosial yang terintegrasi berbagai program lintas SKPD telah mampu menurunkan tingkat kemiskinan daerah dari 15,03 % pada tahun 2015 menjadi 12,51%. Untuk total penanganan PMKS dan Lansia sampai dengan 2018 sebesar 46,44% dari 34,94% di tahun 2014. Sementara untuk ketersediaan potensi sumber kesejahteraan sosial sampai dengan tahun 2018

Tabel 2.60
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

| No | Uraian | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Karang Taruna | 67 Lembaga |
| 2 | Tagana | 25 Orang |
| 3 | Lembaga Konsultasi Kesejahteraan keluarga (LK3) | 1 Lembaga |
| 4 | Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) | 138 Orang |
| 5 | Tenaga Pusat Kesejahteraan Sosial | 80 Orang |

### 2.3.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

**A. Urusan Tenaga Kerja**

Pembangunan ketenagakerjaan dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan di bidang tertentu yang berbasis masyarakat. Hal ini sangat mendukung upaya memperluas lapangan kerja dan menciptakan tenaga kerja mandiri yang berkualitas.

Untuk memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari dapat dilihat dari indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja.

Tabel 2.61
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab. Kolaka
Tahun 2014 – 2018

| Uraian | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Pencari Kerja (orang) | 7.411 | 5.950 | 4.369 | 4.508 | 4.495 | 25.833 |
| Pencari Kerja yg di tempatkan (orang) | 1.278 | 1.034 | 1.644 | 1.060 | 1.645 | 6.661 |
| TPAK (%) | 73.03 | 72.6 | 73.58 | 74,9 | 75,60 | - |
| Tingkat Pengangguran (%) | 4.20 | 6.53 | 4.68 | 2,97 | 2,18 | - |
| Penempatan Naker Gemari | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Penempatan Tenaga Medis Gemari | 131 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: BPS Tahun 2018

Dari tabel di atas menunjukan sejak tahun 2014 – 2018 total pencari kerja sebanyak 25.833 orang dengan jumlah tenaga kerja ditempatkan sebanyak 6.661 orang atau 25,78%, hal ini telah mampu menurunkan tingkat penangguran terbuka dari 4,20% pada tahun 2014 menjadi 2,18

pada tahun 2018. Selain itu pemerintah daerah melakukan pengangkatan tenaga Gemari (Gerakan Masayarakat Mandiri) tenaga pendamping desa dan tenaga medis Gemari masing-masing 100 orang pertahun.

**B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak**

Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Kolaka dilakukan dengan peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Selain itu fasilitasi pemberdayaan perempuan menuju keluarga sehat dan sejahtera dengan meningkatkan keterampilan perempuan dan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Tabel 2.62
Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka

| NO | URAIAN KEGIATAN | VOLUME CAPAIAN (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Prosentase Perempuan di Lembaga Pemerintahan | 4,02 | 8,74 | 0,45 | 3,10 | 8,8 |
| 2 | Prosentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta | N/A | 5,44 | N/A | N/A | N/A |
| 3 | Rasio KDRT | N/A | 2,11 | 0,38 | 0,52 | 1,75 |
| 4 | Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan anak (%) | N/A | N/A | N/A | 87 | 90 |
| 5 | Jumlah penurunan tingkat kekerasan pada perempuan (Kasus) | N/A | 11 | 2 | 18 | 20 |
| 6 | Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan (%) | 25 | 40 | 45 | 47 | 55 |
| 7 | Indeks Pembangunan Gender | 50 | 71,66 | 71,76 | 71,85 | 72,10 |

Sumber: Dinas PP-PA Kab. Kolaka, 2018

Berdasarkan table di atas menunjukan bahwa prosentase peran perempuan di lembaga pemerintahan dari tahun 2014 sebesar 4,02% meningkat menjadi 8,8% pada tahun 2018, demikian juga rasio KDRT dari 2,11 pada tahun 2015 menurun menjadi 1,75 di tahun 2018, sementara

Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan meningkat dari 25 (%) pada tahun 2014 menjadi 55% pada tahun 2018. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2014 sebesar 50% pada tahun 2014 meningkat menjadi 72,10% pada tahun 2018.

**C. Urusan Ketahanan Pangan**

Mengacu pada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan mengamatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab mewujudkan ketahanan pangan, dalam kaitan ini pemerintah melakukan: pengamatan, pembinaan, pengendalian dan pengamanan terhadap ketersediaan pangan cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Ketahanan pangan juga menyangkut lembaga/instansi, dalam menyelenggarakan operasional yang sesuai dengan potensi dan budaya setempat, mengingat cakupan yang multi sektor dan multi wilayah dalam peragaman kegiatan ketahanan pangan sangat membutuhkan adanya koordinasi lintas sektoral yang mantap dan dukungan yang penuh dari Pemerintah Kabupaten Kolaka, guna mewujudkan ketahanan pangan daerah maupun lokal wilayah.

Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah daerah berkewajiban untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan berbasiskan kemandirian penyediaan pangan domestik. Kemandirian ini semakin penting di tengah kondisi yang mengalami krisis pangan, energi dan finansial. Berikut gambaran realisasi kinerja urusan ketahanan pangan yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.63
Realisasi Kinerja Ketahanan Pangan Kabupaten Kolaka
Tahun 2014 – 2018

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | REALISASI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REALISASI 2014 | REALISASI 2015 | REALISASI 2016 | REALISASI 2017 | REALISASI 2018 |
| Jumlah energi dan protein per kapita kabupaten | Kkal | 2843 | 3215 | 4015 | 3876 | 3636 |
| Kapasitas Cadangan Pangan Masyarakat | Ton | 48.174 | 50.120 | 53.980 | 53.088 | 45.611 |
| Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Score PPH | 85.5 | 88.7 | 93.7 | 80.7 | 90,4 |
| Penguatan Regulasi/ Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dan Jejaring Keamanan Pangan Daerah | Lbg | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Prosentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan | Persen | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 |
| Prosentase Penanganan Daerah Rawan Pangan | Persen | 70 | 72 | 74 | 74 | 75 |
| Prosentase Ketersediaan Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan di Daerah | Persen | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| Persentase Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan | Persen | 90 | 92 | 94 | 97 | 99 |
| Jumlah Lumbung Pangan | Unit | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kapasitas Lumbung | Ton | 80 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| Rice Milling Unit (RMU) | Unit | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kapasitas RMU | Ton/hari | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2018

## D. Urusan Pertanahan

Terkait dengan urusan pertanahan, Pemerintah Kabupaten Kolaka secara bertahap dan berkesinambungan untuk melakukan penyelesaian masalah pertanahan baik tanah milik pemerintah daerah yang belum memiliki sertifikat hak milik maupun penyelesaian masalah tanah milik masyarakat melalui mediasi bila terjadi komplik pemamfaatan dan

penggunaan. Sampai dengan tahun 2018 penyelesaian jumlah tanah yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat hak tanah milik pemda sebagaimana pada table berikut.

Tabel 2.64
Data Pertanahan Milik Pemda di Kabupaten Kolaka Tahun 2018

| Uraian | Satuan Bidang/ M2 | Jumlah persil |
|---|---|---|
| Tanah milik pemda yang sudah tersertifikasi | 2.286.688 | 287 |
| Tanah milik pemda yang belum bersertifikat | 1.233.304 | 172 |
| Jumlah lahan pemda | 3.519.992 | 459 |

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kolaka, 2018

**E. Urusan Lingkungan Hidup**

Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat harus memperhatikan aspek keselarasan, keserasian dan keseimbangan dengan fungsi lingkungan, yang dapat menjamin pembangunan daerah berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan mutu lingkungan dengan pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal.

Salah satu tugas dan fungsi lingkungan hidup adalah terkait pengelolaan persampahan. Cakupan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka saat ini baru mencapai tiga kecamatan yaitu Kecamatan Kolaka, Latambaga dan Wundulako. Juimlah produksi sampah perkotaan sebesar 16.968,7 ton dan jumlah sampah yang ditangani sebesar 15.831,7 ton atau persentase penanganan sebesar 93,3%, rincian per kecamatan pada tabel berikut.

Tabel 2.65
Volume Sampah dan Jumlah Sampah yang Tertangani Tahun 2018

| NO | KECAMATAN | JUMLAH VOLUME PRODUKSI SAMPAH (ton) | JUMLAH SAMPAH YANG DITANGANI (ton) | PERSENTASE (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolaka | 9.852,2 | 9.192,1 | 93,3 |
| 2 | Latambaga | 6.280,5 | 5.859,7 | 93,3 |
| 3 | Wundulako | 836,0 | 779,9 | 93,3 |
| **Jumlah** | | **16.968,7** | **15.831,7** | **93,3** |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2018

Pengelolaan sampah meliputi 4 kegiatan utama yaitu pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sementara di TPS, sedangkan tempat pengangkutan dan pengolahan akhir di TPA Patioso Kelurahan Mangolo seluas 10 ha.

Selain itu, terkait kualitas lingkungan di Kabupaten Kolaka, berikut ini gambaran umum dari beberapa indikator umum lingkungan hidup di Kabupaten Kolaka tahun 2014 – 2018.

Tabel 2.66
Kondisi Indikator Lingkungan Hidup Kab. Kolaka 2014 – 2018

| INDIKATOR | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. Persentase Penanganan Sampah Perkotaan | 74,5 | 97,5 | 97,7 | 98,0 | 93,3 |
| 2. Cakupan Pelayanan Sampah (Kecamatan) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3. Rasio Tempat Pembuangan Sampah | 14,05 | 4,54 | 3,18 | 2,05 | 1,76 |
| 4. Indeks Pencemaran Air | 6 | 5,62 | 5,73 | 7,75 | 6,61 |
| 5. Indeks Pencemaran Udara | 90 | 85 | 83 | 83 | n/a |
| 6. Indeks Tutupan Hutan | 59 | 59 | 59 | 59 | n/a |
| 7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 52,4 | 51,2 | 50,90 | 51,05 | n/a |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2018

## F. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Kependudukan dan Catatan sipil diarahkan untuk pemenuhan administrasi kependudukan bagi semua masyarakat agar mendapat kepastian hukum kependudukan berupa penerbutan kartu penduduk, kartu keluarga, akte kelahiran, akte kematian, akte perceraian dan kartu identitas anak sebagai pendataan diri dan status seseorang sehingga dapat digunakan untuk keperluan persyarakatan penyelesaian yang berkaitan dengan status diri.

Selama kurun waktu 4 tahun terakhir (tahun 2014-2018), jumlah penduduk yang telah memiliki administrasi kependudukan yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang undangan, dari hasil pelayanan yang dilakukan kantor pelayanan kantor kependudukan dan pelayanan sipil adalah sebagai berikut:

Tabel 2.67
Capaian Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kolaka Tahun 2014 – 2018

| Jenis Pelayanan | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| KTP | **10.877** | **1.297** | **216** | **125.790** | **136.360** |
| Kartu Keluarga | **6.081** | **6.658** | **7.388** | **70.307** | **57.740** |
| Akta kelahiran | **1.751** | **1.564** | **1.658** | **39.496** | **147.265** |
| Akta Perkawinan | **205** | **1.033** | **984** | **1.280** | **425** |
| Akta kematian | **174** | **115** | **205** | **349** | **353** |
| Akta perceraian | **7** | **15** | **20** | **15** | **32** |
| Akta pengangkatan anak | **2** | **2** | **2** | **4** | **-** |

Sumber: DUKCAPIL Kab. Kolaka, 2018

## G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan untuk meningkatkan peran kelembagaan desa dan lembaga pendukungnya, meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan, meningkatkan ketahan ekonomi masyrakat desa melalui peningkatan peran Bumdes dan ketahanan sosial serta ketahanan lingkungan melalui pemanfaatan sumberdaya alam yang berbasis kearifan local. Jumlah desa di kabupaten kolaka sampai dengan tahun 2018 sebanyak 100 desa dimana masih terdapt status desa sangat tertinggal, 12 desa (12) deesa tertinggal 63 desa berkembang 25 desa. Oleh karena itu fokus pemerintah daerah pada tahun 2019 – 2024 menaikan status desa minimal 55 desa kategori desa mandiri. Rincian penyebaran status desa perkecamatan sebagaimana berikut :

Tabel 2.68
Jumlah Lembaga BUMDES di Kabupaten Kolaka Tahun 2014 - 2018

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Jumlah lembaga BumDes yang dibentuk | 35 | 65 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: DPMD Kab. Kolaka, 2018

## H. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Salah satu indikator kinerja untuk urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kabupaten Kolaka adalah perkembangan rasio akseptor KB aktif pada Pasangan Usia Subur (PUS). Kesadaran akan pentingnya mengatur jumlah anak pada masyarakat Kabupaten Kolaka saat ini sudah cukup baik. Berkaitan dengan itu pemerintah daerah terus melakukan penyuluhan dan pembinaan lintas instansi terkait guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran yang lebih tinggi di masyarakat agar mau ikut ber KB. Jumlah peserta KB di Kabupaten Kolaka pada tahun 2018 sebanyak 31.533 peserta dari 44.721 pasangan usia subur. Capaian indikator perkembangan peserta KB aktif tahun 2014 sampai 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.69
Cakupan Peserta KB Kab. Kolaka Tahun 2014 – 2018

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Jumlah PUS | 37.030 | 39.193 | 41.471 | 41.471 | 44.721 |
| Peserta KB (Akseptor KB) | 27.315 | 28.974 | 26.859 | 29.612 | 31.533 |
| Ratio TFR | 3.12 | 3.02 | 2,92 | 2,82 | 2,6 |
| Ratio CPR | 92 | 94 | 95 | 96 | 72,00 |
| Cakupan Peserta KB Aktif | 90 | 93 | 94 | 95 | 100 |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Kolaka

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) pada tahun 2014 sebanyak 37.030 PUS telah mengikuti program KB sebanyak menjadi 44 akseptor KB sebanyak 27.315 akseptor KB (73,76%), sedangkan tahun 2018 jumlah PUS sebanyak 44.721 PUS dengan jumlah akseptor sebanyak 31.533 akseptor (70,51%). Untuk perkembanga rasio Total Fertiliy Rate (TFR) mengalami penurunan dari 2014 sebesar 3,12% menjadi 2,6% pada tahun 2018, sementara untuk rasio Contraceptive Prevalence Rate (CPR) sebesar 92% pada tahun 2014 menurun hingga 72% pada tahun 2018.

**I. Urusan Perhubungan**

Program prioritas perhubungan di Kabupaten Kolaka masuk dalam 9 Program prioritas SMS Berjaya ke 5 yaitu perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang bertujuan untuk meningkatkan kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas. Urusan wajib perhubungan non pelayanan dasar sangat penting peranannya dalam meningkatkan aksesibilitas jasa transportasi, perdagangan, pengembangan industri lokal maupun investasi sehingga roda perekonomian sudatu daerah lebih maju.

a. Perhubungan Darat

Transportasi angkutan antar propinsi di Kabupaten Kolaka pada setiap tahunnya mengalami kenaikan dari 86 bus tahun 2014 naik menjadi 111 pada tahun 2018. Transportasi angkutan antar kabupaten dalam propinsi pada setiap tahunnya tidak mengalami kenaikan cenderung mengalami penurunan. Transportasi angkutan antar kecamatan dalam kabupaten pada setiap tahunnya mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kondisi transportasi darat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.70
Perkembangan Transportasi Darat Kab. Kolaka Tahun 2014 – 2018

| **Uraian** | | **Tahun** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Angkutan** | **Satuan** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| Antar Propinsi | Bus | 86 | 101 | 101 | 111 | 111 |
| Antar Kabupaten Dalam Prop | Bus | 279 | 245 | 245 | 241 | 241 |
| | MPV | 83 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Antar Kecamatan Dalam Kabupaten | Bus | 77 | 77 | 77 | 29 | 29 |
| | MPV | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | Kota dan Desa | 220 | 110 | 25 | 25 | 25 |

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Kolaka, 2018

b. Perhubungan Udara

Kabupaten Kolaka telah memiliki satu bandara bernama bandara Sangia Ni Bandera sejak tahun 2010 yang terletak di Kecamatan Tanggetada dengan jarak 60 km dari ibu kota Kabupaten Kolaka, jarak tempuh kendaraan darat 45 menit. Panjang landasan semula kurang lebih 900 m dan sejak tahun 2016 panjang landasan bertambah menjadi 1.400 m. Pada awal operasi pesawat udara yang mendarat di bandara tersebut 1 pesawat type ATR 72 dan saat ini pesawat yang beroperasi 2 pesawat. Perkembangan jumlah penerbangan sejak tahun 2015 sampai dengan 2016 mengalami konstan rata-rata hanya 2 pesawat dengan rata-rata

penerbangan 2200 kali dalam setahun. Tahun 2017 penerbangan mengalami penurunan yang cukup signifikan dikarenakan hanya 1 pesawat yang beroperasi. Secara terperinci perkembangan tranportasi dan jumlah penumpang dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Tabel 2.71
Perkembangan Transportasi Udara Kab. Kolaka Tahun 2014 – 2018

| Uraian | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Penerbangan (PP) | n/a | 2.214 | 2.224 | 1.434 | 1.692 |
| Jumlah Penumpang | n/a | 113.695 | 113.004 | 88,500 | 104.430 |

Sumber : Dinas Perhubungan, 2018

c. Perhubungan Laut

Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagi jembatan yang menghubungkan jaringan jalan yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

Kapal atau sarana angkutan laut yang digunakan sebagai transportasi penyeberangan untuk melintas di jalur pelayaran penyeberangan Kolaka-Bajoe adalah kapal Ro-ro yang biasa memuat kendaraan.

Tabel 2.72
Perkembangan Transportasi Laut Kab. Kolaka Tahun 2014 – 2018

| Uraian | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Angkutan Pelayaran (PP) | 3 Kapal/ hari | 3 Kapal/ hari | 3 Kapal/ hari | 3 Kapal/ hari | 3 Kapal/ hari |
| Jumlah Penumpang | n/a | 378.006 | 423.158 | n/a | n/a |

Sumber : Dinas Perhubungan, 2018

**J. Urusan Komunikasi dan Informatika**

Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan suatu kebutuhan bagi suatu organisasi dalam mendukung kegiatan organisasi untuk mencapaian tujuan yang berkaitan dengan peningkatan mutu proses kerja di bidang pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi pada saat sekarang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju transparansi dan akuntabilitas organisasi dan menuju terciptanya good governance di lingkungan pemerintah Kabupaten Kolaka. Fungsi pengembangan teknologi dan komunikasi berbasis elektronik (e-commerce) yang meliputi:

(1) Pengembangan dan pembangunan Sistem Teknologi Informasi Pengembangan Jaringan dan Pusat Data; (2) Layanan Jasa Akses Internet Dedicated; (3) Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi kecamatan; (4) Pembuatan audio visual profil Kabupaten Kolaka.

Gambaran jaringan informasi dan komunikasi di Kabupaten Kolaka adalah sebagai berikut: SKPD yang berjaring internet dalam kurun waktu 4 tahun (2014-2017) mengalami kenaikan dari 20 (58,8%) tahun 2014 menjadi 29 (88 %) pada tahun 2018. Jaringan internet di Kecamatan mulai tahun 2014-2018 mengalami kenaikan dari 11 (83%) tahun 2014 menjadi 11 (92%) dengan kata lain hampir semua kecamatan ada jaringan internet tinggal 1 kecamatan yang belum internet yaitu Kecamatan Polinggona. Desa yang yang tersambung internet setiap tahunnya cukup pesat, pada tahun 2014 31%, tahun 2015 46%, tahun 2016 61%, 2017 88% dan 2018 88%. Kondisi yang berkaitan dengan urusan komunikasi dan informasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.73
Urusan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kolaka Tahun 2014 – 2018

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| SKPD Yang berjaringan internet | Jumlah SKPD/% | 20 (58,8) | 24 (71%) | 27 (79%) | 29 (85%) | 30 (88%) |
| Kecamatan yg tersambung internet | Kecamatan | 10 (83%) | 10 (83%) | 11 (92%) | 11 (92%) | 11 (92%) |
| Covered Desa Internet | % | 31% | 46% | 61% | 88% | 88% |
| Masyarakat komplain terhadap layanan public | % | 32 | 28 | 24 | 18 | 18 |
| SIM Aplikasi | Jumlah Aplikasi | 10 | 12 | 18 | 22 | 22 |

Sumber: Dinas Kominfo Kab. Kolaka, 2019

## K. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

### a. Jumlah Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Dengan semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berkembangnya ekonomi rakyat berbasis kearifan lokal, menurunnya angka kemiskinan dan berkurangnya jumlah pengangguran.

Keberadaan koperasi diharapkan menjadi penyeimbang terhadap pilar ekonomi lainnya. Lembaga koperasi oleh banyak kalangan, Kabupaten Kolakaakini sangat sesuai dengan budaya dan tata kehidupan bangsa Indonesia. Jumlah koperasi aktif di kabupaten Kolaka ditunjukan pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.74
Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Kolaka 2014-2018

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Jumlah Koperasi Aktif (unit) | 24 | 27 | 38 | 42 | 57 |

Sumber: Dinas Koperindag, 2018

**b. Usaha Kecil dan Menengah**

Usaha kecil dan Menengah (UKM) merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sangat berperan mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja, kinerja usaha kecil dan menengah di Kabupaten Kolaka terus mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas.

Tabel 2.75
Jumlah Pertumbuhan UKM Tahun 2014 – 2018

| Uraian | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Jumlah Pertumbuhan UKM | 256 | 1.842 | 219 | 1.690 | 4.482 |

Sumber: Dinas Koperindag, 2018

**L. Urusan Penanaman Modal**

Suasana yang kondusif mutlak diperlukan bagi suatu daerah guna keutuhan dan menjaring penanaman modal. Untuk mewujudkannya dengan memberikan kontribusi dan pelayanan yang prima melalui:

- Pengembangan dan promosi potensi sumberdaya disegala bidang;
- Mengoptimalkan dan pemberdayaan masyarakat sekitar potensi dan produk unggulan;
- Pengawasan Penanaman modal didaerah Kolaka;
- Peningkatan professional aparat penanaman modal;
- Peningkatan kerjasama baik dengan instansi terkait maupun pihak swasta.

Dari beberapa hal tersebut diatas, indikator kinerja terkait dengan penanaman modal dapat dilihat dari perkembangan jumlah investor (PMA/PMDN) di Kabupaten Kolaka.

Gambar 2.54
Grafik Perkembangan Jumlah Investor PMA &PMDN
di Kabupaten KolakaTahun 2014–2017 (DPM-PTSP, 2018)

**M. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**

Gambaran kondisi daerah berkaitan dengan urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Kolaka, dapat dilihat dari jumlah organisasi olahraga dan banyaknya sarana prasarana olahraga, dimana semakin banyak jumlah organisasi olahraga di daerah akan mendorong meningkatnya kepedulian dan keterlibatan pemuda dalam berolah raga. Jumlah organisasi olahraga tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 di kabupaten Kolaka sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.76
Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten KolakaTahun 2014 – 2018

| Indikator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah organisasi olahraga | **32** | **32** | **32** | **32** | **n/a** |

Sumber: Dinas Pemuda dan Olah Raga Tahun 2018

Kehadiran Pemerintah Daerah dalam membina, menfasilitasi, membangun ketersediaan sarana dan prasarana penunjang olahraga serta mendukung penyelenggaraan berbagai ivent kegiatan olah raga di daerah

sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 yang telah dilakukan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.77
Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Kolaka Tahun 2014 – 2017

| Uraian | Satuan | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stadion | Buah | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gedung Olah Raga | Unit | 3 | 3 | 8 | 9 |
| Lapangan Sepak Bola | Lapangan | 28 | 28 | 32 | 31 |
| Lapangan Tenis | Lapangan | 10 | 10 | 12 | 9 |
| Lapangan Volly Ball | Lapangan | 32 | 32 | 28 | 28 |
| Lapangan Basket | Lapangan | 6 | 6 | 13 | 13 |
| Lapangan Takraw | Lapangan | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Kolam Renang | Kolam | 3 | 3 | 10 | 10 |

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kolaka, 2018

**N. Urusan Statistik**

Ketersediaan data dan informasi yang andal dan terpercaya adalah salah satu kunci keberhasilan sebuah perencanaan. Data dan informasi yang berkualitas menjadi sumber informasi tentang kondisi berbagai hal yang dapat diketahui oleh pihak-pihak terkait dalam memahami permasalahan dan tantangan. Hal itu memberikan andil penting dalam merancang kebijakan maupun dalam melakukan pamantauan dan evaluasi agar sasaran untuk memperbaiki keadaan maupun mengatasi masalah yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Pengumpulan sampai dengan penyediaan data dan informasi itu merupakan aspek penting dalam pembangunan pada urusan Statistik. Jenis statistik terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Penyelenggaraan statistik dasar dilakukan oleh BPS sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Sementara itu, statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya baik secara mandiri maupun bersama dengan BPS.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kolaka merupakan instansi Pemda Kabupaten Kolaka yang bertugas melaksanakan urusan

statistik. Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, khususnya jenis statistik sektoral, Dinas Kominfo melakukan koordinasi dengan BPS, instansi vertikal lain dan SKPD Kabupaten melalui forum data. Penyelenggaraan kegiatan statistik ini dituangkan dalam Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

**O. Urusan Kebudayaan**

Kondisi daerah Kabupaten Kolaka terkait dengan urusan kebudayaan dapat dilihat dari indikator kinerja jumlah sarana dan penyelenggaraan seni dan budaya serta jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Urusan Kebudayaan diarahkan untuk menggali, mengembangkan, menanamkan dan melestarikan budaya daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Komitmen tersebut merupakan salah satu program prioritas pembangunanan daerah melalui membangun budaya yang terintegrasi dengan pembangunan pendidikan dan agama.

Tabel 2.78
Jumlah Penyelengaraan Seni Budaya dan Situs Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2017

| NO | URAIAN | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya | 3 | 5 | 9 | 19 |
| 3 | Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan | 20 | 30 | 50 | 83 |

Sumber : Dinas Pariwisata dan Dinas Dikbud, 2018

**O. Urusan Perpustakaan**

Gambaran umum terkait dengan urusan perpustakaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

a. Jumlah Perpustakaan

Perpustakaan merupakan salah satu wadah untuk menarik minat baca masyarakat karena didalamnya terdapat bahan pustaka sebagai

bahan bacaan untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu dan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dan sebagai sarana penunjang kelangsungan pendidikan. Banyaknya jumlah perpustakaan yang terdapat di suatu daerah dapat memberikan gambaran sebagai komitmen kapasitas yang dimiliki oleh daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum untuk menumbuhkan minat baca. Pemerintah Daerah dalam memberikan mendorong minat baca masyarakat saat ini memiliki perpustakaan 1 unit, 1 unit perpustakaan keliling dan mendorong pada semua desa/kelurahan untuk membangun perpustakaan, saat ini sudah terbentuk perpustakaan di 135 desa/kelurahan.

b. Pengunjung Perpustakaan

Indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan tingginya minat baca masyarakat di daerah. Total jumlah pengunjung ke perpustakaan milik Pemda Kabupaten Kolaka sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 4.265 orang, dengan perincian setiap tahunnya sebagai berikut:

Gambar 2.55
Kunjungan Perpustakaan 2014 – 2017

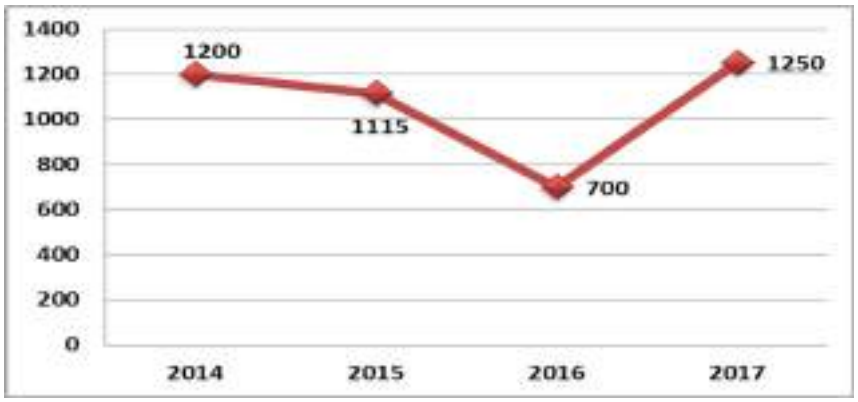


Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kolaka, 2018

Dalam urusan kearsipan ditujukan pada peningkatan pengelolaan kearsipan dengan melakukan pembinaan kearsipan dan melaksanakan akuisisi arsip dari instansi-instansi lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka. Dengan melakukan manajemen kearsipan yang baik akan lebih memudahkan dalam menyimpan maupun pengambilan data sehingga lebih efisien, aman dan efektif.

### 2.3.2 FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

#### A. Urusan Kelautan dan Perikanan

Guna mewujudkan pembangunan pada urusan perikanan di Kabupaten Kolaka, upaya-upaya yang perlu mendapat perhatian dalam mencapai tujuan tersebut adalah peningkatan efisiensi, produksi dan produktifitas usaha tani yang berbasis perikanan.

Sasaran urusan Kelautan Perikanan adalah meningkatnya produksi perikanan serta terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumberdaya kelautan perikanan. Potensi kelautan dan perikanan Kabupaten Kolaka cukup besar dan masih terbuka peluang untuk pengembangannya. Potensi dan produksi perikanan di Kabupaten Kolaka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.79
Produksi perikanan kabupaten Kolaka tahun 2014-2018

| No | Tahun | Total Produksi Perikanan (Ton) | |
|---|---|---|---|
| | | Valnas | Laporan Tahunan |
| 1 | 2014 | 314.147,5 | 79.058,40 |
| 2 | 2015 | 64.256,58 | 80.373,60 |
| 3 | 2016 | 97.123.01 | 80.933,14 |
| 4 | 2017 | 22.994,64 | 76.348,97 |
| 5 | 2018 | 72.468,52 | 72.468,52 |

Sumber : Dinas Perikanan, Tahun 2018

Tabel 2.80
Produksi Perikanan Budidaya Ikan Tahun 2014-2018

| No | Tahun | Produksi Perikanan Budidaya (Ton) | |
|---|---|---|---|
| | | Valnas | Laporan Tahunan |
| 1 | 2014 | 311.034,50 | 57.791,13 |
| 2 | 2015 | 58.987,58 | 58.945,70 |
| 3 | 2016 | 93.296,01 | 59.402,12 |
| 4 | 2017 | 16.476,64 | 56.181,03 |
| 5 | 2018 | 56.855,03 | 56.855,03 |

Sumber : Dinas Perikanan, Tahun 2018

Tabel 2.81
Rincian Produksi Perikanan Budidaya berdasarkan Jenis Usaha dari Tahun 2014-2018

| No | Jenis Usaha | Jumlah Produksi (Ton) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Budidaya Air Tawar | 741,30 | 797,00 | 834,77 | 545,12 | 509,10 |
| 2 | Budidaya Air Payau | 25.722,40 | 29.627,40 | 34.412,92 | 32.954,95 | 32.535,72 |
| 3 | Budidaya Rumput Laut | 31.249,53 | 28.445,40 | 24.075,33 | 22.648,97 | 23.781,42 |
| 4 | Budidaya Teripang | 15,40 | 14,50 | 15,87 | 12,36 | 11,12 |
| 5 | Budidaya Kerapu | 62,50 | 61,40 | 63,23 | 19,63 | 17,67 |
| Jumlah | | 57.791,13 | 58.945,70 | 59.402,12 | 56.181.03 | 56.855.03 |

Sumber : Dinas Perikanan, Tahun 2018

## B. Urusan Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. Melalui pariwisata, potensi - potensi unggulan daerah di sektor lain seperti Pertanian dan Perkebunan akan mudah dikenal sehingga secara tidak langsung pariwisata merupakan alat promosi bagi daerah untuk menarik minat investasi.

Tabel 2.82
Perkembangan Jumlah Objek Wisata dan Jumlah Wisatawan di Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2018

| Indikator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Objek Wisata | | | | | |
| 1. WisataAlam | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 2. Wisata Budaya /Sejarah/ Religi | 23 | 23 | 23 | 40 | 40 |
| 3. Agro Wisata | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| B. Jumlah Wisatawan | 4.589 | 4.589 | 4.744 | 5.952 | 17.824 |
| F. Jumlah Ekonomi kreatif yang dibina | - | - | - | 3 | 6 |
| G. Jumlah SDM Pariwisata | - | - | 40 | 53 | 53 |

Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Kolaka, 2018

## C. Urusan Pertanian

Urusan Pertanian (dalam arti luas mencakup pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan) di Kabupaten Kolaka dihadapkan pada tantangan dan persaingan yang semakin kuat, sehingga usaha tani diarahkan agar dapat menghasilkan produk yang bermutu, berdaya saing dan memenuhi kebutuhan pasar baik domestik bahkan mancanegara.

Tabel 2.83
Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Ternak dan Perikanan di Kabupaten KolakaTahun2014–2018

| No | Indikator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produksi tanaman pangan (ton) | | | | | |
| | Padi | 66.816.2 | 99.388 | 97.835.69 | 85.877.14 | 114.202,68 |
| | Jagung | 1.920.1 | 1.797 | 11.641.17 | 15 | 15.303,60 |
| | Kedelai | 1.053 | 2.639 | 4.024 | 7.055 | 3.257,36 |
| | UbiKayu | 5.635.3 | 7.972.79 | 4.207.14 | 7.773.60 | 4.250,83 |
| | UbiJalar | 2.437.5 | 421.98 | 584.28 | 381.76 | 501,06 |
| | KacangHijau | 11.647,35 | 8.064 | 19.513 | - | 28,95 |
| | Hortikultura: | | | | | |
| | Sayur–sayuran (Kw) | | | | | |
| | a.KacangPanjang | 2.603 | 2.014 | 1.963 | 2.000 | 2.809 |
| | b.Kangkung | 2.222 | 2.205 | 1.556 | 1.700 | 5.101 |
| | c.CabeRawit | 497 | 368 | 779 | 850 | 2.017 |
| | d.Tomat | 1.102 | 1.463 | 934 | 1000 | 1.600 |
| | e. Bayam | 1.738 | 1.809 | 820 | 1000 | 3.356 |
| | Buah– buahan : (Kw) | | | | | |
| | a.Durian | 35.681 | 96.608 | 10.615 | 5.067 | 14.644 |
| | b.Mangga | 19.894 | 108.253 | 19.565 | 8.948 | 28.281 |
| | c.Langsat | 230.436 | 80.499 | 9.602 | 746 | 0 |
| | d.Jeruk Siam/Keprok | 1.536 | 47.478 | 15.883 | 5.112 | 3.003 |
| | e.Pisang | 5.508 | 101.049 | 14.919 | 14.007 | 23.955.5 |

| No | Indikator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Produktivitaslahanpertanian tanamanpangan(ton/ha) | | | | | |
| | Padi | 5.02 | 5.26 | 5.31 | 5.23 | 5,21 |
| | Jagung | 4.55 | 4.15 | 5.19 | 1.60 | 5,40 |
| | Kedelai | 1.80 | 1.87 | 2.00 | 5.00 | 1,52 |
| | UbiKayu | 25.85 | 25.97 | 25.97 | 37,92 | 37,92 |
| | UbiJalar | 12.5 | 10.82 | 10.82 | 11,93 | 11,93 |
| | KacangHijau | 2.05 | 0.79 | 0.75 | 0,82 | 0,82 |
| | Hortikultura : | | | | | |
| | Sayur–sayuran (Kw/Ha) | | | | | |
| | a.KacangPanjang | 5.5 | 6.3 | 7.32 | 7.2 | 22,1 |
| | b.Kankung | 7.6 | 8.8 | 7.9 | 8.4 | 35,9 |
| | c.CabeRawit | 3.2 | 3.2 | 6.13 | 6.5 | 14,8 |
| | d.Tomat | 5.2 | 7.03 | 5.99 | 6.2 | 21,1 |
| | e. Bayam | 7.5 | 9.9 | 5.09 | 6.0 | 28,4 |
| | Buah– buahan: (Kw/Ha) | | | | | |
| | a.Durian | 2.0 | 1.0 | 17.03 | 73 | 140 |
| | b.Mangga | 1.5 | 1 | 39.83 | 58 | 100 |
| | c.Langsat | 2 | 1.4 | 39.71 | 64 | 0 |
| 4 | ProduksikomiditiPerkebunan(Ton) | | | | | |
| | a. Kopi | 263.62 | 250,18 | 202.26 | 203.19 | 178.04 |
| | b. Lada | 866.44 | 1.033 | 1190.3 | 1.223,92 | 1.253,31 |
| | c. Jambu Mete | 290.77 | 281,20 | 283.79 | 275,33 | 288,57 |
| | d. Vanili | 2.13 | 3,03 | 3.03 | 0,53 | 0,53 |
| | e. Kakao | 9760.38 | 9.661,24 | 10.039.54 | 9.496,23 | 9.152,03 |
| | f. Kepala Sawit | 243.5 | 9.5 | 572.41 | 1.811,48 | 727,76 |
| | g. Cengkeh | 6748.82 | 7.203,06 | 6.843.01 | 5.947,40 | 6.327,01 |
| | h. Kelapa Dalam | 3.980,00 | 3.871,31 | 3.561.86 | 3.585,11 | 3.634,56 |
| 5 | LuasTanamPerkebunan(Ha) | | | | | |
| | a. Kopi | 550.05 | 550.05 | 524.55 | 520.05 | 535.68 |
| | b. Lada | 1781.13 | 1781.13 | 2047.47 | 2122.67 | 2.265,39 |
| | c. Jambu Mete | 2122.67 | 1877.91 | 1721.93 | 1716.13 | 1.664,88 |
| | d. Vanili | 77.85 | 77.85 | 77.85 | 77.85 | 46,50 |
| | e. Kakao | 29754.48 | 29754.48 | 29570.44 | 29438.29 | 29.515,66 |
| | f. Kepala Sawit | 5570.,45 | 4706 | 4924.02 | 4927.57 | 4.954,07 |
| | g. Cengkeh | 11189.,29 | 11189.29 | 12887.32 | 13295.52 | 13.727,34 |
| | h. Kelapa Dalam | 3.582.58 | 3.793,32 | 3.793.92 | 3.996,57 | 4.019,87 |
| 6 | ProduksiHasilTernak(Kg) | | | | | |
| | Daging | 939.747 | 1.188.311 | 1.154.487 | 1.249.252 | 1.594.281 |
| | Telur | n/a | 465.125 | 501.179 | 516.501 | 539.219 |

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura,
Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Kolaka, 2018

Tabel 2.84
Kondisi Sarana dan Prasarana Pertanian di Kabupaten Kolaka
Tahun 2014–2018

| NO. | URAIAN | JUMLAH SAPRAS PERTANIAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| I. | ALSINTAN | | | | | |
| | 1. TR-2 (Unit) | 9 | 142 | 110 | 47 | 41 |
| | 2. TR-4 (Unit) | | 7 | 1 | 4 | 5 |
| | 3. Pompa Air (Unit) | | 16 | 49 | 32 | 48 |
| | 4. Rice Transplanter (Unit) | | 31 | 11 | 7 | |
| | 5. Power Threser (Unit) | | 20 | 3 | 3 | |
| | 6. RMU (Unit) | 1 | 4 | 6 | 6 | |

| NO. | URAIAN | JUMLAH SAPRAS PERTANIAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | 7. Combine Harvester (Unit) | | | | | |
| | 8. Seed Cleaner (Unit) | | 1 | | | |
| | 9. Hand Spayer | | | 30 | 21 | 16 |
| | 10. Exavator | | | | 1 | 1 |
| II | PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR | | | | | |
| | 1. Pembangunan/ Rehab JUT (Km) | 11,4 | 22,9 | 20,8 | - | 3,9 |
| | 2. Perluasan Sawah (Ha) | 360 | 1.000 | 350 | | |
| | 3. Pengembangan optimalisasi lahan (Ha) | 540 | 3.000 | - | 1.350 | |
| | 4. Pembangunan irigasi air tanah | 3 | 15 | 7 | 11 | 5 |
| | 5. Pembangunan irigasi air permukaan | | 2 | | 5 | 5 |
| | 6. Rehab irigasi tersier (Ha) | 2.200 | 4.013 | 2.000 | 1.500 | - |
| | 7. Rehab jaringan irigasi tersier (Meter) | 5.500 | 12.500 | 4.800 | 2.900 | |
| | 8. Pembangunan DAM Parit (unit) | 3 | 30 | 10 | 6 | 2 |
| | 9. Pembangunan embung (Unit) | | 6 | | 2 | |

## D. Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan di Kabupaten Kolaka saat ini berada diurutan keempat dalam berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Kolaka. Fasilitasi sektor perdagangan melalui penyederhanaan regulasi yang bertujuan untuk menarik investor, pengembangan dan perluasan guna akselerasi perdagangan serta memperkuat dan memperbaiki struktur perdagangan baik dalam hal konsentrasi penguasaan pasar maupun dalam hal kedalaman jaringan pemasok bahan baku dan bahan pendukung.

Untuk perdagangan antar pulau, Kabupaten Kolaka telah mengantarpulaukan beberapa komoditas hasil bumi dan laut diantaranya hasil tanaman perkebunan,hasil hutan, perikanan dan peternakan. Nilai perdagangan antar pulau Kabupaten Kolaka ditunjukan sebagai berikut:

Tabel 2.85
Nilai Perdagangan Antar Pulau Kab.Kolaka 2014-2018

| Uraian | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasil Bumi dan Laut | 281.161.695 | 1.338.062.887 | 633.240.378 | N/A | 857.853.000 |

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka

Disisi sarana perdagangan, Pemerintah Kabupaten Kolaka telah membangun sarana perdagangan untuk mendukung kegiatan perekonomian masyarakat baik yang bersumber dari dana APBN maupun dana APBD.

Tabel 2.86
Jumlah Pasar yang terbangun di Kab.Kolaka 2014-2018

| Uraian | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembangunan Pasar dan Gudang (unit) | 2 | 4 | 5 | 3 | - |

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka

Dalam kurun 5 tahun terakhir 2014-2018 di Kabupaten Kolaka telah terbangun 13 unit pasar dan 1 unit gudang. Jumlah Pasar di Kabupaten Kolaka sampai dengan tahun 2018 berjumlah 39 unit. Pasar rakyat memerlukan perhatian khusus agar eksistensi pasar rakyat betul-betul tetap bisa survive di antara pasar modern.

## E. Urusan Perindustrian

Sektor Perindustrian merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian daerah mengingat pentingnya kontribusi sektor ini terhadap pembentukan PDRB dan penciptaan lapangan kerja. Adapun capaian urusan perindustrian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.87
Realisasi Capaian Urusan Perindustrian Kab. Kolaka 2014 – 2018

| Uraian | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bantuan Peralatan (Set) | - | 3 | 3 | 8 | 11 |
| Pembangunan Sentra IKM (unit) | - | - | 2 | 24 | - |
| Pembangunan Workshop Tenun Adat (unit) | - | - | 1 | - | - |
| Pembangunan Gedung Saos Cabe (unit) | - | - | - | 1 | - |
| Pembangunan Workshop pengolahan dodol cokelat (Unit) | 1 | - | - | - | - |

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka

### 2.3.4. Fokus Urusan Penunjang Pemerintahan

#### 2.3.4.1. Urusan Perencanaan Pembangunan

Untuk melaksanakan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kolaka, mempunyai kewenangan :

a. Perumusan kebijakan daerah dibidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber DayaAlam, Infrastruktur dan Kewilayahan
d. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk pimpinan.

Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan Kabupaten Kolaka.

Tabel 2.88
Capaian kinerja bidang perencanaan Tahun 2014 – 2018

| No | Indikator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda (RPJPD 2005-2025) | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | |
| 2 | Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda (RPJMD 2014-2019) | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | |
| 3 | Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | |
| 4 | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda (RTRW 2012-2032) | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | |
| 5 | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

### 2.3.4.2. Urusan Kepegawaian

Urusan Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia dimana arah kebijakannya melakukan tertib adminstrasi kepegawaian ASN yang terintegragi dengan system informasi kepegawaian, melaukan pendidikan dan pelatihan formal serta pendidikan penjenjangan. Sampai dengan tahun 2018 pelayanan urusan kepegawaian yang telah dilakukan sebagai mana pada table berikut :

Tabel 2.89
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Kepegawaian Kabupaten Kolaka

| No | Indikator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 2 | Jumlah mutasi ASN pada instansi pemerintah | 382 | 274 | 295 | 767 | 125 |
| 3 | Jumlah ASN yang telah mengikuti Diklat pimpinan pada instansi pemerintah | 2 | 28 | 19 | 12 | 13 |
| 4 | Jumlah seleksi JPT Pratama pada instansi pemerintah | - | 11 | 9 | 7 | 0 |

Sumber: BKPSDM Kab. Kolaka, 2018

### 2.3.4.3. Urusan fungsi penunjang Pengawasan

Urusan pengawasan di daerah dilaksanakan inspektorat kabupaten dengan fokus pengawasan diarahkan pada pembinaan, tata kelola administrasi keuangan serta mengevaluasi hasil tindak lanjut dari hasil rekomendasi terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK. Kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh inspekttorat kabupaten sebagaimana pada table berikut :

Tabel 2.90
Capaian Kinerja penyelengaraan Urusan penunjang Pemerintahan Bidang pengawasan Kabupaten Kolaka

| No | Indikator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemeriksaan Reguler (Kali) | 54 | 44 | 20 | 16 | 20 |
| 2 | Penyelesaian terhadap temuan (%) | 80 | 80 | 85 | 85 | 30 |
| 3 | Pemeriksaan Khusus (Kali) | 60 | 107 | 69 | 71 | 6 |

Sumber: Inspektorat Kab. Kolaka, 2018

### 2.3.4.4. Urusan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan

Urusan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan di daerah dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka

yang diharapkan dapat memberikan telaahan dan kajian terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh daerah sebagai masukan dalam proses penyusunan perencanaan. Kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Balitbang Kabupaten Kolaka sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.91
Capaian Kinerja penyelengaraan Urusan penunjang Pemerintahan
Bidang Penelitian dan pengembangan Kabupaten Kolaka

| No | Indikator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah kajian dan penelitian yang dijadikan bahan perumusan kebijakan | - | - | - | 6 | 7 |
| 2 | Jumlah hasil kajian dan penelitian yang telah didesiminasi | - | - | - | 1 | 1 |

Sumber: Balitbang Kab. Kolaka, 2018 (diolah)

## 2.4 ASPEK DAYA SAING

Aspek daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah pada umumnya terkaitdengan kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumberdaya manusia.

### 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiflier effect bagi peningkatan daya saing daerah.

Untuk menggambarkan aspek kemampuan ekonomi daerah untuk memicu daya saing daerah dapat dilihat melalui pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita. Adapun angka konsumsi rumah tangga perkapita Kabupaten Kolaka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.92
Perkembangan komponen Konsumsi Rumah Tangga
Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2017

| URAIAN | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| ADHB (milyar)<br>ADHK (milyar) | 4.082,14<br>3.451,09 | 4.488,66<br>3.665,81 | 4.927,66<br>3.923,89 | 5.388,28<br>4.116,03 |
| Proporsi terhadap PDRB | 26,70 | 26,45 | 26,81 | 25,25 |
| Pertumbuhan konsumsi RT | 7,36 | 6,22 | 7,04 | 4,90 |

Sumber: BPS, 2018 (diolah)

### 2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup pembelian untuk makanan dan bukan makanan (barang dan jasa) di dalam negeri maupun di luar negeri. Termasuk pula di sini pengeluaran lembaga nirlaba yang tujuan usahanya adalah untuk melayani keperluan rumah tangga. Salah satu determinan dari kesejahteraan ekonomi penduduk adalah kemampuan daya beli penduduk. Peningkatan kemampuan daya beli akan meningkatkan kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Meningkatnya kemampuan daya beli penduduk tentu saja diakibatkan meningkatnya pendapatan. Karena itu besarnya konsumsi/pengeluaran penduduk merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk.

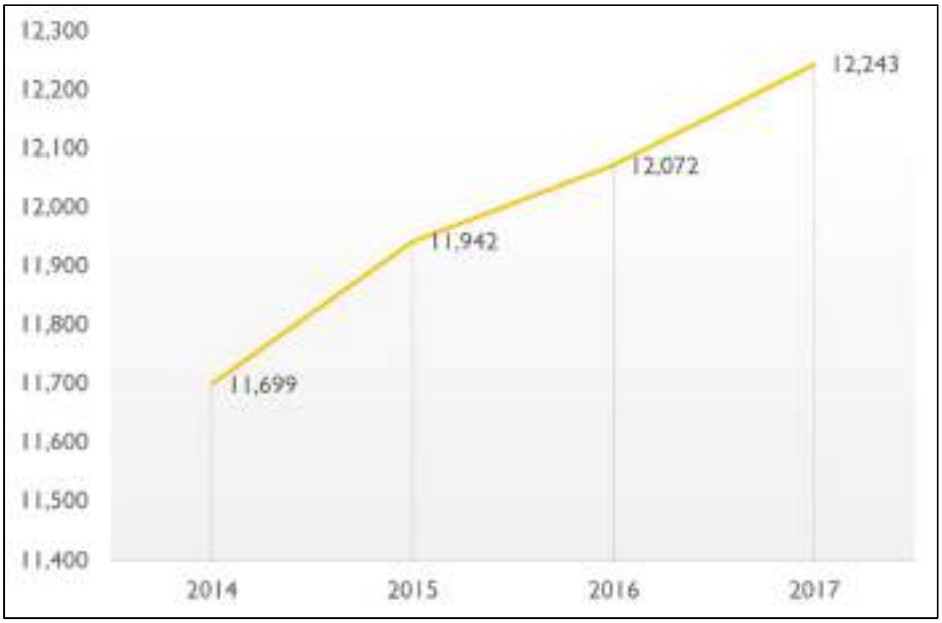


Gambar 2.56
Pengeluaran per kapita (ribu rp/org/thn) Kab. Kolaka 2014-2017

Tabel 2.93
Pengeluaran Rata-rata per Kapita sebulan kelompok Makanan (rupiah) Kab, Kolaka Tahun 2017

| Komoditas/ commodity | | Kelompok Barang Makanan / Food Commodity Group | |
|---|---|---|---|
| | | Pengeluarn (Rp)/ Expenditure (Rp) | Persentase/ Percentage |
| 1 | | 2 | 3 |
| 1 | Padi - padian/ Grains | 64.649 | 13,36 |
| 2 | Umbi - Umbian / Tubers | 5.272 | 1,09 |
| 3 | Ikan, Udang, Cumi, Kerang/ Fish, Shrimp,Squid,Scallop | 63.575 | 13,13 |
| 4 | Daging / Meats | 9.070 | 1,87 |
| 5 | Telur dan Susu / Eggs and Milk | 25.761 | 5,32 |
| 6 | Sayur- Sayuran / Vegetables | 30.417 | 6,28 |
| 7 | Kacang- Kacangan/ Beans | 7.183 | 1,48 |
| 8 | Buah - Buahan / Fruits | 16.378 | 3,38 |
| 9 | Minyak dan Lemak /Oil And Fats | 11.281 | 2,33 |
| 10 | Bahan Minuman / Baverages Ingredients | 18.080 | 3,74 |
| 11 | Bumbu - bumbuan / Spices | 12.508 | 2,58 |
| 12 | Konsumsi Lainnya / Other Consumptions | 11.283 | 2,33 |

| Komoditas/ commodity | | Kelompok Barang Makanan / Food Commodity Group | |
|---|---|---|---|
| | | Pengeluarn (Rp)/ Expenditure (Rp) | Persentase/ Percentage |
| 1 | | 2 | 3 |
| 13 | Makanan dan Minuman jadi / Prepared Foods and beverages | 137.215 | 28,35 |
| 14 | Tembakau dan sirih / Tobacco and betel | 71.350 | 14,74 |
| **Jumlah pengeluaran / Total of Expenditure** | | **484.022** | **100** |

Sumber: BPS, 2018 (diolah)

Tabel 2.94
Pengeluaran Rata-rata per Kapita sebulan kelompok bukan Makanan (rupiah) Kab, Kolaka Tahun 2017

| Komoditas/ commodity | | Kelompok Barang Non Makanan / Non Food Commodity Group | |
|---|---|---|---|
| | | Pengeluarn (Rp)/ Expenditure (Rp) | Persentase/ Percentage |
| 1 | | 2 | 3 |
| 1 | Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga/ Housing and Facilities | 226.902 | 53,70 |
| 2 | Aneka Barang dan Jasa / Miscellaneous Goods and Services | 81.053 | 19,18 |
| 3 | Pakaian , Alas Kaki , dan Tutup kepala/ Clothing, Footwear,and Headger | 33.986 | 8,04 |
| 4 | Barang Tahan Lama / Durable Goods | 40.492 | 9,58 |
| 5 | Pajak, Pungutan dan Asuransi / taxes, charges and Insurace | 32.460 | 7,68 |
| 6 | keperluan Pesta dan Upacara/ kenduri/Party Supplies and Ceremony | 7.625 | 1,80 |
| Jumlah pengeluaran / Total of Expenditure | | 422.518 | 100,00 |

Sumber: BPS, 2018 (diolah)

Tabel 2.95
Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita seminggu (kkal)
Kabupaten Kolaka tahun 2017

| **Kelompok Makanan / Food Group** | | **Rata - Rata Konsumsi Kalori Perkapita Average Consumtion Of Calories Per Capita** |
|---|---|---|
| **1** | | **2** |
| 1 | Padi - padian/ Cereal | 7.388,05 |
| 2 | Umbi - Umbian / Tubers | 643,54 |
| 3 | Ikan/ Fish | 742,42 |
| 4 | Daging / Meats | 195,19 |
| 5 | Telur dan Susu / Eggs and Milk | 388,11 |
| 6 | Sayur- Sayuran / Vegetables | 284,38 |
| 7 | Kacang- Kacangan/ Legumes | 276,88 |
| 8 | Buah - Buahan / Fruits | 456,04 |
| 9 | Minyak dan Lemak /Oil And Fats | 1.600,35 |
| 10 | Bahan Minuman / Baverages Ingredients | 800,98 |
| 11 | Bumbu - bumbuan / Spices | 103,24 |
| 12 | Konsumsi Lainnya / Miscellaneous Food items | 547,90 |
| 13 | Makanan dan Minuman jadi / Prepared Foods and beverages | 3.624,92 |
| **Jumlah / Total** | | **17.052,00** |

Sumber: BPS, 2018 (diolah)

### 2.4.1.2 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga.

Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. Nilai Tukar Petani dapat dihitung dengan membandingkan faktor produksi dengan produk, yaitu perbandingan antara indeks yang diterima (It) petani dan yang dibayar (Ib) petani.

NTP Kabupaten Kolaka mengacu pada pendekatan perhitungan NTP Provinsi Sulawesi Tenggara yang dihitung oleh BPS sebesar 94,93 % tahun 2018.

2.4.1.3 Produktifitas Daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor (17 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. PDRB dihitung berdasarkan 17 (Tujuh Belas) sektor. Produktifitas Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2018.

Tabel 2.96
Produktifitas Total Daerah

| SEKTOR LAPANGAN USAHA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 23.638.337,04 | 25.067.909,35 | 29.092.483,70 | 31.065.829,21 | 33.180.332,84 |
| Pertambangan dan Penggalian | 80.164.841,22 | 91.320.702,09 | 90.725.126,02 | 115.390.956,67 | 130.933.993,80 |
| Industri Pengolahan | 16.666.211,63 | 17.208.734,07 | 20.461.567,10 | 22.156.155,18 | 24.892.803,70 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 23.784,94 | 24.459,13 | 29.613,26 | 35.543,86 | 36.614,09 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 191.718,30 | 200.843,21 | 222.465,00 | 227.002,49 | 240.777,57 |
| Konstruksi | 12.610.539,71 | 15.204.009,85 | 18.812.618,19 | 19.765.860,65 | 21.828.974,49 |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 15.739.456,75 | 17.211.769,11 | 20.132.450,16 | 22.031.158,89 | 24.289.301,46 |
| Transportasi dan Pergudangan | 3.795.208,15 | 3.976.204,33 | 4.419.370,75 | 4.680.027,45 | 5.174.241,52 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 675.542,20 | 687.295,81 | 770.540,48 | 823.967,24 | 899.844,93 |
| Informasi dan Komunikasi | 1.113.785,38 | 1.163.096,35 | 1.325.585,04 | 1.467.374,40 | 1.590.166,25 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 2.897.030,27 | 3.162.711,61 | 3.765.716,86 | 4.092.609,77 | 4.317.022,19 |
| Real Estate | 1.484.937,41 | 1.681.494,60 | 1.834.549,34 | 1.948.440,09 | 2.006.716,81 |
| Jasa Perusahaan | 184.569,59 | 210.331,95 | 241.189,00 | 262.001,00 | 284.447,51 |

| SEKTOR LAPANGAN USAHA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 4.735.939,79 | 4.847.642,92 | 5.107.628,87 | 5.391.638,72 | 5.948.215,62 |
| Jasa Pendidikan | 2.999.982,07 | 3.305.918,65 | 3.638.780,01 | 3.891.564,45 | 4.211.273,01 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 700.268,97 | 777.704,58 | 835.235,71 | 880.699,98 | 953.275,22 |
| Jasa lainnya | 1.633.168,19 | 1.803.683,44 | 1.965.753,83 | 2.063.098,46 | 2.195.363,22 |

Sumber : Bappeda, 2019 (Data diolah)

### 2.4.2 Fokus Kewilayahan/Infrastruktur

Gambaran terhadap aspek daya saing Kabupaten Kolaka dalam hal kewilayahan dan infrastruktur dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Fokus Kewilayahan

Daya saing daerah dalam fokus kewilayahan dapat digambarkan salah satunya melalui luasan wilayah yang bisa dimanfaatkan untuk aktivitas pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam konteks tata ruang, penggunaan lahan di suatu daerah terbagi menjadi menjadi dua jenis kawasan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan budidaya inilah yang kemudian menjadi potensi wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas pembangunan dan aktivitas masyarakat.

Tabel 2.97
Luasan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Kab. Kolaka

| Jenis Penggunaan Lahan | Luas | |
|---|---|---|
| | (ha) | % |
| **A. Kawasan Lindung** | | |
| Hutan Lindung | 109.174,8 | 43.92 |
| Sempadan Sungai | 2.391,2 | 0.96 |
| Hutan Suaka | 8.070,0 | 3.25 |
| **B. Kawasan Budidaya** | | |
| Hutan Produksi | 74.538,6 | 29.98 |
| Perkebunan | 23.755,2 | 9.56 |
| Sawah | 8.520,5 | 3.43 |
| Lahan Kering/Hortikultura | 665.5 | 0.27 |
| Permukiman | 13.075,8 | 5.26 |
| Pertambangan | 83.99,7 | 3.38 |
| **JUMLAH** | **328.364,3** | **100** |

Sumber: RTRW Kab. Kolaka, Bappeda 2018

b. Fokus Infrastruktur

Dalam konteks daya saing infrastruktur, Kabupaten Kolaka merupakan salah satu daerah yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari infrastruktur daerah Panjang jalan di Kabupaten Kolaka pada tahun 2018 sepanjang 876,81 Kilometer, sementara jumlah kendaraan sebanyak 7.890 sehingga Rasio Panjang jalan perjumlah kendaraan sebesar 0,11 yang diuraikan dalam tabel 2.86

Tabel 2.98
Kondisi Infrastruktur jalan Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2018

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Panjang jalan (km) | 827,82 | 850,82 | 876.82 | 877.42 | 876.81 |
| Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (km) | 132.44 (16%) | 135.16 (16) | 157.06 (18%) | 266,74 (30%) | 197,28 (22,5%) |
| Panjang jalan kabupaten dalam kondisi sedang (km) | 333,02 (40%) | 382,32 (45%) | 139.16 (16%) | 250,12 (29%) | 290,66 (33,15%) |
| Panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak (km) | 132,44 (16%) | 133.97 (16%) | 381.36 (43%) | 241,25 (27%) | 254,1 (28,98%) |
| Panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat (km) | 203,75 (25%) | 199.37 (23%) | 199.24 (23%) | 119,31 (14%) | 134,7 (15,36%) |
| Panjang Jalan Nasional (km) | 361,00 | 361,00 | 361,00 | 361,00 | 361,00 |
| Panjang jalan Provinsi (km) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka, 2019

Tabel 2.99
Kondisi Infrastruktur Irigasi di Kab. Kolaka

| Uraian | Satuan | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rasio Jaringan Primer** | **Km/ha** | **1,37** | **1,59** | **1.59** | **1,6** | **1,6** |
| Panjang Saluran | Km | 14,29 | 17,88 | 17,88 | 18,00 | 18,00 |
| - Baik | Km | 7,43 | 10,55 | 12,16 | 13,68 | 13,68 |
| - Sedang | Km | 1,57 | 4,11 | 2,86 | 1,80 | 1,80 |
| - Rusak | Km | 5,29 | 3,22 | 2,86 | 2,52 | 2,52 |
| **Persentase** | | | | | | |
| Baik | | 52% | 59% | 68.09% | 76% | 76% |
| Sedang | | 11% | 23% | 15.02% | 10% | 10% |
| Kurang | | 37% | 18% | 16.89% | 14% | 14% |
| **Rasio Jaringan Sekunder** | **Km/ha** | **0.01** | **0.01** | **0.01** | **0.01** | **0.01** |
| Panjang Saluran | Km | 141,63 | 149,03 | 158,00 | 160,77 | 160,77 |
| - Baik | Km | 73,65 | 87,93 | 107,59 | 122,18 | 125,00 |
| - Sedang | Km | 15,58 | 34,28 | 23,73 | 16,08 | 15,77 |
| - Rusak | | 52,4 | 26,83 | 26,70 | 22,51 | 20,00 |
| **Persentase** | | | | | | |
| Baik | | 52% | 59% | 68,09% | 76% | 77,75% |
| Sedang | | 11% | 23% | 15,02% | 10% | 9,81% |
| Rusak | | 37% | 18% | 16,89% | 14% | 12,44% |

| Rasio Jaringan Tersier | Km/ha | n/a | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panjang Saluran | **km** | **206,34** | **206,34** | **206,34** | **206,34** | **206,34** |
| - Pasangan Batu | **km** | **7,11** | **9,24** | **37,31** | **42,11** | **42,11** |
| - Tanah | **km** | **199,23** | **197,10** | **169,03** | **164,23** | **164,23** |
| **Persentase** | | | | | | |
| - Pasangan Batu | **3,5%** | **4%** | **18%** | **20%** | **20.41%** | **20.41%** |
| - Tanah | **96,5%** | **96%** | **82%** | **80%** | **79.59%** | **79.59%** |

Sumber: Dinas PUPR & Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kolaka, 2018

### 2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian. Investasi Akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Dalam mendorong investasi di daerah, Pemerintah Kabupaten Kolaka akan memberikan jaminan keamanan yang kondusif kepada semua investor yang akan menanamkan modalnya, kenyamanan berusaha, ketertiban pada lokasi usaha dan memfasilitasi dalam bila muncul permasalahan di dalam melaksanakan kegiatanaktivitas usaha investasinya.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan rasa aman tersebut baik ditingkat kabupaten, kecamatan, dan desa, melalui koordinasi yang terpadu disemuatingkatan, sosial kegiatan, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita dalam berbagai aktivitas di masing-masing wilayah, sehingga tumbuh rasa memiliki dan pada akhirnya akan dapat di wujudkan suasana aman dan kondusif. Gambaran umum kondusifitas Kabupaten Kolaka khususnya terkait dengan Stabilitas keamanan dapat dilihat pada tabel tersebut

Tabel 2.100
Angka Stabilitas Keamanan
Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2018

| No | Jenis Kriminal | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah kasus narkoba | 5 | 18 | 28 | 82 |
| 2. | Jumlah kasus pembunuhan | 7 | 2 | 1 | - |
| 3. | Jumlah kejahatan seksual | 20 | 21 | 24 | 21 |
| 4. | Jumlah kasus penganiayaan | 22 | 86 | 125 | 90 |
| 5. | Jumlah kasus pencurian | 32 | 93 | 158 | 196 |
| 6. | Jumlah kasus penipuan | 3 | 33 | 45 | 34 |
| 7. | Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun | 211 | 946 | 769 | 574 |
| 8. | Angka kriminalitas (8)/(9) | 0,001 | 0,004 | 0,003 | 0,002 |
| 9. | Jumlah Demo | 36 | 30 | 38 | 30 |

Sumber : BPS Kabupaten Kolaka,2018

Komponen lain yang mendukung iklim berinvestasi di suatu daerah adalah dukungan regulasi. Untuk memperkuat daya saing daerah di bidang investasi, Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka akan memberikan insentif dan pemberian kemudahan bagi penanaman modal sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010, dengan tujuan :

- Memberikan dukungan kepada penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah;
- Pemberian dan penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanaman modal didaerah;
- Mendorong peningkatan ekspansi sektor swasta melakukan investasi di daerah guna pemanfaatan potensi daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah dilakukandengan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparan, akuntabilitas, efektif dan efisien. Pemberian insentif daerah dapat berupa:

- Pengurangan dan keringanan pajak daerah;
- Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah yang menyebabkan ekonomi tinggi;
- Pemberian dana stimulan dan atau pemberian bantuan modal.

Sedangkan pemberian kemudahan dapat berbentuk:

- Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- Penyediaan sarana prasarana pemerintahan dalam bentuk pinjam pakai;
- Penyediaan lahan atau lokasi;
- Pemeberian bantuan teknis dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayan terpadu satu pintu.

Mekanisme pemberian insentif dan pemberian kemudahan bagi penanaman modal di daerah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2010.
Penguatan daya saing daerah untuk menarik investor ke daerah, guna pemanfaatan potensi unggulan daerah sebagai sumber kekuatan ekonomi riil, menjadi program prioritas daerah.

Dalam mendorong peningkatan investasi kemudahan pelayanan perizinan, ketepatan waktu penyelesaian perizinan, transparansi, akuntabel, merupakan tuntutan yang harus di penuhi di daerah. Berdasarkan Undang- undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal, ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009.

Sehubungan hal tersebut, untuk mempermudah pelayanan perizinan (one stop service), Pemerintah Kabupaten Kolaka membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka.

Tabel 2.101
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka

| NO | U R A I A N | CAPAIAN KINERJA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | | | | |
| **I** | **Jumlah Nilai Investasi PMA dan PMDN** | Rp. 591.7 m | Rp. 663.7 m,- | Rp. 714. m | Rp.777.1 m | Rp.777.9 m |
| | | | | | | |
| **II** | **Pelayanan Perizinan :** | | | | | |
| 1 | Surat Izin Tempat Usaha (SITU) | 608 Izin | 703 Izin | 595 Izin | 504 Izin | 424 Izin |
| 2 | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | 538 Izin | 475 Izin | 655 Izin | 379 Izin | 340 Izin |
| 3 | Tanda Daftar Perusahaan (TDP PT) | 230 Izin | 478 Izin | 1093 Izin | 125 Izin | - |
| 4 | Tanda Daftar Perorangan (TDP PO) | - | - | - | 167 Izin | - |
| 5 | Tanda Daftar Industri (TDI) | 9 Izin | 26 Izin | 19 Izin | 4 Izin | - |
| 6 | Tanda Daftar Gudang (TDG) | 1 Izin | 20 Izin | 10 Izin | 3 Izin | - |
| 7 | Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) | 170 Izin | 235 Izin | 32 Izin | 81 Izin | 93 Izin |
| 8 | Izin Operasional rumah sakit | - | - | - | - | 1 Izin |
| 9 | Izin Operasional klinik | - | - | - | - | 2 Izin |
| 10 | Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK) | 5 Izin | 26 Izin | 355 Izin | 7 Izin | 10 Izin |
| 11 | Tanda Daftar Koperasi (TDP KOP) | - | - | - | 20 Izin | - |
| 12 | Tanda Daftar CV (TDP CV) | - | - | - | 108 Izin | - |
| 13 | Izin Lokasi | 5 Izin | 12 Izin | 5 Izin | 1 Izin | - |
| 14 | Izin Prinsip | 5 Izin | 11 Izin | 11 Izin | 15 Izin | 15 Izin |
| | Jumlah | 1571 Izin | 1986 Izin | 2775 Izin | 1414 Izin | 885 Izin |
| **III** | **Pelayanan Non Perizinan** | | | | | |
| 1 | Reklame | 86 Lembar | - | - | - | - |
| 2 | NPWPD | 608 Lembar | 730 Lembar | 595 Lembar | 504 Lembar | 374 Lembar |
| | **Jumlah** | **694 Lembar** | **730 Lembar** | **595 Lembar** | **504 Lembar** | **374 Lembar** |

Sumber: DPM-PTSP Kab. Kolaka, 2018

### 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

#### 2.4.4.1. Tingkat Pendidikan Penduduk

Salah satu indikator untuk melihat kualitas sumber daya manusia suatu daerah adalah tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah.

Tabel 2.102
Persentase Penduduk 15 Tahun Ke atas yang Bekerja
Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, Tahun 2017

| Karakteristik | Tidak/ Belum pernah bersekolah | Masih Bersekolah | | | Tidak bersekolah lagi | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SD/ Sederajat | SMP/ Sederajat | SMA / Ke atas | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Jenis Kelamin** | | | | | | |
| Laki - Laki | 4,91 | 14,61 | 5,32 | 8,92 | 66,23 | 100 |
| Perempuan | 5,43 | 14,90 | 6,07 | 7,32 | 66,28 | 100 |
| **Kelompok Pengeluaran** | | | | | | |
| 40 Persen Terbawah | 6,43 | 20,22 | 6,26 | 6,54 | 60,55 | 100 |
| 40 Persen Tengah | 4,37 | 12,91 | 5,58 | 10,04 | 67,09 | 100 |
| 40 Persen Teratas | 4,37 | 8,35 | 4,83 | 7,45 | 74,99 | 100 |
| **Kabupaten Kolaka** | 5,16 | 14,75 | 5,68 | 8,15 | 66,26 | 100 |

Sumber: BPS, 2018 (diolah)

# BAB III
# GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Keuangan daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik, menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mendukung tercapainya pembangunan nasional. Oleh karena itu, maka Pemerintah Daerah perlu memastikan mempunyai pendapatan yang cukup dalam rangka membiayai berbagai belanja daerahnya dan pengelolaannya harus dilakukan secara efektif dan efisien agar tepat guna dan berhasil guna.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian, sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah harus mempunyai perhatian terhadap pengelolaan keuangan daerah dan manajemen aset daerah, hal ini dikarenakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, transparan serta akuntabel merupakan sebuah kewajiban sebagai penyelenggara pemerintahan guna mempertanggungjawabkan amanah rakyat.

## 3.1. Kondisi Perekonomian Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan perkonomian suatu daerah. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk mengetahui besarnya pergerakan harga. Perkembangan PDRB Kabupaten Kolaka tahun 2014 sampai dengan 2017 ditampilkan pada grafik berikut :

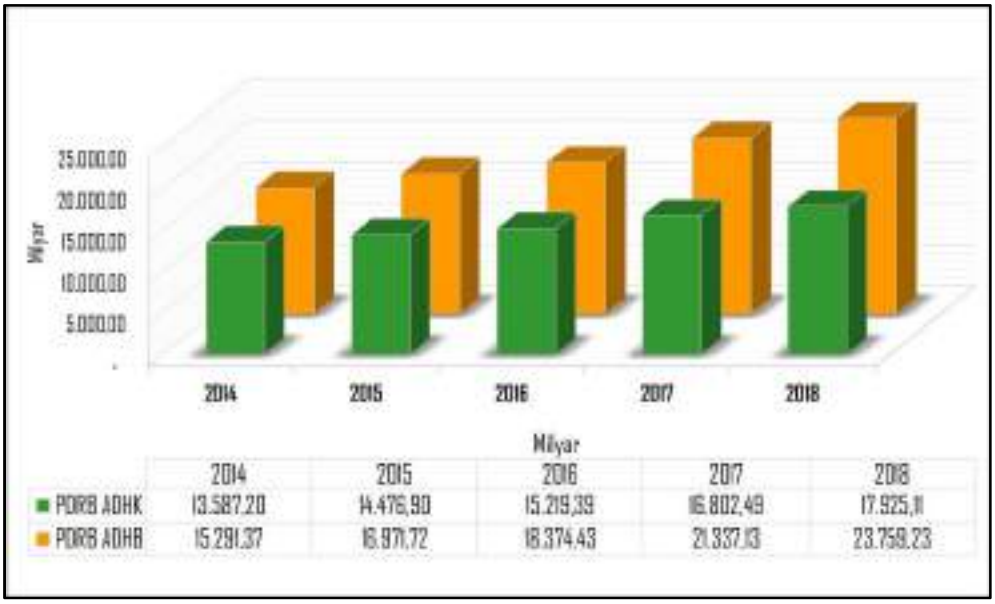


Sumber : BPS Kolaka, 2019

Gambar 3.1
Perkembangan PDRB Kabupaten Kolaka
Tahun 2014 – 2018

PDRB Kabupaten Kolaka baik atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku untuk periode tahun 2014 – 2017 menunjukkan adanya trend peningkatan. Untuk PDRB atas dasar harga berlaku dari Rp. 15,29 triliun pada tahun 2014 naik menjadi Rp. 23,75 triliun pada tahun 2018, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan naik menjadi Rp. 17,92 triliun pada tahun 2018 dari Rp. 13,58 triliun pada tahun 2014.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kolaka yang ditunjukkan melalui PDRB atas dasar harga konstan pada periode yang sama juga menunjukkan adanya trend pertumbuhan posistif. Pada tahun 2014 perekonomian Kabupaten Kolaka tumbuh 0,48%, hal ini disebabkan adanya pemekaran wilayah Kabupaten Kolaka Timur sehingga menyebabkan berkurangnya aktivitas penyelenggaraan pemerintah yang berdampak pada penurunan laju pertumbuhan ekonomi. Pemekaran wilayah menyebabkan timbulnya *diseconomies of scale* atau terpecahnya aktivitas ekonomi ke dalam skala yang relatif kecil. Selain itu, adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait larangan

ekspor mineral mentah sehingga mempengaruhi kinerja sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Kolaka.

Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi meningkat secara signifikan mencapai 6,55% yang dipengaruhi oleh kinerja sektor pertambangan dan penggalian serta konstruksi yang tumbuh signifikan diatas dua digit, kemudian sedikit melamban pada tahun 2016 mencapai 5,13% yang disebabkan oleh kinerja sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh negatif. Selanjutnya pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi meningkat secara signifikan mencapai 10,40% yang dipengaruhi oleh kinerja pertumbuhan yang sangat signifikan pada sektor pertambangan dan penggalian, sedangkan pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kolaka lebih rendah dibanding tahun sebelumnya meskipun tumbuh positif mencapai 6,68%, hal ini disebabkan oleh menurunnya kinerja sektor pertambangan dan penggalian yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Berikut grafik pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kolaka dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 :

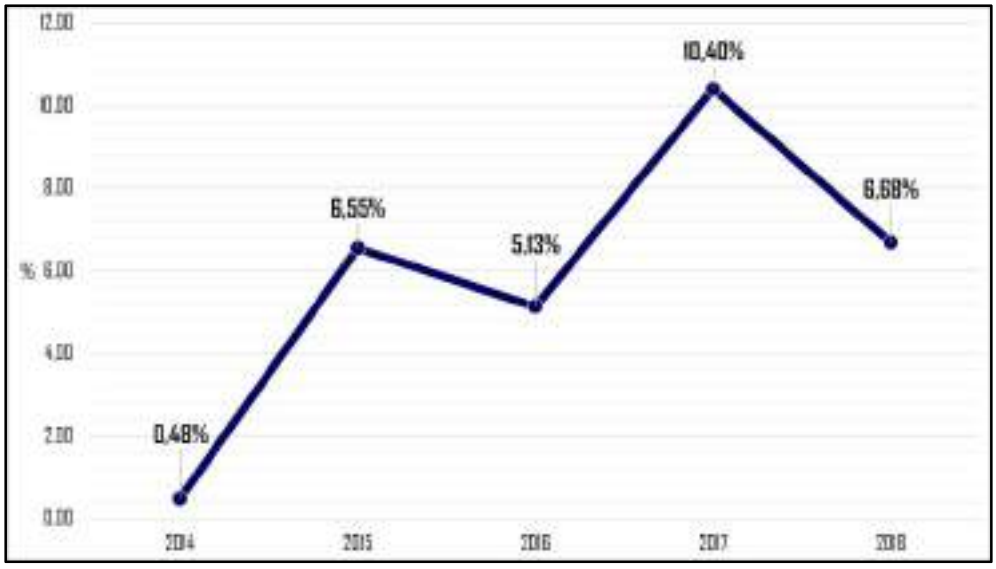


Sumber : BPS Kolaka, 2019

Gambar 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kolaka
Tahun 2014 – 2018

## 3.2. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan merupakan gambaran tingkat pencapaian realisasi keuangan yang mencakup pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta belanja yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan.

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui trend yang terjadi dalam pengelolaan keuangan guna menentukan proyeksi pendapatan yang akan diterima dan belanja yang akan dikeluarkan pada masa yang akan datang.

### 3.2.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya. Secara umum gambaran kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Kolaka tahun 2014 – 2018 disajikan berikut ini :

#### a. Pendapatan Daerah

Secara umum komponen pendapatan daerah terdiri dari :

1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka selama tahun 2014 hingga 2018 selengkapnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Kolaka Tahun 2014 – 2018

| NO. | URAIAN | REALISASI (Rp.) | | | | | RATA-RATA PERTUMBUHAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| | | | | | | | |
| **1** | **PENDAPATAN DAERAH** | **786.146.691.539,18** | **1.051.038.969.703,04** | **1.060.246.937.012,98** | **1.083.491.774.906,79** | **1.155.131.428.043,92** | **10,84** |
| **1.1** | **Pendapatan Asli Daerah** | **67.736.378.890,18** | **66.365.244.972,04** | **72.323.532.837,98** | **122.419.728.540,79** | **101.143.712.550,92** | **14,71** |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | 11.239.818.647,00 | 13.468.690.269,00 | 19.473.081.222,00 | 21.709.254.556,00 | 26.840.689.637,00 | 24,88 |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah | 15.474.043.043,00 | 6.722.624.315,00 | 6.469.870.326,00 | 10.877.707.724,00 | 7.588.637.291,00 | -5,61 |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 6.967.282.790,00 | 7.635.197.237,00 | 8.963.835.169,00 | 10.697.823.072,00 | 10.466.131.383,00 | 11,04 |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 34.055.234.410,18 | 38.538.733.151,04 | 37.416.746.120,98 | 79.134.943.188,79 | 56.248.254.239,92 | 23,21 |
| | | | | | | | |
| **1.2** | **Dana Perimbangan** | **588.539.667.464,00** | **859.446.803.132,00** | **873.287.766.802,00** | **812.455.981.080,00** | **856.406.097.729,00** | **11,52** |
| 1.2.1 | Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak | 66.138.071.464,00 | 105.064.921.132,00 | 64.788.541.235,00 | 38.901.754.505,00 | 105.899.786.043,00 | 38,20 |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | 454.342.506.000,00 | 572.933.352.000,00 | 593.123.363.000,00 | 582.704.093.000,00 | 582.742.370.000,00 | 6,97 |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 68.059.090.000,00 | 181.448.530.000,00 | 215.375.862.567,00 | 190.850.133.575,00 | 167.763.941.686,00 | 40,45 |
| | | | | | | | |
| **1.3** | **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** | **129.870.645.185,00** | **125.226.921.599,00** | **114.635.637.373,00** | **148.616.065.286,00** | **197.581.617.764,00** | **12,64** |
| 1.1.1 | Hibah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.619.200.000,00 | - |
| 1.3.2 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 21.912.948.185,00 | 23.881.862.199,00 | 37.274.092.373,00 | 33.702.497.286,00 | 30.007.167.153,00 | 11,13 |
| 1.3.3 | Dana Penyesuaian | 88.629.697.000,00 | 88.938.003.000,00 | 61.871.545.000,00 | 78.405.600.000,00 | 91.174.449.000,00 | 3,23 |
| 1.3.4 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 2.100.000.000,00 | 2.386.968.000,00 | 2.190.000.000,00 | 10.157.968.000,00 | 11.000.000.000,00 | 94,38 |
| 1.3.5 | Pendapatan Lainnya yang Sah | 17.228.000.000,00 | 10.020.088.400,00 | 13.300.000.000,00 | 26.350.000.000,00 | 32.780.801.611,00 | 28,36 |

Sumber : BKAD Kolaka, 2019

Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka selama periode tahun 2014 – 2018 mengalami perkembangan yang cukup tinggi. Realisasi pendapatan pada tahun 2014 mencapai sebesar Rp. 786,14 milyar, sedangkan pada akhir tahun 2018 penerimaan pendapatan menjadi sebesar Rp. 1,15 triliun. Kenaikan pendapatan ini diperoleh dari pos Pendapatan Asli Daerah yang mengalami peningkatan dari Rp. 67,73 milyar pada tahun 2014 menjadi Rp. 101,14 milyar pada tahun 2018; Dana Perimbangan dari Rp. 588,53 milyar menjadi Rp. 856,40 milyar; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari Rp. 129,87 milyar menjadi Rp. 197,58 milyar.

Secara umum sumber penerimaan Kabupaten Kolaka masih sangat tergantung pada dukungan pendanaan Pemerintah Pusat. Hal ini terlihat dari masih besarnya proporsi Dana Perimbangan dibanding dengan Pendapatan Asli Daerah. Perbandingan rata-rata kontribusi komponen Pendapatan Daerah selengkapnya digambarkan pada grafik berikut :

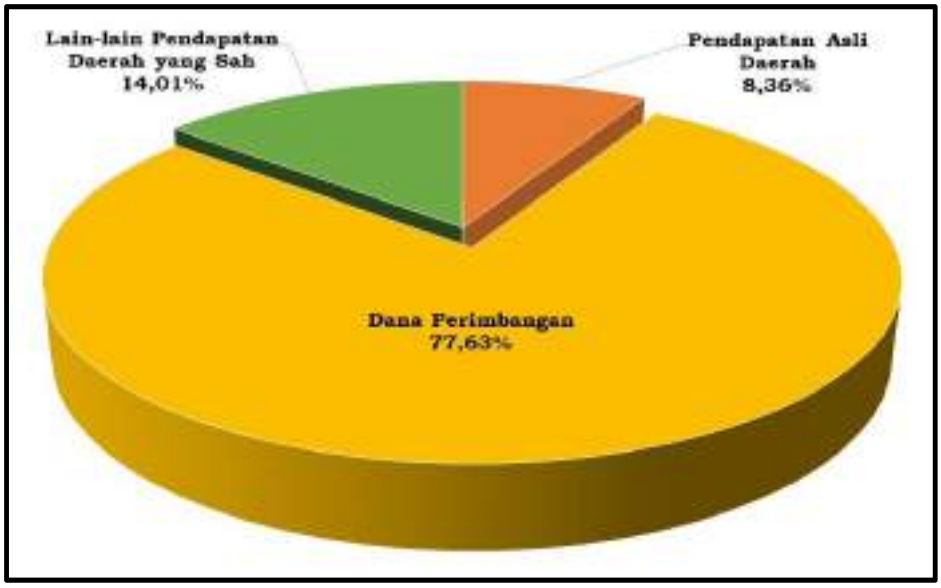


Sumber : BKAD Kolaka, 2019

Gambar 3.3
Rata-rata Realisasi Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah

Berdasarkan proporsi kontribusi masing-masing komponen Pendapatan Daerah selama lima tahun terakhir, kontribusi tertinggi berasal dari Dana Perimbangan yang mencapai 77,63%, disusul kemudian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 14,01% dan Pendapatan Asli Daerah 8,36%.

Sementara itu rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka selama lima tahun terakhir sebesar 10,84%, dengan rincian masing-masing Pendapatan Asli Daerah tumbuh rata-rata sebesar 14,71%, Dana Perimbangan tumbuh rata-rata sebesar 11,52%, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tumbuh rata-rata sebesar 12,64%.

**b. Belanja Daerah**

Selain kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Secara umum komponen belanja terdiri dari :

1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
2) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kolaka selama tahun 2014 hingga 2018 selengkapnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Kolaka Tahun 2014 – 2018

| NO. | URAIAN | REALISASI (Rp.) | | | | | RATA-RATA PERTUMBUHAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| | | | | | | | |
| **2** | **BELANJA DAERAH** | **824.057.433.779,00** | **1.046.447.926.610,00** | **1.052.680.350.859,00** | **1.081.752.241.817,00** | **1.126.355.842.597,00** | **8,62** |
| **2.1** | **Belanja Tidak Langsung** | **431.125.286.668,00** | **477.114.822.999,00** | **519.931.281.285,00** | **558.537.392.286,00** | **569.925.857.787,00** | **7,28** |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 386.350.207.268,00 | 410.564.528.199,00 | 414.258.050.960,00 | 392.679.800.211,00 | 377.696.078.689,00 | -0,46 |
| 2.1.2 | Belanja Hibah | 11.778.451.400,00 | 6.200.000.000,00 | 3.278.764.000,00 | 12.705.400.000,00 | 42.990.776.398,00 | 107,85 |
| 2.1.3 | Belanja Bantuan Sosial | 2.415.653.000,00 | 2.577.968.000,00 | 5.019.584.000,00 | 1.344.000.000,00 | 5.724.000.000,00 | 88,52 |
| 2.1.4 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa | 29.930.975.000,00 | 56.798.644.800,00 | 97.374.882.325,00 | 151.288.452.075,00 | 142.648.802.700,00 | 52,72 |
| 2.1.5 | Belanja Tidak Terduga | 650.000.000,00 | 973.682.000,00 | 0,00 | 519.740.000,00 | 866.200.000,00 | 4,11 |
| | | | | | | | |
| **2.2** | **Belanja Langsung** | **392.932.147.111,00** | **569.333.103.611,00** | **532.749.069.574,00** | **523.214.849.531,00** | **556.429.984.810,00** | **10,76** |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | 42.392.126.760,00 | 52.128.620.775,00 | 51.938.818.396,00 | 59.345.462.330,00 | 62.325.594.207,00 | 10,47 |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 185.054.632.645,00 | 223.834.406.241,00 | 176.154.271.018,00 | 207.861.027.383,00 | 238.542.136.579,00 | 8,10 |
| 2.2.3 | Belanja Modal | 165.485.387.706,00 | 293.370.076.595,00 | 304.655.980.160,00 | 256.008.359.818,00 | 255.562.254.024,00 | 16,25 |

Sumber : BKAD Kolaka, 2019

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kolaka cenderung meningkat tiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2014 sebesar Rp. 824.05 milyar dan meningkat menjadi Rp. 1,12 triliun pada tahun 2018. Kenaikan belanja ini masing-masing terdiri dari Belanja Tidak Langsung dari Rp. 431,12 milyar menjadi Rp. 569,92 milyar dan Belanja Langsung dari Rp. 392,93 milyar menjadi Rp. 556,42 milyar.

Pada komponen Belanja Tidak Langsung, pos Belanja Hibah naik dari Rp. 11,77 milyar pada tahun 2014 menjadi Rp. 42,99 milyar tahun 2018, Belanja Bantuan Sosial tahun 2014 sebesar Rp. 2,41 milyar meningkat menjadi Rp. 5,72 milyar tahun 2018, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa naik signifikan dari Rp. 29,93 milyar di tahun 2014 menjadi Rp. 142,64 milyar pada tahun 2018, dan Belanja Tidak Terduga naik dari Rp. 650,00 juta pada tahun 2014 menjadi Rp. 866,20 juta di tahun 2018. Sementara itu pos Belanja Pegawai pada periode tahun 2014 – 2018 mengalami penurunan dari Rp. 386,35 milyar menjadi Rp. 377,69 milyar.

Pada komponen Belanja Langsung pada kurun waktu tahun 2014 – 2018 secara umum menunjukkan trend kenaikan anggaran belanja, yaitu pos Belanja Pegawai naik dari Rp. 42,39 milyar menjadi Rp. 62,32 milyar, Belanja Barang dan Jasa naik dari Rp. 185,05 milyar menjadi Rp. 238,54 milyar, dan Belanja Modal naik dari Rp. 165,48 milyar menjadi Rp. 255,56 milyar.

Selama perode tahun 2014 – 2018 rata-rata proporsi Belanja Langsung Lebih Besar dibanding dengan Belanja Tidak Langsung. Proporsi Belanja Langsung mencapai 50,09 % dibanding Belanja Tidak Langsung sebesar 49,91%. Perbandingan rata-rata kontribusi komponen Belanja Daerah selengkapnya digambarkan pada Grafik 3.4.

Selama periode yang sama, Belanja Daerah rata-rata tumbuh sebesar 8,62% dengan rincian masing-masing Belanja Tindak Langsung rata-rata tumbuh 7,28% dan Belanja Langsung rata-rata tumbuh 10,76%.

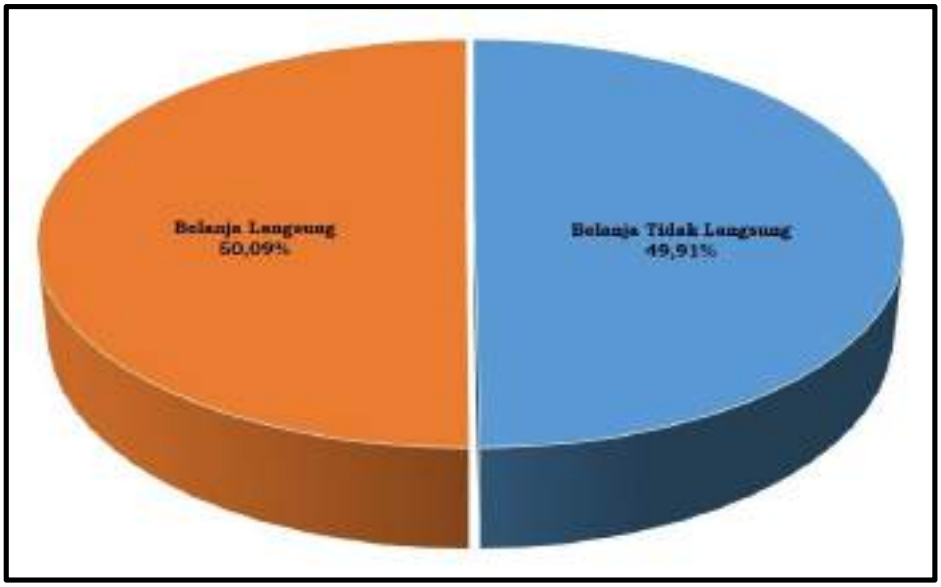


Sumber : BKAD Kolaka, 2019

Gambar 3.4
Rata-rata Realisasi Kontribusi Komponen Belanja Daerah

Tabel 3.3
Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka
Tahun 2014 – 2018

| NO | URAIAN | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **Pendapatan Umum Daerah** | | | | | |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 67.736.378.890,18 | 66.365.244.972,04 | 72.323.532.837,98 | 122.419.728.540,79 | 101.143.712.550,92 |
| 2 | Dana Bagi Hasil | 66.138.071.464,00 | 105.064.921.132,00 | 64.788.541.235,00 | 38.901.754.505,00 | 105.899.786.043,00 |
| 3 | Dana Alokasi Umum | 454.342.506.000,00 | 572.933.352.000,00 | 593.123.363.000,00 | 582.704.093.000,00 | 582.742.370.000,00 |
| | **Jumlah A** | **588.216.956.354,18** | **744.363.518.104,04** | **730.235.437.072,98** | **744.025.576.045,79** | **789.785.868.593,92** |
| | | | | | | |
| **B** | **Belanja Pegawai** | | | | | |
| 1 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 350.164.222.178,00 | 373.281.967.214,00 | 377.221.326.230,00 | 352.250.289.214,00 | 340.380.898.399,00 |
| 2 | Tambahan Penghasilan PNS | 33.117.076.000,00 | 35.158.038.635,00 | 34.241.852.048,00 | 36.399.209.332,00 | 32.011.964.752,00 |
| | **Jumlah B** | **383.281.298.178,00** | **408.440.005.849,00** | **411.463.178.278,00** | **388.649.498.546,00** | **372.392.863.151,00** |
| | | | | | | |
| | **Kemampuan Kauangan Daerah** | **204.935.658.176,18** | **335.923.512.255,04** | **318.772.258.794,98** | **355.376.077.499,79** | **417.393.005.442,92** |

Sumber : BKAD Kab. Kolaka, 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat ditentukan kelompok kemampuan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017. Kemampuan keuangan daerah dihitung dari besaran Pendapatan Umum Daerah (PAD, DAU dan DBH) dikurangi dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara (gaji dan tunjangan). Kabupaten Kolaka pada tahun 2016 memiliki kemampuan keuangan daerah sebesar Rp. 204,93 milyar atau termasuk dalam kelompok kemampuan keuangan daerah kategori *rendah*. Sementara itu, dari tahun 2015 – 2018 kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kolaka masuk dalam kategori *sedang*, dengan rincian sebagai berikut; tahun 2015 sebesar Rp. 335,92 milyar, tahun 2016 sebesar Rp. 318,77 milyar, tahun 2017 sebesar Rp. 355,37 dan tahun 2018 sebesar Rp. 417,29 milyar.

**a. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Kabupaten Kolaka terdiri dari :

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; dan
3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kolaka selama tahun 2014 hingga 2018 selengkapnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Kolaka Tahun 2014 – 2018

| NO. | URAIAN | REALISASI (Rp.) | | | | | RATA-RATA PERTUMBUHAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| | | | | | | | |
| 3 | PEMBIAYAAN DAERAH | 54.256.212.736,67 | 8.845.670.496,85 | 8.667.713.589,89 | 11.590.069.073,71 | 13.346.634.373,50 | -9,21 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 67.267.453.400,67 | 16.345.670.496,85 | 9.167.713.589,89 | 16.090.069.073,71 | 13.346.634.373,50 | -15,29 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 13.011.240.664,00 | 7.500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 4.500.000.000,00 | 0,00 | 141,08 |

Sumber : BKAD Kolaka, 2019

Berdasarkan Tabel 3.4 diperoleh gambaran bahwa realisasi Pembiayaan Netto dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan rata rata sebesar 9,21%. Penerimaan Pembiayaan mengalami kenaikan dengan rata-rata penurunan sebesar 15,29% Sedangkan dari data realisasi Pengeluaran Pembiayaan diperoleh gambaran realisasi Pengeluaran Pembiayaan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

### 3.2.2. Neraca Daerah

Neraca daerah adalah laporan keuangan yang menyajikan kondisi aset, kewajiban dan ekuitas suatu daerah pada waktu tertentu. Perkembangan neraca daerah Kabupaten Kolaka dan rata-rata pertumbuhannya dari tahun 2014 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Kolaka Tahun 2014 – 2018

| NO | URAIAN | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | RATA-RATA PERTUM-BUHAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ASET** | | | | | | |
| **1.1** | **Aset Lancar** | **74.520.013.347,47** | **51.391.552.750,93** | **50.949.484.037,16** | **56.951.083.908,56** | **95.443.368.108,09** | **11,87** |
| 1.1.1 | Kas | 16.481.550.577,85 | 19.199.152.142,05 | 17.400.609.707,87 | 13.453.227.589,50 | 42.129.037.639,42 | 49,40 |
| 1.1.2 | Piutang | 50.348.132.164,95 | 24.959.664.839,38 | 26.353.390.277,29 | 36.940.928.930,74 | 45.428.869.228,86 | 4,58 |
| 1.1.3 | Persediaan | 7.418.490.988,00 | 7.232.735.769,50 | 7.195.484.052,00 | 6.556.927.388,32 | 7.885.461.239,81 | 2,09 |
| 1.1.4 | Belanja Dibayar Dimuka | 271.839.616,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | |
| **1.2** | **Aset Tetap** | **2.286.400.163.711,26** | **1.354.996.172.188,29** | **1.595.537.385.926,52** | **1.591.314.912.647,18** | **1.695.454.177.255,90** | **-4,18** |
| 1.2.1 | Tanah | 264.247.228.465,00 | 334.280.716.385,00 | 349.155.167.977,00 | 337.117.123.947,00 | 339.511.830.217,00 | 7,05 |
| 1.2.2 | Peralatan dan Mesin | 317.774.617.595,85 | 280.773.612.103,41 | 313.043.754.936,41 | 328.865.219.571,37 | 319.511.908.621,30 | 0,51 |
| 1.2.3 | Gedung dan Bangunan | 566.728.700.571,94 | 532.933.022.689,91 | 613.943.189.910,35 | 645.378.026.256,35 | 696.474.000.811,34 | 5,57 |
| 1.2.4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 1.098.237.587.157,00 | 1.124.828.446.205,64 | 1.264.714.216.745,94 | 1.348.665.077.208,94 | 1.492.621.532.092,71 | 8,04 |
| 1.2.5 | Aset Tetap Lainnya | 27.101.024.736,41 | 17.942.881.330,41 | 20.327.863.315,41 | 26.735.495.965,41 | 32.195.018.080,41 | 7,86 |
| 1.2.6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 12.311.005.185,06 | 19.848.916.675,44 | 60.471.331.296,70 | 98.556.818.910,70 | 120.533.731.213,40 | 87,79 |
| 1.2.7 | Akumulasi penyusutan | 0,00 | (955.611.423.201,52) | (1.026.118.138.255,29) | (1.194.002.849.212,59) | (1.305.393.843.780,26) | 8,27 |
| | | | | | | | |
| **1.3** | **Aset lainnya** | **39.195.493.299,00** | **128.217.154.601,80** | **40.517.944.028,72** | **170.307.257.441,95** | **182.865.122.266,71** | **121,61** |
| 1.3.1 | Aset Tak Berwujud | 1.231.987.450,00 | 1.544.886.537,92 | 3.708.987.450,00 | 2.685.450.000,00 | 7.862.936.123,76 | 82,67 |
| 1.3.2 | Akumulasi Amortisasi | 0,00 | 0,00 | (1.348.956.157,08) | (791.938.750,00) | (1.578.232.362,39) | 14,50 |
| 1.3.3 | Kas yang dibatasi Penggunaannya | 0,00 | 167.105.000,00 | 167.105.000,00 | 167.105.000,00 | 163.235.000,00 | -0,58 |
| 1.3.4 | Aset Lain-Lain | 37.963.505.849,00 | 126.505.163.063,88 | 177.113.730.690,95 | 168.246.641.191,95 | 213.111.607.157,26 | 73,72 |
| 1.3.5 | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain | 0,00 | 0,00 | (139.122.922.955,15) | 0,00 | (36.694.423.651,92) | -25,00 |

| NO | URAIAN | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | RATA-RATA PERTUM-BUHAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.4** | **Investasi Jangka Panjang** | **53.127.430.270,88** | **57.108.667.369,94** | **55.741.835.287,15** | **60.241.835.287,15** | **50.923.377.099,60** | **-0,57** |
| 1.4.1 | Investasi Non Permanen | 2.498.888.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 |
| 1.4.2 | Investasi Permanen | 50.628.542.270,88 | 57.108.667.369,94 | 55.741.835.287,15 | 60.241.835.287,15 | 50.923.377.099,60 | 0,75 |
| | | | | | | | |
| | **JUMLAH ASET DAERAH** | **2.453.243.100.628,61** | **1.591.713.546.910,96** | **1.742.746.649.279,55** | **1.878.815.089.284,84** | **2.024.686.044.730,30** | **-2,51** |
| | | | | | | | |
| **2** | **KEWAJIBAN** | | | | | | |
| **2.1** | **Kewajiban Jangka Pendek** | **128.037.823,00** | **81.084.034.032,16** | **89.007.325.310,33** | **33.888.043.446,66** | **12.824.698.939,47** | **15.778,47** |
| 2.1.1 | Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 6.425.976,00 | 58.392.081,16 | 826.586.845,00 | 70.193.057,00 | 6.738.382,00 | 485,59 |
| 2.1.2 | Pendapatan Diterima Di muka | 0,00 | 636.789.349,00 | 1.674.936.680,33 | 3.111.493.394,66 | 1.712.347.297,00 | 50,96 |
| 2.1.3 | Utang Belanja | 0,00 | 80.106.852.602,00 | 86.223.801.785,00 | 30.424.356.995,00 | 11.105.613.260,47 | -30,14 |
| 2.1.4 | Utang Jangka Pendek Lainnya | 121.611.847,00 | 282.000.000,00 | 282.000.000,00 | 282.000.000,00 | 0,00 | 7,97 |
| | | | | | | | |
| **2.2** | **Kewajiban Jangka Panjang** | **0,00** | **1.296.646.442,00** | **282.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-44,56** |
| 2.2.1 | Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2.2 | Pendapatan Diterima Dimuka | 0,00 | 732.646.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 |
| 2.2.3 | Utang Jangka Panjang Lainnya | 0,00 | 564.000.000,00 | 282.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -37,50 |
| | | | | | | | |
| **3** | **EKUITAS DANA** | **2.453.115.062.805,61** | **1.509.332.866.436,80** | **1.653.457.323.969,22** | **1.844.927.045.838,18** | **2.011.861.345.790,83** | **-2,07** |
| | | | | | | | |
| | **JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA** | **2.453.243.100.628,61** | **1.591.713.546.910,96** | **1.742.746.649.279,55** | **1.878.815.089.284,84** | **2.024.686.044.730,30** | **-2,51** |

Sumber : BKAD Kolaka, 2019

Tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui melalui analisis rasio / perbandingan antar elemen laporan keuangan berdasarkan neraca tersebut diatas. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas terdiri rasio lancar *(current ratio)* dan rasio cepat *(quick ratio)*. Rasio lancar *(current ratio)* adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari 1 (satu).

Rasio keuangan Kabupaten Kolaka tahun 2014 – 2018 selengkapnya ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014 – 2018

| RASIO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rasio lancar (current ratio) | 582,02 | 0,63 | 0,57 | 1,68 | 7,44 |
| Rasio cepat (quick ratio) | 524,08 | 0,54 | 0,49 | 1,49 | 6,83 |
| Rasio total hutang terhadap total asset | 0,0001 | 0,0518 | 0,0512 | 0,0180 | 0,0063 |
| Rasio hutang terhadap modal | 0,0001 | 0,0546 | 0,0540 | 0,0184 | 0,0064 |

Sumber : BKAD Kolaka, 2019

Rasio lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan tabel di atas, rasio lancar pada tahun 2014 adalah sebesar 582,02 dan tahun 2018 sebesar 7,44.

Rasio quick merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi hutang lancar. Quick rasio menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel di atas, quick rasio pada tahun 2014 sebesar 524,08 serta pada tahun 2018 quick rasio sebesar 6,83.

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. *Solvable* berarti mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya, jadi rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas terdiri dari rasio total hutang terhadap total aset yang menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah, dan rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain.

Besar rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kabupaten Kolaka pada tahun 2014 sebesar 0,0001 dan pada tahun 2018 sebesar 0,0063. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.

Pada tahun 2014 rasio hutang terhadap modal Pemerintah Kabupaten Kolaka sebesar 0,0001 serta periode tahun 2018 sebesar 0,0064. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki, dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada hutang.

### 3.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan kas daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru.

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi

dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja.

Sedangkan kebijakan pengelolaan pembiayaan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan pembiayaan (setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan) untuk mengantisipasi terjadinya defisit anggaran daerah.

### 3.3.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Kolaka pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang.

Proporsi belanja pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran selengkapnya disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Kolaka Tahun 2014 – 2018

| NO. | U R A I A N | TOTAL BELANJA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR | TOTAL PENGELUARAN (BELANJA + PENGELUARAN PEMBIAYAAN) | PERSENTASE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tahun Anggaran 2014 | 485.758.978.557,00 | 837.068.674.443,00 | 58,03 |
| 2 | Tahun Anggaran 2015 | 515.531.103.690,00 | 1.053.947.926.610,00 | 48,91 |
| 3 | Tahun Anggaran 2016 | 500.426.203.707,00 | 1.053.180.350.859,00 | 47,52 |
| 4 | Tahun Anggaran 2017 | 499.731.648.647,00 | 1.086.252.241.817,00 | 46,01 |
| 5 | Tahun Anggaran 2018 | 487.579.765.643,00 | 1.126.355.842.597,00 | 43,29 |

Sumber : BKAD Kolaka, 2019

Berdasarkan tabel di atas, proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi belanja dan pengeluaran pembiayaan di Kabupaten Kolaka pada kurun waktu tahun 2014 – 2018 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2014 total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mencapai 58,03%, selanjutnya terus mengalami penurunan hingga mencapai 43,29% pada tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Kolaka relatif baik dari sisi belanja, karena proporsi penggunaan anggaran untuk belanja aparatur tidak mendominasi pengeluaran dalam APBD, dan sebaliknya belanja publik meningkat dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di berbagai bidang.

### 3.3.2. Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah anggaran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Perkembangan defisit riil Kabupaten Kolaka tahun 2014 – 2018 selengkapnya ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kolaka Tahun 2014 – 2018

| NO. | U R A I A N | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Realisasi Pendapatan Daerah | 786.146.691.539,18 | 1.051.018.881.303,04 | 1.060.246.937.012,98 | 1.083.491.774.906,79 | 1.155.131.428.043,92 |
| | Dikurangi Realisasi : | | | | | |
| 2 | Belanja Daerah | 824.057.433.779,00 | 1.046.447.926.610,00 | 1.052.680.350.859,00 | 1.081.752.241.817,00 | 1.126.355.842.597,00 |
| 3 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 13.011.240.664,00 | 7.500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 4.500.000.000,00 | 0,00 |
| | **Defisit Riil** | **(50.921.982.903,82)** | **(2.929.045.306,96)** | **7.066.586.153,98** | **(2.760.466.910,21)** | **28.775.585.446,92** |
| | | | | | | |
| | Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan : | | | | | |
| 4 | SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya | 67.267.453.400,67 | 16.345.470.496,85 | 9.167.713.589,89 | 16.090.069.073,71 | 42.122.219.820,42 |

Sumber : BKAD Kolaka, 2019

Berdasarkan tabel di atas, pada kurun waktu tahun 2014 – 2018 APBD Kabupaten Kolaka mengalami defisit, kecuali pada tahun 2016 dan 2018. Untuk menutup defisit riil anggaran pada kurun waktu yang sama, maka digunakan penerimaan yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

## 3.4. Kerangka Pendanaan

APBD merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Peranan APBD sebagai pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan daerah, maka realisasi APBD pada masa lalu dapat digunakan sebagai bahan analisis untuk menyusun proyeksi kerangka pendanaan untuk perencanaan pembangunan daerah pada tahun selanjutnya.

### 3.4.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun komponen dari pendapatan daerah, meliputi: pendapatan asli daerah; dana perimbangan; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pada sisi lain, terdapat belanja daerah yang merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kolaka yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat

dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Proyeksi pendapatan dan belanja dilakukan berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kolaka yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI dari tahun 2014 – 2018.

Proyeksi pendapatan dan belanja Kabupaten Kolaka tahun 2020 – 2024 disajikan sebagaimana Tabel 3.9 :

### 3.4.2. APBD Tahun Anggaran 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019 merupakan APBD masa transisi RPJMD. APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019 disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2019. Berdasarkan Tabel 3.9, pada tahun 2019 Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp. 1,30 triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 107,04 milyar, Dana Perimbangan sebesar Rp. 983,29 milyar dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 217,33 milyar.

Sementara itu, Belanja Daerah ditargetkan sebesar Rp. 1,30 triliun yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 612,04 milyar dan Belanja Langsung sebesar Rp. 696,63 milyar, sedangkan Penerimaan Pembiayaan ditargetkan sebesar Rp. 5,00 milyar dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 4,00 milyar.

Tabel 3.9
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kolaka Tahun 2020 – 2024

| URAIAN | PROYEKSI (Rp.) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019*) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **PENDAPATAN** | **1.307.682.693.935,00** | **1.462.913.790.200,00** | **1.619.698.157.800,00** | **1.776.482.525.300,00** | **1.933.266.892.800,00** | **2.090.051.260.400,00** |
| **Pendapatan Asli Daerah** | **107.044.262.997,00** | **125.643.516.200,00** | **135.757.115.300,00** | **145.870.714.200,00** | **155.984.313.200,00** | **166.097.912.200,00** |
| Pajak Daerah | 23.874.940.100,00 | 32.241.699.400,00 | 36.558.472.500,00 | 40.680.972.100,00 | 44.585.885.400,00 | 48.247.102.100,00 |
| Retribusi Daerah | 12.045.725.652,00 | 15.491.212.700,00 | 17.110.158.300,00 | 18.923.377.200,00 | 20.954.182.500,00 | 23.228.684.400,00 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 10.697.823.072,00 | 12.592.488.000,00 | 13.563.216.000,00 | 14.533.944.000,00 | 15.504.672.100,00 | 16.475.400.100,00 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 60.425.774.173,00 | 65.318.116.100,00 | 68.525.268.500,00 | 71.732.420.900,00 | 74.939.573.200,00 | 78.146.725.600,00 |
| **Dana Perimbangan** | **983.298.504.000,00** | **1.115.228.628.000,00** | **1.249.011.962.600,00** | **1.382.795.297.300,00** | **1.516.578.632.100,00** | **1.650.361.966.900,00** |
| Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak | 139.595.210.000,00 | 180.329.784.300,00 | 214.308.696.500,00 | 248.287.608.700,00 | 282.266.521.000,00 | 316.245.433.200,00 |
| Dana Alokasi Umum | 611.181.698.000,00 | 657.465.857.800,00 | 691.578.754.300,00 | 725.691.650.900,00 | 759.804.547.500,00 | 793.917.444.100,00 |
| Dana Alokasi Khusus | 232.521.596.000,00 | 277.432.985.900,00 | 343.124.511.800,00 | 408.816.037.700,00 | 474.507.563.600,00 | 540.199.089.600,00 |
| **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** | **217.339.926.938,00** | **222.041.646.000,00** | **234.929.079.900,00** | **247.816.513.800,00** | **260.703.947.500,00** | **273.591.381.300,00** |
| Pendapatan Hibah | 35.496.208.000,00 | 36.412.894.700,00 | 38.829.581.400,00 | 41.246.268.200,00 | 43.662.954.900,00 | 46.079.641.600,00 |
| Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 64.486.759.938,00 | 66.034.054.000,00 | 74.030.340.000,00 | 82.026.625.900,00 | 90.022.911.800,00 | 98.019.197.700,00 |
| Dana Penyesuaian | 117.356.959.000,00 | 119.594.697.300,00 | 122.069.158.500,00 | 124.543.619.700,00 | 127.018.080.800,00 | 129.492.542.000,00 |

| URAIAN | PROYEKSI (Rp.) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019*) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **BELANJA** | **1.308.682.693.935,00** | **1.460.595.224.400,00** | **1.616.552.111.900,00** | **1.773.338.061.600,00** | **1.931.117.626.300,00** | **2.087.784.439.200,00** |
| **Belanja Tidak Langsung** | **612.045.712.130,00** | **680.094.519.400,00** | **750.930.012.900,00** | **824.471.751.600,00** | **904.564.409.300,00** | **1.004.035.632.200,00** |
| Belanja Pegawai | 431.093.846.030,00 | 481.794.473.900,00 | 540.300.218.500,00 | 601.104.095.400,00 | 667.775.160.900,00 | 753.100.175.900,00 |
| Belanja Hibah | 8.463.200.000,00 | 12.100.000.000,00 | 13.068.000.000,00 | 14.113.440.000,00 | 15.242.515.200,00 | 16.461.916.400,00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 4.549.375.000,00 | 8.899.056.100,00 | 9.867.056.000,00 | 10.656.420.600,00 | 11.508.934.200,00 | 12.429.649.000,00 |
| Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa | 2.864.700,00 | 5.729.400,00 | 6.875.300,00 | 8.250.300,00 | 9.900.400,00 | 11.880.500,00 |
| Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa | 164.936.426.400,00 | 173.295.260.000,00 | 182.687.863.100,00 | 192.589.545.300,00 | 203.027.898.600,00 | 214.032.010.400,00 |
| Belanja Tidak Terduga | 3.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 6.000.000.000,00 | 7.000.000.000,00 | 8.000.000.000,00 |
| **Belanja Langsung** | **696.636.981.805,00** | **780.500.705.000,00** | **865.622.099.000,00** | **948.866.310.000,00** | **1.026.553.217.000,00** | **1.083.748.807.000,00** |
| Belanja Pegawai | 76.735.558.500,00 | 78.622.344.000,00 | 90.218.334.000,00 | 95.430.335.000,00 | 108.833.657.000,00 | 111.473.696.000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 274.386.359.379,00 | 301.553.361.000,00 | 331.523.533.000,00 | 365.928.625.000,00 | 393.377.393.000,00 | 412.694.498.000,00 |
| Belanja Modal | 345.515.063.926,00 | 400.325.000.000,00 | 443.880.232.000,00 | 487.507.350.000,00 | 524.342.167.000,00 | 559.580.613.000,00 |
| | | | | | | |
| **Surplus / (Defisit)** | **(1.000.000.000,00)** | **2.318.565.800,00** | **3.146.045.900,00** | **3.144.463.700,00** | **2.149.266.500,00** | **2.266.821.200,00** |
| **PEMBIAYAAN** | | | | | | |
| **Penerimaan Pembiayaan** | **5.000.000.000,00** | **6.250.000.000,00** | **7.812.500.000,00** | **9.765.625.000,00** | **12.207.031.200,00** | **14.648.437.500,00** |
| **Pengeluaran Pembiayaan** | **4.000.000.000,00** | **8.568.565.800,00** | **10.958.545.900,00** | **12.910.088.700,00** | **14.356.297.700,00** | **16.915.258.700,00** |
| | | | | | | |
| **Pembiayaan Netto** | **1.000.000.000,00** | **(2.318.565.800,00)** | **(3.146.045.900,00)** | **(3.144.463.700,00)** | **(2.149.266.500,00)** | **(2.266.821.200,00)** |
| | | | | | | |
| **SILPA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Keterangan : *) Perda Kab. Kolaka No. 12 Tahun 2018 tentang APBD Kab. Kolaka TA. 2019

Sumber : BKAD dan Bappeda Kab. Kolaka, 2019 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, pendapatan daerah pada tahun 2020 diperkirakan mencapai Rp. 1,46 triliun lebih, dan diproyeksikan terus meningkat secara konsisten hingga mencapai Rp. 2,09 triliun pada tahun 2024. Sementara itu, jika ditinjau dari komponen pembentuk pendapatan daerah juga diperkirakan mengalami peningkatan yang konsisten. Pendapatan asli daerah pada tahun 2020 diperkirakan mencapai Rp. 125,64 milyar lebih, dan pada akhir periode RPJMD tahun 2024 diproyeksikan mencapai Rp. 166,09 milyar lebih.

Pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan pada tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp. 1,11 triliun lebih, dan terus meningkat hingga mencapai Rp. 1,65 triliun lebih pada tahun 2024. Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan mencapai Rp. 222,04 milyar lebih pada awal periode RPJMD tahun 2020, dan diproyeksikan sebesar Rp. 273,59 milyar lebih pada tahun 2024.

Proyeksi terhadap belanja daerah menunjukkan bahwa pada tahun 2020 diperkirakan berjumlah Rp. 1,46 triliun lebih, sementara pada akhir periode RPJMD tahun 2024 jumlah belanja diproyeksikan mencapai Rp. 2,08 triliun lebih. Ditinjau berdasarkan jenis belanja, maka jumlah belanja tidak langsung pada tahun 2020 diperkirakan mencapai Rp. 680,09 milyar lebih, dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2024 hingga menjadi Rp. 1,00 triliun lebih. Sedangkan jumlah belanja langsung pada tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan belanja tidak langsung, diperkirakan sebesar Rp. 780,50 milyar lebih dan selanjutnya pada tahun 2024 jumlah belanja langsung diperkirakan mencapai Rp. 1,08 triliun lebih.

### 3.4.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat

serta prioritas utama, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Berikut ini disajikan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Kolaka tahun 2020 – 2024 :

Tabel 3.10
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024

| NO | URAIAN | PROYEKSI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Pendapatan | 1.462.913.790.200,00 | 1.619.698.157.800,00 | 1.776.482.525.300,00 | 1.933.266.892.800,00 | 2.090.051.260.400,00 |
| 2 | Penerimaan Pembiayaan | 6.250.000.000,00 | 7.812.500.000,00 | 9.765.625.000,00 | 12.207.031.200,00 | 14.648.437.500,00 |
| | **Total Penerimaan** | **1.469.163.790.200,00** | **1.627.510.657.800,00** | **1.786.248.150.300,00** | **1.945.473.924.000,00** | **2.104.699.697.900,00** |
| | Dikurangi : | | | | | |
| 3 | Belanja Tidak Langsung | 680.094.519.400,00 | 750.930.012.900,00 | 824.471.751.600,00 | 904.564.409.300,00 | 1.004.035.632.200,00 |
| 4 | Pengeluaran Pembiayaan | 8.568.565.800,00 | 10.958.545.900,00 | 12.910.088.700,00 | 14.356.297.700,00 | 16.915.258.700,00 |
| | | | | | | |
| | **Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan** | **780.500.705.000,00** | **865.622.099.000,00** | **948.866.310.000,00** | **1.026.553.217.000,00** | **1.083.748.807.000,00** |

Sumber : BKAD Kab. Kolaka, 2019

Berdasarkan tabel di atas kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Kolaka cenderung meningkat dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah direncanakan untuk mendanai program prioritas sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daearah dikelompokkan menjadi 3 sebagai berikut :

1) Priortas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat;
2) Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kolaka serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
3) Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah selengkapnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024

| URAIAN | PROYEKSI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan** | **780.500.705.000,00** | **865.622.099.000,00** | **948.866.310.000,00** | **1.026.553.217.000,00** | **1.083.748.807.000,00** |
| | | | | | |
| Prioritas I | 390.250.352.500,00 | 432.811.049.500,00 | 474.433.155.000,00 | 513.276.608.500,00 | 541.874.403.500,00 |
| Prioritas II | 312.200.282.000,00 | 346.248.839.600,00 | 379.546.524.000,00 | 410.621.286.800,00 | 433.499.522.800,00 |
| Prioritas III | 78.050.070.500,00 | 86.562.209.900,00 | 94.886.631.000,00 | 102.655.321.700,00 | 108.374.880.700,00 |

Sumber : Bappeda Kab. Kolaka, 2019

# BAB IV
# PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Gambaran kondisi Kabupaten Kolaka yang telah diuraikan pada bab II menunjukkan bahwa masih ada persoalan pembangunan daerah yang harus diselesaikan dalam lima tahun kedepan. Permasalahan pembangunan daerah juga tidak terlepas dari pengaruh global, nasional, dan provinsi seperti kondisi sosial, politik, dan ekonomi, serta berbagai kebijakan di tataran nasional dan provinsi. Adapun permasalahan pokok pembangunan yang dihadapi Kabupaten Kolaka adalah : (1) masih tingginya angka kemiskinan; (2) masih belum optimalnya pelayanan infrastruktur wilayah dan kawasan permukiman; (3) masih rendahnya daya saing ekonomi dan produktivitas; (4) masih belum optimalnya penerapan Reformasi Birokrasi; (5) masih rendahnya kualitas sumber daya manusia; (6) Masih terbatasnya lapangan kerja; dan (7) masih tingginya kerusakan dan pencemaran lingkungan serta permasalahan pertanahan.

## 4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

### 4.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

#### A. Urusan Pendidikan

Permasalahan Pendidikan di Kabupaten Kolaka antara lain :

(1) Belum meratanya akses pendidikan wajib belajar 12 Tahun;
(2) Kuantitas, kualitas dan sebaran guru belum maksimal;
(3) Masih rendahnya ketersediaan sarana penunjang PAUD/ SD/ SMP;
(4) Belum adanya dukungan beasiswa pendidikan bagi masyarakat tidak mampu dan berprestasi;
(5) Perlunya menjaga paham kebangsaan dan keagamaan.

## B. Urusan Kesehatan

Permasalahan kesehatan yang masih ditemui di Kabupaten Kolaka meliputi :

(1) Masih kurang optimalnya kualitas pelayanan kesehatan dasar pada ibu melahirkan dan bayi;

(2) Masih belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan penyakit;

(3) Masih belum optimalnya penanganan *stunting*;

(4) Masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan kesehatan serta SDM tenaga kesehatan;

(5) Masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan sekunder.

## C. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Permasalahan pekerjaan umum dan penataan ruang yang masih terjadi di Kabupaten Kolaka, antara lain:

(1) Masih belum memadainya konektifitas jaringan jalan dan jembatan pada pusat-pusat pertumbuhan (sentra produksi, pariwisata dan pusat pemerintahan);

(2) Belum terintegrasinya sistem informasi dalam perencanaan pembangunan jalan/jembatan dan pemanfaatan ruang kota;

(3) Penyediaan dan pengelolaan air minum belum optimal;

(4) Masih belum optimalnya sistem irigasi dalam mendukung pertanian;

(5) Sistem sanitasi yang masih belum terpadu;

(6) Masih minimnya rencana rinci tata ruang.

**D. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman**

Permasalahan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang masih terjadi di Kabupaten Kolaka, antara lain:

(1) Belum optimalnya penataan lingkungan pemukiman kumuh;

(2) Masih banyaknya rumah yang tidak layak huni;

(3) Belum seimbangnya pertumbuhan rumah tangga dengan pertumbuhan pengadaan rumah (backlog);

(4) Belum optimalnya prasarana, sarana dan utilitas.

**E. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**

Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang masih terjadi di Kabupaten Kolaka, antara lain:

(1) Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik dan paham kebangsaan kepada masyarakat;

(2) Belum optimalnya peran organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan wawasan kebangsaan dan jati diri bangsa;

(3) Belum optimalnya perlindungan masyarakat dan penegakan perda;

(4) Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pencegahan bencana.

**F. Urusan Sosial**

Permasalahan urusan sosial yang masih terjadi di Kabupaten Kolaka, antara lain:

(1) Masih perlunya penurunan angka kemiskinan.;

(2) Belum optimalnya penanganan PMKS terutama Lanjut usia, Komunitas Adat Terpencil, Anak Jalanan, Wanita Rawan Sosial

Ekonomi, Distabilitas, Korban tindak kekerasan dan Korban penyalahgunaan NAPZA ;

### 4.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib bukan Pelayanan Dasar

**A. Urusan Tenaga Kerja**

Permasalahan ketenagakerjaan yang masih terjadi di Kabupaten Kolaka, antara lain:

(1) Rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta kompetensi angkatan kerja tidak sesuai kebutuhan kerja;

(2) Belum optimalnya pemanfaatan Balai Latihan Kerja; dan

(3) Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja.

**B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain :

(1) Masih belum optimalnya peran kesetaraan gender dalam pembangunan;

(2) Belum optimalnya kelembagaan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan

(3) Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan.

## C. Urusan Pangan

Permasalahan terkait urusan ketahanan pangan yang masih terjadi di Kabupaten Kolaka, antara lain:

(1) Belum optimalnya upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan;

(2) Masih adanya potensi terjadinya kerawanan dan keamanan pangan; dan

(3) Kualitas pola konsumsi pangan masyarakat yang belum beragam dan gizi berimbang.

## D. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan terkait urusan lingkungan hidup yang masih terjadi di Kabupaten Kolaka, antara lain:

(1) Belum optimalnya penanganan sampah;

(2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah;

(3) Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan; dan

(4) Menurunnya kuantitas dan kualitas sumber daya air dan udara.

## E. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, yakni :

(1) Belum optimalnya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

(2) Belum optimalnya sarana prasarana administrasi kependudukan;

**F. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yakni :

(1) Belum optimalnya partisipasi masyarakat Desa/Kelurahan dalam mendukung pembangunan di pedesaan;

(2) Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan sistem informasi masyarakat baik sosial maupun ekonomi dalam menunjang kemampuan Desa dalam membangun;

(3) Masih rendahnya pemberdayaan kesejahteraan keluarga dalam pembangunan; dan

(4) Belum optimalnya peran BUMDES dalam peningkatan ekonomi masyarakat Desa.

**G. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, antara lain :

(1) Masih perlunya pengendalian penduduk;
(2) Masih kurangnya tenaga penyuluh KB yang berkualitas; dan
(3) Belum optimalnya konseling kesehatan reproduksi remaja.

**H. Urusan Perhubungan**

Permasalahan terkait urusan perhubungan yang masih terjadi di Kabupaten Kolaka, antara lain:

(1) Belum optimalnya pelayanan terminal penumpang dari aspek kondisi fisik fasilitas utama beserta pendukungnya;
(2) Pengembangan pelayanan angkutan belum optimal dalam mendukung aksesibilitas; dan
(3) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan uji kelaikan jalan kendaraan bermotor.

## I. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Komunikasi dan Informatika, yakni :

(1) Belum optimalnya penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan media massa bagi masyarakat;

(2) Belum optimalnya pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE); dan

(3) Kurang memadainya kualitas SDM di bidang komunikasi dan informatika pemerintahan lini depan.

## J. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, antara lain :

(1) Masih rendahnya penciptaan wirausaha baru dan daya saing UMKM;

(2) Masih rendahnya kapasitas para pengelola koperasi dan UMKM; dan

(3) Masih rendahnya akses permodalan UMKM terhadap sumber daya produktif.

## K. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Penanaman Modal, yakni:

(1) Belum optimalnya pelayanan perijinan; dan

(2) Belum optimalnya nilai inventarisasi daerah.

**L. Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kepemudaan dan Olahraga, antara lain :

(1) Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan;

(2) Belum optimalnya pembinaan prestasi dan permasyarakatan olah raga; dan

(3) Masih terbatasnya daya dukung Sarana dan Prasarana Olah Raga.

**M. Urusan Statistik**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Statistik, yakni :

(1) Belum optimalnya forum data untuk keterpaduan perencanaan dan evaluasi pembangunan.

**N. Urusan Kebudayaan**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kebudayaan, antara lain:

(1) Belum optimalnya pelestarian adat istiadat, budaya dan kearifan lokal; dan

(2) Masih rendahnya inovasi dalam pengembangan seni dan budaya daerah.

**O. Urusan Perpustakaan**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Perpustakaan, yakni :

(1) Masih rendahnya minat baca masyarakat; dan

(2) Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan.

**P. Urusan Kearsipan**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan kearsipan, antara lain :

(1) Kurang optimalnya pemeliharaan terhadap dokumen/arsip daerah dan sarana prasarana pengolahan dan penyimpanan arsip daerah.

**Q. Urusan Pertanahan**

Permasalahan yang muncul terkait pertanahan antara lain :

(1) Belum optimalnya pengelolaan pertanahan; dan

(2) Belum semua aset pemerintah daerah dan masyarakat bersertifikat.

### 4.1.3 Urusan Pilihan

**A. Urusan Kelautan dan Perikanan**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kelautan dan Perikanan, yakni :

(1) Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan budi daya;

(2) Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi perikanan;

(3) Belum terdatanya kesejahteraan melalui nilai tukar nelayan;

(4) Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan; dan

(5) Masih rendahnya akses permodalan bagi nelayan dan pelaku usaha tambak.

**B. Urusan Pariwisata**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pariwisata, antara lain :

(1) Belum profesionalnya kelembagaan dan sumber daya pengelola destinasi wisata;

(2) Masih rendahnya jumlah kunjungan wisata dan pendapatan daerah dari objek wisata;

(3) Masih rendahnya daya saing destinasi dan promosi wisata serta konektifitas antar daerah wisata; dan

(4) Belum terkelolanya dengan baik potensi ekonomi kreatif pada daerah wisata.

## C. Urusan Pertanian

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pertanian, yakni :

(1) Masih lemahnya pengembangan agroindustri;

(2) Masih rendahnya nilai tukar produk pertanian;

(3) Belum optimalnya produktifitas dan pemasaran hasil-hasil pertanian, perkebunan dan peternakan; dan

(4) Masih rendahnya akses permodalan bagi petani.

(5) Masih terbatasnya sarana prasarana pertanian

## D. Urusan Perdagangan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Perdagangan, antara lain:

(1) Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen;

(2) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan yang lebih representatif dan modern;

(3) Masih rendahnya ketersediaan dan kualitas hasil – hasil produksi unggulan daerah; dan

(4) Belum adanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan.

## E. Urusan Perindustrian

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Perindustrian, yakni :

(1) Terbatasnya akses industri kecil dan menengah terhadap permodalan dan kemitraan;

(2) Masih rendahnya daya saing produk industri lokal;

(3) Kurang berkembangnya sentra-sentra industri daerah; dan

(4) Belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang berkompeten dan bersertifikasi.

**F. Urusan Transmigrasi**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Transmigrasi, antara lain:

(1) Belum optimalnya infrastruktur kawasan transmigrasi; dan
(2) Belum adanya penguatan sistem, kompetensi dan pengelolaan transmigrasi.

### 4.1.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**A. Perencanaan**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Perencanaan, yakni :

(1) Belum optimalnya penyediaan data dan informasi pembangunan daerah;
(2) Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
(3) Belum terintegrasinya perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah secara elektronik.

**B. Pengawasan**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pengawasan, antara lain :

(1) Belum optimalnya sistem pengawasan internal pemerintah; dan
(2) Masih rendahnya kuantitas dan kualitas tenaga auditor daerah.

**C. Keuangan**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Keuangan, yakni :

(1) Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
(2) Belum optimalnya pengelolaan pendapatan daerah.

**D. Kepegawaian**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kepegawaian, antara lain:

(1) Masih rendahnya tingkat profesionalisme dan kapasitas aparatur pemda serta pemerintahan lini depan; dan

(2) Reformasi birokrasi belum terealisasi secara optimal.

**E. Penelitian dan Pengembangan**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Penelitian dan Pengembangan, yakni :

(1) Penelitian belum sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan kebutuhan yang akan dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

(2) Sistem Inovasi Daerah (SIDa) belum berjalan optimal.

**F. Administrasi Pemerintahan**

Permasalahan yang dihadapi pada fungsi lainnya, antara lain :

(1) Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;

(2) Perlu peningkatan kualitas pelayanan publik;

(3) Masih rendahnya nilai evaluasi SAKIP kabupaten; dan

(4) Belum tuntasnya batas administrasi daerah.

## 4.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Berdasarkan hasil telaah gambaran umum kondisi daerah dan permasalahan yang dihadapi, maka dapat dirumuskan dalam 4 (empat) isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Kolaka dalam lima tahun

kedepan, yakni isu strategis internasional, nasional, regional (provinsi) dan kabupaten.

### 4.2.1. Isu Strategis Internasional

**A. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (*SDGs*)**

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, direncanakan dapat dicapai selama 15 Tahun sampai dengan 2030. Dimana Tujuan *Sustainable Development Goals* (*SDGs*) harus didukung capaiannya oleh Pemerintahan Kabupaten Kolaka yaitu :

1) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun;
2) Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan;
3) Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4) Menjamin kualitas pendidikan yang merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6) Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7) Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9) Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10) Menjadikan kota dan permukiman aman, tangguh, dan berkelanjutan;
11) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;

12) Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
13) Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
14) Menguatkan masyarakat yang damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, di semua tingkatan; dan
15) Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan untuk pembangunan berkelanjutan. Target: memperkuat sarana pelaksanaan dan revitalisasi kemitraan untuk pembangunan berkelanjutan.

**B. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)**

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC) merupakan sebuah sistem yang menuju sebuah kesepakatan dalam mengintegrasikan ekonomi antar negara ASEAN. MEA telah merencanakan peta ekonomi baru yang menguntungkan untuk negara-negara ASEAN yaitu dengan dibukanya pasar perdagangan bebas, hal ini akan meminimalkan kesulitan-kesulitan yang selama ini menjadi penghalang untuk kegiatan ekspor – import.

Tujuan dari kesepakatan MEA yaitu :

1. Memperkuat hubungan antar negara ASEAN;
2. Mewujudkan sistem perbankan;
3. Merencanakan sistem keuangan;
4. Ketahanan pangan;
5. Keamanan politik;
6. Sosial Budaya.

**C. Revolusi Industri 4.0**

Dunia saat ini sedang menghadapi perubahan industri ke-4 atau yang dikenal dengan Revolusi Industri 4.0. Setidaknya terdapat tiga hal utama yang menjadi ciri khas era 4.0. Pertama, inovasi dapat dikembangkan dan menyebar jauh lebih cepat dari sebelumnya. Kecepatan terjadinya terobosan-terobosan baru pada era ini terjadi pada skala eksponensial dan bukan lagi pada skala linear. Kedua, penurunan biaya produksi marjinal dan munculnya platform yang dapat menyatukan dan mengkonsentrasikan beberapa bidang keilmuan terbukti meningkatkan output pekerjaan. Transformasi ini mengakibatkan perubahan dengan ruang lingkup yang begitu luas sehingga menyebabkan perubahan pada seluruh sistem produksi, manajemen, maupun tata kelola. Ketiga, revolusi secara global ini akan berpengaruh besar dan terbentuk di hampir semua negara di dunia, di mana cakupan transformasi ini terjadi pada setiap bidang industri, dan bahkan akan mempunyai dampak menyeluruh pada level sistem di banyak tempat.

Revolusi Industri 4.0 adalah masa di mana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya sehingga berpotensi untuk memberdayakan individu dan masyarakat, karena ia dapat menciptakan peluang baru bagi ekonomi, sosial, maupun pengembangan pribadi. Namun di sisi lain, era ini juga bisa menyebabkan pengkerdilan dan marjinalisasi beberapa kelompok, memperburuk ketimpangan sosial, menciptakan risiko keamanan yang baru, serta dapat merusak hubungan antar manusia. Hal ini sudah menjadi hal yang tidak mungkin dihindari, sehingga negara dan daerah harus mampu beradaptasi dan mengantisipasi dengan strategi yang tepat agar mampu bersaing dan memanfaatkan era ini untuk percepatan pembangunan.

### 4.2.2. Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional yang menjadi pertimbangan dalam pembangunan nasional lima tahun mendatang telah dijabarkan dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020 – 2024. Beberapa isu strategis yang berkaitan langsung dengan proses perencanaan pembangunan di daerah diantaranya:

1. Pengembangan Infrastruktur;
2. SDM yang Unggul dan Berdaya Saing, dan
3. Peningkatan Investasi dan Regulasi Perijinan.

**1. Pengembangan Infrastruktur**

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui: 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah, 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan, 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK, 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien, 5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Selain itu, pengembangan infrastruktur juga ditujukan untuk mendorong pemerataan pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui: 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah, 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang, 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif, 4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis

kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

**2. SDM yang Unggul dan Berdaya Saing**

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Dalam kaitannya dengan pengembangan SDM, Pemerintah Pusat memiliki fokus program pada pengembangan pendidikan vokasi serta program pencegahan stunting. Untuk pengembangan vocational training dan vocational school, beberapa kebijakan nasional yang akan dilaksanakan diantaranya:

- Sistem insentif/regulasi untuk industri
- Pemetaan kebutuhan dan pengembangan bidang keahlian termasuk penguatan informasi pasar kerja
- Penyelarasan kurikulum, model pembelajaran, prodi sesuai kebutuhan industri;
- Dual TVET, teaching factory dan pemagangan;
- Penguatan softskills dan pembelajaran bahasa asing; ▪ kewirausahaan di sekolah, madrasah, dan pesantren;
- Pemagangan guru/instruktur di industri, instruktur/praktisi dari industri ▪ Pengendalian satuan pendidikan dan program studi vokasi baru ▪ Peningkatan akreditasi

Selanjutnya, terkait dengan pencegahan/penurunan stunting, beberapa kebijakan nasional yang mendukung pencapaiannya antara lain:

- Peningkatan efektivitas intervensi spesifik, serta perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi
- Percepatan perbaikan gizi masyarakat
- Penguatan Pelayanan Kesehatan • Imunisasi • Obat dan perbekalan kesehatan • Pelatihan dan penugasan khusus tenaga kesehatan
- Peningkatan kesehatan ibu dan anak, KB, dan kesehatan reproduksi • Penurunan Kematian Ibu dan Bayi • Peningkatan Kesehatan Reproduksi

**3. Investasi dan Regulasi Perijinan**

Isu lain yang menjadi fokus pemerintah dalam lima tahun mendatang adalah mengundang investasi yang seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan dengan memangkas hambatan investasi, perizinan yang lambat dan pungutan liar. Kebijakan strategis dalam pencapaian target ini diantaranya:

- Penyederhanaan Perizinan yang menghambat investasi, Pelaksanaan simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan investasi tingkat pusat/kementerian lembaga dan daerah.
- Pelaksanaan Integrasi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (SPBTSE), Pengembangan SPBTSE, Implementasi SPBTSE, Koordinasi Kebijakan Pengembangan Investasi
- Penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Peringkat EODB, Koordinasi Kebijakan Kemudahan Berusaha dan Peningkatan Daya Saing Nasional
- Penataan regulasi ketenagakerjaan

### 4.2.3. Isu Strategis Regional (Provinsi Sulawesi Tenggara)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan pembangunannya melalui pendekatan Gerakan Akselerasi Pembangunan Wilayah Daratan dan Lautan/Kepulauan (GARBARATA). Pendekatan GARBARATA ini akan menjadi gerbong program prioritas daerah yang akan menuju ke seluruh wilayah daratan dan lautan/kepulauan.

Program prioritas dimaksud terdiri dari 5 pilar SULTRA EMAS, yaitu:

1) Pilar Sultra Cerdas;
2) Pilar Sultra Sehat;
3) Pilar Sultra Peduli Kemiskinan;
4) Pilar Sultra Berbudaya dan Beriman; dan
5) Pilar Sultra Produktif.

### 4.2.4. Isu Strategis Kabupaten Kolaka

Isu strategis daerah didapatkan dari pemetaan permasalahan-permasalahan yang ada dan sinkronisasi dengan isu-isu strategis yang ada di internasional, nasional dan provinsi sehingga isu strategis daerah Kabupaten Kolaka yang diangkat pada RPJMD Tahun 2019 - 2024 adalah sebagai berikut:

**a) Penanggulangan kemiskinan**

Kemiskinan merupakan masalah global yang juga masih menjadi isu di Kabupaten Kolaka. Pada tahun 2018 tingkat kemiskinan Kabupaten Kolaka terhitung sebesar 12,51% atau 26 ribu jiwa. Angka ini masih tergolong tinggi karena berada di atas capaian nasional sebesar 9,66%. Kemiskinan lazim didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi

geografis, gender dan kondisi lingkungan. Selain itu, kemiskinan juga terjadi akibat masih adanya ketidaktepatan sasaran program kegiatan maupun lokasi intervensi penanganan kemiskinan, belum terintegrasinya program kegiatan penanggulangan kemiskinan, belum tervalidasinya data kemiskinan secara periodik, belum efektifnya sistem pengawasan secara partisipatif, dan belum optimalnya pemberdayaan kelompok sasaran (petani dan nelayan) menuju industrialisasi komoditas pertanian (industri pengolahan hasil pertanian).

**b) Infrastruktur wilayah dan kawasan permukiman**

Pemerataan pembangunan merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan daerah Kabupaten Kolaka. Pembangunan daerah khususnya terkait penyediaan fasilitas publik dan infrastruktur tidak hanya harus berkualitas namun juga harus inklusif dan merata. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Kolaka yang membentang dari utara ke selatan menjadi salah faktor yang mempengaruhi kualitas pemerataan penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik di Kabupaten Kolaka. Untuk membuka akses dan pemerataan infrastruktur wilayah perlu dibangun konektivitas jalan dan jembatan yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan baik itu pusat produksi maupun pusat pemerintahan. Berdasarkan data kondisi awal Tahun 2018 jalan Kabupaten Kolaka dalam kondisi mantap mencapai 76% yang dihitung berdasarkan panjang jalan dalam kondisi baik 359,14 Km (41%) dan jalan kondisi sedang sepanjang 306,22 Km (35%), namun capaian tersebut masih ditemukan permasalahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah antara lain : masih belum memadainya konektifitas jaringan jalan dan jembatan pada pusat-pusat pertumbuhan (sentra produksi, pariwisata dan pusat pemerintahan); serta belum terintergrasinya sistem informasi dalam perencanaan pembangunan jalan/jembatan dan pemanfaatan ruang kota.

Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh. Berdasarkan kondisi awal tahun 2018 luas kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten Kolaka mencapai 34,72 Ha dan persentase rumah layak huni mencapai 40%. Capaian tersebut masih perlu mendapatkan perhatian oleh Pemerintah Daerah antara lain : belum optimalnya penataan lingkungan pemukiman kumuh; masih banyaknya rumah yang tidak layak huni; dan belum seimbangnya pertumbuhan rumah tangga dengan pertumbuhan pengadaan rumah (*backlog*).

**c) Daya Saing Ekonomi dan Peningkatan Produktivitas**

Hingga saat ini, sektor pertambangan dan penggalian merupakan komponen utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kolaka. Sektor ini berkontribusi 48% terhadap total PDRB Kab. Kolaka. Sedangkan sektor lain yang cukup signifikan mempengaruhi kinerja ekonomi Kab. Kolaka yaitu sektor pertanian/kehutanan/perikanan 13.15%, sektor industri pengolahan 9.38% dan sektor Perdagangan 9.33%. Pemerintah Kabupaten Kolaka mengalami kesulitan dalam pemanfaatan sektor pertambangan secara optimal bagi kesejahteraan penduduk Kolaka sejak diperlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014, dimana kewenangan sektor pertambangan bukan lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, namun telah beralih kepada pemerintah provinsi.

Mengantisipasi agar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kolaka tetap tumbuh positif, sektor-sektor ekonomi lainnya menjadi prioritas untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi dan produktivitas.

sedangkan sektor pertanian dalam arti luas melalui pengembangan agroindustri/industri pengolahan, optimalisasi produktivitas

komoditas unggulan, serta pemberian kemudahan akses terhadap permodalan.

Pada sektor perdagangan dan UMKM, melalui peningkatan sarana dan prasarana pendukung perdagangan yang lebih representatif dan modern, peningkatan kualitas hasil – hasil produksi unggulan daerah, penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan, penciptaan wirausaha baru dan daya saing UMKM, serta dukungan terhadap akses permodalan UMKM.

Selanjutnya sektor pariwisata, melalui peningkatan daya saing dan promosi destinasi wisata, peningkatan konektifitas antar daerah wisata, peningkatan kualitas kelembagaan dan sumber daya pengelola destinasi wisata, serta dukungan pengembangan ekonomi kreatif pada daerah wisata.

**d) Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan**

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kolaka masih menjadi permasalahan utama yang perlu mendapat perhatian. Permasalahan tersebut diantaranya masih rendahnya tingkat profesionalisme dan kapasitas aparatur, belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, masih kurangnya kualitas pelayanan publik dan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan penerapan SPBE pada perangkat daerah.

Pada bidang perencanaan dan keuangan, belum optimalnya penyediaan data dan informasi pembangunan daerah, belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, belum terintegrasinya perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah secara elektronik, belum optimalnya pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah, serta belum optimalnya pengelolaan perusahaan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

Pada bidang Pengawasan, belum optimalnya sistem pengawasan internal pemerintah dan masih rendahnya kuantitas dan kualitas tenaga auditor daerah.

**e) Kualitas pendidikan dan kesehatan**

Kualitas kehidupan masyarakat di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan dan layanan kesehatan. Salah satu indikator untuk mengetahui kualitas kehidupan masyarakat adalah melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan IPM dibentuk oleh 3 dimensi yaitu dimensi kesehatan yang dihitung menggunakan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), dimensi Pendidikan yang dihitung menggunakan indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS), serta dimensi standar Hidup Layak yang dihitung menggunakan indikator pengeluaran perkapita.

Secara umum, kinerja peningkatan IPM Kabupaten Kolaka cukup baik setiap tahun terjadi peningkatan linear terhadap angka IPM Kabupaten Kolaka. Pada tahun 2017, angka IPM Kabupaten Kolaka tercatat sebesar 71.46. Namun demikian, dalam lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara, angka ini masih berada di bawah Kota Kendari (81.83) dan Kota Bau-Bau (74.14). Adapun permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Kolaka antara lain: belum meratanya akses pendidikan serta Kuantitas, kualitas dan sebaran guru; masih rendahnya ketersediaan sarana penunjang; belum adanya dukungan beasiswa pendidikan bagi masyarakat tidak mampu dan berprestasi; kurang optimalnya kualitas pelayanan kesehatan dasar pada ibu melahirkan dan bayi serta penangan stunting; belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular/tidak menular; rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan fasilitas kesehatan serta SDM tenaga kesehatan; rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat; masih kurangnya tenaga penyuluh KB yang berkualitas; serta belum optimalnya konseling kesehatan reproduksi remaja.

**f) Peluang kerja**

Ketersediaan peluang kerja merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data BPS Kabupaten Kolaka, terjadi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kolaka dari 6.53 % di tahun 2015, menjadi 2.18% di tahun 2018. Meskipun terjadi penurunan, namun masih ditemukan permasalahan yakni, rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja, kompetensi angkatan kerja tidak sesuai kebutuhan kerja, dan terbatasnya ketersediaan lapangan kerja, serta belum optimalnya pemanfaatan Balai Latihan Kerja.

**g) Kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam serta masalah pertanahan**

Isu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam serta masalah pertanahan merupakan isu yang sangat penting dalam upaya pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan isu pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang berkaitan dengan penanganan perubahan iklim, pemeliharaan ekosistem laut dan pemeliharaan ekosistem darat.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup dan perlindungan SDA masih terdapat permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kolaka, seperti: belum optimalnya penanganan sampah; masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah; belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan; serta menurunnya kuantitas dan kualitas sumber daya air dan udara.

Selanjutnya, isu permasalahan pertanahan bermula dari tidak adanya kesepakatan bersama pada tiga hal, yaitu siapa yang berhak (1) menguasai tanah dan sumberdaya alam; (2) memanfaatkan tanah dan sumberdaya alam; (3) mengambil keputusan atas penguasaaan tanah dan sumberdaya alam tersebut. Permasalahan pertanahan di Kabupaten Kolaka antara lain masih adanya klaim kepemilikan

lahan pemda oleh masyarakat; belum semua aset Pemerintah daerah dan masyarakat bersertifikat.

# BAB V

# VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih lima tahun kedepan. Visi dan Misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah melalui implementasi Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah yang terukur, fokus dan tepat sasaran dengan tetap memperhatikan Isu Strategis Internasional, Nasional, dan Regional (Provinsi) serta pencapaian Tujuan RPJPD Kabupaten Kolaka Tahun 2005-2025.

## 5.1. VISI

Visi pembangunan daerah Kabupaten Kolaka Periode Tahun 2019-2024 adalah lanjutan dari Visi Pembangunan Periode Tahun 2014-2019. Untuk melanjutkan dan meningkatkan hasil capaian pembangunan daerah pada periode tahun sebelumnya, maka ditetapkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kolaka periode tahun 2019-2024 yaitu:

**“ Kabupaten Kolaka yang Semakin Maju, Berkeadilan dan Sejahtera ”**

**Semakin** : mengartikan bahwa adanya pertambahan, peningkatan, kelebihan dari suatu kegiatan, program yang dilaksanakan dimulai dari sampai batas waktu yang ditentukan terjadi perubahan, perbaikan, peningkatan dalam pembangunan.

**Maju** : mengartikan bahwa adanya dinamika, pergerakan kondisi perekonomian kearah yang lebih baik, yang tergambar dari laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dibarengi dengan laju inflasi yang terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan

kemiskinan, serta tetap terjaganya kelestraian alam dan lingkungan hidup. Selain itu, juga ditandai dengan struktur ekonomi yang kokoh dan mampu produktifitas tinggi, dengan berbasis pada potensi ekonomi daerah.

**Berkeadilan:** Dimaknai bahwa perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu, golongan maupun antar wilayah, sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

**Sejahtera :** Mengandung makna bahwa semua kebutuhan lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dari aspek sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan, sandang dan papan secara merata.

Bahasa visi ini mengadung nilai-nilai dan harapan yang luhur, dalam menjalankan pemerintahan sampai dengan kurun waktu lima tahun ke depan, sebagai kerangka amanat pencapaian visi jangka panjang pembangunan Kabupaten Kolaka Tahun 2005-2025, yaitu:

**"Kabupaten Kolaka Sebagai Daerah Perjuangan yang Aman, Maju, Berbudaya, Religius, Demokratis, Adil dan Sejahtera"**

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antar masyarakat, pemerintah dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Kolaka secara terpadu, yang dijalankan melalui sistem pemerintahan baik dan adil dalam melayani masyarakat, serta berpijak pada pola berpikir dan pola berbuat berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Visi Kabupaten Kolaka tersebut juga dapat sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional dan Visi Pembangunan Sulawesi Tenggara.

## 5.2. MISI

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka ditetapkan beberapa Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka yang akan dijalankan pada periode 2019-2024, yaitu:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah;
   Misi ini menggambarkan Pembangunan konektivitas Infrastruktur untuk memperkuat dan mendukung pusat-pusat pertumbuhan, mengurangi beban logistik dalam menjaga stabilitas harga serta mempercepat arus lalulintas orang dan barang.
2. Meningkatkan kinerja ekonomi melalui ekonomi kerakyatan;
   Misi ini menggambarkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui penguatan produktivitas dan daya saing produk unggulan daerah.
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan sendi-sendi sosial budaya dan agama;
   Misi ini menggambarkan upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam memperoleh kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, keten traman dan ketertiban dalam sosial kemasyarakatan.
4. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, bersih dan bermartabat;
   Misi ini menggambarkan upaya pembaharuan sistem penyelenggaraan pemerintahan utamanya aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya aparatur untuk menciptakan Pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bermartabat melalui pemanfaatan teknologi informasi.
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup.

Misi ini menggambarkan pembangunan daerah dan pengelolaan sumber daya alam yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah

penataan ruang dan pengolaan lingkungan hidup sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang berkelanjutan.

Kelima misi tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan, yang setiap tujuan dan sasaran tersebut akan dicapai melalui prioritas pembangunan Strategi Mekongga Sejahtera Bekerja dan Berkarya (SMS BERJAYA).

Selanjutnya akan diuraikan keterkaitan antara misi RPJMN Tahun 2015-2019 melalui 9 Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita), Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 dengan misi RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

Tabel 5.1

Keterkaitan Misi RPJMN (Nawacita), RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara dan RPJMD Kabupaten Kolaka

| No. | 9 Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita) RPJMN 2015-2019 | Misi RPJMN 2015-2019 | Misi Pembangunan Sulawesi Tenggara 2018-2023 | Misi Pembangunan Kabupaten Kolaka 2019-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara | Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan | | |
| 2. | Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya | Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum<br>Mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim | Mewujudkan birokrasi pemerintahan provinsi yang modern, tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance) serta peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan dan kelurahan sebagai pusat pelayanan pemerintahan | Menerapkan tatakelola pemerintahan yang baik, efisien, bersih dan bermartabat |
| 3. | Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan | Mewujudkan bangsa yang berdaya saing | | Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup |

| No. | 9 Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita) RPJMN 2015-2019 | Misi RPJMN 2015-2019 | Misi Pembangunan Sulawesi Tenggara 2018-2023 | Misi Pembangunan Kabupaten Kolaka 2019-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 4. | Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya | | | |
| 5. | Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia | Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera | Meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat berdaulat dan aman dalam bidang ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, politik, serta iman dan taqwa | Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan sendi-sendi sosial budaya dan agama |
| | | Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional | | |
| 6. | Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional | | Meningkatkan konektivitas dan kemitraan antar pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur sosial ekonomi | Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah |

| No. | 9 Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita) RPJMN 2015-2019 | Misi RPJMN 2015-2019 | Misi Pembangunan Sulawesi Tenggara 2018-2023 | Misi Pembangunan Kabupaten Kolaka 2019-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 7. | Peningkatan kedaulatan pangan | | Memajukan daya saing wilayah melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan investasi | Meningkatkan kinerja ekonomi melalui ekonomi kerakyatan |
| 8. | Melakukan revolusi karakter bangsa | Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan | | Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan sendi-sendi sosial budaya dan agama |
| 9. | Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia | | | Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan sendi-sendi sosial budaya dan agama |

## 5.3 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

### 5.3.1. TUJUAN PEMBANGUNAN

Tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2019-2024 dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan permukiman;
2. Meningkatkan kapasitas ekonomi rakyat untuk menurunkan angka kemiskinan;
3. Meningkatkan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor unggulan daerah;

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Meningkatkan kualitas sendi-sendi sosial, budaya, agama dan paham kebangsaan;
6. Meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan;
7. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan potensi sumber daya alam berkelanjutan.

### 5.3.2 SASARAN PEMBANGUNAN

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatnya dukungan infrastruktur untuk penguatan konektivitas dan peningkatan daya saing daerah.
2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar perumahan dan pemukiman.
3. Meningkatnya kemampuan usaha dan kesempatan kerja.
4. Tercapainya ketahanan pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah.
5. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan.
6. Meningkatnya daya saing dan investasi daerah.
7. Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan.
8. Meningkatnya pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk serta keluarga berencana.
9. Lestarinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
10. Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di daerah.
11. Terciptanya kerukunan antar dan inter umat beragama di daerah.
12. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
13. Optimalnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Keberlanjutan Berdasarkan Tata Ruang Daerah.
14. Meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi dan mengurangi risiko bencana dan kondisi kedaruratan.

Adapun keselarasan Tujuan, Sasaran terhadap Misi dijabarkan sebagai berikut :

**Misi 1 : Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah**, Misi ini dijabarkan melalui tujuan Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan permukiman dengan sasaran meningkatnya dukungan infrastruktur untuk penguatan konektivitas dan peningkatan daya saing daerah serta meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar perumahan dan pemukiman. Tujuan misi satu ini di ukur dengan indikator indeks daya saing infrastruktur dengan indikator sasaran proporsi jalan kabupaten dalam kondisi mantap, Persentase ketersediaan air irigasi pada setiap musim tanam/kebutuhan air irigasi berdasarkan rencana tanam, persentase Rumah Tangga berakses air bersih, persentase Rumah Tangga bersanitasi, persentase ruas jalan yang tersedia sarana Penerangan Jalan Umum yang baik, luas kawasan kumuh perkotaan dan persentase rumah layak huni.

**Misi 2 : Meningkatkan kinerja ekonomi melalui ekonomi kerakyatan,** didukung dengan 2 (dua) tujuan yakni tujuan pertama; Meningkatkan kapasitas ekonomi rakyat untuk menurunkan angka kemiskinan, tujuan ini didukung oleh 2 (dua) sasaran yakni meningkatnya kemampuan usaha dan kesempatan kerja serta tercapainya ketahanan pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah, sedangkan tujuan kedua; Meningkatkan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor unggulan daerah. Tujuan ini ditunjang dengan 2 (dua) sasaran yakni meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan serta meningkatnya daya saing dan investasi daerah. Adapun indikator tujuan adalah angka kemiskinan dan nilai PDRB atas dasar harga konstan.

**Misi 3 : Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan sendi-sendi sosial budaya dan agama**, dilaksanakan dengan 2 (dua) tujuan yakni tujuan pertama; meningkatnya kualitas sumber daya manusia didukung 2 (dua) sasaran yaitu meningkatnya

akses dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, serta meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk serta keluarga berencana. Tujuan kedua; meningkatkan kualitas sendi-sendi sosial, budaya, agama dan paham kebangsaan juga dilaksanakan dengan 3 (tiga) sasaran yaitu pertama; Lestarinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, kedua; Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di daerah, ketiga; Terciptanya kerukunan antar dan inter umat beragama di daerah. Tujuan pertama diukur dengan indikator nilai Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan tujuan kedua indikatornya adalah Jumlah konflik SARA. Indikator sasaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan yaitu : Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-rata lama sekolah, Angka Harapan Hidup, Total Fertility Rate (TFR), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Persentase Sanggar Seni dan Budaya yang dibina, Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani dan Indeks kerukunan umat beragama.

**Misi 4 : Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, bersih dan bermartabat**. Misi keempat dilaksanakan dengan satu tujuan yaitu Meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Tujuan ini didukung oleh satu sasaran yaitu, Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator Nilai AKIP Kabupaten, Opini BPK terhadap laporan keuangan, Indeks Desa Membangun, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah.

**Misi 5 : Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup**. Misi kelima diimplementasikan melalui satu tujuan dan tiga sasaran yaitu tujuan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Berkelanjutan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan sasaran antara lain Optimalnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Keberlanjutan Berdasarkan Tata Ruang Daerah,

Optimalnya sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu dan Meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi dan mengurangi risiko bencana dan kondisi kedaruratan. Adapun indikator sasaran yaitu, Persentase Ruang Terbuka Hijau, Persentase jumlah sampah yang tertangani dan persentase desa tangguh bencana.

Tabel 5.2
Rumusan Misi,Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024

| Tujuan/ Sasaran | Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program | Satuan | Kondisi Awal (2018/ 2019) | Target | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| **MISI 1: MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH** | | | | | | | | | |
| Tujuan 1: Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan permukiman | Indeks Daya Saing Infrastruktur | indeks | n/a | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 | 78 |
| Sasaran 1: Meningkatnya dukungan infrastruktur untuk penguatan konektivitas dan peningkatan daya saing daerah | Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap | % | 55,65 | 62 | 65 | 68 | 71 | 75 | 75 |
| | Persentase ketersediaan air irigasi pada setiap musim tanam | % | 65 | 67 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 |
| Sasaran 2: Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar | Persentase Rumah Tangga berakses air bersih | % | 79,47 | 80 | 82 | 85 | 90 | 95 | 95 |

| Tujuan/ Sasaran | Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program | Satuan | Kondisi Awal (2018/ 2019) | Target | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| perumahan dan pemukiman | Persentase Rumah Tangga bersanitasi | % | 80,64 | 82 | 85 | 88 | 92 | 95 | 95 |
| | Persentase Ruas Jalan dengan PJU yang berfungsi baik | % | 16,67 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 |
| | Luas Kawasan Kumuh Perkotaan | Ha | 34,72 | 30 | 25 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| **MISI 2: MENINGKATKAN KINERJA EKONOMI MELALUI EKONOMI KERAKYATAN** | | | | | | | | | |
| Tujuan 2: Meningkatkan kapasitas ekonomi rakyat untuk menurunkan angka kemiskinan | Angka Kemiskinan | % | 12,51 | 11,72 | 11,25 | 10,65 | 10,02 | 9,81 | 9,81 |
| Sasaran 3: Meningkatnya kemampuan usaha dan kesempatan kerja | Pengeluaran per kapita yang disesuaikan | Rp (ribuan)/ bulan | 12.243 | 12.543 | 12.843 | 13.143 | 13.443 | 13.743 | 13.743 |
| | Tingkat pengangguran terbuka | % | 2,18 | 2,10 | 2,05 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

| Tujuan/ Sasaran | Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program | Satuan | Kondisi Awal (2018/ 2019) | Target | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Sasaran 4: Tercapainya ketahanan pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah | Skor Pola Pangan Harapan | Skor | 87 | 89,6 | 92,2 | 94,8 | 97,4 | 100 | 100 |
| Tujuan 3: Meningkatkan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor unggulan daerah | Nilai PDRB AHK | Rp. (Milyar) | 16.802,49 | 17.643 | 18.701 | 19.823 | 21.211 | 22.696 | 22.696 |
| Sasaran 5: Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan | Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) | % | 6,68 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,7 |
| | Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan sektor pedagangan | % | 18,71 | 19,32 | 19,44 | 19,53 | 19,98 | 20 | 20 |

| Tujuan/ Sasaran | Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program | Satuan | Kondisi Awal (2018/ 2019) | Target | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Sasaran 6: Meningkatnya daya saing dan investasi daerah | Nilai investasi | Rp (milyar) | 58,23 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 |
| **MISI 3: MENINGKATKAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN SERTA PENGUATAN SENDI-SENDI SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA** | | | | | | | | | |
| Tujuan 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia | Nilai IPM | indeks | 71,46 | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 | 74,5 |
| Sasaran 7: Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan | Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,98 | 13 | 13,25 | 13,75 | 13,97 | 14 | 14 |
| | Angka Rata-rata lama sekolah | Tahun | 8,31 | 8,33 | 8,36 | 8,75 | 8,9 | 9 | 9 |
| | Angka Harapan Hidup | Tahun | 70,06 | 70,3 | 70,7 | 71 | 71,2 | 71,5 | 71,5 |
| | Prevalensi Stunting Balita Kabupaten Kolaka | % | 26,9 | 26,5 | 26,1 | 25,7 | 25,3 | 24,9 | 24,9 |

| Tujuan/ Sasaran | Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program | Satuan | Kondisi Awal (2018/ 2019) | Target | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Sasaran 8: Meningkatnya pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk serta KB | Total Fertility Rate (TFR) | Rasio | 2,69 | 2,65 | 2,63 | 2,58 | 2,52 | 2,5 | 2,5 |
| | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | indeks | 72,10 | 72,20 | 72,30 | 72,42 | 72,50 | 72,60 | 72,60 |
| | Predikat Kabupaten Layak Anak | Predikat | n/a | Pratama | Pratama | Madya | Madya | Nindya | Nindya |
| Tujuan 5: meningkatkan kualitas sendi-sendi sosial, budaya, agama dan paham kebangsaan | Indeks Kebebasan SIpil | indeks | n/a | 80 | 85 | 88 | 90 | 92 | 92 |
| Sasaran 9: Lestarinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal | Persentase sanggar seni dan budaya yang dibina | % | 18,1 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 50 |
| Sasaran 10: Menurunnya jumlah PMKS di daerah | Persentase PMKS yang tertangani | % | 46,44 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 |

| Tujuan/ Sasaran | Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program | Satuan | Kondisi Awal (2018/ 2019) | Target | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Sasaran 11: Terciptanya kerukunan antar dan inter umat beragama di daerah | Indeks kerukunan umat beragama | indeks | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **MISI 4: MENERAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, EFISIEN, BERSIH DAN BERMARTABAT** | | | | | | | | | |
| Tujuan 6: Meningkatan sistem tata kelola pemerintahan | Indeks Reformasi Birokrasi | indeks | n/a | B | B | B | BB | BB | BB |
| Sasaran 12: Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan | Nilai AKIP kabupaten | Nilai | CC | B | BB | BB | A | A | A |
| | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan daerah | indeks | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | Indeks Desa Membangun | indeks | N/A | 0,5 | 0,56 | 0,61 | 0,63 | 0,65 | 0,65 |
| | Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) | indeks | N/A | baik | baik | baik | sangat baik | sangat baik | sangat baik |

| Tujuan/ Sasaran | Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program | Satuan | Kondisi Awal (2018/ 2019) | Target | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah | indeks | N/A | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 |
| | Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah | % | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| **MISI 5: MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | | |
| Tujuan 7: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Berkelanjutan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | indeks | n/a | 60 | 65 | 70 | 73 | 75 | 75 |
| Sasaran 13: Optimalnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang berkelanjutan | Pencapaian Adipura | tercapai/tidak tercapai | n/a | Tercapai | Tercapai | Tercapai | Tercapai | Tercapai | Tercapai |

| Tujuan/ Sasaran | Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program | Satuan | Kondisi Awal (2018/ 2019) | Target | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Sasaran 14: Meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi dan mengurangi risiko bencana dan kondisi kedaruratan | Persentase Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana | % | 27,3 | 40,9 | 54,5 | 68,2 | 81,8 | 100 | 100 |

# BAB VI

# STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah diuraikan serta memperhatikan permasalahan dan isu strategis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah selama periode tahun 2019 - 2024 yang dijabarkan sebagai berikut:

## 6.1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas pembangunan lima tahun kedepan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Untuk mencapai misi 1 : **Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah** yang bertujuan "*Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan permukiman*". Guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi yang akan dilakukan tercantum pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 1

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI |
|---|---|---|
| **Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan permukiman** | Meningkatnya dukungan infrastruktur untuk penguatan konektivitas dan peningkatan daya saing daerah | Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah |
| | Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar perumahan dan pemukiman | Melaksanakan pemenuhan standar pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan pemukiman |

Untuk mencapai misi 2 : **Meningkatkan Kinerja Ekonomi Melalui Ekonomi Kerakyatan** yang bertujuan "*Meningkatkan kapasitas ekonomi rakyat untuk menurunkan angka kemiskinan*" dan *Meningkatkan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor unggulan daerah"*. Guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi yang akan dilakukan tercantum pada tabel 6.2 berikut ini :

Tabel 6.2
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 2

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI |
|---|---|---|
| **Meningkatkan kapasitas ekonomi rakyat untuk menurunkan angka kemiskinan** | Meningkatnya kemampuan usaha dan kesempatan kerja | Mengupayakan penciptaan lapangan kerja baru dan perlindungan tenaga kerja |
| | Tercapainya ketahanan pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah | Memfasilitasi ketersediaan dan kemudahan pangan bagi masyarakat |
| **Meningkatkan produktifitas nilai tambah dan daya saing sektor unggulan daerah** | Meningkatnya Laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan | Mengupayakan penciptaan lapangan kerja baru dan perlindungan tenaga kerja |
| | | Optimalisasi daya dukung potensi pariwisata serta pengembangan promosi pariwisata yang efektif, kreatif, terarah, terpadu dan berkelanjutan |
| | Meningkatnya daya saing dan Investasi daerah | Peningkatan koordinasi dan Pelayanan perizinan |

Untuk mencapai misi 3 : **Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Serta Penguatan Sendi-Sendi Sosial Budaya Dan Agama** yang bertujuan "*Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia*"

*dan "Meningkatkan kualitas sendi-sendi sosial, budaya, agama dan paham kebangsaan"* . Guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi yang akan dilakukan tercantum pada tabel 6.3 berikut ini :

Tabel 6.3
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 3

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI |
|---|---|---|
| Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan | Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar, tenaga pendidik dalam mendukung wajar 9 tahun |
| | | Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan dalam meningkatkan kualitas pemenuhan pelayanan kesehatan |
| | | Meningkatkan upaya preventif dalam pelaksanaan pemenuhan kesehatan |
| | Meningkatnya pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk serta KB | Optimalisasi upaya pengendalian penduduk melalui layanan KB dan pengarusutamaan gender |
| Meningkatkan kualitas sendi-sendi sosial, budaya, agama dan paham kebangsaan | Lestarinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal | Peningkatan pemahaman nilai nilai budaya daerah di masyarakat |
| | Menurunnya jumlah PMKS di daerah | Meningkatkan pengendalian dan pembinaan PMKS |
| | Terciptanya kerukunan antar dan inter umat beragama di daerah | Meningkatkan sarana dan prasarana peribadatan serta nilai-nilai keagamaan |

Untuk mencapai misi 4 : **Menerapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Efisien, Bersih Dan Bermartabat** yang bertujuan "*Meningkatan sistem tata kelola pemerintahan*". Guna

mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi yang akan dilakukan tercantum pada tabel 6.4 berikut ini :

Tabel 6.4
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 4

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI |
|---|---|---|
| Meningkatan sistem tata kelola pemerintahan | Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui penguatan inovasi daerah dan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi |

Untuk mencapai misi 5 : **Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup** yang bertujuan "*Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Berkelanjutan*". Guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi yang akan dilakukan tercantum pada tabel 6.5 berikut ini :

Tabel 6.5
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 5

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI |
|---|---|---|
| Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Berkelanjutan | Optimalnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkeberlanjutan | Meningkatkan sistem perijinan, pengawasan dan pemantauan lingkungan dan penataan ruang, serta penegakan hukum |
| | | Mengurangi jumlah timbulan sampah |

| | | |
|---|---|---|
| | Meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi dan mengurangi risiko bencana dan kondisi kedaruratan | Meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi dan mengurangi risiko bencana |

**6.2. Arah Kebijakan**

Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan, sasaran dan strategi pembangunan lima tahun kedepan, ditetapkan arah kebijakan yang akan menjadi acuan dan pedoman penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Adapun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kolaka tahun 2019-2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 6.1.**
**Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kolaka Tahun 2019 - 2024**

A. Arah Kebijakan tahun 2020

Perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kolaka untuk lima tahun kedepan dimulai pada tahun 2020. Tema Pembangunan tahun 2020 difokuskan pada "Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan untuk mendukung pengembangan SDM" dengan arah kebijakan yaitu :

1. Peningkatan konektivitas transportasi antara pusat-pusat desa/kelurahan dengan pusat kecamatan dan kabupaten serta Perluasan keterjangkauan layanan komunikasi dan informasi hingga ke pelosok;
2. Penyediaan prasarana sarana utilitas pemukiman;
3. Meningkatkan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja serta perlindungan tenagakerja dan kesehatan pekerja;
4. Meningkatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman;
5. Menerapkan sistem agribisnis yang berdaya saing;
6. Penguatan dan pengembangan destinasi pariwisata;
7. Penyediaan sistem perizinan berbasis elektronik serta meningkatkan promosi peluang investasi daerah;
8. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
9. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana faskes dasar dan rujukan serta tenaga medis dan paramedis;
10. Peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat dan meningkatkan upaya pencegahan dan pemantauan terhadap penyebaran penyakit;
11. Meningkatkan sarana dan prasarana pengendalian penduduk, penguatan peran PPL KB & PPKBD;
12. Penguatan dan pembinaan nilai-nilai budaya daerah;
13. Pembinaan, pelatihan, pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi PMKS;
14. Pembinaan tokoh agama, percepatan penanaman nilai agama sejak dini serta penguatan peran dan fungsi rumah ibadah;
15. Penerapan e-Government dan peningkatan pelayanan publik;
16. Pelaksanaan pembangunan daerah yang tertib tata ruang dan berbasis lingkungan hidup;
17. Peningkatan sarana prasarana persampahan dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
18. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengurangan risiko bencana.

B. Arah Kebijakan tahun 2021

Tema Pembangunan tahun 2021 difokuskan pada "pengembangan kualitas pembangunan dan SDM untuk meningkatkan pelayanan publik" dengan arah kebijakan yaitu :

1. Pemantapan konektivitas transportasi antara pusat-pusat desa/kelurahan dengan pusat kecamatan dan kabupaten serta Perluasan keterjangkauan layanan komunikasi dan informasi hingga ke pelosok;
2. Penyediaan prasarana sarana utilitas pemukiman;
3. Meningkatkan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja serta perlindungan tenagakerja dan kesehatan pekerja;
4. meningkatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman;
5. Menerapkan sistem agribisnis yang berdaya saing;
6. Penguatan dan pengembangan destinasi pariwisata;
7. Penyediaan sistem perizinan berbasis elektronik serta meningkatkan promosi peluang investasi daerah;
8. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas tenaga pendidik dan kependidikan;
9. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana faskes dasar dan rujukan serta tenaga medis dan paramedis;
10. Peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat dan meningkatkan upaya pencegahan dan pemantauan terhadap penyebaran penyakit;
11. Meningkatkan sarana dan prasarana pengendalian penduduk, penguatan peran PPL KB & PPKBD;
12. Penguatan dan pembinaan nilai-nilai budaya daerah;
13. Pembinaan, pelatihan, pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi PMKS;
14. Pembinaan tokoh agama, percepatan penanaman nilai agama sejak dini serta penguatan peran dan fungsi rumah ibadah;
15. Peningkatan e-Government dan peningkatan pelayanan publik;
16. Peningkatan pembangunan daerah yang tertib tata ruang dan berbasis lingkungan hidup;
17. Peningkatan sarana prasarana persampahan dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan persampahan;
18. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengurangan risiko bencana.

C. Arah Kebijakan tahun 2022

Tema Pembangunan tahun 2022 difokuskan pada "Pemantapan kualitas pembangunan dan SDM untuk meningkatkan nilai tambah potensi daerah" dengan arah kebijakan yaitu :

1. Peningkatan konektivitas transportasi antara simpul-simpul produksi, pengolahan, distribusi dan pemasaran serta Perluasan keterjangkauan layanan komunikasi dan informasi hingga ke pelosok;
2. Penyediaan prasarana sarana utilitas pemukiman;
3. Meningkatkan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja serta perlindungan tenagakerja dan kesehatan pekerja;
4. meningkatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman;
5. Menerapkan sistem agribisnis yang berdaya saing;
6. Meningkatkan pemasaran destinasi pariwisata;
7. Penyediaan sistem perizinan berbasis elektronik serta meningkatkan promosi peluang investasi daerah;
8. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas tenaga pendidik dan kependidikan;
9. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana faskes dasar dan rujukan serta tenaga medis dan paramedis;
10. Peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat dan meningkatkan upaya pencegahan dan pemantauan terhadap penyebaran penyakit;
11. Meningkatkan sarana dan prasarana pengendalian penduduk, penguatan peran PPL KB & PPKBD;
12. Penguatan dan pembinaan nilai-nilai budaya daerah ;
13. Pembinaan, pelatihan, pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi PMKS;
14. Pembinaan tokoh agama, percepatan penanaman nilai agama sejak dini serta penguatan peran dan fungsi rumah ibadah;
15. Peningkatan e-Government dan peningkatan pelayanan publik
16. Pemantapan pembangunan daerah yang tertib tata ruang dan berbasis lingkungan hidup;
17. Peningkatan sarana prasarana persampahan dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan persampahan;
18. Pemantapan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengurangan risiko bencana.

D. Arah Kebijakan tahun 2023

Tema Pembangunan tahun 2023 difokuskan pada "Penguatan kualitas pembangunan dan SDM untuk mendukung peningkatan daya saing daerah" dengan arah kebijakan yaitu :

1. Pemantapan konektivitas transportasi antara simpul-simpul produksi, pengolahan, distribusi dan pemasaran serta Perluasan keterjangkauan layanan komunikasi dan informasi hingga ke pelosok;
2. Penyediaan prasarana sarana utilitas pemukiman;
3. Meningkatkan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja serta perlindungan tenagakerja dan kesehatan pekerja;
4. meningkatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman;
5. Menerapkan sistem agribisnis yang berdaya saing;
6. Meningkatkan pemasaran destinasi pariwisata;
7. Penyediaan sistem perizinan berbasis elektronik serta meningkatkan promosi peluang investasi daerah;
8. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas tenaga pendidik dan kependidikan;
9. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana faskes dasar dan rujukan serta tenaga medis dan paramedis;
10. Peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat dan meningkatkan upaya pencegahan dan pemantauan terhadap penyebaran penyakit;
11. Meningkatkan sarana dan prasarana pengendalian penduduk, penguatan peran PPL KB & PPKBD;
12. Penguatan dan pembinaan nilai-nilai budaya daerah;
13. Pembinaan, pelatihan, pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi PMKS;
14. Pembinaan tokoh agama, percepatan penanaman nilai agama sejak dini serta penguatan peran dan fungsi rumah ibadah;
15. Pemantapan e-Government dan peningkatan pelayanan publik;
16. Pemantapan pembangunan daerah yang tertib tata ruang dan berbasis lingkungan hidup;
17. Peningkatan sarana prasarana persampahan dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan persampahan;
18. Pemantapan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengurangan risiko bencana

E. Arah Kebijakan tahun 2024

Tema Pembangunan tahun 2024 difokuskan pada "Pencapaian pembangunan dan SDM Kabupaten Kolaka yang berdaya saing dan mandiri" dengan arah kebijakan yaitu :

1. Penguatan konektivitas transportasi antara simpul-simpul produksi, pengolahan, distribusi dan pemasaran serta Perluasan keterjangkauan layanan komunikasi dan informasi hingga ke pelosok;
2. Penyediaan prasarana sarana utilitas pemukiman;
3. Meningkatkan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja serta perlindungan tenagakerja dan kesehatan pekerja;
4. meningkatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman;
5. Menerapkan sistem agribisnis yang berdaya saing;
6. Meningkatkan pemasaran destinasi pariwisata;
7. Penyediaan sistem perizinan berbasis elektronik serta meningkatkan promosi peluang investasi daerah;
8. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas tenaga pendidik dan kependidikan;
9. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana faskes dasar dan rujukan serta tenaga medis dan paramedis;
10. Peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat dan meningkatkan upaya pencegahan dan pemantauan terhadap penyebaran penyakit;
11. Meningkatkan sarana dan prasarana pengendalian penduduk, penguatan peran PPL KB & PPKBD;
12. Penguatan dan pembinaan nilai-nilai budaya daerah;
13. Pembinaan, pelatihan, pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi PMKS;
14. Pembinaan tokoh agama, percepatan penanaman nilai agama sejak dini serta penguatan peran dan fungsi rumah ibadah;
15. Penguatan e-Government dan peningkatan pelayanan publik;
16. Penguatan pembangunan daerah yang tertib tata ruang dan berbasis lingkungan hidup;
17. Peningkatan sarana prasarana persampahan dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan persampahan;
18. Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengurangan risiko bencana.

Berdasarkan penjelasan arah kebijakan Pembangunan tahunan tersebut di atas, maka dapat dijabarkan setiap misi sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 6.6
Arah Kebijakan Pembangunan lima Tahun kedepan

| **Arah Kebijakan** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **MISI 1 : MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH** | | | | |
| Peningkatan konektivitas transportasi antara pusat-pusat desa/kelurahan dengan pusat kecamatan dan kabupaten serta Perluasan keterjangkauan layanan komunikasi dan informasi hingga ke pelosok | Pemantapan konektivitas transportasi antara pusat-pusat desa/kelurahan dengan pusat kecamatan dan kabupaten serta Perluasan keterjangkauan layanan komunikasi dan informasi hingga ke pelosok | Peningkatan konektivitas transportasi antara simpul-simpul produksi, pengolahan, distribusi dan pemasaran serta Perluasan keterjangkauan layanan komunikasi dan informasi hingga ke pelosok | Pemantapan konektivitas transportasi antara simpul-simpul produksi, pengolahan, distribusi dan pemasaran serta Perluasan keterjangkauan layanan komunikasi dan informasi hingga ke pelosok | Penguatan konektivitas transportasi antara simpul-simpul produksi, pengolahan, distribusi dan pemasaran serta Perluasan keterjangkauan layanan komunikasi dan informasi hingga ke pelosok |
| Penyediaan prasarana sarana utilitas pemukiman | Penyediaan prasarana sarana utilitas pemukiman | Penyediaan prasarana sarana utilitas pemukiman | Penyediaan prasarana sarana utilitas pemukiman | Penyediaan prasarana sarana utilitas pemukiman |

| Arah Kebijakan | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **MISI 2 : MENINGKATKAN KINERJA EKONOMI MELALUI EKONOMI KERAKYATAN** | | | | |
| Meningkatkan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja serta perlindungan tenagakerja dan kesehatan pekerja | Meningkatkan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja serta perlindungan tenagakerja dan kesehatan pekerja | Meningkatkan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja serta perlindungan tenagakerja dan kesehatan pekerja | Meningkatkan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja serta perlindungan tenagakerja dan kesehatan pekerja | Meningkatkan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja serta perlindungan tenagakerja dan kesehatan pekerja |
| meningkatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman | meningkatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman | meningkatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman | meningkatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman | meningkatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman |
| Menerapkan sistem agribisnis yang berdaya saing | Menerapkan sistem agribisnis yang berdaya saing | Menerapkan sistem agribisnis yang berdaya saing | Menerapkan sistem agribisnis yang berdaya saing | Menerapkan sistem agribisnis yang berdaya saing |
| Penguatan dan pengembangan destinasi pariwisata | Penguatan dan pengembangan destinasi pariwisata | Meningkatkan pemasaran destinasi pariwisata | Meningkatkan pemasaran destinasi pariwisata | Meningkatkan pemasaran destinasi pariwisata |
| Penyediaan sistem perizinan berbasis elektronik serta meningkatkan promosi peluang investasi daerah | Penyediaan sistem perizinan berbasis elektronik serta meningkatkan promosi peluang investasi daerah | Penyediaan sistem perizinan berbasis elektronik serta meningkatkan promosi peluang investasi daerah | Penyediaan sistem perizinan berbasis elektronik serta meningkatkan promosi peluang investasi daerah | Penyediaan sistem perizinan berbasis elektronik serta meningkatkan promosi peluang investasi daerah |

| Arah Kebijakan | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **MISI 3 : MENINGKATKAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN SERTA PENGUATAN SENDI-SENDI SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA** | | | | |
| Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas tenaga pendidik dan kependidikan | Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas tenaga pendidik dan kependidikan | Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas tenaga pendidik dan kependidikan | Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas tenaga pendidik dan kependidikan | Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas tenaga pendidik dan kependidikan |
| Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana faskes dasar dan rujukan serta tenaga medis dan paramedis | Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana faskes dasar dan rujukan serta tenaga medis dan paramedis | Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana faskes dasar dan rujukan serta tenaga medis dan paramedis | Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana faskes dasar dan rujukan serta tenaga medis dan paramedis | Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana faskes dasar dan rujukan serta tenaga medis dan paramedis |
| Peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat dan meningkatkan upaya pencegahan dan pemantauan terhadap penyebaran penyakit | Peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat dan meningkatkan upaya pencegahan dan pemantauan terhadap penyebaran penyakit | Peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat dan meningkatkan upaya pencegahan dan pemantauan terhadap penyebaran penyakit | Peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat dan meningkatkan upaya pencegahan dan pemantauan terhadap penyebaran penyakit | Peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat dan meningkatkan upaya pencegahan dan pemantauan terhadap penyebaran penyakit |

| **Arah Kebijakan** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Meningkatkan sarana dan prasarana pengendalian penduduk, penguatan peran PPL KB & PPKBD | Meningkatkan sarana dan prasarana pengendalian penduduk, penguatan peran PPL KB & PPKBD | Meningkatkan sarana dan prasarana pengendalian penduduk, penguatan peran PPL KB & PPKBD | Meningkatkan sarana dan prasarana pengendalian penduduk, penguatan peran PPL KB & PPKBD | Meningkatkan sarana dan prasarana pengendalian penduduk, penguatan peran PPL KB & PPKBD |
| Penguatan dan pembinaan nilai-nilai budaya daerah | Penguatan dan pembinaan nilai-nilai budaya daerah | Penguatan dan pembinaan nilai-nilai budaya daerah | Penguatan dan pembinaan nilai-nilai budaya daerah | Penguatan dan pembinaan nilai-nilai budaya daerah |
| Pembinaan, pelatihan, pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi PMKS | Pembinaan, pelatihan, pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi PMKS | Pembinaan, pelatihan, pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi PMKS | Pembinaan, pelatihan, pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi PMKS | Pembinaan, pelatihan, pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi PMKS |
| Pembinaan tokoh agama, percepatan penanaman nilai agama sejak dini serta penguatan peran dan fungsi rumah ibadah | Pembinaan tokoh agama, percepatan penanaman nilai agama sejak dini serta penguatan peran dan fungsi rumah ibadah | Pembinaan tokoh agama, percepatan penanaman nilai agama sejak dini serta penguatan peran dan fungsi rumah ibadah | Pembinaan tokoh agama, percepatan penanaman nilai agama sejak dini serta penguatan peran dan fungsi rumah ibadah | Pembinaan tokoh agama, percepatan penanaman nilai agama sejak dini serta penguatan peran dan fungsi rumah ibadah |

| Arah Kebijakan | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **MISI 4 : MENETAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, EFISIEN, BERSIH DAN BERMARTABAT** | | | | |
| Penerapan e-Government dan peningkatan pelayanan publik | Peningkatan e-Government dan peningkatan pelayanan publik | Peningkatan e-Government dan peningkatan pelayanan publik | Pemantapan e-Government dan peningkatan pelayanan publik | Penguatan e-Government dan peningkatan pelayanan publik |
| **MISI 5 : MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | |
| Pelaksanaan pembangunan daerah yang tertib tata ruang dan berbasis lingkungan hidup | Peningkatan pembangunan daerah yang tertib tata ruang dan berbasis lingkungan hidup | Pemantapan pembangunan daerah yang tertib tata ruang dan berbasis lingkungan hidup | Pemantapan pembangunan daerah yang tertib tata ruang dan berbasis lingkungan hidup | Penguatan pembangunan daerah yang tertib tata ruang dan berbasis lingkungan hidup |
| Peningkatan sarana prasarana persampahan dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan | Peningkatan sarana prasarana persampahan dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan persampahan | Peningkatan sarana prasarana persampahan dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan persampahan | Peningkatan sarana prasarana persampahan dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan persampahan | Peningkatan sarana prasarana persampahan dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan persampahan |
| Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengurangan risiko bencana | Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengurangan risiko bencana | Pemantapan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengurangan risiko bencana | Pemantapan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengurangan risiko bencana | Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengurangan risiko bencana |

Selanjutnya akan diuraikan Keselarasan antara 9 Agenda Pembangunan Nasional (Nawacita), Program prioritas pembangunan Sulawesi Tenggara (Program Sultra Emas) dengan 9 Program Prioritas SMS Berjaya pada tabel berikut ini :

Tabel 6.7

Keselarasan Nawacita, Program Sultra Emas dengan 9 Prioritas Pembangunan SMS Berjaya

| No. | 9 Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita) | Program Prioritas Pembangunan Sultra (Program Sultra Emas) | 9 Prioritas Pembangunan SMS Berjaya |
|---|---|---|---|
| 1. | Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara | | |
| 2. | Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya | Sultra Berbudaya dan Beriman | Pemantapan Reformasi Birokrasi dengan berbasis elektronik serta peningkatan pelayanan lini depan<br><br>Penguatan konektivitas Infrastruktur daerah<br><br>Penataan kawasan perkotaan dan fasilitas publik |
| 3. | Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan | | |
| 4. | Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya | | |

| No. | 9 Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita) | Program Prioritas Pembangunan Sultra (Program Sultra Emas) | 9 Prioritas Pembangunan SMS Berjaya |
|---|---|---|---|
| 5. | Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia | Sultra Cerdas | Peningkatan pendidikan, agama, budaya dan paham kebangsaan |
| | | Sultra Sehat | Pemenuhan layanan kesehatan masyarakat yang berkualitas |
| 6. | Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional | Sultra Produktif<br><br>Sultra Bantuan masyarakat miskin | Penguatan Struktur ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan<br><br>Pembukaan peluang kerja dan peningkatan keahlian tenaga kerja |
| 7. | Peningkatan kedaulatan pangan | | Peningkatan Infrastruktur Pertanian dalam arti luas |
| 8. | Melakukan revolusi karakter bangsa | Sultra berbudaya dan beriman<br><br>Sultra Cerdas | Peningkatan pendidikan, agama, budaya dan paham kebangsaan |
| 9. | Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia | Sultra berbudaya dan beriman<br><br>Sultra Cerdas | |

## 6.3. Program Pembangunan Daerah

### A. Penjabaran Prioritas Pembangunan SMS Berjaya

Dalam rangka mengimplementasikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan, maka diperlukan suatu program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih agar supaya lebih fokus dan terarah dalam pencapaian Sembilan Prioritas Pembangunan SMS Berjaya. Penjabaran Prioritas Pembangunan ini

akan dilaksanakan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka dengan berkoordinasi Instansi/Lembaga terkait sebagaimana diuraikan pada Tabel berikut ini :

Tabel 6.8

Implementasi 9 Prioritas Pembangunan SMS Berjaya dan Penjabarannya terhadap Misi

| MISI | 9 Prioritas Pembangunan SMS Berjaya | Penjabaran Prioritas Pembangunan | SKPD/ Instansi/ Lembaga Pelaksana |
|---|---|---|---|
| 1. Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah | Peningkatan infrastruktur pertanian dalam arti luas | Meningkatkan cakupan layanan jaringan irigasi, bendungan dan saluran tambak | Dinas PUPR, Dinas Tanaman Pengan dan Hortikultura. Dinas Perkebunan dan Peternakan dan Dinas Perikanan, Bagian Perekonomian dan SDA Setda, serta Balai Wilayah Sungai IV Kendari |
| | | Peningkatan jalan produksi dan jalan usaha tani pada sentra-sentra produksi | |
| | Penguatan konektivitas infrastruktur daerah | Peningkatan konektivitas transportasi antara pusat-pusat sentra Produksi, Pariwisata dan Pemerintahan | Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, , Bagian Infrastruktur Setda dan Bagian Administrasi Pembangunan Setda, serta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XXI Kendari |
| | | Perluasan keterjangkauan layanan komunikasi dan informasi hingga ke pelosok | Dinas Kominfo dan Bagian Humas dan Protokol Setda |
| 2. Meningkatkan kinerja ekonomi melalui ekonomi kerakyatan | Penguatan struktur ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan | Meningkatkan daya saing produksi dan pengolahan hasil agribisnis dan agroindustri | Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, BKAD serta Bagian Perekonomian dan SDA Setda, Perbankan |
| | | Pengembangan produk unggulan pertanian berskala kawasan | |
| | | Pemberian stimulan permodalan bagi Petani, Nelayan dan UMKM | |

| MISI | 9 Prioritas Pembangunan SMS Berjaya | Penjabaran Prioritas Pembangunan | SKPD/ Instansi/ Lembaga Pelaksana |
|---|---|---|---|
| | | Peningkatan nilai tambah kepariwisataan dan penguatan ekonomi kreatif | Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas PUPR, Bapenda serta Bagian Perekonomian dan SDA Setda |
| | Pembukaan peluang kerja dan peningkatan keahlian tenaga kerja | Penguatan peran dan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | Peningkatan keterampilan wirausaha | Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | Peningkatan kerjasama Pemerintah, Masyarakat dan Dunia usaha | Dinas PM & PTSP, Bag. Pemerintahan Setda, Perusda, Perbankan |
| 3. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan sendi-sendi sosial budaya dan agama | Peningkatan Pendidikan, Agama, Budaya dan Paham kebangsaan | Beasiswa berprestasi | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BKAD |
| | | Perpustakaan yang representatif | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | Sekolah berbasis IT | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kominfo |
| | | Promotif dan preventif kesehatan sejak dini melalui penguatan UKS | Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | Penguatan nilai-nilai keagamaan melalui pembinaan pada usia sekolah dan inter antar umat beragama | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kesbangpol, Bag. Kesra Setda, Kementerian Agama Kolaka |
| | | Penguatan nilai-nilai budaya yang berbasis kearifan lokal dan pemahaman kebangsaan untuk mempererat kebhinekaan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kesbangpol, Dinas Pemuda dan Olahraga, Bag. Pemberdayaan masyarakat dan |

| MISI | 9 Prioritas Pembangunan SMS Berjaya | Penjabaran Prioritas Pembangunan | SKPD/ Instansi/ Lembaga Pelaksana |
|---|---|---|---|
| | | | Trantibum Linmas Setda |
| | Pemenuhan Layanan Kesehatan Masyarakat yang berkualitas | Kolaka Sehat | Dinas Kesehatan, Dinas PP & KB, Dinas PKP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bappeda, Dinas PP dan PA |
| | | Meningkatkan peran rumah sakit kolaka sebagai pusat rujukan regional | Dinas Kesehatan, RSBG, BPJS Kesehatan |
| 4. Menerapkan tatakelola pemerintahan yang baik, efisien, bersih dan bermartabat | Pemantapan Reformasi Birokrasi yang berbasis elektronik serta Peningkatan pelayanan pemerintahan lini depan | Penerapan e-Goverment terintegrasi (e-planning, e-budgeting, e-Kinerja, e-Monev dll) | Seluruh SKPD |
| | | Peningkatan kualitas aparat pemerintah lini depan | Dinas PMD, Bag. Pemerintahan Setda, Bag. Pemberdayaan masyarakat dan Trantibum Linmas Setda, Kecamatan, Lurah, Desa, |
| 5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup | Penataan Kawasan Perkotaan dan Fasilitas Publik | Penataan Ruang Terbuka Hijau | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas PKP, Dinas Kesehatan, Bappeda, Satpol PP dan Damkar, Bag. Infrastruktur Setda, Kecamatan, Kelurahan, Desa |
| | | Peningkatan kualitas lingkungan | |
| | | Penyediaan Prasana Sarana Utilitas yang berkualitas | |
| | | Penyediaan lampu jalan umum (Kolaka Terang) | |
| | Perlindungan SDA dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan | Pengawasan dan pemantauan pengelolaan Sumber daya alam | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas PKP, Bappeda, Satpol PP dan |

| MISI | 9 Prioritas Pembangunan SMS Berjaya | Penjabaran Prioritas Pembangunan | SKPD/ Instansi/ Lembaga Pelaksana |
|---|---|---|---|
| | | Pembangunan daerah yang tertib tata ruang dan berbasis lingkungan hidup | Damkar, BPBD, Bag. Ekonomi dan SDA Setda, Bag. Hukum Setda, Kecamatan, Kelurahan, Desa, Balai SDA Sultra |
| | | Penyediaan sarana prasarana persampahan dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan | |

Penjabaran Program Prioritas yang diuraikan tersebut di atas, selanjutnya akan dilaksanakan kedalam Program pembangunan pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai kewenangannya dengan saling berintegrasi serta berkolaborasi dalam rangka mewujudkan visi, dan misi pembangunan daerah serta pencapaian sasaran RPJMD.

## B. Program Pembangunan

Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya, sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran RPJMD.

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi pembangunan Kabupaten Kolaka tahun 2019-2024 berjumlah 146 Program, yang disertai dengan pendanaan bersifat indikatif yang dapat disajikan pada tabel berikut ini :

**TABEL 6.9**

**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2019-2024**

| Kode | Tujuan/Sasaran | Program | Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | | | | | | Kondisi Akhir | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | |
| | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| | **MISI 1: MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tujuan 1: Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan permukiman | Indeks Daya Saing Infrastruktur | indeks | n/a | 65 | | 68 | 0,00 | 71 | 0,00 | 75 | 0,00 | 78 | 0,00 | 78 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Sasaran 1: Meningkatnya dukungan infrastruktur untuk penguatan konektivitas dan peningkatan daya saing daerah | | Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap | % | 55,65 | 62 | 0 | 65 | 0,00 | 68 | 0,00 | 71 | 0,00 | 75 | 0,00 | 75 | 0,00 | PUPR |
| | | | Persentase ketersediaan air irigasi pada setiap musim tanam | % | 65 | 67 | 0 | 70 | 0,00 | 75 | 0,00 | 80 | 0,00 | 85 | 0,00 | 85 | 0,00 | PUPR, DISTANHORTI |
| | | Program Pembangunan Kebinamargaan | Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap | % | 55,65 | 62 | 113.140.000 | 65 | 117.012.000 | 68 | 122.862.000 | 71 | 129.005.730 | 75 | 135.456.016 | 75 | 135.456.016 | PUPR |
| | | Program Pengembangan keciptakaryaan | Presentase saluran drainase/ gorong-gorong yang berfungsi dengan baik | % | 60 | 65 | 14.312.697 | 72 | 15.000.000 | 79 | 15.400.000 | 86 | 15.700.000 | 95 | 15.900.000 | 95 | 15.900.000 | PUPR |
| | | | Persentase Pengembangan Pengelolaan air minum bagi masyarakat | % | 60 | 65 | | 72 | | 79 | | 86 | | 95 | | 95 | | PUPR |
| | | | Cakupan sanitasi layak | % | 86,1 | 90 | | 93 | | 96 | | 98 | | 100 | | 100 | | PUPR |
| | | Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air | Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik | % | 69,9 | 74 | 6.862.740 | 79 | 7.205.877 | 84 | 7.566.171 | 89 | 7.944.479 | 94 | 8.341.703 | 94 | 8.341.703 | PUPR |
| | | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | Persentase layanan angkutan darat | % | 26 | 30 | 593.364 | 35 | 623.032 | 45 | 654.184 | 50 | 686.893 | 60 | 721.238 | 60 | 721.237,65 | DISHUB |
| | | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik | % | 58 | 60 | 1.805.724 | 65 | 1.896.010 | 70 | 1.990.811 | 75 | 2.090.351 | 80 | 2.194.869 | 80 | 2.194.869 | DISHUB |
| | | Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas | Persentase Pemasangan Rambu-rambu | % | n/a | 40 | 1.166.664 | 45 | 1.224.997 | 50 | 1.286.247 | 55 | 1.350.559 | 60 | 1.418.087 | 60 | 1.418.087 | DISHUB |
| | | Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum | % | n/a | 70 | 255.816 | 73 | 268.607 | 76 | 282.037 | 79 | 296.139 | 82 | 310.946 | 82 | 310.946 | DISHUB |
| | | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Persentase masyarakat yang terpapar informasi publik | % | n/a | 55 | 913.208 | 60 | 1.273.868 | 65 | 1.337.562 | 70 | 1.404.440 | 75 | 1.474.662 | 75 | 1.474.661,91 | KOMINFO |

| Kode | Tujuan/Sasaran | Program | Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | | | | | | Kondisi Akhir | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | |
| | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| | Sasaran 2: Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar perumahan dan pemukiman | | Persentase Rumah Tangga berakses air bersih | % | 79,47 | 80 | 0 | 82 | 0 | 85 | 0 | 90 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | PUPR, DINAS PKP, DINAS KESEHATAN, DINAS PMD, KECAMATAN, KELURAHAN |
| | | | Persentase Rumah Tangga bersanitasi | % | 80,64 | 82 | 0 | 85 | 0 | 88 | 0 | 92 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | PUPR, DINAS PKP, DINAS KESEHATAN, DINAS PMD, KECAMATAN, KELURAHAN |
| | | | Persentase Ruas Jalan dengan PJU yang berfungsi baik | % | 16,67 | 20 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | DINAS PKP, KECAMATAN, KELURAHAN |
| | | | Luas Kawasan Kumuh Perkotaan | Ha | 34,72 | 30 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PKP, DINAS PUPR, DINAS KESEHATAN, DINAS SOSIAL, DINAS LH, KECAMATAN, KELURAHAN |
| | | Program Pengembangan Perumahan | Persentase Rumah Layak Huni | % | 40 | 50 | 4.091.844 | 60 | 4.296.436 | 70 | 4.511.258 | 80 | 4.736.821 | 90 | 4.973.662 | 90 | 4.973.661,96 | DINAS PKP |
| | | Program Lingkungan Sehat Perumahan | Luas Kawasan Kumuh Perkotaan | Ha | 34,72 | 30 | 1.411.768 | 25 | 1.482.356 | 20 | 1.556.474 | 15 | 1.634.298 | 10 | 1.716.013 | 10 | 1.716.013 | DINAS PKP |
| | | Program Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman | Persentase Ruas Jalan yang tersedia sarana PJU dengan baik | % | 16,67 | 20 | 2.137.256 | 25 | 2.244.119 | 30 | 2.356.325 | 35 | 2.474.141 | 40 | 2.597.848 | 40 | 2.597.848 | DINAS PKP |
| | **MISI 2: MENINGKATKAN KINERJA EKONOMI MELALUI** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tujuan 2: Meningkatkan kapasitas ekonomi rakyat untuk menurunkan angka kemiskinan | | Angka Kemiskinan | % | 12,51 | 11,72 | 0 | 11,25 | 0 | 10,65 | 0 | 10,02 | 0 | 9,81 | 0 | 9,81 | 0 | 0 |

| Kode | Tujuan/Sasaran | Program | Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | | | | | | Kondisi Akhir | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | |
| | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| | Sasaran 3: Meningkatnya kemampuan usaha dan kesempatan kerja | | Pengeluaran per kapita yang disesuaikan | Rp (ribuan)/ bulan | 12.243 | 12.543 | 0 | 12.843 | 0 | 13.143 | 0 | 13.443 | 0 | 13.743 | 0 | 13.743 | 0 | DISTANHORTI, DISBUNAK, DINAS PERIKANAN, DINAS KOPERASI UKM, DINAS PERINDAG, DINAS NAKERTRANS, DINAS PARIWISATA, DINAS SOSIAL, DINAS PMD |
| | | | Tingkat pengangguran terbuka | % | 2,18 | 2,10 | 0 | 2,05 | 0 | 2,00 | 0 | 2,00 | 0 | 2,00 | 0 | 2,00 | 0 | DINAS NAKERTRANS, DISTANHORTI, DISBUNAK, DINAS PERIKANAN, DINAS KOPERASI UKM, DINAS PERINDAG, DINAS PARIWISATA, DINAS SOSIAL, DINAS PMD, DINAS DIKBUD |
| | | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. | Prosentase meningkatnya kualitas tenaga kerja yang dipromosikan | % | 16 | 16 | 554.908 | 18 | 582.653 | 20 | 611.786 | 22 | 642.375 | 23 | 674.494 | 23 | 674.494 | Dinas Nakertrans |
| | | Program Pembinaan, Penempatan dan perluasan Kesempatan Kerja. | Prosentase tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan. | % | 26,71 | 21,48 | 729.408 | 22,42 | 765.878 | 23,25 | 804.172 | 25 | 844.381 | 26 | 886.599 | 26 | 886.599 | Dinas Nakertrans |
| | | Program Hubungan Industrial dan Syarat Kerja | Persentase penyelesaian sengketa ketenagakerjaan | % | 45 | 50 | 308.832 | 55 | 324.274 | 60 | 340.487 | 65 | 357.512 | 70 | 375.387 | 70 | 375.387 | Dinas Nakertrans |
| | | Program Peningkatan kapasitas UPTD BLKK. | Persentase lulusan BLKK yang terserap di lapangan pekerjaan | % | 36,6 | 41,6 | 2.607.840 | 46,6 | 2.740.731 | 51,6 | 2.869.519 | 56,6 | 3.014.495 | 61,6 | 3.165.969 | 61,6 | 3.165.969 | UPTD BLK |
| | | Program Pembangunan dan Pembinaan Transmigrasi | Persentase Usaha Ekonomi Masyarakat Transmigrasi yang dibina | % | 50 | 50 | 411.768 | 50 | 429.857 | 60 | 459.599 | 60 | 481.079 | 70 | 504.384 | 70 | 504.384 | Dinas Nakertrans |
| | | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | Ton | 20.178,03 | 20.200 | 3.642.447 | 20.400 | 3.824.569 | 20.600 | 4.015.798 | 20.700 | 4.216.588 | 20.800 | 4.427.417 | 20.800 | 4.427.417 | DIN PERIKANAN |
| | | Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan | Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan yang Mandiri | % | 5 | 6 | 1.524.500 | 7 | 1.600.725 | 8 | 1.680.761 | 9 | 1.764.799 | 11 | 1.853.039 | 11 | 1.853.039,28 | DIN PERIKANAN |
| | | Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Pertanian | Jumlah Kelompok Tani Madya | klp | 16 | 75 | 5.789.563 | 150 | 8.447.669 | 225 | 9.335.243 | 300 | 9.716.327 | 379 | 1.458.469 | 379 | 1.458.469 | DIN TP HORTI |
| | | Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah | Persentase berkembangnya UKM yang terbina | % | n/a | 35 | 863.732 | 40 | 906.919 | 45 | 952.265 | 50 | 999.878 | 55 | 1.049.872 | 250 | 1.049.871,64 | DIN KOP-UKM |

| Kode | Tujuan/Sasaran | Program | Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | | | | | | Kondisi Akhir | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | |
| | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| | | Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi | Persentase Koperasi dan UKM yang Aktif | % | 89,91 | 92,02 | 311.768 | 94,13 | 327.356 | 96,24 | 343.724 | 98,12 | 360.910 | 100 | 378.956 | 100 | 378.956 | DIN KOP-UKM |
| | | Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi | Persentase Koperasi yang mandiri | % | n/a | 30 | 700.000 | 33 | 735.000 | 35 | 771.750 | 38 | 810.338 | 42 | 850.854 | 5 | 850.854 | DIN KOP-UKM |
| | | Program Pengembangan IKM | Persentase IKM yang mandiri | % | 48,35 | 50,14 | 1.328.500 | 51,93 | 1.394.925 | 53,72 | 1.464.671 | 55,51 | 1.537.905 | 57,3 | 1.614.800 | 57,3 | 1.614.800 | DIN PERINDAG |
| | | Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi | persentase IKM yang menggunakan teknologi industri | % | 23 | 38 | 300.000 | 53 | 315.000 | 69 | 330.750 | 84 | 347.288 | 100 | 364.652 | 100 | 364.652 | DIN PERINDAG |
| | Sasaran 4: Tercapainya ketahanan pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah | | Skor Pola Pangan Harapan | Skor | 87 | 89,6 | 0 | 92,2 | 0 | 94,8 | 0 | 97,4 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | DINAS KETAHANAN PANGAN, DISTANHORTI, DISBUNAK, DINAS KESEHATAN |
| | | Program Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan pangan | Ketersediaan Energi dan Protein per kapita | kkal/kap/hari | 3.636 | 2.400 | 498.000 | 2.400 | 482.800 | 2.400 | 506.940 | 2.400 | 532.287 | 2.400 | 558.901 | 2.400 | 558.901,00 | DISKETAPANG |
| | | | | gram/kap/hari | 60 | 63 | | 63 | | 63 | | 63 | | 63 | | 63 | | DISKETAPANG |
| | | Program Pengelolaan Distribusi dan Cadangan Pangan | Jumlah cadangan pangan pemerintah | ton | 45.611 | 46.000 | 670.000 | 47.000 | 709.324 | 48.000 | 744.790 | 49.000 | 782.030 | 50.000 | 821.131 | 90 | 821.131 | DISKETAPANG |
| | | Program Pengembangan Diversifikasi, Konsumsi dan Keamanan Pangan | Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan | % | 80 | 86 | 947.832 | 87 | 1.029.500 | 88 | 1.080.975 | 89 | 1.135.024 | 90 | 1.191.775 | 90 | 1.191.775 | DISKETAPANG |
| | Tujuan 3: Meningkatkan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor unggulan daerah | | Nilai PDRB AHK | Rp. (Milyar) | 16.802 | 17.643 | 0 | 18.701 | 0 | 19.823 | 0 | 21.211 | 0 | 22.696 | 0 | 22.696 | 0 | 0 |
| | Sasaran 5: Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan | | Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) | % | 6,68 | 7,3 | 0 | 7,4 | 0 | 7,5 | 0 | 7,6 | 0 | 7,7 | 0 | 7,7 | 0 | DISTANHORTI, DISBUNAK, DINAS PERIKANAN, DINAS KOPERASI UKM, DINAS PERINDAG, DINAS NAKERTRANS, DINAS PARIWISATA, DINAS SOSIAL, DINAS PMD |
| | | | Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan sektor pedagangan | % | 18,71 | 19,32 | 0 | 19,44 | 0 | 19,53 | 0 | 19,98 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | DINAS PERINDAG, DISTANHORTI, DISBUNAK |
| | | Program pengembangan pemasaran pariwisata | Presentase promosi wisata | % | 90 | 92 | 1.546.472 | 94 | 1.613.796 | 96 | 1.684.485 | 98 | 1.758.710 | 100 | 1.836.645 | 100 | 1.836.645 | DIN PARIWISATA |
| | | Program pengembangan destinasi pariwisata | Jumlah kunjungan wisata | orang | 20.000 | 25.000 | 7.898.028 | 30000 | 8.292.929 | 35000 | 8.707.576 | 40000 | 9.142.955 | 45000 | 9.600.102 | 45000 | 9.600.102 | DIN PARIWISATA |

| Kode | Tujuan/Sasaran | Program | Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | | | | | | Kondisi Akhir | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | |
| | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| | | Program Pengembangan Kelembagaan dan SDM Kepariwisataan | SDM kepariwisataan yang terakreditasi | Orang | 40 | 90 | 541.176 | 140 | 568.235 | 190 | 596.647 | 240 | 626.479 | 290 | 657.803 | 290 | 657.803 | DIN PARIWISATA |
| | | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif | Terbentuknya kelompok ekraf yang mendukung pariwisata | klp | 4 | 5 | 734.316 | 6 | 771.032 | 7 | 809.583 | 8 | 850.063 | 9 | 892.566 | 13 | 892.566 | DIN PARIWISATA |
| | | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | Persentase Alat Ukur Perdagangan bertanda tera sah yang berlaku | % | 67,57 | 70,27 | 1.000.000 | 72,92 | 1.050.000 | 75,38 | 1.102.500 | 78,38 | 1.157.625 | 81,08 | 1.215.506 | 81,08 | 1.215.506 | DIN PERINDAG |
| | | Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan | Persentase pasar daerah dalam kondisi baik | % | 51,85 | 55,56 | 4.850.888 | 59,25 | 5.093.432 | 62,96 | 55.348.104 | 66,66 | 83.115.509 | 70,37 | 107.271.284 | 70,37 | 107.271.284 | DIN PERINDAG |
| | | Program Pengembangan Usaha, Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan | ton | 19 | 30 | 1.413.965 | 35 | 1.484.663 | 40 | 1.558.896 | 45 | 1.636.841 | 50 | 1.718.683 | 50 | 1.718.683 | DIN PERIKANAN |
| | | Program Pengembangan kawasan dan Perbenihan Perikanan | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | Ton | 50.000 | 50.200 | 2.124.100 | 50.400 | 2.230.305 | 50.600 | 2.341.820 | 50.800 | 2.458.911 | 51.000 | 2.581.857 | 51.000 | 2.581.857 | DIN PERIKANAN |

| Kode | Tujuan/Sasaran | Program | Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | | | | | | Kondisi Akhir | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | |
| | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| | | Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan | Jumlah produksi padi | ton | 88.800 | 96.200 | 1.077.780 | 103.600 | 1.121.669 | 111.000 | 1.177.752 | 113.960 | 1.236.640 | 118.400 | 1.298.472 | 118.400 | 1.298.472,08 | DIN TP HORTI |
| | | | Jumlah produksi tanaman pangan lainnya | ton | 11.436 | 12.008 | | 12.608 | | 13.239 | | 13.901 | | 14.596 | | 14.596 | 0 | DIN TP HORTI |
| | | Program Peningkatan Produksi Hortikultura | Jumlah Produksi Buah-buahan | kwintal | 364 | 400 | 1.395.500 | 440 | 1.465.275 | 484 | 1.538.539 | 533 | 1.615.466 | 586 | 1.696.239 | 586 | 1.696.239 | DIN TP HORTI |
| | | | Jumlah Produksi Sayur-sayuran | kwintal | 245 | 270 | | 296 | | 326 | | 359 | | 395 | | 395 | | DIN TP HORTI |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian | Panjang jaringan irigasi tersier yang berfungsi baik | meter | 35.902 | 37.902 | 3.789.913 | 38.502 | 3.979.408 | 38.702 | 4.178.379 | 38.902 | 4.387.298 | 39.002 | 4.606.662 | 39.002 | 4.606.662 | DIN TP HORTI |
| | | Program Peningkatan Produksi Perkebunan | Jumlah Produksi Kakao | ton | 9.152,03 | 9.609 | 2.090.840 | 10.090 | 2.195.382 | 10.595 | 2.305.151 | 11124 | 2.420.409 | 11681 | 2.541.429 | 11681 | 2.541.429 | DIN BUN |
| | | | Jumlah Produksi Cengkeh | ton | 6.327,01 | 6.643,36 | | 6.975,53 | | 7.324,31 | | 7.690,52 | | 8.075,05 | | 8.075,05 | | DIN BUN |
| | | | Jumlah Produksi Kelapa dalam | ton | 3.634,56 | 3.816,29 | | 4.007,10 | | 4207 | | 4418 | | 4639 | | 4639 | | DIN BUN |
| | | | Jumlah Produksi Lada | ton | 1.253,32 | 1.315,99 | | 1.381,79 | | 1.450,87 | | 1.523,42 | | 1.599,59 | | 1.599,59 | | DIN BUNAK |
| | | | Jumlah Produksi Pala | ton | 2 | 22 | | 60 | | 100 | | 180 | | 250 | | 250 | | 0 |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan | Persentase peningkatan sarana prasarana perkebunan | % | 70 | 75 | 3.904.868 | 80 | 4.100.111 | 85 | 4.305.117 | 90 | 4.502.373 | 95 | 4.746.391 | 95 | 4.746.391 | DIN BUNAK |
| | | Program Peningkatan Produksi Peternakan | Produksi daging ternak besar | Kg | 547.587 | 550.087 | 2.529.868 | 550.587 | 2.656.361 | 553.587 | 2.789.179 | 554.587 | 2.928.638 | 558.087 | 3.075.070 | 558.087 | 3.075.070 | DIN BUNAK |
| | | | Produksi daging ternak kecil | Kg | 277.869 | 279.119 | 0 | 279.369 | 0 | 281.119 | 0 | 282.369 | 0 | 285.619 | 0 | 280.007 | 0 | DIN BUNAK |
| | | | Produksi ternak unggas | Kg | 1.799.093 | 2.349.093 | 0 | 2.449.093 | 0 | 3.099.093 | 0 | 3.299.093 | 0 | 4.049.093 | 0 | 4.049.093 | 0 | DIN BUNAK |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sasaran 6: Meningkatnya daya saing dan investasi daerah | | Nilai investasi | Rp (milyar) | 58,23 | 65 | 0 | 70 | 0 | 75 | 0 | 80 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | DINAS PMPTSP, DINAS PERINDAG |
| | | Program Peningkatan Promosi dan informasi Penanaman Modal | Persentase peningkatan kunjungan investor | % | 3 | 3 | 719.164 | 3 | 755.122 | 3 | 792.878 | 3 | 832.522 | 3 | 874.148 | 3 | 874.148 | DIN PTSP |
| | | Program Peningkatan Iklim Investasi dan pengendalian penanaman modal | Jumlah Investor PMA dan PMDN | Investor | 5 | 6 | 247.256 | 7 | 259.619 | 8 | 272.600 | 9 | 286.230 | 10 | 300.541 | 10 | 300.541,21 | DIN PTSP |
| | | Program Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan terpadu | Predikat kepatuhan pelayanan publik (ombudsman) | predikat | rendah | sedang | 628.304 | sedang | 659.719 | tinggi | 692.705 | tinggi | 727.340 | tinggi | 763.707 | 5000 | 763.707 | DIN PTSP |
| | | Program Pelayanan pengaduan dan pelaporan penanaman modal dan perijinan | Indeks kepuasan masyarakat trhadap pelayanan perizinan | % | 80 | 84 | 392.296 | 88 | 411.911 | 92 | 432.506 | 96 | 454.132 | 100 | 476.838 | 100 | 476.838 | DIN PTSP |
| | | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dan Peternakan | Persentase pengolahan hasil perkebunan dan peternakan | % | 50 | 55 | 2.394.976 | 60 | 2.514.725 | 65 | 2.640.461 | 70 | 2.672.484 | 80 | 2.806.108 | 80 | 2.806.108 | DIN BUN |
| | | Program Pengembangan Sarana Prasarana Peternakan | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana peternakan | % | 80 | 85 | 4.837.368 | 88 | 5.079.236 | 90 | 5.333.198 | 95 | 5.599.858 | 100 | 5.879.851 | 100 | 6.417.713 | DIN BUN |

| Kode | Tujuan/Sasaran | Program | Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | | | | | | Kondisi Akhir | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | |
| | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| | | Program Pengembangan SDM Perkebunan dan Peternakan | Persentase peningkatan SDM Petani dan peternak | % | 40 | 45 | 492.048 | 50 | 411.650 | 55 | 432.348 | 60 | 553.965 | 70 | 476.664 | 70 | 476.664 | DIN BUN |
| | **MISI 3: MENINGKATKAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tujuan 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia | | Nilai IPM | indeks | 71,46 | 72,5 | 0 | 73 | 0 | 73,5 | 0 | 74 | 0 | 74,5 | 0 | 74,5 | 0 | 0 |
| | Sasaran 7: Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan | | Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,98 | 13 | 0 | 13,25 | 0 | 13,75 | 0 | 13,97 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | DIKBUD, DINSOS |
| | | | Angka Rata-rata lama sekolah | Tahun | 8,31 | 8,33 | | 8,36 | | 8,75 | | 8,9 | | 9 | | 9 | | DIKBUD, DINSOS |
| | | | Angka Harapan Hidup | Tahun | 70,06 | 70,3 | | 70,7 | | 71 | | 71,2 | | 71,5 | | 71,5 | | DINKES, DINAS KETAHANAN PANGAN, DINAS PP-KB |
| | | | Prevalensi Stunting Balita | % | 26,9 | 26,5 | | 26,1 | | 25,7 | | 25,3 | | 24,9 | | 24,9 | | DINKES, DINAS PMD, DINAS PUPR, DINAS PKP, DINAS PP-KB, DINSOS, DINAS KETAHANAN PANGAN, DISTANHORTI, DISBUNAK, DINAS PP-PA, BAPPEDA, KECAMATAN, KELURAHAN |
| | | Program Pendidikan Anak Usia Dini | APK PAUD | % | 57,1 | 59,2 | 4.777.380 | 61,5 | 5.016.249 | 63 | 5.267.061 | 64,75 | 5.530.415 | 66,21 | 5.806.935 | 66,21 | 5.806.935 | DIN DIKBUD |
| | | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | Persentase APM Jenjang SD | % | 88,6 | 88,75 | 69.673.281 | 88,8 | 72.306.945 | 88,85 | 75.122.292 | 88,9 | 78.128.406 | 88,95 | 81.334.827 | 88,95 | 81.334.827 | DIN DIKBUD |
| | | | Persentase APM Jenjang SMP | % | 78,6 | 78,7 | | 78,76 | | 78,8 | | 78,85 | | 78,9 | | 78,9 | | DIN DIKBUD |
| | | Program Pendidikan Non Formal | Angka kelulusan pendidikan kesetaraan Paket A | % | 100 | 100 | 742.008 | 100 | 779.108 | 100 | 818.064 | 100 | 858.967 | 100 | 901.915 | 100 | 901.915 | DIN DIKBUD |
| | | | Angka kelulusan pendidikan kesetaraan Paket B | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | DIN DIKBUD |
| | | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | % Pendidik TK yang memenuhi kualifikasi S1 | % | 64,5 | 66,2 | 2.086.272 | 68,5 | 2.190.586 | 71,5 | 2.300.115 | 73,1 | 2.415.121 | 75 | 2.535.877 | 75 | 2.535.877 | DIN DIKBUD |
| | | | % Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1 | % | 80,99 | 86,9 | | 88,4 | | 90,7 | | 92,9 | | 94,5 | | 94,5 | | DIN DIKBUD |
| | | | % Pendidik SMP yang memenuhi kualifikasi S1 | % | 90,80 | 96,4 | | 97,1 | | 97,5 | | 98,1 | | 98,5 | | 98,5 | | DIN DIKBUD |
| | | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | % sekolah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) | % | 70 | 75 | 1.063.584 | 80 | 1.116.763 | 85 | 1.172.601 | 90 | 1.231.231 | 95 | 1.292.793 | 95 | 1.292.793 | DIN DIKBUD |

| Kode | Tujuan/Sasaran | Program | Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | | | | | | Kondisi Akhir | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | |
| | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| | | Program Penguatan Kualitas SDM Unggul Kolaka | Persentase penerima beasiswa dari target Kolaka Maju dan Berdaya Saing | % | n/a | 20 | 3.000.000 | 40 | 4.000.000 | 60 | 5.000.000 | 80 | 6.000.000 | 100 | 7.000.000 | 100 | 7.000.000 | DIN DIKBUD |
| | | Program Kesehatan Masyarakat | Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | % | 81,5 | 84,2 | 23.910.222 | 86,9 | 25.434.778 | 89,6 | 27.202.501 | 92,6 | 29.070.346 | 95 | 30.687.800 | 95 | 30.687.800 | DIN KESEHATAN |
| | | | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | % | 86,3 | 87,44 | | 87,44 | | 89,72 | | 90,86 | | 92 | | 92 | | |
| | | | Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KN1) | % | 94,9 | 95,52 | | 96,14 | | 96,72 | | 97,38 | | 98 | | 98 | | |
| | | | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | % | 41,5 | 45,2 | | 48,9 | | 52,6 | | 56,3 | | 60 | | 60 | | |
| | | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 79,92 | 87,95 | | 91,97 | | 95,98 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | Program Pencegahan & Pengendalian Penyakit | persentase orang usia 15 s/d 59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | % | 12,94 | 22,35 | 2.416.400 | 31,76 | 2.471.379 | 41,18 | 2.991.056 | 50,59 | 3.911.711 | 60 | 3.996.337 | 60 | 3.996.337 | DIN KESEHATAN |
| | | 0 | Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesui standar kesehatan | % | 16,41 | 41,84 | | 54,56 | | 67,28 | | 80 | | 80 | | 80 | | |
| | | 0 | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 12,5 | 22 | | 31,5 | | 41 | | 50,5 | | 60 | | 60 | | |
| | | 0 | Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 7,8 | 14,04 | | 20,28 | | 26,52 | | 32,76 | | 39 | | 39 | | |
| | | 0 | Persentase orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | 0 | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |

| Kode | Tujuan/Sasaran | Program | Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | | | | | | Kondisi Akhir | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | |
| | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| | | 0 | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | % | 31 | 44,8 | | 58,6 | | 72,4 | | 86,2 | | 100 | | 100 | | |
| | | Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan | Persentase ketersedian obat esensial dan obat kebutuhan lainnya | % | 94,55 | 95,35 | 62.107.058 | 96,15 | 65.212.411 | 96,95 | 68.473.031 | 97,75 | 71.896.683 | 97,75 | 75.491.517 | 97,75 | 75.491.517 | DIN KESEHATAN |
| | | | Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi | % | 64 | 95 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | DIN KESEHATAN |
| | | | Persentase tenaga kesehatan yang berkompeten dengan surat tanda registrasi (STR) | % | 84,61 | 86,08 | | 87,57 | | 89,04 | | 90,5 | | 92 | | 92 | | DIN KESEHATAN |
| | | Program Sistem Informasi Kesehatan | Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi | % | 62,2 | 95 | 486.744 | 95 | 511.081 | 95 | 536.635 | 95 | 563.467 | 95 | 591.640 | 95 | 591.640 | DIN KESEHATAN |
| | | Program Pelayanan Kesehatan Sekunder | Cakupan Pemanfaatan Tempat Tidur (BOR) | % | 68,18 | 70,28 | 100.000.000 | 72,32 | 140.000.000 | 74,36 | 140.000.000 | 76,40 | 150.000.000 | 78,44 | 150.000.000 | 78,44 | 150.000.000 | RSBG |
| | | | Cakupan Rata-rata Lama Perawatan (LOS) | Hari | 4,04 | 4,64 | | 5,44 | | 6,24 | | 7,04 | | 7,78 | | 7,78 | | |
| | | | Cakupan Selang Waktu Penggunaan Tempat Tidur (TOI) | Hari | 2,16 | 2,21 | | 2,24 | | 2,33 | | 2,37 | | 2,37 | | 2,37 | | |
| | | Program Pembinaan pelayanan Kepemudaan | Persentase aktifitas organisasi kepemudaan yang aktif | % | 40 | 45 | 1.038.316 | 47 | 1.090.232 | 50 | 1.144.743 | 53 | 1.201.981 | 55 | 1.262.080 | 55 | 1.262.080 | DIK MUDORA |
| | | Program Pembudayaan dan Pemasyarakatan Olah Raga | Persentase angka partisipasi masyarakat yang berolahraga | % | 70 | 75 | 612.112 | 80 | 642.718 | 85 | 674.853 | 90 | 708.596 | 95 | 744.026 | 95 | 744.025,96 | DIK MUDORA |
| | | Program Peningkatan Prestasi olahraga | Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat daerah, provinsi dan nasional | Org/Atlit (Daerah,Prov., Nas) | 20,10,3 | 10,5,1 | 852.944 | 15,6,1 | 895.591 | 16,6,2 | 940.371 | 17,7,3 | 987.389 | 17,7,3 | 1.036.759 | 17,7,3 | 1.036.759 | DIK MUDORA |
| | | Program Pelayanan Perpustakaan | Persentase peningkatan Pengunjung Perpustakaan | % | 45 | 50 | 1.763.716 | 52 | 1.826.902 | 55 | 1.893.247 | 60 | 1.962.909 | 65 | 2.036.055 | 65 | 2.036.055 | DIN PERPUS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Tujuan/Sasaran | Program | Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | | | | | | Kondisi Akhir | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | |
| | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| | Sasaran 8: Meningkatnya pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk serta KB | | Total Fertility Rate (TFR) | Rasio | 2,69 | 2,65 | 0 | 2,63 | 0 | 2,58 | 0 | 2,52 | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 | 0 | DINAS PP-KB |
| | | | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | indeks | 72,10 | 72,20 | 0 | 72,30 | 0 | 72,42 | 0 | 72,50 | 0 | 72,60 | 0 | 72,60 | 0 | DINAS PP-PA |
| | | | Predikat Kabupaten Layak Anak | Predikat | n/a | Pratama | 0 | Pratama | 0 | Madya | 0 | Madya | 0 | Nindya | 0 | Nindya | 0 | DINAS PP-PA, DINKES, DIKBUD, DINAS PP-KB, DINSOS, DINAS PUPR, DISHUB, DISKOMINFO, KECAMATAN, KELURAHAN |
| | | Program Keluarga Berencana | Persentase Pemakaian alat kontrasepsi modern (mCPR) | % | 73,77 | 74,41 | 5.549.020 | 74,74 | 5.826.471 | 75,06 | 6.117.795 | 75,38 | 6.423.684 | 75,38 | 6.744.868 | 75,38 | 6.744.868,49 | Dinas P2KB |
| | | | Rasio Petugas Lapangan Kleuarga Berencana (PLKB/PKB) 1 (satu) petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan. | Orang/desa | 1/5 | 1/4 | | 1/4 | | 1/3 | | 1/3 | | 1/2 | | 1/2 | | Dinas P2KB |
| | | Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Cakupan keluarga pra sejahtera dan KS1 menjadi anggota kelompok UPPKS | % | 41,18 | 60,7 | 584.116 | 70,47 | 613.322 | 80,23 | 643.988 | 90 | 676.187 | 90 | 709.997 | 90 | 709.997 | Dinas P2KB |
| | | Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan | Persentase Penurunan Laju pertumbuhan penduduk. | % | 2,22 | 2,02 | 1.003.920 | 1,82 | 1.054.116 | 1,61 | 1.106.822 | 1,41 | 1.162.163 | 1,21 | 1.220.271 | 1,21 | 1.220.271 | Dinas P2KB |
| | | | Angka Kelahiran pada remaja per WUS 15-19 tahun (ASFR) per 1000 KLH | KLH | 38 | 38 | | 38 | | 38 | | 38 | | 38 | | 38 | | Dinas P2KB |
| | | Program Pemenuhan Hak Anak | Prosentase sarana ruang publik ramah anak (%) | % | 38,78 | 45 | 672.548 | 50 | 706.175 | 55 | 741.484 | 60 | 778.558 | 65 | 817.486 | 65 | 817.486,30 | Dinas P3A |
| | | Program Peningkatan Kualiatas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga | Persentase kualitas hidup perempuan dan keluarga yang ditingkatkan. | % | 5,9 | 10,07 | 1.058.828 | 13,5 | 1.111.769 | 16,7 | 1.167.358 | 17,7 | 1.225.726 | 19,3 | 1.287.012 | 19,3 | 1.287.012 | Dinas P3A |
| | | Program Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Anak | Persentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | % | 100 | 100 | 529.408 | 100 | 555.878 | 100 | 583.672 | 100 | 612.856 | 100 | 643.499 | 100 | 643.499 | Dinas P3A |
| | Tujuan 5: meningkatkan kualitas sendi-sendi sosial, budaya, agama dan paham kebangsaan | | Indeks Kebebasan SIpil | indeks | n/a | 80 | 0 | 85 | 0 | 88 | 0 | 90 | 0 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 |
| | Sasaran 9: Lestarinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal | | Persentase sanggar seni dan budaya yang dibina | % | 18,1 | 20 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | DINAS DIKBUD, DINAS PARIWISATA |

| Kode | Tujuan/Sasaran | Program | Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | | | | | | Kondisi Akhir | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | |
| | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| | | Program Pengembangan Nilai Budaya | Persentase sanggar seni dan budaya yang dibina | % | 18,1 | 20 | 343.140 | 25 | 360.297 | 30 | 378.312 | 40 | 397.227 | 50 | 417.089 | 50 | 417.089 | Dikbud |
| | | Program Pengelolaan Kekayaan & Keragaman Budaya | Persentase cagar budaya dan benda budaya daerah yang dilestarikan | % | 45 | 50 | 2.490.192 | 52 | 2.614.702 | 55 | 2.745.437 | 60 | 2.882.709 | 65 | 3.026.844 | 65 | 3.026.843,94 | Dikbud |
| | Sasaran 10: Menurunnya jumlah PMKS di daerah | | Persentase PMKS yang tertangani | % | 46,44 | 50 | 0 | 55 | 0 | 60 | 0 | 65 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | DINAS SOSIAL |
| | | Program Penanganan Fakir Miskin | Persentase Fakir Miskin yang tertangani | % | 46,44 | 50 | 3.233.500 | 55 | 3.395.175 | 60 | 3.564.934 | 67 | 3.743.180 | 75 | 3.930.339 | 75 | 3.930.339 | Dinas Sosial |
| | | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persentase warga yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial | % | 77,68 | 80 | 2.426.464 | 81 | 1.884.337 | 83 | 1.797.654 | 85 | 1.857.537 | 87 | 1.806.612 | 87 | 1.806.612 | Dinas Sosial |
| | | Program Pemberdayaan Sosial | Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial | % | 66,51 | 70 | 1.305.000 | 73 | 1.370.250 | 75 | 1.438.762 | 83 | 1.510.700 | 85 | 1.586.236 | 85 | 1.586.236 | Dinas Sosial |
| | | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia dan anak terlantar di luar panti yang ditangani | % | 20,13 | 25 | 1.461.500 | 30 | 1.534.575 | 35 | 1.611.303 | 40 | 1.691.869 | 45 | 1.776.462 | 45 | 1.776.462 | Dinas Sosial |
| | Sasaran 11: Terciptanya kerukunan antar dan inter umat beragama di daerah | | Indeks kerukunan umat beragama | indeks | 75 | 80 | 0 | 80 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | DINAS SOSIAL, BADAN KESBANGPOL-LINMAS |
| | | Program Kesejahteraan Rakyat dan keagamaan | Persentase ketersediaan laporan Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan | % | 100 | 100 | 7.144.908 | 100 | 7.502.153 | 100 | 7.877.261 | 100 | 8.271.124 | 100 | 8.684.680 | 100 | 8.684.680 | SETDA-KESRA |
| | **MISI 4: MENERAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, EFISIEN, BERSIH DAN BERMARTABAT** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tujuan 6: Meningkatan sistem tata kelola pemerintahan | | Indeks Reformasi Birokrasi | indeks | n/a | B | 0 | B | 0 | B | 0 | BB | 0 | BB | 0 | BB | 0 | 0 |
| | Sasaran 12: Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan | | Nilai AKIP kabupaten | Nilai | CC | B | 0 | BB | 0 | BB | 0 | A | 0 | A | 0 | A | 0 | SEMUA OPD |
| | | | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan daerah | indeks | WTP | WTP | 0 | WTP | 0 | WTP | 0 | WTP | 0 | WTP | 0 | WTP | 0 | SEMUA OPD |
| | | | Indeks Desa Membangun | indeks | N/A | 0,5 | 0 | 0,56 | 0 | 0,61 | 0 | 0,63 | 0 | 0,65 | 0 | 0,65 | 0 | DINAS PMD, KECAMATAN |
| | | | Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) | indeks | N/A | baik | 0 | baik | 0 | baik | 0 | sangat baik | 0 | sangat baik | 0 | sangat baik | 0 | DISKOMINFO |

| Kode | Tujuan/Sasaran | Program | Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | | | | | | Kondisi Akhir | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | |
| | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah | indeks | N/A | 65 | 0 | 70 | 0 | 75 | 0 | 80 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | SEMUA OPD |
| | | | Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah | % | 10 | 12 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | BAPENDA |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | % | 100 | 100 | 65.999.637 | 100 | 73.317.631 | 100 | 73.015.558 | 100 | 77.749.644 | 100 | 81.691.264 | 100 | 81.691.264 | SKPD |
| | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase peningkatan disiplin aparatur | % | 100 | 100 | 1.035.000 | 100 | 818.149 | 100 | 854.058 | 100 | 891.760 | 100 | 931.349 | 100 | 931.349 | SKPD |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | persentasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | 100 | 100 | 2.039.000 | 100 | 2.225.984 | 100 | 2.355.481 | 100 | 2.491.685 | 100 | 2.625.877 | 100 | 2.625.877 | SKPD |
| | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | % | 100 | 100 | 6.399.896 | 100 | 6.717.088 | 100 | 7.044.253 | 100 | 7.387.442 | 100 | 7.802.713 | 100 | 7.802.713 | SKPD |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur | % | 100 | 100 | 23.258.375 | 100 | 23.350.294 | 100 | 23.782.508 | 100 | 24.897.579 | 100 | 26.052.455 | 100 | 26.052.455 | SKPD |
| | | Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah | Persentase Promosi Pembangunan Daerah yang mendatangkan investasi | % | n/a | 20 | 859.000 | 40 | 875.000 | 60 | 900.000 | 80 | 925.000 | 100 | 950.000 | 34 | 950.000 | SKPD |
| | | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Persentase ketersediaan Akses Jaringan Internet di Ruang Publik dan OPD | % | 80 | 82 | 5.950.976 | 85 | 7.298.525 | 90 | 7.663.451 | 95 | 8.046.624 | 100 | 8.448.955 | 100 | 8.448.955 | KOMINFO |
| | | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Persentase kertersediaan data statistik sektoral | % | n/a | 65 | 529.408 | 70 | 555.878 | 75 | 583.672 | 80 | 612.856 | 85 | 643.499 | 85 | 643.499 | KOMINFO |
| | | Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah | Persentase pengamanan digital informasi | % | n/a | 45 | 146.076 | 50 | 153.380 | 55 | 161.049 | 65 | 169.101 | 75 | 177.556 | 75 | 177.556 | KOMINFO |
| | | Program Pembinaan Masyarakat | Persentase Pembinaan Masyarakat yang dilaksanakan | % | 100 | 100 | 512.028 | 100 | 537.629 | 100 | 564.511 | 100 | 592.736 | 100 | 622.373 | 100 | 622.373 | SATPOL PP & DAMKAR |

| Kode | Tujuan/Sasaran | Program | Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | | | | | | Kondisi Akhir | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | |
| | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| | | Program Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada | % | 60 | 100 | 5.232.156 | 100 | 5.493.764 | 100 | 5.768.452 | 100 | 6.056.875 | 100 | 6.359.718 | 100 | 6.359.718 | SATPOL PP & DAMKAR |
| | | Program Penegakan Perda | Persentase Penegakan Perda | % | n/a | 80 | 693.132 | 85 | 727.789 | 90 | 764.178 | 95 | 802.387 | 100 | 842.506 | 100 | 842.506 | SATPOL PP & DAMKAR |
| | | Program Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa | Persentase Peningkatan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa | % | 100 | 100 | 725.000 | 100 | 761.250 | 100 | 799.312 | 100 | 839.278 | 100 | 881.242 | 100 | 881.242,00 | KESBANGPOL |
| | | Program Politik Dalam Negeri | Persentase peningkatan pemahaman politik dan demokrasi | % | 100 | 100 | 697.348 | 100 | 732.215 | 100 | 768.826 | 100 | 807.267 | 100 | 847.630 | 100 | 847.630 | KESBANGPOL |
| | | Program Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan | indeks kebebasan sipil | % | n/a | 80 | 500.000 | 85 | 525.000 | 88 | 551.250 | 90 | 578.812 | 92 | 607.753 | 92 | 607.753 | KESBANGPOL |
| | | Program Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik | Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik | % | 100 | 100 | 750.000 | 100 | 787.500 | 100 | 826.875 | 100 | 868.218 | 100 | 911.629 | 100 | 911.629 | KESBANGPOL |
| | | Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk | % | 95,12 | 96,5 | 1.120.000 | 97 | 1.176.000 | 97,38 | 1.234.800 | 97,75 | 1.296.540 | 98,25 | 1.361.367 | 98,25 | 1.361.367,00 | Dukcapil |
| | | Program Pelayanan Pencatatan sipil | Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil | % | 28,88 | 31,63 | 467.908 | 34,38 | 491.303 | 37,13 | 515.869 | 39,88 | 541.662 | 42,88 | 568.745 | 42,88 | 568.745,00 | Dukcapil |
| | | Program Pengelolaan Informasi dan Kependudukan | Ketersediaan Data Base Kependudukan skala Kabupaten | % | 60 | 65 | 297.500 | 70 | 312.375 | 75 | 327.994 | 80 | 344.393 | 85 | 361.613 | 85 | 361.613 | Dukcapil |
| | | Program Pemanfaatan data & Inovasi | Persentase Data Capil yang dimanfaatkan | % | n/a | 40 | 230.000 | 50 | 241.500 | 55 | 253.575 | 60 | 266.253 | 70 | 279.566 | 70 | 279.566,00 | Dukcapil |
| | | Program Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan | Rata-rata persentase sarana/prasarana yang berfungsi dan pemberdayaan masyarakat kecamatan/ kelurahan | % | n/a | 65 | 50.500.000 | 70 | 53.025.000 | 75 | 55.676.250 | 80 | 58.460.062 | 85 | 61.383.065 | 85 | 61.383.065 | 12 Kecamatan |
| | | Program Pemerintahan Desa dan Kelurahan | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik | % | 60 | 70 | 1.519.676 | 75 | 1.595.659 | 80 | 1.675.442 | 85 | 1.759.214 | 90 | 1.847.175 | 90 | 1.847.175 | DINAS PMD |
| | | Program kelembagaan dan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Persentase Desa yang kategori IDMnya meningkat | % | 50 | 60 | 1.400.000 | 70 | 1.575.000 | 80 | 1.653.750 | 85 | 1.736.437 | 87 | 1.823.259 | 87 | 1.823.259 | DINAS PMD |

| Kode | Tujuan/Sasaran | Program | Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | | | | | | Kondisi Akhir | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | |
| | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| | | Program pemberdayaan dan kerjasama | Persentase kelompok masyarakat yang diberdayakan | % | 70 | 75 | 2.050.000 | 80 | 2.152.500 | 85 | 2.260.125 | 90 | 2.373.121 | 95 | 2.491.787 | 95 | 2.491.787 | DINAS PMD |
| | | Program fasilitasi legislasi persidangan dan kehumasan | Persentase prolegda yang ditetapkan | % | 100 | 100 | 11.001.513 | 100 | 11.551.589 | 100 | 12.129.168 | 100 | 12.735.627 | 100 | 13.372.408 | 100 | 13.372.408 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | Program penganggaran dan pengawasan dprd | Persentase pokok-pokok pikiran yang masuk dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah | % | 50 | 70 | 2.868.423 | 70 | 3.011.844 | 70 | 3.162.436 | 70 | 3.320.558 | 70 | 3.486.586 | 100 | 3.486.586 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Persentase Unit Kerja yang Akuntabel | % | 43 | 70 | 4.836.293 | 78 | 4.981.382 | 86 | 5.130.823 | 93 | 5.284.748 | 100 | 5.443.290 | 100 | 5.443.290 | Inspektorat |
| | | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan & Aparatur Pengawasan | Persentase pegawai yang bersertifikat JFA dan P2UPD | % | 75 | 75 | 1.358.558 | 80 | 1.399.315 | 85 | 1.441.294 | 90 | 1.484.533 | 95 | 1.529.069 | 95 | 1.529.069 | Inspektorat |
| | | Program Pengembangan, Pengadaan & Diklat | Persentase pemenuhan kompetensi pegawai | % | 5,38 | 11 | 2.353.704 | 22 | 2.471.389 | 33 | 2.594.959 | 44 | 2.724.707 | 55 | 2.860.942 | 55 | 2.860.942 | BKPSDM |
| | | Program Mutasi data dan Informasi | Persentase pegawai perangkat daerah dengan data kepegawaian terintegrasi, valid dan terupdate | % | 20 | 50 | 538.740 | 60 | 565.677 | 70 | 593.961 | 80 | 623.659 | 90 | 654.842 | 90 | 654.842 | BKPSDM |
| | | Program disiplin, penghargaan dan fasilitasi profesi ASN | Persentase Penyelesaian Kasus disiplin ASN | % | 100 | 100 | 556.956 | 100 | 584.804 | 100 | 614.044 | 100 | 644.746 | 100 | 676.983 | 100 | 676.983 | BKPSDM |
| | | | Persentase Peningkatan Kinerja ASN | % | 20 | 35 | | 50 | | 65 | | 80 | | 95 | | 95 | | |
| | | Program Litbang Sosial dan Pemerintahan | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan sosial dan pemerintahan | % | 20 | 25 | 896.072 | 30 | 1.250.000 | 33 | 1.250.000 | 37 | 1.500.000 | 40 | 1.500.000 | 40 | 1.500.000 | BALITBANG |
| | | Program Litbang Ekonomi dan Pembangunan | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan ekonomi dan pembangunan | % | 22,22 | 33,33 | 1.000.000 | 41,67 | 1.500.000 | 41,67 | 1.500.000 | 41,67 | 1.750.000 | 50,00 | 1.750.000 | 50,00 | 1.750.000 | BALITBANG |
| | | Program Litbang Inovasi dan Teknologi | Persentase hasil penelitian yang telah didesiminasikan | % | 13,33 | 20,5 | 1.100.000 | 25 | 1.250.000 | 30 | 1.250.000 | 35 | 1.500.000 | 40 | 1.500.000 | 40 | 1.500.000 | BALITBANG |
| | | Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah | Persentase ketersediaan laporan Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah | % | 100 | 100 | 1.452.000 | 100 | 1.524.600 | 100 | 1.600.830 | 100 | 1.680.872 | 100 | 1.764.915 | 100 | 1.764.915 | Bagian Pemerintahan |

| Kode | Tujuan/Sasaran | Program | Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | | | | | | Kondisi Akhir | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | |
| | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| | | Program Bagian Hukum | Persentase ketersediaan laporan Bagian Hukum | % | 100 | 100 | 1.180.452 | 100 | 1.239.475 | 100 | 1.301.448 | 100 | 1.366.521 | 100 | 1.434.847 | 100 | 1.434.847 | Bagian Hukum |
| | | Program Bagian Barang Jasa | Tingkat Kematangan ULP | Tingkat/ Level | 2 | 3 | 2.394.912 | 4 | 2.514.658 | 4 | 2.640.390 | 5 | 2.772.410 | 5 | 2.911.031 | 5 | 2.911.031 | Bagian Barang Jasa |
| | | | Nilai Standar LPSE | Standar | 2 | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | | 12 | | Bagian Barang Jasa |
| | | Program Bagian Umum | Persentase ketersediaan laporan Bagian Umum | % | 100 | 100 | 8.673.489 | 100 | 9.107.163 | 100 | 9.562.522 | 100 | 10.040.648 | 100 | 10.542.680 | 100 | 10.542.680 | Bagian Umum |
| | | Program Bagian Organisasi | Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi | % | n/a | B | 1.708.920 | B | 1.794.366 | B | 1.884.084 | B | 1.978.289 | B | 2.077.203 | B | 2.077.203 | Bagian Organisasi |
| | | Program Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol | Persentase ketersediaan laporan Bagian Hubungan masyarakat dan Protokol | % | 100 | 100 | 3.570.000 | 100 | 3.748.500 | 100 | 3.935.925 | 100 | 4.132.721 | 100 | 4.339.357 | 100 | 4.339.357 | Bagian Humas & Protokol |
| | | Program Bagian Administrasi Pembangunan | Persentase ketersediaan laporan Bagian Administrasi Pembangunan | % | 100 | 100 | 480.396 | 100 | 504.416 | 100 | 529.637 | 100 | 556.118 | 100 | 583.924 | 100 | 583.924 | Bagian Administrasi Pembangunan |
| | | Program Bagian Infrastruktur | Persentase ketersediaan laporan Bagian Infrastruktur | % | 100 | 100 | 480.396 | 100 | 504.416 | 100 | 529.637 | 100 | 556.118 | 100 | 583.924 | 100 | 583.924 | Bagian Infrastruktur |
| | | Program Bagian Pemberdayaan Masyarakat & Trantibun Linmas | Persentase ketersediaan laporan Bagian Pemberdayaan Masyarakat & Trantibun Linmas | % | 100 | 100 | 343.140 | 100 | 360.297 | 100 | 378.312 | 100 | 397.227 | 100 | 417.089 | 100 | 417.089 | Bagian Pemberdayaan Masyarakat & Trantibun Linmas |
| | | Program Bagian Tata Usaha Pimpinan | Persentase ketersediaan laporan Bagian Tata Usaha Pimpinan | % | 100 | 100 | 343.140 | 100 | 360.297 | 100 | 378.312 | 100 | 397.227 | 100 | 417.089 | 100 | 417.089 | Bagian Tata Usaha Pimpinan |
| | | Program Bagian Ekonomi & Sumberdaya alam | Persentase ketersediaan laporan Bagian Ekonomi & Sumberdaya Alam | % | 100 | 100 | 480.396 | 100 | 504.416 | 100 | 529.637 | 100 | 556.118 | 100 | 583.924 | 100 | 583.924 | Bagian Ekonomi & SDA |
| | | Program Perencanaan Anggaran Daerah | Ketepatan dalam penyusunan RAPBD dan RAPBDP | % | 100 | 100 | 2.543.803 | 100 | 2.985.993 | 100 | 3.135.293 | 100 | 3.292.053 | 100 | 3.456.660 | 100 | 3.456.660 | BKAD |
| | | Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah | Ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan laporan keuangan pemda serta raperda pertanggung jawaban APBD | % | 100 | 100 | 2.416.432 | 100 | 2.852.254 | 100 | 2.994.866 | 100 | 3.144.610 | 100 | 3.301.840 | 100 | 3.301.840 | BKAD |
| | | Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah | % | 72 | 77 | 1.961.265 | 82 | 2.374.328 | 86 | 2.493.045 | 90 | 2.617.697 | 92 | 2.748.582 | 92 | 2.748.582 | BKAD |
| | | Program Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah | Keakuratan dalam penatausahaan keuangan daerah | % | 100 | 100 | 1.778.544 | 100 | 1.972.471 | 100 | 2.071.095 | 100 | 2.174.649 | 100 | 2.283.382 | 100 | 2.283.382 | BKAD |

| Kode | Tujuan/Sasaran | Program | Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | | | | | | Kondisi Akhir | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | |
| | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| | | Program pengelolaan Pajak Daerah Ret. Daerah dan Pendapatan Lainnya | Persentase kontribusi Pajak dan retribusi daerah terhadap PAD | % | 34 | 35,7 | 1.590.968 | 37,5 | 1.670.516 | 39,4 | 1.754.042 | 41,3 | 1.841.744 | 43,4 | 1.933.832 | 43,4 | 1.933.832 | BAPENDA |
| | | Program Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB | Persentase kontribusi PBB-P2 dan BPHTB terhadap PAD | % | 4,2 | 5 | 1.575.000 | 5,6 | 1.653.750 | 6 | 1.736.438 | 7 | 1.823.259 | 9 | 1.914.422 | 9 | 1.914.422 | BAPENDA |
| | | Program penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah | Persentase keakuratan dan ketepatan pelaporan pendapatan daerah | % | 100 | 100 | 755.000 | 100 | 792.750 | 100 | 832.388 | 100 | 874.007 | 100 | 917.707 | 100 | 917.707 | BAPENDA |
| | | Program intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Daerah | Persentase Peningkatan Penerimaan PAD | % | 4,5 | 15 | 1.430.000 | 15 | 1.501.500 | 15 | 1.576.575 | 15 | 1.655.404 | 15 | 1.738.174 | 15 | 1.738.174 | BAPENDA |
| | | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah | % | 95 | 100 | 3.254.900 | 100 | 4.467.645 | 100 | 4.691.027 | 100 | 4.925.579 | 100 | 8.171.858 | 100 | 8.171.858 | BAPPEDA |
| | | | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | Perencanaan, Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persentase sasaran program dan kegiatan RKPD yang konsisten dengan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | % | 90 | 100 | 1.196.072 | 100 | 2.305.876 | 100 | 2.421.169 | 100 | 2.542.228 | 100 | 2.669.339 | 100 | 2.669.339 | BAPPEDA |
| | | Program Perencanaan, Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Persentase sasaran program dan kegiatan RKPD yang konsisten dengan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | % | 90 | 100 | 1.127.456 | 100 | 2.233.829 | 100 | 2.345.520 | 100 | 2.462.796 | 100 | 2.585.936 | 100 | 2.585.936 | BAPPEDA |
| | | Program Perencanaan, Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam | Persentase sasaran program dan kegiatan RKPD yang konsisten dengan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA | % | 90 | 100 | 1.058.828 | 100 | 2.161.769 | 100 | 2.269.858 | 100 | 2.383.351 | 100 | 2.502.518 | 100 | 2.502.518 | BAPPEDA |
| | | Program Pengembangan Data/Informasi dan Pelaporan | Persentasi ketersediaan data/ informasi perencanaan pembangunan daerah | % | 90 | 100 | 1.978.118 | 100 | 2.089.697 | 100 | 2.194.182 | 100 | 2.303.891 | 100 | 2.419.086 | 100 | 2.419.086 | BAPPEDA |

| Kode | Tujuan/Sasaran | Program | Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | | | | | | Kondisi Akhir | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | |
| | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| | | 0 | Persentasi ketersediaan laporan perencanaan pembangunan daerah | % | 95 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| | | Program Penyelesaian Masalah Pertanahan | Persentase lahan pemda yang bersertifikat | % | 63 | 65 | 1.000.000 | 70 | 1.500.000 | 75 | 2.000.000 | 80 | 2.500.000 | 85 | 3.000.000 | 85 | 3.000.000 | BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTDA |
| | | Program Pelayanan Kearsipan | Persentase arsip tertangani | % | 11,76 | 11,85 | 1.057.844 | 11,90 | 1.085.736 | 11,95 | 1.115.023 | 12,0 | 1.145.774 | 12,05 | 1.178.063 | 12,05 | 1.178.063 | DIN PERPUS |
| | **MISI 5: MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tujuan 7: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Berkelanjutan | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | indeks | n/a | 60 | 0 | 65 | 0 | 70 | 0 | 73 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| | Sasaran 13: Optimalnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang berkelanjutan | | Pencapaian Adipura | tercapai/tidak tercapai | n/a | Tercapai | 0 | Tercapai | 0 | Tercapai | 0 | Tercapai | 0 | Tercapai | 0 | Tercapai | 0 | DINAS LH, DINAS PUPR, KECAMATAN |
| | | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Air | Indeks | 6,61 | 6,4 | 810.000 | 6,3 | 790.160 | 6,2 | 873.701 | 6,1 | 900000 | 6 | 950000 | 6 | 950000 | DLH |
| | | | Indeks Kualitas Udara | Indeks | 83 | 84 | | 85 | | 86 | | 87 | | 88 | | 88 | | |
| | | | Indeks Tutupan Lahan | Indeks | 59 | 59,5 | | 60,5 | | 61 | | 61,5 | | 62 | | 62 | | |
| | | Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | Persentase Pengawasan Izin Lingkungan | % | 36 | 60 | 459.804 | 70 | 482.794 | 80 | 506.934 | 90 | 532.281 | 100 | 600.895 | 100 | 600.895 | DLH |
| | | Program Tata Lingkungan | Presentase Rekomendasi Teknis Lingkungan | % | 100 | 100 | 651.784 | 100 | 684.373 | 100 | 718.592 | 100 | 754.521 | 100 | 792.248 | 100 | 792.248 | DLH |
| | | Program Pelestarian dan Keindahan Lingkungan | Luas RTH yang dipelihara | Ha | 18 | 19 | 4.126.712 | 20 | 4.245.888 | 21 | 4.133.149 | 22 | 3.920.306 | 24 | 4.345.177 | 24 | 4.345.177 | DLH |
| | | Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Rasio bangunan ber-IMB | % | n/a | 60 | 1.090.584 | 63 | 1.149.225 | 66 | 2.145.006 | 69 | 2.252.257 | 72 | 2.364.870 | 72 | 2.364.870 | PUPR |
| | | Program Pengelolaan Sampah dan Limbah | Persentase Pengelolaan Sampah Perkotaan | % | 93,2 | 82 | 8.137.736 | 84 | 9.157.729 | 86 | 9.775.615 | 88 | 10.516.896 | 90 | 10.704.896 | 90 | 10.704.896 | DLH |
| | | 0 | Persentase Penanganan limbah domestik | % | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | DLH |

| Kode | Tujuan/Sasaran | Program | Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | | | | | | Kondisi Akhir | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | |
| | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| | Sasaran 14: Meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi dan mengurangi risiko bencana dan kondisi kedaruratan | | Persentase Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana | % | 27,3 | 40,9 | 0 | 54,5 | 0 | 68,2 | 0 | 81,8 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | BPBD |
| | | Program Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran | Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | % | 100 | 100 | 3.127.020 | 100 | 3.283.371 | 100 | 3.447.540 | 100 | 3.619.917 | 100 | 3.800.912 | 100 | 3.800.912 | SATPOL PP & DAMKAR |
| | | Program Pencegahan Dini Bencana | Persentase Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana | % | 27,3 | 40,9 | 897.833 | 54,5 | 942.725 | 68,2 | 989.861 | 81,8 | 1.039.354 | 100 | 1.091.322 | 100 | 1.091.321,62 | BPBD |
| | | Program Penanganan Pasca Bencana | Persentase Penanganan Pasca Bencana | % | 100 | 100 | 823.500 | 100 | 864.675 | 100 | 907.909 | 100 | 953.304 | 100 | 1.000.969 | 100 | 1.000.969 | BPBD |
| | | Program Penanganan Tanggap Darurat | Persentase Korban Bencana yang tertangani | % | 100 | 100 | 300.000 | 100 | 315.000 | 100 | 330.750 | 100 | 347.288 | 100 | 364.652 | 100 | 364.652 | BPBD |
| **TOTAL ANGGARAN** | | | | | | | **780.500.705** | | **865.622.099** | | **948.866.310** | | **1.026.553.217** | | **1.083.748.807** | | **1.084.286.668** | |

# BAB VII
# KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun kedepan tidak terlepas dari kerangka pendanaan pembangunan yang diproyeksikan saat ini. Sebagaimana tertuang dalam Bab III sebelumnya, Pendapatan daerah Kabupaten Kolaka dalam lima tahun kedepan diproyeksikan akan terus meningkat. Proyeksi peningkatan pendapatan daerah dengan memperhatikan beberapa asumsi:

a. Meningkatnya bagian Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dari alokasi dana transfer pusat sebagai akibat dari pelaksanaan tugas-tugas pemerintah yang kewenangannya berada pada pemerintah Kabupaten Kolaka;
b. Meningkatnya pendapatan asli daerah terutama dari sumber pajak dan retribusi utama daerah, seiring dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan perluasan sumber-sumber pendapatan baru lainnya;
c. Meningkatnya pemanfaatan aset daerah yang bernilai ekonomis.

Pada sisi yang lain kebutuhan belanja pembangunan daerah juga diproyeksikan meningkat. Peningkatan kebutuhan belanja ditujukan untuk memperkuat perekonomian daerah dengan berorientasi pada pemerataan, pertumbuhan yang berkualitas, ekonomi yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan. Perhatian terhadap penanganan kemiskinan yang menjadi inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) juga menjadi perhatian penting dalam kebijakan belanja daerah.

Belanja daerah tahun 2020-2024 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Belanja daerah diprioritaskan untuk penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar serta urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai kewenangan Kabupaten Kolaka dengan memperhatikan potensi daerah.

Belanja daerah yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan proporsi yang semakin berimbang dalam rangka menjaga kualitas fiskal daerah.

Rencana pendanaan dan belanja pembangunan daerah tahun 2020-2024 tertuang dalam tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020-2024
Kabupaten Kolaka

| No | Uraian | Proyeksi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | **BELANJA DAERAH** | **1.460.595.224.400,00** | **1.616.552.111.900,00** | **1.773.338.061.600,00** | **1.931.117.626.300,00** | **2.087.784.439.200,00** |
| **A.** | **Belanja Tidak Langsung** | **680.094.519.400,00** | **750.930.012.900,00** | **824.471.751.600,00** | **904.564.409.300,00** | **1.004.035.632.200,00** |
| 1 | Belanja Pegawai | 481.794.473.900,00 | 540.300.218.500,00 | 601.104.095.400,00 | 667.775.160.900,00 | 753.100.175.900,00 |
| 2 | Belanja Hibah | 12.100.000.000,00 | 13.068.000.000,00 | 14.113.440.000,00 | 15.242.515.200,00 | 16.461.916.400,00 |
| 3 | Belanja Bantuan sosial | 8.899.056.100,00 | 9.867.056.000,00 | 10.656.420.600,00 | 11.508.934.200,00 | 12.429.649.000,00 |
| 4 | Belanja bagi hasil kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa | 5.729.400,00 | 6.875.300,00 | 8.250.300,00 | 9.900.400,00 | 11.880.500,00 |
| 5 | Belanja bantuan keuangan | 173.295.260.000,00 | 182.687.863.100,00 | 192.589.545.300,00 | 203.027.898.600,00 | 214.032.010.400,00 |
| 6 | Belanja tidak terduga | 4.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 6.000.000.000,00 | 7.000.000.000,00 | 8.000.000.000,00 |
| **B** | **Belanja langsung** | **780.500.705.000,00** | **865.622.099.000,00** | **948.866.310.000,00** | **1.026.553.217.000,00** | **1.083.748.807.000,00** |
| 1 | Belanja pegawai | 78.622.344.000,00 | 90.218.334.000,00 | 95.430.335.000,00 | 108.833.657.000,00 | 111.473.696.000,00 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 301.553.361.000,00 | 331.523.533.000,00 | 365.928.625.000,00 | 393.377.393.000,00 | 412.694.498.000,00 |
| 3 | Belanja Modal | 400.325.000.000,00 | 443.880.232.000,00 | 487.507.350.000,00 | 524.342.167.000,00 | 559.580.613.000,00 |

Berdasarkan kerangka pendanaan tersebut di atas dapat digambarkan dalam rencana program prioritas daerah pada seluruh perangkat daerah yang dijabarkan dalam 6 Urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 urusan pilihan dan 5 fungsi penunjang urusan pemerintahan. Pada Tabel 7.2 memuat seluruh program yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, perangkat daerah penanggung jawab dan bidang urusan masing-masing. Adapun penjabaran program prioritas seluruh perangkat daerah Kabupaten Kolaka disajikan dalam Tabel 7.2 berikut ini:

**TABEL 7.2 RPJMD**

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan**

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | |
| | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 1.1.1 | Urusan Wajib Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pendidikan Anak Usia Dini | APK PAUD | % | 57,1 | 59,2 | 4.777.380 | 61,5 | 5.016.249 | 63 | 5.267.061 | 64,75 | 5.530.415 | 66,21 | 5.806.935 | 66,21 | 5.806.935 | DIN DIKBUD |
| | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | Persentase APM Jenjang SD | % | 88,6 | 88,75 | 69.673.281 | 88,8 | 72.306.945 | 88,85 | 75.122.292 | 88,9 | 78.128.406 | 88,95 | 81.334.827 | 88,95 | 81.334.827 | DIN DIKBUD |
| | | Persentase APM Jenjang SMP | % | 78,6 | 78,7 | | 78,76 | | 78,8 | | 78,85 | | 78,9 | | 78,9 | | DIN DIKBUD |
| | Program Pendidikan Non Formal | Angka kelulusan pendidikan kesetaraan Paket A | % | 100 | 100 | 742.008 | 100 | 779.108 | 100 | 818.064 | 100 | 858.967 | 100 | 901.915 | 100 | 901.915 | DIN DIKBUD |
| | | Angka kelulusan pendidikan kesetaraan Paket B | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | DIN DIKBUD |
| | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | % Pendidik TK yang memenuhi kualifikasi S1 | % | 64,5 | 66,2 | 2.086.272 | 68,5 | 2.190.586 | 71,5 | 2.300.115 | 73,1 | 2.415.121 | 75 | 2.535.877 | 75 | 2.535.877 | DIN DIKBUD |
| | | % Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1 | % | 80,99 | 86,9 | | 88,4 | | 90,7 | | 92,9 | | 94,5 | | 94,5 | | DIN DIKBUD |
| | | % Pendidik SMP yang memenuhi kualifikasi S1 | % | 90,80 | 96,4 | | 97,1 | | 97,5 | | 98,1 | | 98,5 | | 98,5 | | DIN DIKBUD |
| | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | % sekolah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) | % | 70 | 75 | 1.063.584 | 80 | 1.116.763 | 85 | 1.172.601 | 90 | 1.231.231 | 95 | 1.292.793 | 95 | 1.292.793 | DIN DIKBUD |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | |
| | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| | Program Penguatan Kualitas SDM Unggul Kolaka | Persentase penerima beasiswa dari target Kolaka Maju dan Berdaya Saing | % | n/a | 20 | 3.000.000 | 40 | 4.000.000 | 60 | 5.000.000 | 80 | 6.000.000 | 100 | 7.000.000 | 100 | 7.000.000 | DIN DIKBUD |
| 1.2.1 | Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Kesehatan Masyarakat | Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | % | 81,5 | 84,2 | 23.910.222 | 86,9 | 25.434.778 | 89,6 | 27.202.501 | 92,6 | 29.070.346 | 95 | 30.687.800 | 95 | 30.687.800 | DIN KESEHATAN |
| | | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | % | 86,3 | 87,44 | | 87,44 | | 89,72 | | 90,86 | | 92 | | 92 | | DIN KESEHATAN |
| | | Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KN1) | % | 94,9 | 95,52 | | 96,14 | | 96,72 | | 97,38 | | 98 | | 98 | | DIN KESEHATAN |
| | | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | % | 41,5 | 45,2 | | 48,9 | | 52,6 | | 56,3 | | 60 | | 60 | | DIN KESEHATAN |
| | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 79,92 | 87,95 | | 91,97 | | 95,98 | | 100 | | 100 | | 100 | | DIN KESEHATAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | |
| | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| | Program Pencegahan & Pengendalian Penyakit | persentase orang usia 15 s/d 59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | % | 12,94 | 22,35 | 2.416.400 | 31,76 | 2.471.379 | 41,18 | 2.991.056 | 50,59 | 3.911.711 | 60 | 3.996.337 | 60 | 3.996.337 | DIN KESEHATAN |
| | | Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesui standar kesehatan | % | 16,41 | 41,84 | | 54,56 | | 67,28 | | 80 | | 80 | | 80 | | DIN KESEHATAN |
| | | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 12,5 | 22 | | 31,5 | | 41 | | 50,5 | | 60 | | 60 | | DIN KESEHATAN |
| | | Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 7,8 | 14,04 | | 20,28 | | 26,52 | | 32,76 | | 39 | | 39 | | DIN KESEHATAN |
| | | Persentase orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | DIN KESEHATAN |
| | | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | DIN KESEHATAN |
| | | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | % | 31 | 44,8 | | 58,6 | | 72,4 | | 86,2 | | 100 | | 100 | | DIN KESEHATAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | |
| | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| | Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan | Persentase ketersedian obat esensial dan obat kebutuhan lainnya | % | 94,55 | 95,35 | 62.107.058 | 96,15 | 65.212.411 | 96,95 | 68.473.031 | 97,75 | 71.896.683 | 97,75 | 75.491.517 | 97,75 | 75.491.517 | DIN KESEHATAN |
| | | Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi | % | 64 | 95 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | DIN KESEHATAN |
| | | Persentase tenaga kesehatan yang berkompeten dengan surat tanda registrasi (STR) | % | 84,61 | 86,08 | | 87,57 | | 89,04 | | 90,5 | | 92 | | 92 | | DIN KESEHATAN |
| | Program Sistem Informasi Kesehatan | Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi | % | 62,2 | 95 | 486.744 | 95 | 511.081 | 95 | 536.635 | 95 | 563.467 | 95 | 591.640 | 95 | 591.640 | DIN KESEHATAN |
| | Program Pelayanan Kesehatan Sekunder | Cakupan Pemanfaatan Tempat Tidur (BOR) | % | 68,18 | 70,28 | 100.000.000 | 72,32 | 140.000.000 | 74,36 | 140.000.000 | 76,40 | 150.000.000 | 78,44 | 150.000.000 | 78,44 | 150.000.000 | RSBG |
| | | Cakupan Rata-rata Lama Perawatan (LOS) | Hari | 4,04 | 4,64 | | 5,44 | | 6,24 | | 7,04 | | 7,78 | | 7,78 | | RSBG |
| | | Cakupan Selang Waktu Penggunaan Tempat Tidur (TOI) | Hari | 2,16 | 2,21 | | 2,24 | | 2,33 | | 2,37 | | 2,37 | | 2,37 | | RSBG |
| 1.3.1 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pembangunan Kebinamargaan | Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap | % | 55,65 | 62 | 113.140.000 | 65 | 117.012.000 | 68 | 122.862.000 | 71 | 129.005.730 | 75 | 135.456.016 | 75 | 135.456.016 | PUPR |
| | Program Pengembangan keciptakaryaan | Presentase saluran drainase/ gorong-gorong yang berfungsi dengan baik | % | 60 | 65 | 14.312.697 | 72 | 15.000.000 | 79 | 15.400.000 | 86 | 15.700.000 | 95 | 15.900.000 | 95 | 15.900.000 | PUPR |
| | | Persentase Pengembangan Pengelolaan air minum bagi masyarakat | % | 60 | 65 | | 72 | | 79 | | 86 | | 95 | | 95 | | PUPR |
| | | Cakupan sanitasi layak | % | 86,1 | 90 | | 93 | | 96 | | 98 | | 100 | | 100 | | PUPR |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | |
| | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| | Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air | Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik | % | 69,9 | 74 | 6.862.740 | 79 | 7.205.877 | 84 | 7.566.171 | 89 | 7.944.479 | 94 | 8.341.703 | 94 | 8.341.703 | PUPR |
| | Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Rasio bangunan ber-IMB | % | n/a | 60 | 1.090.584 | 63 | 1.149.225 | 66 | 2.145.006 | 69 | 2.252.257 | 72 | 2.364.870 | 72 | 2.364.870 | PUPR |
| 1.4.1 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pengembangan Perumahan | Persentase Rumah Layak Huni | % | 40 | 50 | 4.091.844 | 60 | 4.296.436 | 70 | 4.511.258 | 80 | 4.736.821 | 90 | 4.973.662 | 90 | 4.973.661,96 | DINAS PKP |
| | Program Lingkungan Sehat Perumahan | Luas Kawasan Kumuh Perkotaan | Ha | 34,72 | 30 | 1.411.768 | 25 | 1.482.356 | 20 | 1.556.474 | 15 | 1.634.298 | 10 | 1.716.013 | 10 | 1.716.013 | DINAS PKP |
| | Program Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman | Persentase Ruas Jalan yang tersedia sarana PJU dengan baik | % | 16,67 | 20 | 2.137.256 | 25 | 2.244.119 | 30 | 2.356.325 | 35 | 2.474.141 | 40 | 2.597.848 | 40 | 2.597.848 | DINAS PKP |
| 1.5.1 | Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa | Persentase Peningkatan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa | % | 100 | 100 | 725.000 | 100 | 761.250 | 100 | 799.312 | 100 | 839.278 | 100 | 881.242 | 100 | 881.242,00 | KESBANGPOL |
| | Program Politik Dalam Negeri | Persentase peningkatan pemahaman politik dan demokrasi | % | 100 | 100 | 697.348 | 100 | 732.215 | 100 | 768.826 | 100 | 807.267 | 100 | 847.630 | 100 | 847.630 | KESBANGPOL |
| | Program Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan | indeks kebebasan sipil | % | n/a | 80 | 500.000 | 85 | 525.000 | 88 | 551.250 | 90 | 578.812 | 92 | 607.753 | 92 | 607.753 | KESBANGPOL |
| | Program Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik | Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik | % | 100 | 100 | 750.000 | 100 | 787.500 | 100 | 826.875 | 100 | 868.218 | 100 | 911.629 | 100 | 911.629 | KESBANGPOL |
| | Program Pembinaan Masyarakat | Persentase Pembinaan Masyarakat yang dilaksanakan | % | 100 | 100 | 512.028 | 100 | 537.629 | 100 | 564.511 | 100 | 592.736 | 100 | 622.373 | 100 | 622.373 | SATPOL PP & DAMKAR |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | |
| | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| | Program Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada | % | 60 | 100 | 5.232.156 | 100 | 5.493.764 | 100 | 5.768.452 | 100 | 6.056.875 | 100 | 6.359.718 | 100 | 6.359.718 | SATPOL PP & DAMKAR |
| | Program Penegakan Perda | Persentase Penegakan Perda | % | n/a | 80 | 693.132 | 85 | 727.789 | 90 | 764.178 | 95 | 802.387 | 100 | 842.506 | 100 | 842.506 | SATPOL PP & DAMKAR |
| | Program Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran | Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | % | 100 | 100 | 3.127.020 | 100 | 3.283.371 | 100 | 3.447.540 | 100 | 3.619.917 | 100 | 3.800.912 | 100 | 3.800.912 | SATPOL PP & DAMKAR |
| | Program Pencegahan Dini Bencana | Persentase Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana | % | 27,3 | 40,9 | 897.833 | 54,5 | 942.725 | 68,2 | 989.861 | 81,8 | 1.039.354 | 100 | 1.091.322 | 100 | 1.091.321,62 | BPBD |
| | Program Penanganan Pasca Bencana | Persentase Penanganan Pasca Bencana | % | 100 | 100 | 823.500 | 100 | 864.675 | 100 | 907.909 | 100 | 953.304 | 100 | 1.000.969 | 100 | 1.000.969 | BPBD |
| | Program Penanganan Tanggap Darurat | Persentase Korban Bencana yang tertangani | % | 100 | 100 | 300.000 | 100 | 315.000 | 100 | 330.750 | 100 | 347.288 | 100 | 364.652 | 100 | 364.652 | BPBD |
| 1.6.1 | Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Penanganan Fakir Miskin | Persentase Fakir Miskin yang tertangani | % | 46,44 | 50 | 3.233.500 | 55 | 3.395.175 | 60 | 3.564.934 | 67 | 3.743.180 | 75 | 3.930.339 | 75 | 3.930.339 | Dinas Sosial |
| | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persentase warga yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial | % | 77,68 | 80 | 2.426.464 | 81 | 1.884.337 | 83 | 1.797.654 | 85 | 1.857.537 | 87 | 1.806.612 | 87 | 1.806.612 | Dinas Sosial |
| | Program Pemberdayaan Sosial | Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial | % | 66,51 | 70 | 1.305.000 | 73 | 1.370.250 | 75 | 1.438.762 | 83 | 1.510.700 | 85 | 1.586.236 | 85 | 1.586.236 | Dinas Sosial |
| | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia dan anak terlantar di luar panti yang ditangani | % | 20,13 | 25 | 1.461.500 | 30 | 1.534.575 | 35 | 1.611.303 | 40 | 1.691.869 | 45 | 1.776.462 | 45 | 1.776.462 | Dinas Sosial |
| 2.1.1 | URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. | Prosentase meningkatnya kualitas tenaga kerja yang dipromosikan | % | 16 | 16 | 554.908 | 18 | 582.653 | 20 | 611.786 | 22 | 642.375 | 23 | 674.494 | 23 | 674.494 | Dinas Nakertrans |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | |
| | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| | Program Pembinaan, Penempatan dan perluasan Kesempatan Kerja. | Prosentase tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan. | % | 26,71 | 21,48 | 729.408 | 22,42 | 765.878 | 23,25 | 804.172 | 25 | 844.381 | 26 | 886.599 | 26 | 886.599 | Dinas Nakertrans |
| | Program Hubungan Industrial dan Syarat Kerja | Persentase penyelesaian sengketa ketenagakerjaan | % | 45 | 50 | 308.832 | 55 | 324.274 | 60 | 340.487 | 65 | 357.512 | 70 | 375.387 | 70 | 375.387 | Dinas Nakertrans |
| | Program Peningkatan kapasitas UPTD BLKK. | Persentase lulusan BLKK yang terserap di lapangan pekerjaan | % | 36,6 | 41,6 | 2.607.840 | 46,6 | 2.740.731 | 51,6 | 2.869.519 | 56,6 | 3.014.495 | 61,6 | 3.165.969 | 61,6 | 3.165.969 | UPTD BLK |
| 2.2.1 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pemenuhan Hak Anak | Prosentase sarana ruang publik ramah anak (%) | % | 38,78 | 45 | 672.548 | 50 | 706.175 | 55 | 741.484 | 60 | 778.558 | 65 | 817.486 | 65 | 817.486,30 | Dinas P3A |
| | Program Peningkatan Kualiatas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga | Persentase kualitas hidup perempuan dan keluarga yang ditingkatkan. | % | 5,9 | 10,07 | 1.058.828 | 13,5 | 1.111.769 | 16,7 | 1.167.358 | 17,7 | 1.225.726 | 19,3 | 1.287.012 | 19,3 | 1.287.012 | Dinas P3A |
| | Program Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Anak | Persentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | % | 100 | 100 | 529.408 | 100 | 555.878 | 100 | 583.672 | 100 | 612.856 | 100 | 643.499 | 100 | 643.499 | Dinas P3A |
| 2.3.1 | Pangan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan pangan | Ketersediaan Energi dan Protein per kapita | kkal/kap/hari | 3.636 | 2.400 | 498.000 | 2.400 | 482.800 | 2.400 | 506.940 | 2.400 | 532.287 | 2.400 | 558.901 | 2.400 | 558.901,00 | DISKETAPANG |
| | | | gram/kap/hari | 60 | 63 | | 63 | | 63 | | 63 | | 63 | | 63 | | DISKETAPANG |
| | Program Pengelolaan Distribusi dan Cadangan Pangan | Jumlah cadangan pangan pemerintah | ton | 45.611 | 46.000 | 670.000 | 47.000 | 709.324 | 48.000 | 744.790 | 49.000 | 782.030 | 50.000 | 821.131 | 90 | 821.131 | DISKETAPANG |
| | Program Pengembangan Diversifikasi, Konsumsi dan Keamanan Pangan | Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan | % | 80 | 86 | 947.832 | 87 | 1.029.500 | 88 | 1.080.975 | 89 | 1.135.024 | 90 | 1.191.775 | 90 | 1.191.775 | DISKETAPANG |
| 2.4.1 | Pertanahan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Penyelesaian Masalah Pertanahan | Persentase lahan pemda yang bersertifikat | % | 63 | 65 | 1.000.000 | 70 | 1.500.000 | 75 | 2.000.000 | 80 | 2.500.000 | 85 | 3.000.000 | 85 | 3.000.000 | BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTDA |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | |
| | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 2.5.1 | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Air | Indeks | 6,61 | 6,4 | 810.000 | 6,3 | 790.160 | 6,2 | 873.701 | 6,1 | 900.000 | 6 | 950.000 | 6 | 950.000,00 | DLH |
| | | Indeks Kualitas Udara | Indeks | 83 | 84 | | 85 | | 86 | | 87 | | 88 | | 88 | | |
| | | Indeks Tutupan Lahan | Indeks | 59 | 59,5 | | 60,5 | | 61 | | 61,5 | | 62 | | 62 | | |
| | Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | Persentase Pengawasan Izin Lingkungan | % | 36 | 60 | 459.804 | 70 | 482.794 | 80 | 506.934 | 90 | 532.281 | 100 | 600.895 | 100 | 600.895 | DLH |
| | Program Tata Lingkungan | Presentase Rekomendasi Teknis Lingkungan | % | 100 | 100 | 651.784 | 100 | 684.373 | 100 | 718.592 | 100 | 754.521 | 100 | 792.248 | 100 | 792.248 | DLH |
| | Program Pelestarian dan Keindahan Lingkungan | Luas RTH yang dipelihara | Ha | 18 | 19 | 4.126.712 | 20 | 4.245.888 | 21 | 4.133.149 | 22 | 3.920.306 | 24 | 4.345.177 | 24 | 4.345.177 | DLH |
| | Program Pengelolaan Sampah dan Limbah | Persentase Pengelolaan Sampah Perkotaan | % | 93,2 | 82 | 8.137.736 | 84 | 9.157.729 | 86 | 9.775.615 | 88 | 10.516.896 | 90 | 10.704.896 | 90 | 10.704.896 | DLH |
| | | Persentase Penanganan limbah domestik | % | 0 | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 10 | | DLH |
| 2.6.1 | Administrasi Kependudukan dan Capil | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk | % | 95,12 | 96,5 | 1.120.000 | 97 | 1.176.000 | 97,38 | 1.234.800 | 97,75 | 1.296.540 | 98,25 | 1.361.367 | 98,25 | 1.361.367,00 | Dukcapil |
| | Program Pelayanan Pencatatan sipil | Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil | % | 28,88 | 31,63 | 467.908 | 34,38 | 491.303 | 37,13 | 515.869 | 39,88 | 541.662 | 42,88 | 568.745 | 42,88 | 568.745,00 | Dukcapil |
| | Program Pengelolaan Informasi dan Kependudukan | Ketersediaan Data Base Kependudukan skala Kabupaten | % | 60 | 65 | 297.500 | 70 | 312.375 | 75 | 327.994 | 80 | 344.393 | 85 | 361.613 | 85 | 361.613 | Dukcapil |
| | Program Pemanfaatan data & Inovasi | Persentase Data Capil yang dimanfaatkan | % | n/a | 40 | 230.000 | 50 | 241.500 | 55 | 253.575 | 60 | 266.253 | 70 | 279.566 | 70 | 279.566,00 | Dukcapil |
| 2.7.1 | Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pemerintahan Desa dan Kelurahan | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik | % | 60 | 70 | 1.519.676 | 75 | 1.595.659 | 80 | 1.675.442 | 85 | 1.759.214 | 90 | 1.847.175 | 90 | 1.847.175 | DINAS PMD |
| | Program kelembagaan dan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Persentase Desa yang kategori IDMnya meningkat | % | 50 | 60 | 1.400.000 | 70 | 1.575.000 | 80 | 1.653.750 | 85 | 1.736.437 | 87 | 1.823.259 | 87 | 1.823.259 | DINAS PMD |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | |
| | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| | Program pemberdayaan dan kerjasama | Persentase kelompok masyarakat yang diberdayakan | % | 70 | 75 | 2.050.000 | 80 | 2.152.500 | 85 | 2.260.125 | 90 | 2.373.121 | 95 | 2.491.787 | 95 | 2.491.787 | DINAS PMD |
| 2.8.1 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Keluarga Berencana | Persentase Pemakaian alat kontrasepsi modern (mCPR) | % | 73,77 | 74,41 | 5.549.020 | 74,74 | 5.826.471 | 75,06 | 6.117.795 | 75,38 | 6.423.684 | 75,38 | 6.744.868 | 75,38 | 6.744.868,49 | Dinas P2KB |
| | | Rasio Petugas Lapangan Kleuarga Berencana (PLKB/PKB) 1 (satu) petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan. | Orang/desa | 1/5 | 1/4 | | 1/4 | | 1/3 | | 1/3 | | 1/2 | | 1/2 | | Dinas P2KB |
| | Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Cakupan keluarga pra sejahtera dan KS1 menjadi anggota kelompok UPPKS | % | 41,18 | 60,7 | 584.116 | 70,47 | 613.322 | 80,23 | 643.988 | 90 | 676.187 | 90 | 709.997 | 90 | 709.997 | Dinas P2KB |
| | Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan | Persentase Penurunan Laju pertumbuhan penduduk. | % | 2,22 | 2,02 | 1.003.920 | 1,82 | 1.054.116 | 1,61 | 1.106.822 | 1,41 | 1.162.163 | 1,21 | 1.220.271 | 1,21 | 1.220.271 | Dinas P2KB |
| | | Angka Kelahiran pada remaja per WUS 15-19 tahun (ASFR) per 1000 KLH | KLH | 38 | 38 | | 38 | | 38 | | 38 | | 38 | | 38 | | Dinas P2KB |
| 2.9.1 | Perhubungan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | Persentase layanan angkutan darat | % | 26 | 30 | 593.364 | 35 | 623.032 | 45 | 654.184 | 50 | 686.893 | 60 | 721.238 | 60 | 721.237,65 | DISHUB |
| | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik | % | 58 | 60 | 1.805.724 | 65 | 1.896.010 | 70 | 1.990.811 | 75 | 2.090.351 | 80 | 2.194.869 | 80 | 2.194.869 | DISHUB |
| | Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas | Persentase Pemasangan Rambu-rambu | % | n/a | 40 | 1.166.664 | 45 | 1.224.997 | 50 | 1.286.247 | 55 | 1.350.559 | 60 | 1.418.087 | 60 | 1.418.087 | DISHUB |
| | Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum | % | n/a | 70 | 255.816 | 73 | 268.607 | 76 | 282.037 | 79 | 296.139 | 82 | 310.946 | 82 | 310.946 | DISHUB |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | |
| | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 2.10.1 | Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Persentase masyarakat yang terpapar informasi publik | % | n/a | 55 | 913.208 | 60 | 1.273.868 | 65 | 1.337.562 | 70 | 1.404.440 | 75 | 1.474.662 | 75 | 1.474.661,91 | KOMINFO |
| | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Persentase ketersediaan Akses Jaringan Internet di Ruang Publik dan OPD | % | 80 | 82 | 5.950.976 | 85 | 7.298.525 | 90 | 7.663.451 | 95 | 8.046.624 | 100 | 8.448.955 | 100 | 8.448.955 | KOMINFO |
| 2.11.1 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah | Persentase berkembangnya UKM yang terbina | % | n/a | 35 | 863.732 | 40 | 906.919 | 45 | 952.265 | 50 | 999.878 | 55 | 1.049.872 | 250 | 1.049.871,64 | DIN KOP-UKM |
| | Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi | Persentase Koperasi dan UKM yang Aktif | % | 89,91 | 92,02 | 311.768 | 94,13 | 327.356 | 96,24 | 343.724 | 98,12 | 360.910 | 100 | 378.956 | 100 | 378.956 | DIN KOP-UKM |
| | Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi | Persentase Koperasi yang mandiri | % | n/a | 30 | 700.000 | 33 | 735.000 | 35 | 771.750 | 38 | 810.338 | 42 | 850.854 | 5 | 850.854 | DIN KOP-UKM |
| 2.12.1 | Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Peningkatan Promosi dan informasi Penanaman Modal | Persentase peningkatan kunjungan investor | % | 3 | 3 | 719.164 | 3 | 755.122 | 3 | 792.878 | 3 | 832.522 | 3 | 874.148 | 3 | 874.148 | DIN PTSP |
| | Program Peningkatan Iklim Investasi dan pengendalian penanaman modal | Jumlah Investor PMA dan PMDN | Investor | 5 | 6 | 247.256 | 7 | 259.619 | 8 | 272.600 | 9 | 286.230 | 10 | 300.541 | 10 | 300.541,21 | DIN PTSP |
| | Program Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan terpadu | Predikat kepatuhan pelayanan publik (ombudsman) | predikat | rendah | sedang | 628.304 | sedang | 659.719 | tinggi | 692.705 | tinggi | 727.340 | tinggi | 763.707 | 5000 | 763.707 | DIN PTSP |
| | Program Pelayanan pengaduan dan pelaporan penanaman modal dan perijinan | Indeks kepuasan masyarakat trhadap pelayanan perizinan | % | 80 | 84 | 392.296 | 88 | 411.911 | 92 | 432.506 | 96 | 454.132 | 100 | 476.838 | 100 | 476.838 | DIN PTSP |
| 2.13.1 | Kepemudaan dan Olah Raga | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pembinaan pelayanan Kepemudaan | Persentase aktifitas organisasi kepemudaan yang aktif | % | 40 | 45 | 1.038.316 | 47 | 1.090.232 | 50 | 1.144.743 | 53 | 1.201.981 | 55 | 1.262.080 | 55 | 1.262.080 | DIK MUDORA |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | |
| | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| | Program Pembudayaan dan Pemasyarakatan Olah Raga | Persentase angka partisipasi masyarakat yang berolahraga | % | 70 | 75 | 612.112 | 80 | 642.718 | 85 | 674.853 | 90 | 708.596 | 95 | 744.026 | 95 | 744.025,96 | DIK MUDORA |
| | Program Peningkatan Prestasi olahraga | Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat daerah, provinsi dan nasional | Org/Atlit (Daerah,Prov., Nas) | 20,10,3 | 10,5,1 | 852.944 | 15,6,1 | 895.591 | 16,6,2 | 940.371 | 17,7,3 | 987.389 | 17,7,3 | 1.036.759 | 17,7,3 | 1.036.759 | DIK MUDORA |
| 2.14.1 | Statistik | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Persentase kertersediaan data statistik sektoral | % | n/a | 65 | 529.408 | 70 | 555.878 | 75 | 583.672 | 80 | 612.856 | 85 | 643.499 | 85 | 643.499 | KOMINFO |
| 2.15.1 | Persandian | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah | Persentase pengamanan digital informasi | % | n/a | 45 | 146.076 | 50 | 153.380 | 55 | 161.049 | 65 | 169.101 | 75 | 177.556 | 75 | 177.556 | KOMINFO |
| 2.16.1 | Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pengembangan Nilai Budaya | Persentase sanggar seni dan budaya yang dibina | % | 18,1 | 20 | 343.140 | 25 | 360.297 | 30 | 378.312 | 40 | 397.227 | 50 | 417.089 | 50 | 417.089 | Dikbud |
| | Program Pengelolaan Kekayaan & Keragaman Budaya | Persentase cagar budaya dan benda budaya daerah yang dilestarikan | % | 45 | 50 | 2.490.192 | 52 | 2.614.702 | 55 | 2.745.437 | 60 | 2.882.709 | 65 | 3.026.844 | 65 | 3.026.843,94 | Dikbud |
| 2.17.1 | Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pelayanan Perpustakaan | Persentase peningkatan Pengunjung Perpustakaan | % | 45 | 50 | 1.763.716 | 52 | 1.826.902 | 55 | 1.893.247 | 60 | 1.962.909 | 65 | 2.036.055 | 65 | 2.036.055 | DIN PERPUS |
| 2.18.1 | Kearsipan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pelayanan Kearsipan | Persentase arsip tertangani | % | 11,76 | 11,85 | 1.057.844 | 11,90 | 1.085.736 | 11,95 | 1.115.023 | 12,0 | 1.145.774 | 12,05 | 1.178.063 | 12,05 | 1.178.063 | DIN PERPUS |
| 3.1.1 | URUSAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | Ton | 20.178,03 | 20.200 | 3.642.447 | 20.400 | 3.824.569 | 20.600 | 4.015.798 | 20.700 | 4.216.588 | 20.800 | 4.427.417 | 20.800 | 4.427.417 | DIN PERIKANAN |
| | Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan | Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan yang Mandiri | % | 5 | 6 | 1.524.500 | 7 | 1.600.725 | 8 | 1.680.761 | 9 | 1.764.799 | 11 | 1.853.039 | 11 | 1.853.039,28 | DIN PERIKANAN |
| | Program Pengembangan Usaha, Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan | ton | 19 | 30 | 1.413.965 | 35 | 1.484.663 | 40 | 1.558.896 | 45 | 1.636.841 | 50 | 1.718.683 | 50 | 1.718.683 | DIN PERIKANAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | |
| | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| | Program Pengembangan kawasan dan Perbenihan Perikanan | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | Ton | 50.000 | 50.200 | 2.124.100 | 50.400 | 2.230.305 | 50.600 | 2.341.820 | 50.800 | 2.458.911 | 51.000 | 2.581.857 | 51.000 | 2.581.857 | DIN PERIKANAN |
| 3.2.1 | Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program pengembangan pemasaran pariwisata | Presentase promosi wisata | % | 90 | 92 | 1.546.472 | 94 | 1.613.796 | 96 | 1.684.485 | 98 | 1.758.710 | 100 | 1.836.645 | 100 | 1.836.645 | DIN PARIWISATA |
| | Program pengembangan destinasi pariwisata | Jumlah kunjungan wisata | orang | 20.000 | 25.000 | 7.898.028 | 30000 | 8.292.929 | 35000 | 8.707.576 | 40000 | 9.142.955 | 45000 | 9.600.102 | 45000 | 9.600.102 | DIN PARIWISATA |
| | Program Pengembangan Kelembagaan dan SDM Kepariwisataan | SDM kepariwisataan yang terakreditasi | Orang | 40 | 90 | 541.176 | 140 | 568.235 | 190 | 596.647 | 240 | 626.479 | 290 | 657.803 | 290 | 657.803 | DIN PARIWISATA |
| | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif | Terbentuknya kelompok ekraf yang mendukung pariwisata | klp | 4 | 5 | 734.316 | 6 | 771.032 | 7 | 809.583 | 8 | 850.063 | 9 | 892.566 | 13 | 892.566 | DIN PARIWISATA |
| 3.3.1 | Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Pertanian | Jumlah Kelompok Tani Madya | klp | 16 | 75 | 5.789.563 | 150 | 8.447.669 | 225 | 9.335.243 | 300 | 9.716.327 | 379 | 1.458.469 | 379 | 1.458.469 | DIN TP HORTI |
| | Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan | Jumlah produksi padi | ton | 88.800 | 96.200 | 1.077.780 | 103.600 | 1.121.669 | 111.000 | 1.177.752 | 113.960 | 1.236.640 | 118.400 | 1.298.472 | 118.400 | 1.298.472,08 | DIN TP HORTI |
| | | Jumlah produksi tanaman pangan lainnya | ton | 11.436 | 12.008 | | 12.608 | | 13.239 | | 13.901 | | 14.596 | | 14.596 | | DIN TP HORTI |
| | Program Peningkatan Produksi Hortikultura | Jumlah Produksi Buah-buahan | kwintal | 364 | 400 | 1.395.500 | 440 | 1.465.275 | 484 | 1.538.539 | 533 | 1.615.466 | 586 | 1.696.239 | 586 | 1.696.239 | DIN TP HORTI |
| | | Jumlah Produksi Sayur-sayuran | kwintal | 245 | 270 | | 296 | | 326 | | 359 | | 395 | | 395 | | DIN TP HORTI |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian | Panjang jaringan irigasi tersier yang berfungsi baik | meter | 35.902 | 37.902 | 3.789.913 | 38.502 | 3.979.408 | 38.702 | 4.178.379 | 38.902 | 4.387.298 | 39.002 | 4.606.662 | 39.002 | 4.606.662 | DIN TP HORTI |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | |
| | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| | Program Peningkatan Produksi Perkebunan | Jumlah Produksi Kakao | ton | 9.152,03 | 9.609 | 2.090.840 | 10.090 | 2.195.382 | 10.595 | 2.305.151 | 11124 | 2.420.409 | 11681 | 2.541.429 | 11681 | 2.541.429 | DIN BUN |
| | | Jumlah Produksi Cengkeh | ton | 6.327,01 | 6.643,36 | | 6.975,53 | | 7.324,31 | | 7.690,52 | | 8.075,05 | | 8.075,05 | | DIN BUN |
| | | Jumlah Produksi Kelapa dalam | ton | 3.634,56 | 3.816,29 | | 4.007,10 | | 4207 | | 4418 | | 4639 | | 4639 | | DIN BUN |
| | | Jumlah Produksi Lada | ton | 1.253,32 | 1.315,99 | | 1.381,79 | | 1.450,87 | | 1.523,42 | | 1.599,59 | | 1.599,59 | | DIN BUNAK |
| | | Jumlah Produksi Pala | ton | 2 | 22 | | 60 | | 100 | | 180 | | 250 | | 250 | | |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan | Persentase peningkatan sarana prasarana perkebunan | % | 70 | 75 | 3.904.868 | 80 | 4.100.111 | 85 | 4.305.117 | 90 | 4.502.373 | 95 | 4.746.391 | 95 | 4.746.391 | DIN BUNAK |
| | Program Peningkatan Produksi Peternakan | Produksi daging ternak besar | Kg | 547.587 | 550.087 | 2.529.868 | 550.587 | 2.656.361 | 553.587 | 2.789.179 | 554.587 | 2.928.638 | 558.087 | 3.075.070 | 558.087 | 3.075.070 | DIN BUNAK |
| | | Produksi daging ternak kecil | Kg | 277.869 | 279.119 | | 279.369 | | 281.119 | | 282.369 | | 285.619 | | 280.007 | | DIN BUNAK |
| | | Produksi ternak unggas | Kg | 1.799.093 | 2.349.093 | | 2.449.093 | | 3.099.093 | | 3.299.093 | | 4.049.093 | | 4.049.093 | | DIN BUNAK |
| | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dan Peternakan | Persentase pengolahan hasil perkebunan dan peternakan | % | 50 | 55 | 2.394.976 | 60 | 2.514.725 | 65 | 2.640.461 | 70 | 2.672.484 | 80 | 2.806.108 | 80 | 2.806.108 | DIN BUN |
| | Program Pengembangan Sarana Prasarana Peternakan | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana peternakan | % | 80 | 85 | 4.837.368 | 88 | 5.079.236 | 90 | 5.333.198 | 95 | 5.599.858 | 100 | 5.879.851 | 100 | 6.417.713 | DIN BUN |
| | Program Pengembangan SDM Perkebunan dan Peternakan | Persentase peningkatan SDM Petani dan peternak | % | 40 | 45 | 492.048 | 50 | 411.650 | 55 | 432.348 | 60 | 553.965 | 70 | 476.664 | 70 | 476.664 | DIN BUN |
| 3.7.1 | Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | Persentase Alat Ukur Perdagangan bertanda tera sah yang berlaku | % | 67,57 | 70,27 | 1.000.000 | 72,92 | 1.050.000 | 75,38 | 1.102.500 | 78,38 | 1.157.625 | 81,08 | 1.215.506 | 81,08 | 1.215.506 | DIN PERINDAG |
| | Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan | Persentase pasar daerah dalam kondisi baik | % | 51,85 | 55,56 | 4.850.888 | 59,25 | 5.093.432 | 62,96 | 55.348.104 | 66,66 | 83.115.509 | 70,37 | 107.271.284 | 70,37 | 107.271.284 | DIN PERINDAG |
| 3.7.2 | Perindustrian | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pengembangan IKM | Persentase IKM yang mandiri | % | 48,35 | 50,14 | 1.328.500 | 51,93 | 1.394.925 | 53,72 | 1.464.671 | 55,51 | 1.537.905 | 57,3 | 1.614.800 | 57,3 | 1.614.800 | DIN PERINDAG |
| | Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi | persentase IKM yang menggunakan teknologi industri | % | 23 | 38 | 300.000 | 53 | 315.000 | 69 | 330.750 | 84 | 347.288 | 100 | 364.652 | 100 | 364.652 | DIN PERINDAG |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | |
| | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 3.8.1 | Transmigrasi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pembangunan dan Pembinaan Transmigrasi | Persentase Usaha Ekonomi Masyarakat Transmigrasi yang dibina | % | 50 | 50 | 411.768 | 50 | 429.857 | 60 | 459.599 | 60 | 481.079 | 70 | 504.384 | 70 | 504.384 | Dinas Nakertrans |
| 4.1.1 | Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | % | 100 | 100 | 65.999.637 | 100 | 73.317.631 | 100 | 73.015.558 | 100 | 77.749.644 | 100 | 81.691.264 | 100 | 81.691.264 | SKPD |
| | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase peningkatan disiplin aparatur | % | 100 | 100 | 1.035.000 | 100 | 818.149 | 100 | 854.058 | 100 | 891.760 | 100 | 931.349 | 100 | 931.349 | SKPD |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | persentasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | 100 | 100 | 2.039.000 | 100 | 2.225.984 | 100 | 2.355.481 | 100 | 2.491.685 | 100 | 2.625.877 | 100 | 2.625.877 | SKPD |
| | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | % | 100 | 100 | 6.399.896 | 100 | 6.717.088 | 100 | 7.044.253 | 100 | 7.387.442 | 100 | 7.802.713 | 100 | 7.802.713 | SKPD |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur | % | 100 | 100 | 23.258.375 | 100 | 23.350.294 | 100 | 23.782.508 | 100 | 24.897.579 | 100 | 26.052.455 | 100 | 26.052.455 | SKPD |
| | Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah | Persentase Promosi Pembangunan Daerah yang mendatangkan investasi | % | n/a | 20 | 859.000 | 40 | 875.000 | 60 | 900.000 | 80 | 925.000 | 100 | 950.000 | 34 | 950.000 | SKPD |
| | Program fasilitasi legislasi persidangan dan kehumasan | Persentase prolegda yang ditetapkan | % | 100 | 100 | 11.001.513 | 100 | 11.551.589 | 100 | 12.129.168 | 100 | 12.735.627 | 100 | 13.372.408 | 100 | 13.372.408 | SEKRETARIAT DPRD |
| | Program penganggaran dan pengawasan dprd | Persentase pokok-pokok pikiran yang masuk dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah | % | 50 | 70 | 2.868.423 | 70 | 3.011.844 | 70 | 3.162.436 | 70 | 3.320.558 | 70 | 3.486.586 | 100 | 3.486.586 | SEKRETARIAT DPRD |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | |
| | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| | Program Kesejahteraan Rakyat dan keagamaan | Persentase ketersediaan laporan Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan | % | 100 | 100 | 7.144.908 | 100 | 7.502.153 | 100 | 7.877.261 | 100 | 8.271.124 | 100 | 8.684.680 | 100 | 8.684.680 | SETDA-KESRA |
| | Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah | Persentase ketersediaan laporan Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah | % | 100 | 100 | 1.452.000 | 100 | 1.524.600 | 100 | 1.600.830 | 100 | 1.680.872 | 100 | 1.764.915 | 100 | 1.764.915 | Bagian Pemerintahan |
| | Program Bagian Hukum | Persentase ketersediaan laporan Bagian Hukum | % | 100 | 100 | 1.180.452 | 100 | 1.239.475 | 100 | 1.301.448 | 100 | 1.366.521 | 100 | 1.434.847 | 100 | 1.434.847 | Bagian Hukum |
| | Program Bagian Barang Jasa | Tingkat Kematangan ULP | Tingkat/ Level | 2 | 3 | 2.394.912 | 4 | 2.514.658 | 4 | 2.640.390 | 5 | 2.772.410 | 5 | 2.911.031 | 5 | 2.911.031 | Bagian Barang Jasa |
| | | Nilai Standar LPSE | Standar | 2 | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | | 12 | | Bagian Barang Jasa |
| | Program Bagian Umum | Persentase ketersediaan laporan Bagian Umum | % | 100 | 100 | 8.673.489 | 100 | 9.107.163 | 100 | 9.562.522 | 100 | 10.040.648 | 100 | 10.542.680 | 100 | 10.542.680 | Bagian Umum |
| | Program Bagian Organisasi | Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi | % | n/a | B | 1.708.920 | B | 1.794.366 | B | 1.884.084 | B | 1.978.289 | B | 2.077.203 | B | 2.077.203 | Bagian Organisasi |
| | Program Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol | Persentase ketersediaan laporan Bagian Hubungan masyarakat dan Protokol | % | 100 | 100 | 3.570.000 | 100 | 3.748.500 | 100 | 3.935.925 | 100 | 4.132.721 | 100 | 4.339.357 | 100 | 4.339.357 | Bagian Humas & Protokol |
| | Program Bagian Administrasi Pembangunan | Persentase ketersediaan laporan Bagian Administrasi Pembangunan | % | 100 | 100 | 480.396 | 100 | 504.416 | 100 | 529.637 | 100 | 556.118 | 100 | 583.924 | 100 | 583.924 | Bagian Administrasi Pembangunan |
| | Program Bagian Infrastruktur | Persentase ketersediaan laporan Bagian Infrastruktur | % | 100 | 100 | 480.396 | 100 | 504.416 | 100 | 529.637 | 100 | 556.118 | 100 | 583.924 | 100 | 583.924 | Bagian Infrastruktur |
| | Program Bagian Pemberdayaan Masyarakat & Trantibun Linmas | Persentase ketersediaan laporan Bagian Pemberdayaan Masyarakat & Trantibun Linmas | % | 100 | 100 | 343.140 | 100 | 360.297 | 100 | 378.312 | 100 | 397.227 | 100 | 417.089 | 100 | 417.089 | Bagian Pemberdayaan Masyarakat & Trantibun Linmas |
| | Program Bagian Tata Usaha Pimpinan | Persentase ketersediaan laporan Bagian Tata Usaha Pimpinan | % | 100 | 100 | 343.140 | 100 | 360.297 | 100 | 378.312 | 100 | 397.227 | 100 | 417.089 | 100 | 417.089 | Bagian Tata Usaha Pimpinan |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | |
| | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| | Program Bagian Ekonomi & Sumberdaya alam | Persentase ketersediaan laporan Bagian Ekonomi & Sumberdaya Alam | % | 100 | 100 | 480.396 | 100 | 504.416 | 100 | 529.637 | 100 | 556.118 | 100 | 583.924 | 100 | 583.924 | Bagian Ekonomi & SDA |
| | Program Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan | Rata-rata persentase sarana/prasarana yang berfungsi dan pemberdayaan masyarakat kecamatan/ kelurahan | % | n/a | 65 | 50.500.000 | 70 | 53.025.000 | 75 | 55.676.250 | 80 | 58.460.062 | 85 | 61.383.065 | 85 | 61.383.065 | 12 Kecamatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 Kelurahan |
| 4.2.1 | Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Persentase Unit Kerja yang Akuntabel | % | 43 | 70 | 4.836.293 | 78 | 4.981.382 | 86 | 5.130.823 | 93 | 5.284.748 | 100 | 5.443.290 | 100 | 5.443.290 | Inspektorat |
| | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan & Aparatur Pengawasan | Persentase pegawai yang bersertifikat JFA dan P2UPD | % | 75 | 75 | 1.358.558 | 80 | 1.399.315 | 85 | 1.441.294 | 90 | 1.484.533 | 95 | 1.529.069 | 95 | 1.529.069 | Inspektorat |
| 4.3.1 | Perencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah | % | 95 | 100 | 3.254.900 | 100 | 4.467.645 | 100 | 4.691.027 | 100 | 4.925.579 | 100 | 8.171.858 | 100 | 8.171.858 | BAPPEDA |
| | | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | |
| | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| | Perencanaan, Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persentase sasaran program dan kegiatan RKPD yang konsisten dengan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | % | 90 | 100 | 1.196.072 | 100 | 2.305.876 | 100 | 2.421.169 | 100 | 2.542.228 | 100 | 2.669.339 | 100 | 2.669.339 | BAPPEDA |
| | Program Perencanaan, Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Persentase sasaran program dan kegiatan RKPD yang konsisten dengan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | % | 90 | 100 | 1.127.456 | 100 | 2.233.829 | 100 | 2.345.520 | 100 | 2.462.796 | 100 | 2.585.936 | 100 | 2.585.936 | BAPPEDA |
| | Program Perencanaan, Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam | Persentase sasaran program dan kegiatan RKPD yang konsisten dengan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA | % | 90 | 100 | 1.058.828 | 100 | 2.161.769 | 100 | 2.269.858 | 100 | 2.383.351 | 100 | 2.502.518 | 100 | 2.502.518 | BAPPEDA |
| | Program Pengembangan Data/Informasi dan Pelaporan | Persentasi ketersediaan data/ informasi perencanaan pembangunan daerah | % | 90 | 100 | 1.978.118 | 100 | 2.089.697 | 100 | 2.194.182 | 100 | 2.303.891 | 100 | 2.419.086 | 100 | 2.419.086 | BAPPEDA |
| | | Persentasi ketersediaan laporan perencanaan pembangunan daerah | % | 95 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 4.4.1 | Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Perencanaan Anggaran Daerah | Ketepatan dalam penyusunan RAPBD dan RAPBDP | % | 100 | 100 | 2.543.803 | 100 | 2.985.993 | 100 | 3.135.293 | 100 | 3.292.053 | 100 | 3.456.660 | 100 | 3.456.660 | BKAD |
| | | Kesesuaian program dan kegiatan antara KUA, PPAS dan APBD | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | |
| | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| | Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah | Ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan laporan keuangan pemda serta raperda pertanggung jawaban APBD | % | 100 | 100 | 2.416.432 | 100 | 2.852.254 | 100 | 2.994.866 | 100 | 3.144.610 | 100 | 3.301.840 | 100 | 3.301.840 | BKAD |
| | Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah | % | 72 | 77 | 1.961.265 | 82 | 2.374.328 | 86 | 2.493.045 | 90 | 2.617.697 | 92 | 2.748.582 | 92 | 2.748.582 | BKAD |
| | Program Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah | Keakuratan dalam penatausahaan keuangan daerah | % | 100 | 100 | 1.778.544 | 100 | 1.972.471 | 100 | 2.071.095 | 100 | 2.174.649 | 100 | 2.283.382 | 100 | 2.283.382 | BKAD |
| | Program pengelolaan Pajak Daerah Ret. Daerah dan Pendapatan Lainnya | Persentase kontribusi Pajak dan retribusi daerah terhadap PAD | % | 34 | 35,7 | 1.590.968 | 37,5 | 1.670.516 | 39,4 | 1.754.042 | 41,3 | 1.841.744 | 43,4 | 1.933.832 | 43,4 | 1.933.832 | BAPENDA |
| | Program Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB | Persentase kontribusi PBB-P2 dan BPHTB terhadap PAD | % | 4,2 | 5 | 1.575.000 | 5,6 | 1.653.750 | 6 | 1.736.438 | 7 | 1.823.259 | 9 | 1.914.422 | 9 | 1.914.422 | BAPENDA |
| | Program penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah | Persentase keakuratan dan ketepatan pelaporan pendapatan daerah | % | 100 | 100 | 755.000 | 100 | 792.750 | 100 | 832.388 | 100 | 874.007 | 100 | 917.707 | 100 | 917.707 | BAPENDA |
| | Program intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Daerah | Persentase Peningkatan Penerimaan PAD | % | 4,5 | 15 | 1.430.000 | 15 | 1.501.500 | 15 | 1.576.575 | 15 | 1.655.404 | 15 | 1.738.174 | 15 | 1.738.174 | BAPENDA |
| 4.5.1 | Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pengembangan, Pengadaan & Diklat | Persentase pemenuhan kompetensi pegawai | % | 5,38 | 11 | 2.353.704 | 22 | 2.471.389 | 33 | 2.594.959 | 44 | 2.724.707 | 55 | 2.860.942 | 55 | 2.860.942 | BKPSDM |
| | | Persentase pegawai sesuai kebutuhan pegawai (formasi) | % | n/a | 15 | | 30 | | 45 | | 60 | | 75 | | 75 | | |
| | Program Mutasi data dan Informasi | Persentase pegawai perangkat daerah dengan data kepegawaian terintegrasi, valid dan terupdate | % | 20 | 50 | 538.740 | 60 | 565.677 | 70 | 593.961 | 80 | 623.659 | 90 | 654.842 | 90 | 654.842 | BKPSDM |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | |
| | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| | Program disiplin, penghargaan dan fasilitasi profesi ASN | Persentase Penyelesaian Kasus disiplin ASN | % | 100 | 100 | 556.956 | 100 | 584.804 | 100 | 614.044 | 100 | 644.746 | 100 | 676.983 | 100 | 676.983 | BKPSDM |
| | | Persentase Peningkatan Kinerja ASN | % | 20 | 35 | | 50 | | 65 | | 80 | | 95 | | 95 | | |
| 4.7.1 | Penelitian dan Pengembangan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Litbang Sosial dan Pemerintahan | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan sosial dan pemerintahan | % | 20 | 25 | 896.072 | 30 | 1.250.000 | 33 | 1.250.000 | 37 | 1.500.000 | 40 | 1.500.000 | 40 | 1.500.000 | BALITBANG |
| | Program Litbang Ekonomi dan Pembangunan | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan ekonomi dan pembangunan | % | 22,22 | 33,33 | 1.000.000 | 41,67 | 1.500.000 | 41,67 | 1.500.000 | 41,67 | 1.750.000 | 50,00 | 1.750.000 | 50,00 | 1.750.000 | BALITBANG |
| | Program Litbang Inovasi dan Teknologi | Persentase hasil penelitian yang telah didesiminasikan | % | 13,33 | 20,5 | 1.100.000 | 25 | 1.250.000 | 30 | 1.250.000 | 35 | 1.500.000 | 40 | 1.500.000 | 40 | 1.500.000 | BALITBANG |
| TOTAL ANGGARAN | | | | | | 780.500.705 | | 865.622.099 | | 948.866.310 | | 1.026.553.217 | | 1.083.748.807 | | 1.083.748.807 | |

# BAB VIII
# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pada bab ini menguraikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah dan IKU perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah.

Penetapan IKU daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2019-2024 hingga akhir periode masa jabatan. IKU pemerintah daerah Kabupaten Kolaka memuat indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran sebagai tolok ukur penilaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kolaka. IKU daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah dalam pencapaian indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kolaka.

## 8.1. Indikator Kinerja Utama

IKU pemerintah daerah Kabupaten Kolaka tahun 2019-2024 dapat disajikan pada Tabel 8.1 berikut ini:

**Tabel 8.1**
**Indikator Kinerja Utama**

| Nomor | Indikator Kinerja Utama Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| | | | | | | | | | |
| **A.** | **INDIKATOR TUJUAN** | | | | | | | | |
| 1. | Indeks Daya Saing Infrastruktur | Indeks | n/a | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 | 78 |
| 2. | Angka Kemiskinan | % | 12,51 | 11,72 | 11,25 | 10,65 | 10,02 | 9,81 | 9,81 |
| 3. | Nilai IPM | Indeks | 71,46 | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 | 74 | 74 |
| 4. | Nilai PDRB AHK | Rp. (Milyar) | 16.802,49 | 17.643 | 18.701 | 19.823 | 21.211 | 22.696 | 22.696 |
| 5. | Indeks Kebebasan Sipil | Indeks | n/a | 80 | 85 | 88 | 90 | 92 | 92 |
| 6. | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | n/a | B | B | B | BB | BB | BB |

| Nomor | Indikator Kinerja Utama Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| 7. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | n/a | 60 | 65 | 70 | 73 | 75 | 75 |
| **B.** | **INDIKATOR SASARAN** | | | | | | | | |
| 1. | Proporsi jalan kabupaten dalam kondisi mantap | % | 56,65 | 62 | 65 | 68 | 71 | 75 | 75 |
| 2. | Persentase ketersediaan air irigasi pada setiap musim tanam/kebutuhan air irigasi berdasarkan rencana tanam | % | 65 | 67 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 |
| 3. | Persentase RT berakses air bersih | % | 79,47 | 80 | 82 | 85 | 90 | 95 | 95 |
| 4. | Persentase RT bersanitasi | % | 80,64 | 82 | 85 | 88 | 92 | 95 | 95 |
| 5. | PersentaseRuas Jalan dengan PJU yang berfungsi baik | % | 16,67 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 |
| 6. | Luas Kawasan Kumuh Perkotaan | Ha | 34,72 | 30 | 25 | 20 | 10 | 0 | 0 |

| Nomor | Indikator Kinerja Utama Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| 7. | Pengeluaran per kapita yang disesuaikan | Rp (ribuan)/bulan | 12.243 | 12.543 | 12.843 | 13.143 | 13.443 | 13.743 | 13.743 |
| 8. | Tingkat pengangguran terbuka | % | 2,18 | 2,10 | 2,05 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 9. | Skor Pola Pangan Harapan | Skor | 87 | 89,6 | 92,2 | 94,8 | 97,4 | 100 | 100 |
| 10. | Laju Pertumbuhan Ekonomi | % | 6,68 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,7 |
| 11. | Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan sektor pedagangan | % | 18,71 | 19,32 | 19,44 | 19,53 | 19,98 | 20 | 20 |
| 12. | Nilai investasi | Rp (milyar) | 58,23 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 |
| 13. | Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,98 | 13 | 13,25 | 13,75 | 13,97 | 14 | 14 |
| 14. | Angka Rata-rata lama sekolah | Tahun | 8,31 | 8,33 | 8,36 | 8,75 | 8,9 | 9 | 9 |

| Nomor | Indikator Kinerja Utama Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| 15. | Angka Harapan Hidup | Tahun | 70,06 | 70,3 | 70,7 | 71 | 71,2 | 71,5 | 71,5 |
| 16. | Prevalensi Stunting Balita | % | 26,9 | 26,5 | 26,1 | 25,7 | 25,3 | 24,9 | 24,9 |
| 17. | TFR | Rasio | 2,69 | 2,65 | 2,63 | 2,58 | 2,52 | 2,5 | 2,5 |
| | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Indeks | 72,10 | 72,20 | 72,30 | 72,42 | 72,50 | 72,60 | 73,00 |
| 18. | Predikat Kabupaten Layak Anak | Predikat | n/a | Pratama | Pratama | Madya | Madya | Nindya | Nindya |
| 19. | Persentase sanggar seni dan budaya yang dibina | % | 18,1 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 50 |
| 20. | Persentase PMKS yang tertangani | % | 46,44 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 |
| 21. | Indeks kerukunan umat beragama | Indeks | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 22. | Nilai AKIP kabupaten | Nilai | CC | B | BB | BB | A | A | A |
| 23. | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan daerah | Indeks | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 24. | Indeks Desa Membangun | Indeks | N/A | 0,5 | 0,56 | 0,61 | 0,63 | 0,65 | 0,65 |

| Nomor | Indikator Kinerja Utama Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| 25. | Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) | Indeks | N/A | Baik | baik | baik | sangat baik | sangat baik | sangat baik |
| 26. | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah | Indeks | N/A | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 |
| 27. | Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah | % | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| 28. | Pencapaian Adipura | Tercapai/Tidak Tercapai | n/a | Tercapai | Tercapai | Tercapai | Tercapai | Tercapai | Tercapai |
| 29. | Persentase Desa/Kel Tangguh Bencana | % | 27,3 | 40,9 | 54,5 | 68,2 | 81,5 | 100 | 100 |

## 8.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

IKU perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan aspek bidang urusan penyeleggaraan pemerintahan. Indikator ini berada pada *level intermediate outcome*, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. IKU perangkat daerah ini akan menjadi dasar penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya sebagaimana disajikan pada Tabel 8.2 sebagai berikut:

**Tabel 8.2**
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah**
**Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| **I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | |
| **1.1. FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) | % | 6,68 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | |
| 1.1.2 | Pengeluaran per kapita yang disesuaikan | Rp (ribuan)/ bulan | 12.243 | 12.543 | 12.843 | 13.143 | 13.443 | 13.743 | 13.743 | |
| 1.1.3 | Nilai IPM | indeks | 71,46 | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 | 74,5 | |
| 1.1.4 | Angka Kemiskinan | % | 12,51 | 11,72 | 11,25 | 10,65 | 10,02 | 9,81 | 9,81 | |
| 1.1.5 | Tingkat pengangguran terbuka | % | 2,18 | 2,10 | 2,05 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| **1.2. FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL** | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Angka Rata-rata lama sekolah | Tahun | 8,31 | 8,33 | 8,36 | 8,75 | 8,9 | 9 | 9 | |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1.2.2 | Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,98 | 13 | 13,25 | 13,75 | 13,97 | 14 | 14 | |
| 1.2.3 | Angka Harapan Hidup | Tahun | 70,06 | 70,3 | 70,7 | 71 | 71,2 | 71,5 | 71,5 | |
| 1.2.4 | Total Fertility Rate (TFR) | Rasio | 2,69 | 2,65 | 2,63 | 2,58 | 2,52 | 2,5 | 2,5 | |
| 1.2.5 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | indeks | 72,10 | 72,20 | 72,30 | 72,42 | 72,50 | 72,60 | 72,60 | |
| 1.2.6 | Persentase sanggar seni dan budaya yang dibina | % | 18,1 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 50 | |
| 1.2.7 | Indeks Kebebasan SIpil | indeks | n/a | 80 | 85 | 88 | 90 | 92 | 92 | |
| 1.2.8 | Persentase PMKS yang tertangani | % | 46,44 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | |
| 1.2.9 | Indeks kerukunan umat beragama | indeks | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| **II. ASPEK DAYA SAING DAERAH** | | | | | | | | | | |
| **2.1. FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH** | | | | | | | | | | |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 2.1.1 | Pengeluaran per kapita yang disesuaikan | Rp (ribuan)/ bulan | 12.243 | 12.543 | 12.843 | 13.143 | 13.443 | 13.743 | 13.743 | |
| 2.1.2 | Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah | % | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | |
| 2.1.3 | Indeks Desa Membangun | indeks | N/A | 0,5 | 0,56 | 0,61 | 0,63 | 0,65 | 0,65 | |
| 2.1.4 | Prosentase tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan. | % | 26,71 | 21,48 | 22,42 | 23,25 | 25 | 26 | 26 | |
| 2.1.5 | Persentase Penurunan Laju pertumbuhan penduduk. | % | 2,22 | 2,02 | 1,82 | 1,61 | 1,41 | 1,21 | 1,21 | |
| **2.2. FOKUS FASILITASI WILAYAH/INFRASTRUKTUR** | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Indeks Daya Saing Infrastruktur | indeks | n/a | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 | 78 | |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 2.2.2 | Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap | % | 55,65 | 62 | 65 | 68 | 71 | 75 | 75 | |
| 2.2.3 | Persentase ketersediaan air irigasi pada setiap musim tanam | % | 65 | 67 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 | |
| 2.2.4 | Persentase Rumah Tangga berakses air bersih | % | 79,47 | 80 | 82 | 85 | 90 | 95 | 95 | |
| 2.2.5 | Persentase Rumah Tangga bersanitasi | % | 80,64 | 82 | 85 | 88 | 92 | 95 | 95 | |
| 2.2.6 | Persentase Ruas Jalan dengan PJU yang berfungsi baik | % | 16,67 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | |
| 2.2.7 | Luas Kawasan Kumuh Perkotaan | Ha | 34,72 | 30 | 25 | 20 | 10 | 0 | 0 | |
| **III. ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | | | | | | |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| **3.1. FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAH WAJIB** | | | | | | | | | | |
| 1 | Urusan Wajib Pelayanan Dasar | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Pendidikan | | | | | | | | | |
| | APK PAUD | % | 57,1 | 59,2 | 61,5 | 63 | 64,75 | 66,21 | 66,21 | DIN DIKBUD |
| | Persentase APM Jenjang SD | % | 88,6 | 88,75 | 88,8 | 88,85 | 88,9 | 88,95 | 88,95 | DIN DIKBUD |
| | Persentase APM Jenjang SMP | % | 78,6 | 78,7 | 78,76 | 78,8 | 78,85 | 78,9 | 78,9 | DIN DIKBUD |
| | Angka kelulusan pendidikan kesetaraan Paket A | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DIN DIKBUD |
| | Angka kelulusan pendidikan kesetaraan Paket B | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DIN DIKBUD |
| | % Pendidik TK yang memenuhi kualifikasi S1 | % | 64,5 | 66,2 | 68,5 | 71,5 | 73,1 | 75 | 75 | DIN DIKBUD |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | % Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1 | % | 80,99 | 86,9 | 88,4 | 90,7 | 92,9 | 94,5 | 94,5 | DIN DIKBUD |
| | % Pendidik SMP yang memenuhi kualifikasi S1 | % | 90,80 | 96,4 | 97,1 | 97,5 | 98,1 | 98,5 | 98,5 | DIN DIKBUD |
| | % sekolah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) | % | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | DIN DIKBUD |
| | Persentase penerima beasiswa dari target Kolaka Maju dan Berdaya Saing | % | n/a | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | DIN DIKBUD |
| 1.2.1 | Kesehatan | | | | | | | | | |
| | Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | % | 81,5 | 84,2 | 86,9 | 89,6 | 92,6 | 95 | 95 | DIN KESEHATAN |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | % | 86,3 | 87,44 | 87,44 | 89,72 | 90,86 | 92 | 92 | DIN KESEHATAN |
| | Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KN1) | % | 94,9 | 95,52 | 96,14 | 96,72 | 97,38 | 98 | 98 | DIN KESEHATAN |
| | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | % | 41,5 | 45,2 | 48,9 | 52,6 | 56,3 | 60 | 60 | DIN KESEHATAN |
| | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 79,92 | 87,95 | 91,97 | 95,98 | 100 | 100 | 100 | DIN KESEHATAN |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | persentase orang usia 15 s/d 59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | % | 12,94 | 22,35 | 31,76 | 41,18 | 50,59 | 60 | 60 | DIN KESEHATAN |
| | Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesui standar kesehatan | % | 16,41 | 41,84 | 54,56 | 67,28 | 80 | 80 | 80 | DIN KESEHATAN |
| | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 12,5 | 22 | 31,5 | 41 | 50,5 | 60 | 60 | DIN KESEHATAN |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 7,8 | 14,04 | 20,28 | 26,52 | 32,76 | 39 | 39 | DIN KESEHATAN |
| | Persentase orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DIN KESEHATAN |
| | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DIN KESEHATAN |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | % | 31 | 44,8 | 58,6 | 72,4 | 86,2 | 100 | 100 | DIN KESEHATAN |
| | Persentase ketersedian obat esensial dan obat kebutuhan lainnya | % | 94,55 | 95,35 | 96,15 | 96,95 | 97,75 | 97,75 | 97,75 | DIN KESEHATAN |
| | Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi | % | 64 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DIN KESEHATAN |
| | Persentase tenaga kesehatan yang berkompeten dengan surat tanda registrasi (STR) | % | 84,61 | 86,08 | 87,57 | 89,04 | 90,5 | 92 | 92 | DIN KESEHATAN |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi | % | 62,2 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | DIN KESEHATAN |
| | Cakupan Pemanfaatan Tempat Tidur (BOR) | % | 68,18 | 70,28 | 72,32 | 74,36 | 76,40 | 78,44 | 78,44 | RSBG |
| | Cakupan Rata-rata Lama Perawatan (LOS) | Hari | 4,04 | 4,64 | 5,44 | 6,24 | 7,04 | 7,78 | 7,78 | RSBG |
| | Cakupan Selang Waktu Penggunaan Tempat Tidur (TOI) | Hari | 2,16 | 2,21 | 2,24 | 2,33 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | RSBG |
| 1.3.1 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | |
| | Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap | % | 55,65 | 62 | 65 | 68 | 71 | 75 | 75 | PUPR |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Presentase saluran drainase/ gorong-gorong yang berfungsi dengan baik | % | 60 | 65 | 72 | 79 | 86 | 95 | 95 | PUPR |
| | Persentase Pengembangan Pengelolaan air minum bagi masyarakat | % | 60 | 65 | 72 | 79 | 86 | 95 | 95 | PUPR |
| | Cakupan sanitasi layak | % | 86,1 | 90 | 93 | 96 | 98 | 100 | 100 | PUPR |
| | Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik | % | 69,9 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 94 | PUPR |
| | Rasio bangunan ber-IMB | % | n/a | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 72 | PUPR |
| 1.4.1 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | | | | | | | | | |
| | Persentase Rumah Layak Huni | % | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | DINAS PKP |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Luas Kawasan Kumuh Perkotaan | Ha | 34,72 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | DINAS PKP |
| | Persentase Ruas Jalan yang tersedia sarana PJU dengan baik | % | 16,67 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | DINAS PKP |
| 1.5.1 | Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | |
| | Persentase Peningkatan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | KESBANGPOL |
| | Persentase peningkatan pemahaman politik dan demokrasi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | KESBANGPOL |
| | indeks kebebasan sipil | % | n/a | 80 | 85 | 88 | 90 | 92 | 92 | KESBANGPOL |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | KESBANGPOL |
| | Persentase Pembinaan Masyarakat yang dilaksanakan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | SATPOL PP & DAMKAR |
| | Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada | % | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | SATPOL PP & DAMKAR |
| | Persentase Penegakan Perda | % | n/a | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | SATPOL PP & DAMKAR |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | SATPOL PP & DAMKAR |
| | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | BPBD |
| | Persentase Penanganan Pasca Bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BPBD |
| | Persentase Korban Bencana yang tertangani | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BPBD |
| 1.6.1 | Sosial | | | | | | | | | |
| | Persentase Fakir Miskin yang tertangani | % | 46,44 | 50 | 55 | 60 | 67 | 75 | 75 | Dinas Sosial |
| | Persentase warga yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial | % | 77,68 | 80 | 81 | 83 | 85 | 87 | 87 | Dinas Sosial |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial | % | 66,51 | 70 | 73 | 75 | 83 | 85 | 85 | Dinas Sosial |
| | Persentase penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia dan anak terlantar di luar panti yang ditangani | % | 20,13 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | Dinas Sosial |
| 2 | URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | |
| | Prosentase meningkatnya kualitas tenaga kerja yang dipromosikan | % | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 23 | Dinas Nakertrans |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Prosentase tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan. | % | 26,71 | 21,48 | 22,42 | 23,25 | 25 | 26 | 26 | Dinas Nakertrans |
| | Persentase penyelesaian sengketa ketenagakerjaan | % | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | Dinas Nakertrans |
| | Persentase lulusan BLKK yang terserap di lapangan pekerjaan | % | 36,6 | 41,6 | 46,6 | 51,6 | 56,6 | 61,6 | 61,6 | UPTD BLK |
| 2.2.1 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | | | |
| | Prosentase sarana ruang publik ramah anak (%) | % | 38,78 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 | Dinas P3A |
| | Persentase kualitas hidup perempuan dan keluarga | % | 5,9 | 10,07 | 13,5 | 16,7 | 17,7 | 19,3 | 19,3 | Dinas P3A |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | yang ditingkatkan. | | | | | | | | | |
| | Persentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas P3A |
| 2.3.1 | Pangan | | | | | | | | | |
| | Ketersediaan Energi dan Protein per kapita | kkal/kap/hari | 3.636 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | DISKETAPANG |
| | | gram/kap/hari | 60 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | DISKETAPANG |
| | Jumlah cadangan pangan pemerintah | ton | 45.611 | 46.000 | 47.000 | 48.000 | 49.000 | 50.000 | 90 | DISKETAPANG |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan | % | 80 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | DISKETAPANG |
| 2.4.1 | Pertanahan | | | | | | | | | |
| | Persentase lahan pemda yang bersertifikat | % | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 | BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTDA |
| 2.5.1 | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | |
| | Indeks Kualitas Air | Indeks | 6,61 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6 | 6 | DLH |
| | Indeks Kualitas Udara | Indeks | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | |
| | Indeks Tutupan Lahan | Indeks | 59 | 59,5 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62 | |
| | Persentase Pengawasan Izin Lingkungan | % | 36 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | DLH |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Presentase Rekomendasi Teknis Lingkungan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DLH |
| | Luas RTH yang dipelihara | Ha | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 24 | DLH |
| | Persentase Pengelolaan Sampah Perkotaan | % | 93,2 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 90 | DLH |
| | Persentase Penanganan limbah domestik | % | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | DLH |
| 2.6.1 | Administrasi Kependudukan dan Capil | | | | | | | | | |
| | Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk | % | 95,12 | 96,5 | 97 | 97,38 | 97,75 | 98,25 | 98,25 | Dukcapil |
| | Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil | % | 28,88 | 31,63 | 34,38 | 37,13 | 39,88 | 42,88 | 42,88 | Dukcapil |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Ketersediaan Data Base Kependudukan skala Kabupaten | % | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 | Dukcapil |
| | Persentase Data Capil yang dimanfaatkan | % | n/a | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 | 70 | Dukcapil |
| 2.7.1 | Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | | | | |
| | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik | % | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | DINAS PMD |
| | Persentase Desa yang kategori IDMnya meningkat | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 87 | 87 | DINAS PMD |
| | Persentase kelompok masyarakat yang diberdayakan | % | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | DINAS PMD |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 2.8.1 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | | | | | | |
| | Persentase Pemakaian alat kontrasepsi modern (mCPR) | % | 73,77 | 74,41 | 74,74 | 75,06 | 75,38 | 75,38 | 75,38 | Dinas P2KB |
| | Rasio Petugas Lapangan Kleuarga Berencana (PLKB/PKB) 1 (satu) petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan. | Orang/desa | 1/5 | 1/4 | 1/4 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | Dinas P2KB |
| | Cakupan keluarga pra sejahtera dan KS1 menjadi anggota kelompok UPPKS | % | 41,18 | 60,7 | 70,47 | 80,23 | 90 | 90 | 90 | Dinas P2KB |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Persentase Penurunan Laju pertumbuhan penduduk. | % | 2,22 | 2,02 | 1,82 | 1,61 | 1,41 | 1,21 | 1,21 | Dinas P2KB |
| | Angka Kelahiran pada remaja per WUS 15-19 tahun (ASFR) per 1000 KLH | KLH | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | Dinas P2KB |
| 2.9.1 | Perhubungan | | | | | | | | | |
| | Persentase layanan angkutan darat | % | 26 | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 | 60 | DISHUB |
| | Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik | % | 58 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | DISHUB |
| | Persentase Pemasangan Rambu-rambu | % | n/a | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | DISHUB |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum | % | n/a | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 82 | DISHUB |
| 2.10.1 | Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | |
| | Persentase masyarakat yang terpapar informasi publik | % | n/a | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | KOMINFO |
| | Persentase ketersediaan Akses Jaringan Internet di Ruang Publik dan OPD | % | 80 | 82 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | KOMINFO |
| 2.11.1 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | | | | |
| | Persentase berkembangnya UKM yang terbina | % | n/a | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 250 | DIN KOP-UKM |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Persentase Koperasi dan UKM yang Aktif | % | 89,91 | 92,02 | 94,13 | 96,24 | 98,12 | 100 | 100 | DIN KOP-UKM |
| | Persentase Koperasi yang mandiri | % | n/a | 30 | 33 | 35 | 38 | 42 | 5 | DIN KOP-UKM |
| 2.12.1 | Penanaman Modal | | | | | | | | | |
| | Persentase peningkatan kunjungan investor | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | DIN PTSP |
| | Jumlah Investor PMA dan PMDN | Investor | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | DIN PTSP |
| | Predikat kepatuhan pelayanan publik (ombudsman) | predikat | rendah | sedang | sedang | tinggi | tinggi | tinggi | 5000 | DIN PTSP |
| | Indeks kepuasan masyarakat trhadap pelayanan perizinan | % | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 100 | DIN PTSP |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 2.13.1 | Kepemudaan dan Olah Raga | | | | | | | | | |
| | Persentase aktifitas organisasi kepemudaan yang aktif | % | 40 | 45 | 47 | 50 | 53 | 55 | 55 | DIK MUDORA |
| | Persentase angka partisipasi masyarakat yang berolahraga | % | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | DIK MUDORA |
| | Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat daerah, provinsi dan nasional | Org/Atlit (Daerah,Prov., Nas) | 20,10,3 | 10,5,1 | 15,6,1 | 16,6,2 | 17,7,3 | 17,7,3 | 17,7,3 | DIK MUDORA |
| 2.14.1 | Statistik | | | | | | | | | |
| | Persentase kertersediaan data statistik sektoral | % | n/a | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 | KOMINFO |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 2.15.1 | Persandian | | | | | | | | | |
| | Persentase pengamanan digital informasi | % | n/a | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 | 75 | KOMINFO |
| 2.16.1 | Kebudayaan | | | | | | | | | |
| | Persentase sanggar seni dan budaya yang dibina | % | 18,1 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 50 | Dikbud |
| | Persentase cagar budaya dan benda budaya daerah yang dilestarikan | % | 45 | 50 | 52 | 55 | 60 | 65 | 65 | Dikbud |
| 2.17.1 | Perpustakaan | | | | | | | | | |
| | Persentase peningkatan Pengunjung Perpustakaan | % | 45 | 50 | 52 | 55 | 60 | 65 | 65 | DIN PERPUS |
| 2.18.1 | Kearsipan | | | | | | | | | |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Persentase arsip tertangani | % | 11,76 | 11,85 | 11,90 | 11,95 | 12,0 | 12,05 | 12,05 | DIN PERPUS |
| 3 | URUSAN PILIHAN | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | |
| | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | Ton | 20.178,03 | 20.200 | 20.400 | 20.600 | 20.700 | 20.800 | 20.800 | DIN PERIKANAN |
| | Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan yang Mandiri | % | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | DIN PERIKANAN |
| | Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan | ton | 19 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | DIN PERIKANAN |
| | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | Ton | 50.000 | 50.200 | 50.400 | 50.600 | 50.800 | 51.000 | 51.000 | DIN PERIKANAN |
| 3.2.1 | Pariwisata | | | | | | | | | |
| | Presentase promosi wisata | % | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 100 | DIN PARIWISATA |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Jumlah kunjungan wisata | orang | 20.000 | 25.000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 45000 | DIN PARIWISATA |
| | SDM kepariwisataan yang terakreditasi | Orang | 40 | 90 | 140 | 190 | 240 | 290 | 290 | DIN PARIWISATA |
| | Terbentuknya kelompok ekraf yang mendukung pariwisata | klp | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | DIN PARIWISATA |
| 3.3.1 | Pertanian | | | | | | | | | |
| | Jumlah Kelompok Tani Madya | klp | 16 | 75 | 150 | 225 | 300 | 379 | 379 | DIN TP HORTI |
| | Jumlah produksi padi | ton | 88.800 | 96.200 | 103.600 | 111.000 | 113.960 | 118.400 | 118.400 | DIN TP HORTI |
| | Jumlah produksi tanaman pangan lainnya | ton | 11.436 | 12.008 | 12.608 | 13.239 | 13.901 | 14.596 | 14.596 | DIN TP HORTI |
| | Jumlah Produksi Buah-buahan | kwintal | 364 | 400 | 440 | 484 | 533 | 586 | 586 | DIN TP HORTI |
| | Jumlah Produksi | kwintal | 245 | 270 | 296 | 326 | 359 | 395 | 395 | DIN TP HORTI |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Sayur-sayuran | | | | | | | | | |
| | Panjang jaringan irigasi tersier yang berfungsi baik | meter | 35.902 | 37.902 | 38.502 | 38.702 | 38.902 | 39.002 | 39.002 | DIN TP HORTI |
| | Jumlah Produksi Kakao | ton | 9.152,03 | 9.609 | 10.090 | 10.595 | 11124 | 11681 | 11681 | DIN BUN |
| | Jumlah Produksi Cengkeh | ton | 6.327,01 | 6.643,36 | 6.975,53 | 7.324,31 | 7.690,52 | 8.075,05 | 8.075,05 | DIN BUN |
| | Jumlah Produksi Kelapa dalam | ton | 3.634,56 | 3.816,29 | 4.007,10 | 4207 | 4418 | 4639 | 4639 | DIN BUN |
| | Jumlah Produksi Lada | ton | 1.253,32 | 1.315,99 | 1.381,79 | 1.450,87 | 1.523,42 | 1.599,59 | 1.599,59 | DIN BUNAK |
| | Jumlah Produksi Pala | ton | 2 | 22 | 60 | 100 | 180 | 250 | 250 | |
| | Persentase peningkatan sarana prasarana perkebunan | % | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | DIN BUNAK |
| | Produksi daging ternak besar | Kg | 547.587 | 550.087 | 550.587 | 553.587 | 554.587 | 558.087 | 558.087 | DIN BUNAK |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Produksi daging ternak kecil | Kg | 277.869 | 279.119 | 279.369 | 281.119 | 282.369 | 285.619 | 280.007 | DIN BUNAK |
| | Produksi ternak unggas | Kg | 1.799.093 | 2.349.093 | 2.449.093 | 3.099.093 | 3.299.093 | 4.049.093 | 4.049.093 | DIN BUNAK |
| | Persentase pengolahan hasil perkebunan dan peternakan | % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 80 | DIN BUN |
| | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana peternakan | % | 80 | 85 | 88 | 90 | 95 | 100 | 100 | DIN BUN |
| | Persentase peningkatan SDM Petani dan peternak | % | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 70 | DIN BUN |
| 3.7.1 | Perdagangan | | | | | | | | | |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Persentase Alat Ukur Perdagangan bertanda tera sah yang berlaku | % | 67,57 | 70,27 | 72,92 | 75,38 | 78,38 | 81,08 | 81,08 | DIN PERINDAG |
| | Persentase pasar daerah dalam kondisi baik | % | 51,85 | 55,56 | 59,25 | 62,96 | 66,66 | 70,37 | 70,37 | DIN PERINDAG |
| 3.7.2 | Perindustrian | | | | | | | | | |
| | Persentase IKM yang mandiri | % | 48,35 | 50,14 | 51,93 | 53,72 | 55,51 | 57,3 | 57,3 | DIN PERINDAG |
| | persentase IKM yang menggunakan teknologi industri | % | 23 | 38 | 53 | 69 | 84 | 100 | 100 | DIN PERINDAG |
| 3.8.1 | Transmigrasi | | | | | | | | | |
| | Persentase Usaha Ekonomi Masyarakat Transmigrasi yang dibina | % | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | Dinas Nakertrans |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 4 | Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | |
| | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | SKPD |
| | Persentase peningkatan disiplin aparatur | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | SKPD |
| | persentasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | SKPD |
| | Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | SKPD |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | kinerja dan keuangan | | | | | | | | | |
| | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | SKPD |
| | Persentase Promosi Pembangunan Daerah yang mendatangkan investasi | % | n/a | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 34 | SKPD |
| | Persentase prolegda yang ditetapkan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | SEKRETARIAT DPRD |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Persentase pokok-pokok pikiran yang masuk dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah | % | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | SEKRETARIAT DPRD |
| | Persentase ketersediaan laporan Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | SETDA-KESRA |
| | Persentase ketersediaan laporan Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Bagian Pemerintahan |
| | Persentase ketersediaan laporan Bagian Hukum | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Bagian Hukum |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Tingkat Kematangan ULP | Tingkat/ Level | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Bagian Barang Jasa |
| | Nilai Standar LPSE | Standar | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | Bagian Barang Jasa |
| | Persentase ketersediaan laporan Bagian Umum | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Bagian Umum |
| | Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi | % | n/a | B | B | B | B | B | B | Bagian Organisasi |
| | Persentase ketersediaan laporan Bagian Hubungan masyarakat dan Protokol | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Bagian Humas & Protokol |
| | Persentase ketersediaan laporan Bagian Administrasi Pembangunan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Bagian Administrasi Pembangunan |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Persentase ketersediaan laporan Bagian Infrastruktur | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Bagian Infrastruktur |
| | Persentase ketersediaan laporan Bagian Pemberdayaan Masyarakat & Trantibun Linmas | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Bagian Pemberdayaan Masyarakat & Trantibun Linmas |
| | Persentase ketersediaan laporan Bagian Tata Usaha Pimpinan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Bagian Tata Usaha Pimpinan |
| | Persentase ketersediaan laporan Bagian Ekonomi & Sumberdaya Alam | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Bagian Ekonomi & SDA |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Rata-rata persentase sarana/prasarana yang berfungsi dan pemberdayaan masyarakat kecamatan/ kelurahan | % | n/a | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 | 12 Kecamatan |
| | | | | | | | | | | 35 Kelurahan |
| 4.2.1 | Pengawasan | | | | | | | | | |
| | Persentase Unit Kerja yang Akuntabel | % | 43 | 70 | 78 | 86 | 93 | 100 | 100 | Inspektorat |
| | Persentase pegawai yang bersertifikat JFA dan P2UPD | % | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | Inspektorat |
| 4.3.1 | Perencanaan | | | | | | | | | |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah | % | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BAPPEDA |
| | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Persentase sasaran program dan kegiatan RKPD yang konsisten dengan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BAPPEDA |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Persentase sasaran program dan kegiatan RKPD yang konsisten dengan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BAPPEDA |
| | Persentase sasaran program dan kegiatan RKPD yang konsisten dengan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah Lingkup Bidang | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BAPPEDA |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Perekonomian dan SDA | | | | | | | | | |
| | Persentasi ketersediaan data/ informasi perencanaan pembangunan daerah | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BAPPEDA |
| | Persentasi ketersediaan laporan perencanaan pembangunan daerah | % | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4.4.1 | Keuangan | | | | | | | | | |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Ketepatan dalam penyusunan RAPBD dan RAPBDP | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BKAD |
| | Kesesuaian program dan kegiatan antara KUA, PPAS dan APBD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan laporan keuangan pemda serta raperda pertanggung jawaban APBD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BKAD |
| | Persentase optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah | % | 72 | 77 | 82 | 86 | 90 | 92 | 92 | BKAD |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Keakuratan dalam penatausahaan keuangan daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BKAD |
| | Persentase kontribusi Pajak dan retribusi daerah terhadap PAD | % | 34 | 35,7 | 37,5 | 39,4 | 41,3 | 43,4 | 43,4 | BAPENDA |
| | Persentase kontribusi PBB-P2 dan BPHTB terhadap PAD | % | 4,2 | 5 | 5,6 | 6 | 7 | 9 | 9 | BAPENDA |
| | Persentase keakuratan dan ketepatan pelaporan pendapatan daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BAPENDA |
| | Persentase Peningkatan Penerimaan PAD | % | 4,5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | BAPENDA |
| 4.5.1 | Kepegawaian | | | - | | | | | | |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Persentase pemenuhan kompetensi pegawai | % | 5,38 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 55 | BKPSDM |
| | Persentase pegawai sesuai kebutuhan pegawai (formasi) | % | n/a | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 75 | |
| | Persentase pegawai perangkat daerah dengan data kepegawaian terintegrasi, valid dan terupdate | % | 20 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | BKPSDM |
| | Persentase Penyelesaian Kasus disiplin ASN | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BKPSDM |
| | Persentase Peningkatan Kinerja ASN | % | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 | 95 | |

| No | Bidang Urusan / indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal (2018/2019) | Target Capaian | | | | | Kondisi Pada Akhir Priode | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 4.7.1 | Penelitian dan Pengembangan | | | | | | | | | |
| | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan sosial dan pemerintahan | % | 20 | 25 | 30 | 33 | 37 | 40 | 40 | BALITBANG |
| | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan ekonomi dan pembangunan | % | 22,22 | 33,33 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 50,00 | 50,00 | BALITBANG |
| | Persentase hasil penelitian yang telah didesiminasikan | % | 13,33 | 20,5 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | BALITBANG |

# BAB IX
# PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten dan RPJMN.

RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, perlu diatur juga mengenai pedoman transisi yang akan mengatur proses penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2025.

## 9.1 Kaidah Pelaksanaan

Dokumen RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024 merupakan pedoman bagi pemerintah daerah Kabupaten Kolaka dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020-2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan langkah-langkah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta masyarakat termasuk dunia usaha.
2. Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD

Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.

3. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya
4. Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024 kepada masyarakat.
5. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

## 9.2 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang dilaksanakan pada Tahun 2024. Sebagaimana diketahui, tahun 2024 adalah tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Kolaka. Penyusunan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada RPJPD Kabupaten 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024.

Pemerintah Kabupaten Kolaka akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan Tahun 2024. Selain itu, untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kolaka mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, dan mengawal terwujudnya Kabupaten Kolaka yang semakin Maju, Berkeadilan dan Sejahtera.